



Laporan Triwulan

Triwulan IV-2018

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat
melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat
diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

KATA PENGANTAR



Wimboh Santoso, Ph.D

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa berkontribusi dalam meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan guna menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

Perkembangan ekonomi global pada triwulan IV-2018 masih diliputi dengan ketidakpastian. Pasar saham global tercatat mengalami koreksi akibat kekhawatiran pelaku pasar akan outlook perekonomian 2019. Selain itu, laju kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat juga diperkirakan akan naik terbatas sehingga mengakibatkan arus modal terpantau mulai masuk kembali ke negara berkembang.

Kendati proyeksi pasar keuangan global masih menunjukkan volatilitas yang tinggi, kinerja perekonomian domestik pada triwulan IV-2018 mencatatkan sejumlah perkembangan positif. Perekonomian masih tumbuh solid 5,17% (yoy) dengan tingkat inflasi stabil dan performa fiskal yang baik. Namun demikian, kinerja eksternal terutama diakibatkan oleh defisit neraca perdagangan perlu dilakukan upaya perbaikan lebih lanjut.

Kinerja makroekonomi domestik turut mendukung performa industri jasa keuangan. Kinerja perbankan nasional secara umum dalam keadaan yang solid, didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai serta fungsi intermediasi yang semakin baik dengan pertumbuhan kredit sebesar 11,75% (yoy) dan tren *Non Performing Loan* yang menurun. Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga bergerak positif tercermin dari piutang pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 5,17% (yoy) disertai dengan kualitas pembiayaan yang cukup baik.

Perbaikan perekonomian dalam negeri juga turut mempengaruhi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meskipun IHSG ditutup mengalami koreksi, namun koreksi yang kita alami masih merupakan salah satu yang terendah di bursa efek utama kawasan Asia Pasifik dan yang terbaik di kawasan ASEAN.

Dalam lingkup pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan 19 Peraturan OJK (POJK) selama triwulan IV-2018. POJK yang diterbitkan terdiri dari lima POJK yang mengatur sektor Perbankan, tujuh yang mengatur sektor Pasar Modal, lima POJK yang mengatur sektor IKNB dan dua POJK mengenai manajemen strategis. Salah satu aturan yang diterbitkan di sektor Pasar Modal merupakan ketentuan penyelesaian transaksi bursa yang lebih cepat dari sebelumnya T+3 menjadi T+2.

Pada lingkup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah melaksanakan kegiatan edukasi di berbagai kalangan, antara lain kepada komunitas pengusaha kecil dan menengah, mahasiswa, karyawan dan pekerja migran dalam dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*revisit 2017*) untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Selain itu, untuk memberikan pelayanan kepada konsumen sektor jasa keuangan, dilaksanakan pula asistensi perlindungan konsumen dan pusat informasi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mempertahankan kredibilitas instansi, OJK secara berkelanjutan melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas pegawainya melalui pengembangan kompetensi teknis maupun keterampilan manajerial lainnya. Selain itu, OJK terus berbenah dalam melakukan simplifikasi proses bisnis dan mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan

tugas secara komprehensif dengan meluncurkan Rancang Bangun Sistem Informasi 2018-2022 sehingga penggunaan sistem Informasi menjadi lebih terstruktur untuk mencapai kinerja yang lebih efisien dan efektif.

Pelaksanaan tata kelola OJK juga kembali mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan atas Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan LHKPN Terbaik 2018. Atas nama segenap Anggota Dewan Komisiner, saya memberikan apresiasi bagi seluruh pegawai OJK yang selalu memegang teguh komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, serta menjaga nama baik organisasi sebagai garda terdepan OJK.

Ke depan, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan agar industri jasa keuangan semakin tumbuh dengan sehat dan stabil serta bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso, Ph.D

Halaman ini sengaja di kosongkan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
INFOGRAFIK PROGRAM PRIORITAS OJK	xx

BAB 1 TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1	PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA	27
1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	27
1.1.2	Perkembangan Pasar Keuangan Global	29
1.1.3	Perkembangan Ekonomi Domestik	30
1.2	PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	32
1.2.1	Perkembangan Bank Umum	32
1.2.2	Perkembangan Bank Umum Konvensional	32
1.2.3	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	35
1.2.4	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
1.2.5	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	38
1.3	PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	40
1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	40
1.3.2	Perkembangan Pengelolaan Investasi	46
1.3.3	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	49
1.3.4	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	54
1.4	PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	56
1.4.1	Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	59
1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	61
1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	65
1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	66
1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	66
1.4.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	69
1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	69
1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	70
1.5	PERKEMBANGAN PROGRAM <i>FLAGSHIP</i> OJK	70
1.5.1	Bank Wakaf Mikro (BWM)	70
1.5.2	Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)	70
1.5.3	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	71
1.5.4	Simpanan Pelajar (SimPel)	72
1.5.5	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	72
1.5.6	Program 1.000 Aktuaris	73
1.5.7	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	73
1.5.8	Asuransi Nelayan	73
1.5.9	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	73
1.5.10	Asuransi Budidaya Udang (AUBU)	74
1.5.11	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	74

BAB 2
TINJAUAN
OPERASIONAL
SEKTOR JASA
KEUANGAN

2.1	AKTIVITAS PENGATURAN	77
2.1.1	Pengaturan Bank	77
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	77
2.1.3	Pengaturan IKNB	78
2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	80
2.2.1	Pengawasan Perbankan	80
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	85
2.2.3	Pengawasan IKNB	89
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	104
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	104
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	105
2.3.3	Pengembangan IKNB	106
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	106
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	107
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	108
2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	108
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	109
2.5.1	Penelitian dan Pengaturan	109
2.5.2	Inklusi Keuangan	109
2.5.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	110
2.5.4	Perlindungan Konsumen	112
2.5.5	<i>Market Conduct</i>	116
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	117
2.6.1	Penanganan Perkara	117
2.6.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	117
2.6.3	Koordinasi dengan Instansi Terkait	117
2.6.4	Satgas Waspada Investasi Daerah	117
2.6.5	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	118
2.7	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	118
2.7.1	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan	118
2.7.2	<i>Mutual Evaluation Review (MER) 2018</i>	118
2.7.3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	119
2.7.4	Pengembangan Kebijakan APU PPT	119
2.8	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	120
2.8.1	Kerjasama Domestik	120
2.8.2	Kerjasama Internasional	120

**BAB 3
TINJAUAN
INDUSTRI DAN
OPERASIONAL
SEKTOR JASA
KEUANGAN
SYARIAH**

3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	125
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	125
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	130
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	133
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	136
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	136
3.2.2	Pengaturan IKNB Syariah	136
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	136
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	136
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	137
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	137
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	138
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	138
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	139
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	140

**BAB 4
MANAJEMEN
STRATEGIS
DAN TATA
KELOLA
ORGANISASI**

4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	145
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	145
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	145
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) dan Program Khusus (PK) OJK	147
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	148
4.2.1	Pelaksanaan Audit	148
4.2.2	Mitigasi Risiko OJK <i>Wide</i>	148
4.2.3	Implementasi Standar Pengendalian Kualitas	148
4.2.4	Program Pengendalian Gratifikasi	148
4.2.5	<i>Whistle Blowing System</i>	149
4.2.6	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	149
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	150
4.4	KOMUNIKASI	151
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	151
4.4.2	Layanan Informasi	154
4.4.3	OJK TV	154
4.5	KEUANGAN	154
4.5.1	Realisasi Anggaran	154
4.5.2	Penetapan Anggaran	154
4.5.3	Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan	155

4.6	SISTEM INFORMASI	155
4.6.1	Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022	155
4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok	155
4.6.3	Penguatan Sistem Informasi untuk Peningkatan Kapasitas Organisasi	156
4.7	LOGISTIK	156
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	156
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	156
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	157
4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	157
4.8.1	Kebijakan Sumber Daya Manusia	157
4.8.2	Peraturan Mengenai Pemenuhan Sumber Daya Manusia	157
4.8.3	Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar	157
4.9	OJK INSTITUTE	157
4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)	158
4.9.2	Pengembangan Kompetensi	158
4.9.3	Pendidikan Formal	158
4.9.4	Program Penugasan	158
4.9.5	Program Asesmen	158
4.9.6	Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan	158
4.9.7	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	158
4.9.8	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	158
4.9.9	Visit OJK	158
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	159
4.10.1	Pelaksanaan Program	159
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	159
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	159

SINGKATAN DAN AKRONIM

160

DAFTAR TABEL

Tabel I - 1	<i>Outlook Perekonomian</i>	28
Tabel I - 2	<i>World Economic Outlook IMF</i>	28
Tabel I - 3	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	29
Tabel I - 4	Perkembangan Indikator CDS Jangka Menengah Negara ASEAN-5	30
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum	32
Tabel I - 6	Kondisi Bank Umum Konvensional	32
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	33
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	35
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	37
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	38
Tabel I - 11	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	38
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik	42
Tabel I - 13	Perkembangan IHSG	42
Tabel I - 14	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	43
Tabel I - 15	Jumlah Perusahaan Efek	44
Tabel I - 16	Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek Selain Kantor Pusat	44
Tabel I - 17	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	45
Tabel I - 18	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	45
Tabel I - 19	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	45
Tabel I - 20	Perkembangan Pengelolaan Investasi	46
Tabel I - 21	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	47
Tabel I - 22	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	48
Tabel I - 23	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	49
Tabel I - 24	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	49
Tabel I - 25	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri	50
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	50
Tabel I - 27	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	51
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	51
Tabel I - 29	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	51
Tabel I - 30	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	52
Tabel I - 31	Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri	53
Tabel I - 32	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	54
Tabel I - 33	Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> dan <i>Non Investment Grade</i>	54
Tabel I - 34	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	55
Tabel I - 35	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)	55
Tabel I - 36	Total Aset IKNB	56
Tabel I - 37	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
Tabel I - 38	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	58
Tabel I - 39	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	58
Tabel I - 40	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	59
Tabel I - 41	RBC Industri Asuransi	59
Tabel I - 42	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	59
Tabel I - 43	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	60
Tabel I - 44	Portofolio Investasi Dana Pensiun	61
Tabel I - 45	Jumlah Dana Pensiun	61
Tabel I - 46	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	63
Tabel I - 47	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	64
Tabel I - 48	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	64
Tabel I - 49	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	65
Tabel I - 50	Rasio Keuangan Modal Ventura	66

Tabel I - 51	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	66
Tabel I - 52	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	69
Tabel I - 53	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	69
Tabel I - 54	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro	70
Tabel I - 55	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	70
Tabel I - 56	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	70
Tabel I - 57	Pemberian Izin LKM Syariah Bank Wakaf Mikro (BWM) Triwulan IV-2018	70
Tabel I - 58	Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2018	71
Tabel I - 59	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	72
Tabel I - 60	Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang	74
Tabel II - 1	Pemeriksaan Umum Bank	80
Tabel II - 2	Pemeriksaan Khusus Bank	80
Tabel II - 3	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan	80
Tabel II - 4	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	81
Tabel II - 5	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	82
Tabel II - 6	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU	82
Tabel II - 7	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	83
Tabel II - 8	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	83
Tabel II - 9	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	84
Tabel II - 10	Aksi Korporasi	87
Tabel II - 11	Laporan Berkala	87
Tabel II - 12	Sanksi Administratif Pasar Modal	89
Tabel II - 13	Analisis Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	89
Tabel II - 14	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	90
Tabel II - 15	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	91
Tabel II - 16	Penegakan Kepatuhan terhadap Dana Pensiun	92
Tabel II - 17	Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	92
Tabel II - 18	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	93
Tabel II - 19	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha selama Triwulan IV-2018	93
Tabel II - 20	Pelaksanaan Pendampingan LKM	94
Tabel II - 21	Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Khusus	94
Tabel II - 22	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	95
Tabel II - 23	Proses Penetapan Izin Usaha Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	95
Tabel II - 24	Proses Persetujuan Perubahan Kepemilikan Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> pada Triwulan IV-2018	96
Tabel II - 25	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	96
Tabel II - 26	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	97
Tabel II - 27	Penetapan Izin IKNB	97
Tabel II - 28	Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan Pergadaian	97
Tabel II - 29	Pencabutan Izin IKNB	98
Tabel II - 30	Jumlah IKNB Konvensional	98
Tabel II - 31	Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB	99
Tabel II - 32	Persetujuan Pengambilalihan IKNB	99
Tabel II - 33	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB	100
Tabel II - 34	Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB	101
Tabel II - 35	Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB	101
Tabel II - 36	Rekapitulasi Pelaporan Produk	102
Tabel II - 37	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB	102
Tabel II - 38	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB	103
Tabel II - 39	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB	103
Tabel II - 40	Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal	104
Tabel II - 41	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB	104
Tabel II - 42	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	108
Tabel II - 43	Pelaksanaan OJK <i>Goes to Campus</i>	111
Tabel II - 44	Penerimaan Layanan Meja Pengaduan OJK	114
Tabel II - 45	Kegiatan Penyidikan Per Bidang	117
Tabel II - 46	Pemberkasakan Kejaksaan	117

Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	125
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	127
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	128
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	129
Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	130
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	131
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	131
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	131
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	132
Tabel III - 10	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	133
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	133
Tabel III - 12	Aset Industri Perasuransian Syariah	134
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	135
Tabel IV - 1	Judul Siaran Pers Triwulan	153
Tabel IV - 2	Jumpa Pers dan Media <i>Briefing</i>	153
Tabel IV - 3	Daftar Lokasi KR/KOJK	156

DAFTAR GRAFIK



Grafik I - 1	Tingkat Inflasi Amerika Serikat	27
Grafik I - 2	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	27
Grafik I - 3	Kinerja Eksternal Tiongkok	27
Grafik I - 4	Tingkat Inflasi Jepang	28
Grafik I - 5	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	28
Grafik I - 6	Perkembangan Pasar Saham Global	29
Grafik I - 7	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	29
Grafik I - 8	Indeks VIX	30
Grafik I - 9	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	30
Grafik I - 10	Indeks Penjualan Riil SPE	31
Grafik I - 11	Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha	31
Grafik I - 12	Tingkat Inflasi Indonesia	31
Grafik I - 13	Neraca Perdagangan Indonesia	31
Grafik I - 14	Defisit Fiskal Indonesia	31
Grafik I - 15	Perkembangan Aset BUK	33
Grafik I - 16	Tren Pertumbuhan DPK	33
Grafik I - 17	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	34
Grafik I - 18	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	34
Grafik I - 19	Tren NPL (%)	34
Grafik I - 20	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	34
Grafik I - 21	Tren Aset BPR	35
Grafik I - 22	Tren Aset DPK (<i>yoy</i>)	35
Grafik I - 23	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	36
Grafik I - 24	Tren ROA dan BOPO BPR	36
Grafik I - 25	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	37
Grafik I - 26	Penyebaran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (<i>yoy</i>)	39
Grafik I - 27	NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	40
Grafik I - 28	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	41
Grafik I - 29	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	41
Grafik I - 30	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	41
Grafik I - 31	Perkembangan IHSG dan <i>Net Asing</i>	42
Grafik I - 32	Indonesia <i>Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	43
Grafik I - 33	Perkembangan Jumlah SID	44
Grafik I - 34	Rencana Penggunaan Dana	52
Grafik I - 35	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien	54
Grafik I - 36	<i>Market Share Company Rating</i>	54
Grafik I - 37	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB	56
Grafik I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	60
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	62
Grafik I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan	62
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	65
Grafik I - 42	Pertumbuhan Pembiayaan atau Penyertaan Modal	65
Grafik I - 43	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	66
Grafik I - 44	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	66
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset LJKK	66
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	67
Grafik I - 47	<i>Outstanding</i> Penjaminan	67
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	67
Grafik I - 49	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	67
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	68
Grafik I - 51	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian	68
Grafik I - 52	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	68
Grafik I - 53	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	68
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	69

Grafik I - 55	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	69
Grafik I - 56	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan IV-2018	71
Grafik I - 57	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	71
Grafik I - 58	Perkembangan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)	72
Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	83
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR	84
Grafik II - 3	Kinerja Intermediasi IJK	107
Grafik II - 4	CAR Perbankan	107
Grafik II - 5	RBC Industri Perasuransian	107
Grafik II - 6	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	108
Grafik II - 7	Rasio NPL Perbankan	108
Grafik II - 8	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	108
Grafik II - 9	Penerimaan Layanan Konsumen Terintegrasi	112
Grafik II - 10	Layanan Informasi	112
Grafik II - 11	Layanan Pertanyaan	112
Grafik II - 12	Layanan Pengaduan	113
Grafik II - 13	Jenis Produk Perbankan	113
Grafik II - 14	Jenis Produk Perasuransian	113
Grafik II - 15	Jenis Produk Lembaga Pembiayaan	113
Grafik II - 16	Jenis Produk Pasar Modal	113
Grafik II - 17	Jenis Produk pada Dana Pensiun	113
Grafik II - 18	Jenis Produk IKNB Lainnya	113
Grafik II - 19	Jenis Permasalahan Perbankan	113
Grafik II - 20	Jenis Permasalahan Perasuransian	113
Grafik II - 21	Jenis Permasalahan Lembaga Pembiayaan	114
Grafik II - 22	Jenis Permasalahan Pasar Modal	114
Grafik II - 23	Jenis Permasalahan Dana Pensiun	114
Grafik II - 24	Jenis Permasalahan IKNB Lainnya	114
Grafik II - 25	Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan IV-2018)	114
Grafik II - 26	Kanal Layanan (Triwulan IV-2018)	114
Grafik II - 27	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	114
Grafik II - 28	Penerimaan Layanan Berdasarkan Kanal Penyampaian	115
Grafik II - 29	Iklan Berdasarkan Produk yang Ditawarkan	116
Grafik II - 30	Tren Pelanggaran Iklan	117
Grafik II - 31	Klasifikasi Pelanggaran	117
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	126
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah	126
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qta</i>)	126
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	129
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	129
Grafik III - 6	Laba dan ROA Perbankan Syariah	130
Grafik III - 7	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	131
Grafik III - 8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	132
Grafik III - 9	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	132
Grafik III - 10	Jumlah Entitas IKNB Syariah	134
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	145
Grafik IV - 2	Tren Mitigasi dan Risiko	148
Grafik IV - 3	Rekapitulasi Penerimaan Laporan WBS	149
Grafik IV - 4	Rincian Laporan LHKPN	149
Grafik IV - 5	Gambaran Materi RDK	150
Grafik IV - 6	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	151
Grafik IV - 7	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK	151
Grafik IV - 8	Jumlah Publikasi di Media Sosial OJK	152
Grafik IV - 9	Jumlah Pemberitaan	152

Grafik IV - 10	Persentase <i>Tone</i> Berita	152
Grafik IV - 11	Siaran Pers Per Bidang	152
Grafik IV - 12	Jumlah Layanan Informasi	154
Grafik IV - 13	Liputan OJK TV	154
Grafik IV - 14	Statistik OJK TV	154



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan IV-2018 terdapat beberapa perkembangan penting perekonomian global. Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh stabil didukung utamanya oleh konsumsi rumah tangga meskipun beberapa *leading indicators* menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi AS tidak akan secepat yang telah diperkirakan. Akibat pengumuman The Fed atas kenaikan suku bunga kebijakan ke rentang 2,25% - 2,5%, pelaku pasar mengkhawatirkan *outlook* pertumbuhan perekonomian global 2019 sehingga pasar saham sempat terkoreksi turun. Akan tetapi laju normalisasi kebijakan moneter, termasuk laju kenaikan Federal Funds Rate (FFR), diprediksi berkurang sesuai revisi proyeksi kenaikan FFR yang direncanakan hanya akan dilaksanakan 2 kali. Hal ini mendorong penurunan *yield* US Treasury dan kenaikan USD dan menyebabkan modal kembali masuk ke negara berkembang.

Selain itu, World Bank dan International Monetary Fund (IMF) merevisi turun pertumbuhan ekonomi dunia di 2019. Penurunan ini didorong oleh perkiraan dampak perang dagang AS-Tiongkok, kontraksi pasar keuangan di berbagai negara, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Jepang. Pelemahan ekonomi global menyebabkan harga minyak dan komoditas lainnya turun.

Kendati terjadi perlambatan ekonomi global, kondisi perekonomian domestik menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Perekonomian tumbuh solid 5,17% (*yoy*) dengan tingkat inflasi stabil dan performa fiskal terbaik sejak 6 tahun terakhir. Mata uang Rupiah terapresiasi 3,65% (*qta*) ke Rp14.375/USD, setelah sebelumnya menembus psikologis Rp15.000/USD di awal bulan Oktober 2018. Menguatnya nilai tukar Rupiah ini terutama didorong oleh sentimen *dovish* The Fed dan membaiknya kinerja pasar saham domestik. Namun demikian, kinerja eksternal terutama dari defisit neraca perdagangan perlu diperbaiki lebih lanjut.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

- 1. Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 ke T+2**
Kemajuan dan integrasi sistem teknologi informasi yang memungkinkan penyelesaian transaksi lebih cepat dari T+3 menjadi T+2 guna meningkatkan likuiditas serta menurunkan persyaratan permodalan dan agunan.
- 2. MoU Kerja Sama dengan Bank of Thailand dan Monetary Authority of Singapore**
OJK dan perwakilan instansi terkait menandatangani perjanjian kerja sama terkait bidang pengawasan perbankan lintas batas dan pertukaran Informasi dengan Bank of Thailand dan terkait pengembangan dan pengawasan industri keuangan digital (*financial technology*) dengan Monetary Authority of Singapore.
- 3. Peluncuran Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil dan Udang**
Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dengan rentang nilai premi antara Rp90.000-225.000 per hektar.
- 4. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2018**
OJK bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Kegiatan dimaksud bertujuan untuk mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya di kalangan akademisi. Harapannya hasil riset tersebut dapat bermanfaat untuk pengembangan sektor perbankan dan keuangan syariah Indonesia.

Pada lingkup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan kegiatan edukasi berbagai kalangan, antara lain kepada komunitas pengusaha kecil dan menengah, mahasiswa, karyawan dan pekerja migran dalam dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*revisit* 2017) untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Selain itu, OJK juga meluncurkan program tabungan bagi mahasiswa dan pemuda yang dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yaitu Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) serta melaksanakan seminar *fintech* dengan tema “*Utilizing Fintech as a Platform for Enhancing SMEs and Islamic Financing*”.

Penguatan Kapasitas Organisasi

Pada aspek manajemen strategis, OJK didukung oleh Sistem Manajemen Strategis, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang pada periode laporan mencapai tahap penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 serta Penilaian Kinerja 2018. Terkait struktur organisasi dan

SDM, OJK melakukan penyesuaian pada struktur organisasi dan penyegaran pada komposisi pegawai di dalamnya. OJK secara aktif mendukung pengembangan diri dan karir pegawai melalui berbagai pelatihan, penugasan belajar maupun kesempatan *coaching mentoring* sesama pegawai.

Sebagai bentuk peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, OJK memformulasikan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018 – 2022 sebagai arah transformasi sistem informasi di organisasi. Harapannya RBSI 2018–2022 diimplementasikan secara menyeluruh, baik dari bisnis maupun kegiatan pengembangan sistem informasi.

Untuk pemberian manfaat balik terhadap pemangku kepentingan khususnya masyarakat, selama triwulan IV-2018 OJK menerima kunjungan instansi maupun dari pelajar dan mahasiswa, dengan total peserta sebanyak 600. OJK juga menerbitkan publikasi dalam format siaran pers, jumpa pers dan liputan OJK TV.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan IV-2018 dijelaskan dalam buku Laporan Triwulanan IV-2018.



Program Prioritas OJK



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

OJK memberikan **41 izin** usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Total pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp7,51 miliar** kepada **9.191 nasabah** yang terbentuk ke dalam **1.369 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



Program JARING

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank rekanan dan konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit program JARING **tumbuh 12,73% (yoy)** atau **3,46% (qtq)** menjadi **Rp32,13 triliun** dan **NPL gross 1,38%**.



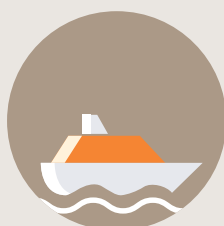
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Sampai dengan triwulan IV-2018, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **901.420 ha** dengan **jumlah petani 1.446.399**. Nilai premi tercatat adalah **Rp161,73 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang telah diganti adalah **120.000 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **75.508 peternak** dengan realisasi klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah sebesar **Rp 39,62 miliar**.



Asuransi Nelayan

Asuransi yang memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko bencana alam atau lainnya saat melaut. Sampai triwulan IV-2018 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai **573.084 nelayan** dari **27 provinsi** dengan realisasi premi **Rp46,148 miliar**.



Asuransi Usaha Budidaya Udang

Asuransi Usaha Budidaya Udang memberikan proteksi terhadap kegagalan usaha Budidaya Udang karena penyakit/bencana alam. Luas lahan Asuransi Usaha Budidaya Udang yang terdaftar sampai dengan triwulan IV-2018 adalah sebesar **3.300 ha** dengan premi sebesar **Rp1,485 miliar**. Nilai klaim sampai dengan triwulan IV-2018 adalah sebesar **Rp666,078 juta** untuk seluas **133,22 ha** di **14 provinsi**.



Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses untuk pelajar kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
293



Jumlah Rekening
16.280.353



Rata-rata Saldo
Rp 391.650



Perjanjian Kerjasama
322.039



Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

1. Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar **Rp28,05 triliun**
2. Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah lima dengan dana kelolaan sebesar **Rp3,66 triliun** atau turun sebesar **2,40% (qtq)**
3. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) **menurun sebesar 1,62%** menjadi **Rp26,15 triliun** dan jumlah kontrak RDPT naik menjadi **62 RDPT**
4. Jumlah kontrak KIK EBA tetap delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar **Rp7,21 triliun**
5. Penerbitan tiga kontrak baru KIK-DIRE, sehingga berjumlah **7 KIK** dengan dana kelolaan **Rp0,62 triliun**



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Untuk meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan IV-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp3,8 triliun**.



Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank Penyelenggara
29



Jumlah Agen
1.004.547



Cakupan Wilayah
512 Kota / Kabupaten dan 34 Provinsi

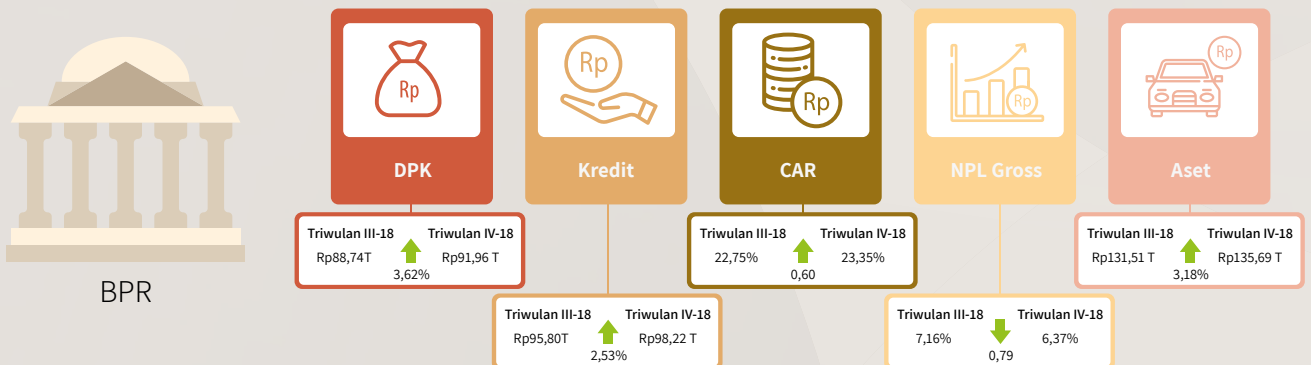
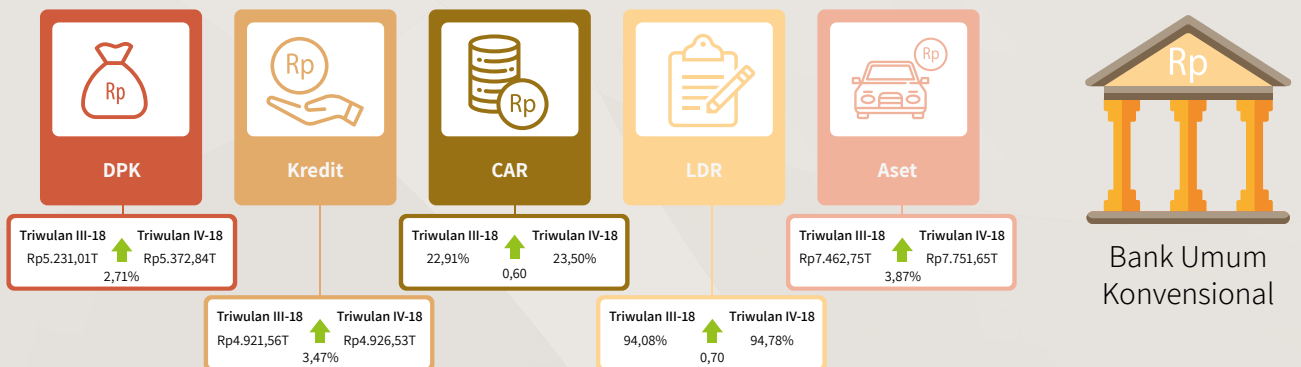
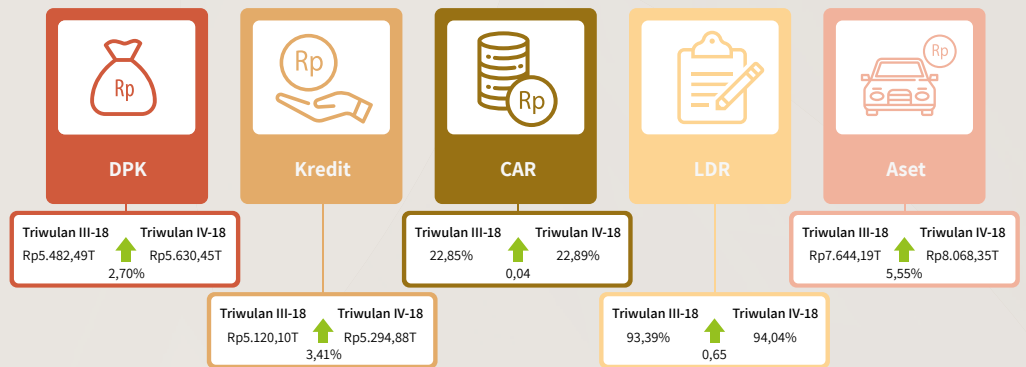


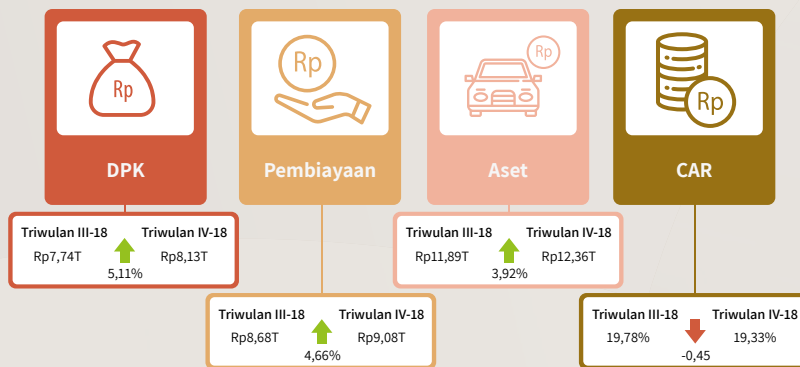
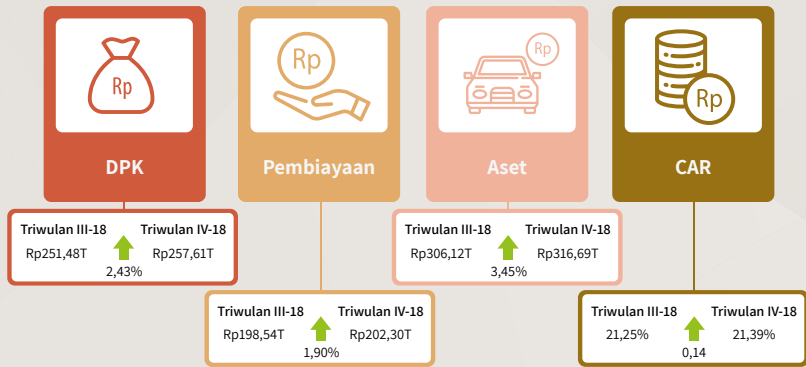
Dana Himpunan
Rp1,57 triliun

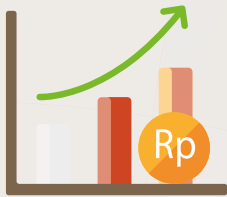


Nasabah
22.832.105

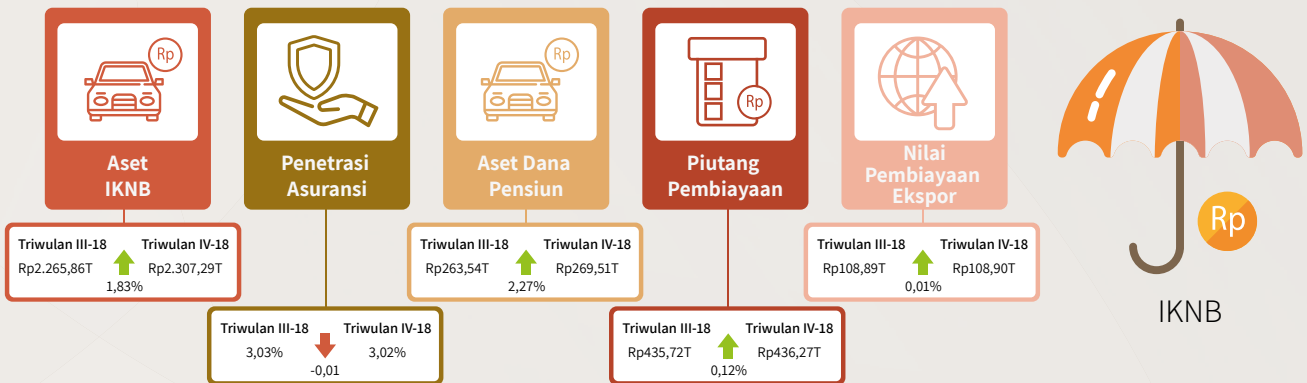
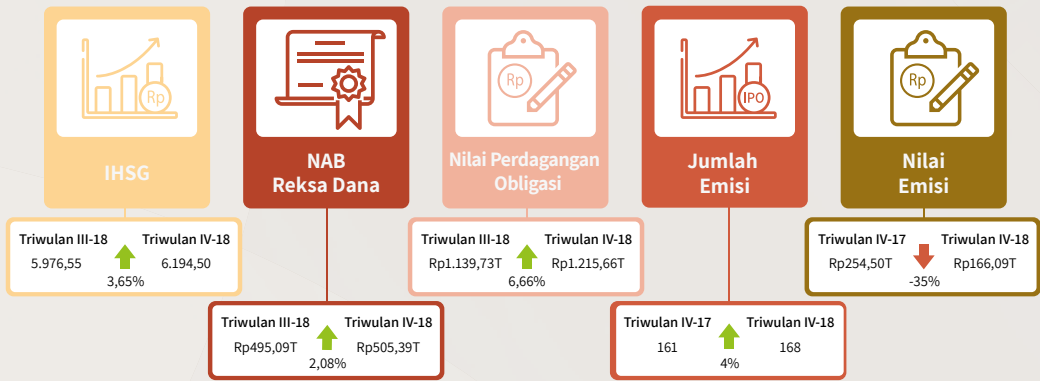
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



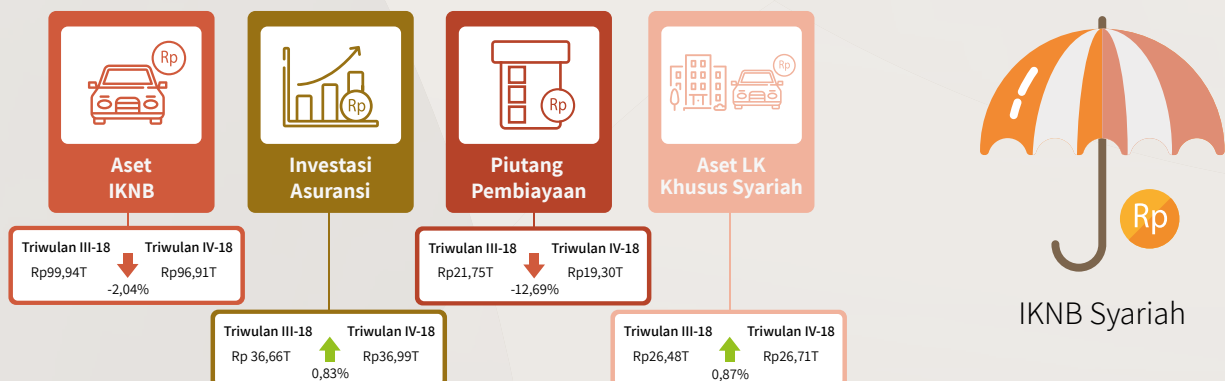
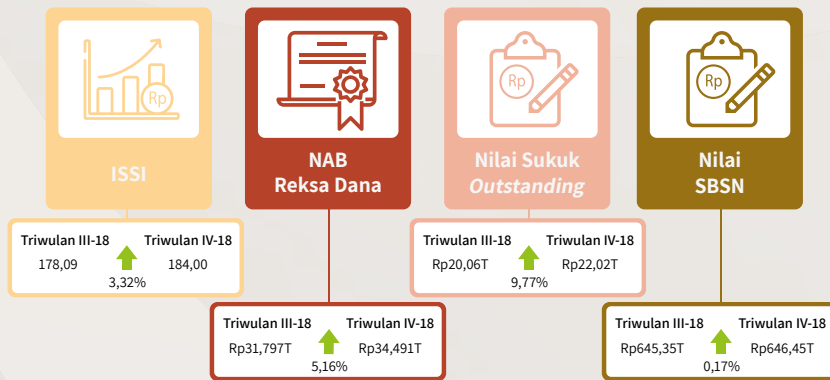




Pasar Modal



PASAR MODAL SYARIAH
Berinvestasi yang Amanah



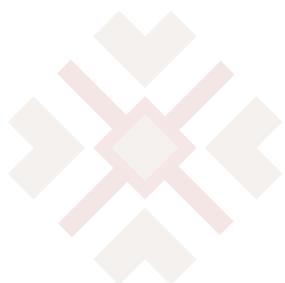
BAB 1

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN





Halaman ini sengaja di kosongkan



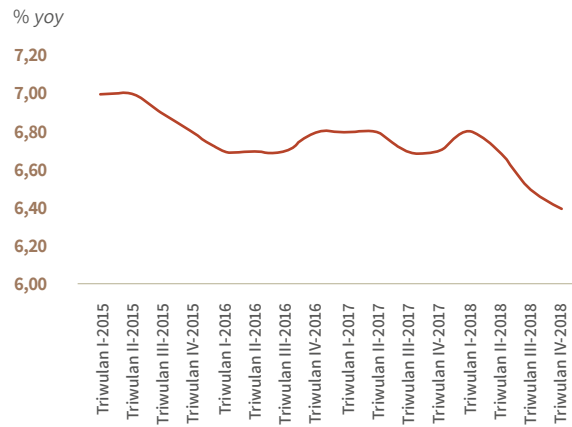
1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pada triwulan IV-2018 pelaku pasar mengkhawatirkan *outlook* pertumbuhan perekonomian global tahun 2019 sehingga pasar saham sempat terkoreksi turun. Selain itu, laju normalisasi kebijakan moneter, termasuk laju kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR), berkurang. Hal ini mendorong penurunan *yield US Treasury* dan kenaikan USD dan menyebabkan modal kembali masuk ke negara berkembang. Perekonomian Tiongkok juga melambat, sehingga harga komoditas diekspektasikan stagnan mengingat Tiongkok adalah konsumen utama komoditas dunia.

Pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga kebijakan ke rentang 2,25% - 2,5%. Namun demikian, The Fed merevisi turun proyeksi pertumbuhan AS tahun 2019 ke 2,3% (yoy) dan hanya berencana menaikkan *Federal Funds Rate* (FFR) dua kali pada 2019 sesuai hasil proyeksi tersebut.

Grafik I - 2 — Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



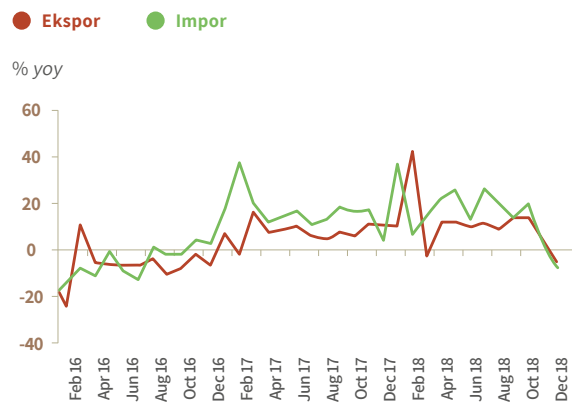
Sumber : CEIC

A. Perkembangan Ekonomi Beberapa Negara Utama

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada triwulan IV-2018 naik sebesar 3,0% (yoy) (triwulan III-2018: 3,0% yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga AS. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, inflasi inti AS pada akhir 2018 tercatat sebesar 2,2%, di atas target inflasi 2% yang telah ditetapkan. Beberapa *leading indicator* menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi AS tidak akan secepat yang telah diperkirakan. Tingkat pengangguran Desember 2018 sebesar 3,9% sedikit naik dibandingkan akhir triwulan III-2018 walaupun tetap menunjukkan tren penurunan. Kenaikan tingkat pengangguran ini sejalan dengan pergerakan *initial jobless claims* yang naik ke 233 ribu pada akhir Desember 2018. Indikator *Markit Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur menunjukkan perusahaan AS masih berada dalam tahap ekspansi di level 53,8 meskipun terdapat indikasi tren penurunan sejak April 2018.

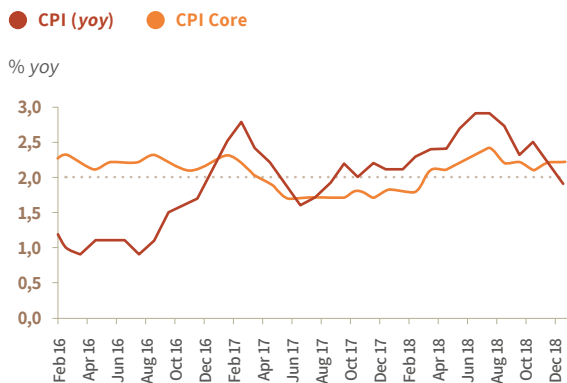
Rilis data pertumbuhan Tiongkok terkini menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok masih berlanjut. Inflasi IHK bergerak relatif stabil di 1,9% (yoy), indikator PMI manufaktur turun ke 49,4 dan memasuki tahap kontraksi untuk pertama kali sejak 2016. Pergerakan indikator eksternal juga mulai mengindikasikan kontraksi ekonomi Tiongkok dengan impor turun -7,6% (yoy) dan ekspor turun -4,4% (yoy).

Grafik I - 3 — Kinerja Eksternal Tiongkok



Sumber : CEIC

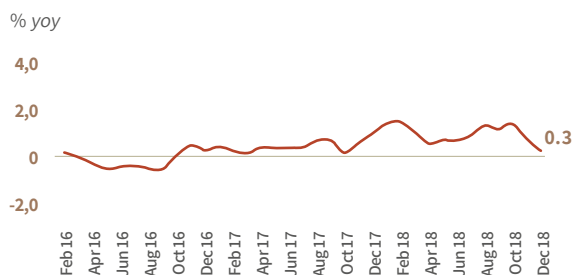
Grafik I - 1 — Tingkat Inflasi Amerika Serikat



Sumber : CEIC

Perekonomian Jepang tumbuh terkontraksi di triwulan IV-2018 dengan inflasi rendah di level 0,8% yoy. Bank of Japan (BoJ) menyatakan akan terus mempertahankan posisi kebijakan moneternya guna mendorong inflasi secara bertahap mencapai ke target 2,0% yang telah ditetapkan.

Grafik I - 4 — Tingkat Inflasi Jepang

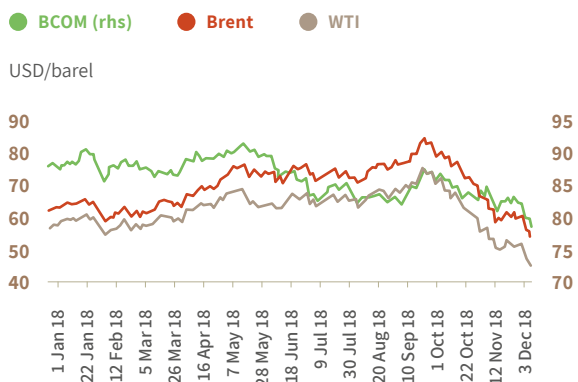


Sumber : CEIC

B. Perkembangan Harga Komoditas

Pelemahan ekonomi global menyebabkan harga minyak dan komoditas lainnya turun. Harga minyak dunia WTI dan Brent masing-masing turun ke level 45,4 USD/brel (-37,54% *qtq*) dan 53,4 USD/brel (-34,01% *qtq*). Upaya OPEC menurunkan produksi sempat menahan laju penurunan di awal Desember, walaupun tidak mampu mendorong kenaikan harga minyak ke level tertingginya. Pergerakan indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) relatif sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia dengan indeks turun -9,96% (*qtq*).

Grafik I - 5 — Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



Sumber : Bloomberg

C. Proyeksi Perekonomian Global

World Bank merevisi turun pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2019 menjadi 2,9% (*yoy*). Penurunan ini terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan negara berkembang menjadi 4,2% (*yoy*). Penurunan terdalam dialami oleh negara eksportir komoditas yang diperkirakan hanya akan tumbuh 2,3% (*yoy*) di tahun

2019 terutama karena hilangnya momentum untuk tumbuh lebih tinggi seiring turunnya harga komoditas di akhir tahun 2018. Adapun perekonomian negara maju diperkirakan tetap tumbuh stabil di 2,0% (*yoy*). Sesuai dengan arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut, harga minyak dunia di 2019 diperkirakan akan turun -2,9% (*yoy*), sedangkan harga komoditas non migas akan naik terbatas 1,0% (*yoy*) (GEP Jun 18: 0,2% *yoy*).

Tabel I - 1 — Outlook Perekonomian

% yoy	2019f	
	GEP Jun 2018	GEP Jan 2019
Global	3,0	2,9
Negara Maju	2,0	2,0
Negara Berkembang	4,7	4,2
Negara Eksportir Komoditas	3,0	2,3
Negara Berkembang Lainnya	5,8	5,5
Harga Minyak	-1,4	-2,9
Harga Komoditas Non Migas	0,2	1

Sumber : World Bank

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2019 juga direvisi turun pada rilis *World Economic Outlook* (WEO) *International Monetary Fund* (IMF). Hal ini terutama disebabkan perkiraan dampak perang dagang AS-Tiongkok, kontraksi pasar keuangan di berbagai negara, dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Perekonomian dunia 2019 direvisi turun menjadi hanya tumbuh 3,5% (*yoy*). Negara maju dan negara berkembang juga diperkirakan masing-masing tumbuh 2,0% (*yoy*) dan 4,5% (*yoy*). IMF memperkirakan harga minyak dunia akan kembali terkoreksi turun -14,1% (*yoy*). Adapun harga komoditas diperkirakan turun terbatas sebesar -2,7% (*yoy*).

Tabel I - 2 — World Economic Outlook IMF

% yoy	2019f	
	WEO Okt 2018	WEO Jan 2019
Global	3,7	3,5
Negara Maju	2,1	2,0
Negara Berkembang	4,7	4,5
Harga Minyak	-0,9	-14,1
Harga Komoditas Non Migas	-0,7	-2,7

Sumber : IMF

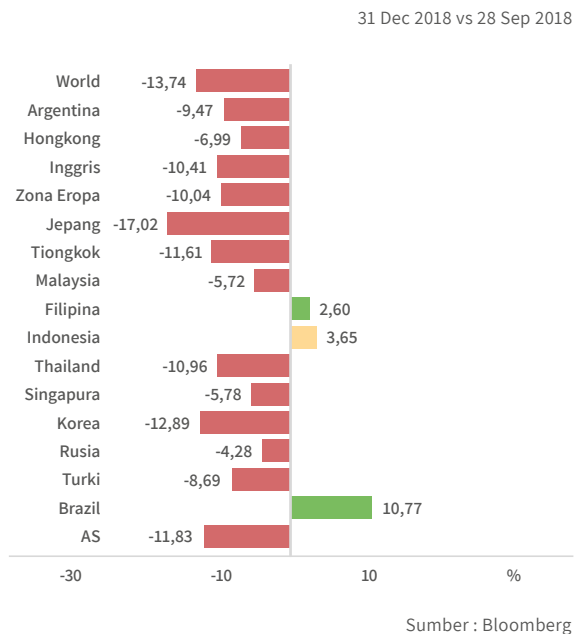
1.1.2 Perkembangan Pasar Keuangan Global

Pasar keuangan global triwulan IV-2018 menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, terutama dari sentimen ketidakpastian kesepakatan perang dagang AS-Tiongkok dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Namun demikian, kinerja pasar domestik masih tetap relatif terjaga baik di tengah fluktuasi yang terjadi.

A. Pasar Nilai Saham

Secara umum pasar saham global berkontraksi di triwulan IV-2018 dengan indeks MSCI *World* terkoreksi sebesar -13,74% (*qtq*) (-10,44% *yoy*). Koreksi terdalam dialami oleh Jepang sebesar -17,02% (*qtq*) (-12,08% *yoy*) terutama disebabkan rilis data makroekonomi terkini yang mengindikasikan belum kuatnya pemulihan ekonomi Jepang. Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok mendorong berbagai perusahaan multinasional untuk merevisi turun proyeksi laba mereka di 2019 dan menyebabkan koreksi di berbagai indeks saham dunia. Namun demikian, IHSG tumbuh naik 3,65% (*qtq*) seiring solidnya rilis data makroekonomi domestik dan fiskal terkini.

Grafik I - 6 Perkembangan Pasar Saham Global



B. Pasar Surat Utang Global

Berbeda dengan pasar saham, pasar surat utang global triwulan IV-2018 secara umum bergerak membaik. *Yield* surat utang jangka panjang secara rata-rata turun 35,77 *bps* terutama didorong oleh sentimen *dovish* yang beberapa kali dikemukakan Gubernur The Fed dan turunnya rencana kenaikan *Federal Fund Rate* (FFR) di 2019 dari 3 kali menjadi

2 kali. *Yield* surat utang Jepang turun 14 *bps* dan kembali menyentuh angka negatif di Desember 2018. *Yield* tenor 10 tahun negara kawasan ASEAN secara rata-rata turun 21 *bps*, dengan *yield* surat utang Indonesia turun 8 *bps*.

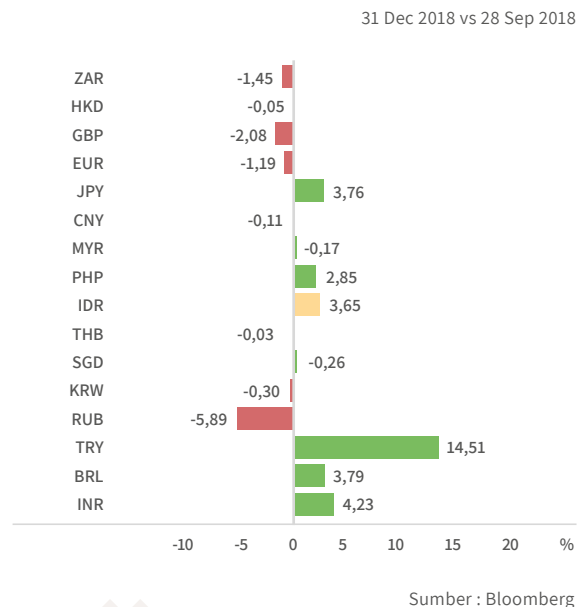
Tabel I - 3 Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Des 2017	Sep 2018	Des 2018	Δqtq (bps)
Hongkong	1,82%	2,42%	2,01%	-41
Inggris	1,19%	1,57%	1,28%	-30
Zona Eropa	0,43%	0,47%	0,24%	-23
Jepang	0,05%	0,13%	-0,01%	-14
Tiongkok	3,88%	3,62%	3,30%	-32
Malaysia	3,91%	4,06%	4,08%	2
Indonesia	6,29%	8,06%	7,98%	-8
Thailand	3,88%	3,62%	3,30%	-32
Singapura	2,00%	2,50%	2,04%	-46
Korea	2,47%	2,36%	1,96%	-40
Rusia	7,43%	8,41%	8,52%	11
Turki	11,47%	17,95%	15,99%	-195
AS	2,40%	3,00%	2,83%	-17

C. Pasar Nilai Tukar

Pergerakan nilai tukar global di triwulan IV-2018 relatif stabil. Nilai mata uang Yen Jepang menguat terhadap *US Dollar* sebesar 3,75% (*qtq*) karena investor masih menganggap mata uang Jepang sebagai *safe haven* di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Mata uang Rupiah terapresiasi 3,65% (*qtq*) ke Rp14.375/USD, setelah sebelumnya menembus psikologis Rp15.000/USD di awal Oktober 2018. Menguatnya nilai tukar Rupiah ini terutama didorong oleh sentimen *dovish* The Fed dan membaiknya kinerja pasar saham domestik.

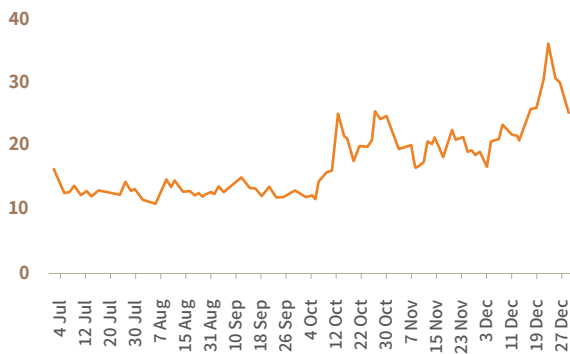
Grafik I - 7 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



D. Volatilitas dan Risiko

Pasar keuangan global triwulan IV-2018 relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nilai rata-rata index VIX pada triwulan IV-2018 naik ke 21,31 (Triwulan III-18: 12,91) terutama dipicu oleh belum adanya kesepakatan perundingan AS-Tiongkok mengenai pengenaan tarif impor. Refleksi kenaikan volatilitas ini dapat dilihat dari tertekannya hampir seluruh harga indeks saham dunia di triwulan yang sama.

Grafik I - 8 — Indeks VIX



Sumber : Bloomberg

Di kawasan ASEAN-5, risiko jangka menengah triwulan IV-2018 terpantau sedikit meningkat. Besar CDS tenor 5 tahun naik rata-rata peningkatan sebesar 10,9 (*qtq*). Kenaikan tertinggi dialami oleh Malaysia sebesar 17,25 *bps*, sedangkan kenaikan terendah dialami Thailand sebesar 3,14 *bps*. Pada saat yang bersamaan, CDS Indonesia naik 7,97 *bps*, relatif rendah dibandingkan kenaikan CDS negara ASEAN lainnya.

Tabel I - 4 — Perkembangan Indikator CDS Jangka Menengah Negara ASEAN-5

	Des 2017	Sep 2018	Des 2018	Δqtq (<i>bps</i>)
Indonesia	85,25	130,12	138,09	7,97
Filipina	67,28	76,69	87,67	10,98
Malaysia	58,37	92,57	109,82	17,25
Vietnam	121,14	152,33	166,99	14,66
Thailand	45	41,28	44,42	3,14

Sumber : Bloomberg

1.1.3 Perkembangan Ekonomi Domestik

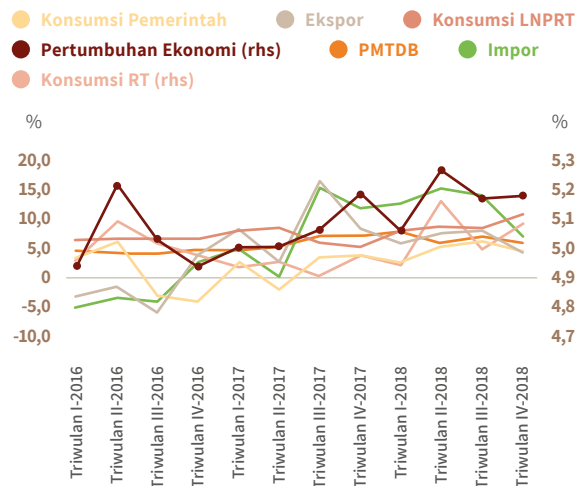
Perekonomian domestik pada triwulan IV-2018 mencatat sejumlah perkembangan positif di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang terjadi. Perekonomian masih

tumbuh solid dengan tingkat inflasi stabil pada rentang target inflasi yang ditetapkan dan defisit fiskal yang berada di bawah rata-rata 6 tahun terakhir. Namun demikian, kinerja eksternal terutama dari defisit neraca perdagangan perlu diperbaiki lebih lanjut.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan IV-2018 tercatat tumbuh positif sebesar 5,18% (*yoy*) (Triwulan-III 18: 5,17% *yoy*). Peningkatan pertumbuhan ini terutama didorong kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga. Dengan pencapaian ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 tercatat sebesar 5,17%, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

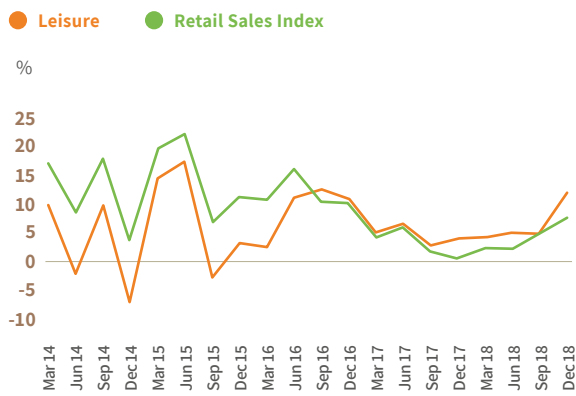
Grafik I - 9 — Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



B. Indikator Sektor Riil

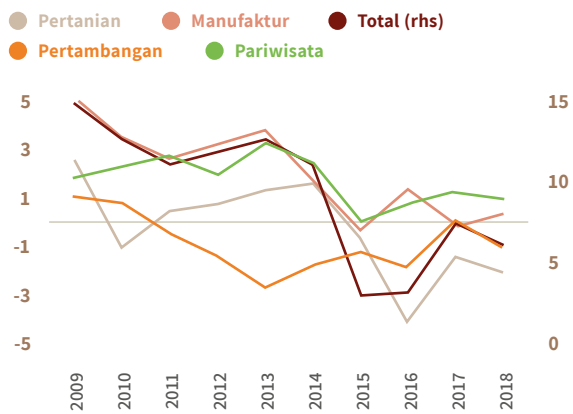
Indikator sektor riil menunjukkan sinyal *mixed* akan pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam fase ekspansi di level 51,2. Penjualan semen dan kendaraan bermotor masing-masing naik sebesar 7,22% (*yoy*) dan 3,23% (*yoy*), turun dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 12,14% (*yoy*) dan 6,4% (*yoy*). Data terkini Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) menunjukkan penjualan retail tumbuh solid sebesar 14,37% (*yoy*). Kenaikan ini terutama didorong oleh penjualan *leisure goods* sebesar 19,27% (*yoy*). Berbeda dengan data penjualan eceran, Survei Kegiatan Dunia Usaha menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami tren perlambatan pertumbuhan sejak krisis keuangan global 2007-2008. Fase kontraksi tersebut diperkirakan telah mengalami *bottoming out* pada 2015-2016. Namun demikian, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kegiatan Usaha 2018 relatif rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengindikasikan bahwa pemulihan yang terjadi masih belum solid.

Grafik I - 10 — Indeks Penjualan Riil SPE



Sumber : Bank Indonesia

Grafik I - 11 — Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha

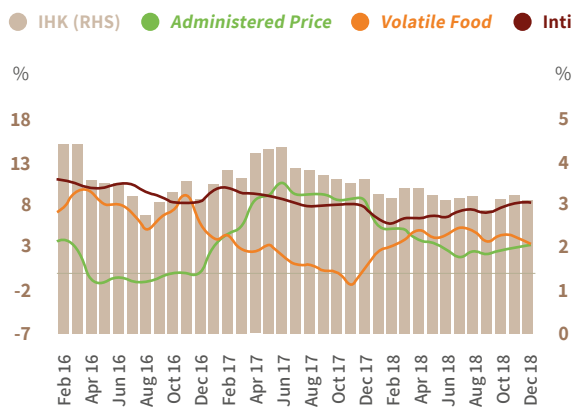


Sumber : Bank Indonesia

C. Tingkat Inflasi

Inflasi triwulan IV-2018 berada pada kisaran rentang target inflasi 3,5±1%. Inflasi inti triwulan IV-2018 tercatat stabil sebesar 3,07% (yoy). Stabilitas inflasi di 2018 terutama disebabkan karena hampir tidaknya ada kenaikan tarif harga yang ditetapkan pemerintah dan stabilnya harga pangan sepanjang tahun. Harga barang yang diatur pemerintah naik 3,36% (yoy), jauh lebih rendah daripada triwulan IV-2017 sebesar 8,7% (yoy). Harga pangan yang bergejolak di saat bersamaan hanya naik 3,39% (yoy).

Grafik I - 12 — Tingkat Inflasi Indonesia



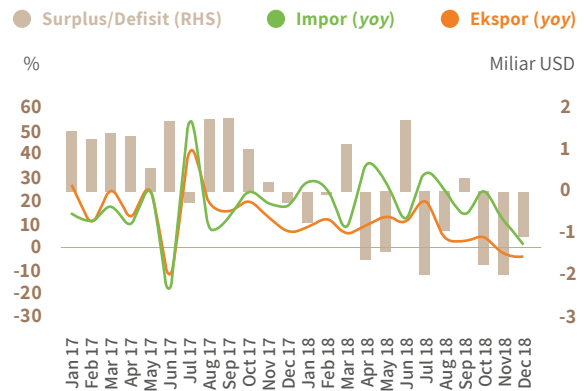
Sumber : BPS

D. Kinerja Eksternal

Rilis data terkini menunjukkan defisit neraca transaksi berjalan kembali melebar. Peningkatan defisit tersebut terutama didorong oleh turunnya kinerja neraca perdagangan barang dan naiknya defisit neraca jasa.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia triwulan IV-2018 mengalami defisit sebesar 4,87 miliar USD. Impor total tumbuh melambat ke level 1,45% (yoy), namun demikian turunnya impor ini diikuti oleh ekspor yang berkontraksi di level -4,15% (yoy). Secara total, Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 8,57 miliar USD sepanjang 2018. Neraca migas menjadi penyumbang utama defisit sebesar 12,4 miliar USD, sedangkan neraca non migas mencatat surplus sebesar 3,84 miliar USD.

Grafik I - 13 — Neraca Perdagangan Indonesia

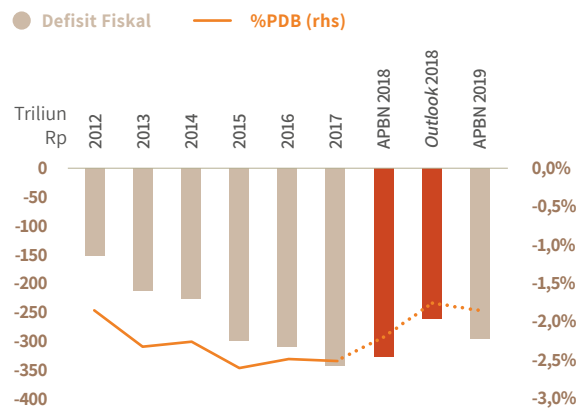


Sumber : BPS

E. Fiskal

Performa fiskal 2018 merupakan yang terbaik dalam 6 tahun terakhir. Realisasi defisit anggaran hingga akhir 2018 tercatat sebesar Rp259,9 triliun atau -1,76% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata defisit fiskal sepanjang 6 tahun terakhir sebesar -2,4%. Neraca keseimbangan primer 2018 tercatat hanya defisit Rp1,8 triliun (-0,01% terhadap PDB) yang mengindikasikan bahwa pembiayaan yang digunakan untuk membayar utang pemerintah semakin berkurang. Tren perbaikan kondisi fiskal ini diharapkan berlanjut di 2019 sehingga dapat menurunkan defisit transaksi berjalan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Grafik I - 14 — Defisit Fiskal Indonesia



Sumber : Kementerian Keuangan

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2018 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,89%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai

dalam menyerap risiko didukung oleh meningkatnya laba dan perbaikan kualitas kredit perbankan. Fungsi intermediasi perbankan juga relatif cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 3,41% (*qtq*) dan DPK sebesar 2,70% (*qtq*).

Tabel I - 5 ———— Kondisi Bank Umum

Indikator	2016	2017	2018		<i>qtq</i>		<i>yoy</i>	
	Des	Des	Sep	Des	Des '17	Sep '18	Des '17	Des '18
Total Aset (Rp Milyar)	6.729.799	7.387.634	7.644.190	8.068.346	-0,08%	+5,55%	+9,77%	+9,21%
Kredit (Rp Milyar)	4.377.195	4.737.944	5.120.099	5.294.882	+2,93%	+3,41%	+8,24%	+11,75%
DPK (Rp Milyar)	4.836.758	5.289.377	5.482.493	5.630.448	+1,55%	+2,70%	+9,36%	+6,45%
- Giro (Rp Milyar)	1.124.235	1.233.480	1.314.411	1.315.034	+0,22%	+0,05%	+9,72%	+6,61%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.551.809	1.701.224	1.724.208	1.825.259	+0,40%	+5,86%	+9,63%	+7,29%
- Deposito (Rp Milyar)	2.160.714	2.354.673	2.443.874	2.490.155	+3,12%	+1,89%	+8,98%	+5,75%
CAR (%)	22,71	23,18	22,85	22,89	88	4	47	(29)
ROA (%)	2,17	2,38	2,46	2,50	8	4	21	12
NIM (%)	5,47	5,15	5,01	5,00	3	(1)	(32)	(15)
BOPO (%)	82,85	79,28	79,50	78,33	(36)	(117)	(357)	(95)
NPL Gross (%)	2,93	2,59	2,66	2,37	(2)	(29)	(34)	(23)
NPL Net (%)	1,24	1,17	1,22	1,04	(1)	(18)	(7)	(13)
LDR (%)	90,50	89,56	93,39	94,04	126	65	(94)	448

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Desember 2018

1.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan IV-2018, sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi ketahanan Bank Umum masih solid, tercermin dari CAR sebesar 23,50%. Fungsi intermediasi BUK juga cukup baik tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 11,97% (*yoy*) di tengah perlambatan pertumbuhan DPK sebesar

6,37% (*yoy*). Dengan pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK, LDR naik menjadi 94,78%. Selain itu, risiko kredit BUK secara gradual membaik, terlihat dari turunnya NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 2,33% dan 1,00%.

Tabel I - 6 ———— Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			<i>qtq</i>		<i>yoy</i>	
	Des '17	Sep '17	Des '18	Des '18	Sep '18	Des '17	Des '18
Total Aset (Rp Milyar)	7.099.564	7.462.753	7.751.655	+1,45%	+3,87%	+9,64%	+9,18%
Kredit (Rp Milyar)	4.548.155	2,0	5.092.584	+2,87%	+3,47%	+8,30%	+11,97%
DPK (Rp Milyar)	5.050.984	4,2	5.372.841	+1,42%	+2,71%	+9,08%	+6,37%
- Giro (Rp Milyar)	1.207.069	2,3	1.287.480	+0,19%	+0,31%	+9,28%	+6,66%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.626.595	5,5	1.737.216	+0,11%	+5,71%	+9,38%	+6,80%
- Deposito (Rp Milyar)	2.217.321	-2,9	2.348.146	+3,09%	+1,91%	+8,76%	+5,90%
CAR (%)	23,18	22,91	23,50	89	60	25	32
ROA (%)	2,45	2,50	2,55	8	5	23	10
NIM (%)	5,32	5,14	5,14	3	(0)	(32)	(18)
BOPO (%)	78,64	79,13	77,86	(33)	(127)	(358)	(78)
NPL Gross (%)	2,50	2,61	2,33	(2)	(28)	(36)	(17)
NPL Net (%)	1,11	1,17	1,00	(2)	(17)	(9)	(11)
LDR (%)	90,04	94,08	94,78	132	70	(65)	474

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Desember 2018

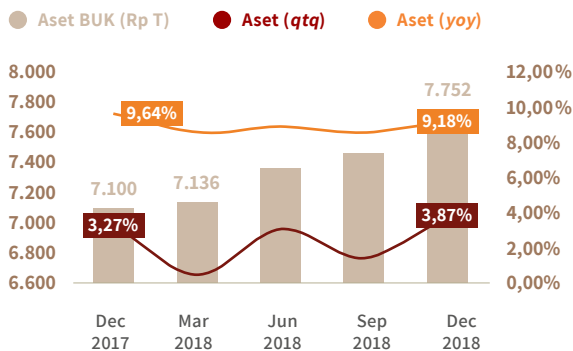
A. Aset

Total aset BUK pada triwulan IV-2018 tumbuh 9,18% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,64% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan modal BUK. Dilihat dari kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset utamanya terjadi pada kelompok BPD dan BUSN Non Devisa. Perlambatan pertumbuhan pada kedua kelompok Bank yang banyak berisi bank BUKU 2 dan BUKU 1 ini salah satunya dipicu oleh semakin ketatnya persaingan perebutan DPK di tengah tren peningkatan suku bunga.

Namun demikian, secara triwulan pertumbuhan aset BUK meningkat sebesar 3,87% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 1,45% (qtq). Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan DPK dan modal yang mengalami peningkatan secara triwulanan.

Secara umum, aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari total aset 4 BUK terbesar yang mencapai 49,65% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar yang mencapai 79,93% dari aset perbankan.

Grafik I - 15 — Perkembangan Aset BUK



Sumber : SPI, Desember 2018

Tabel I - 7 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

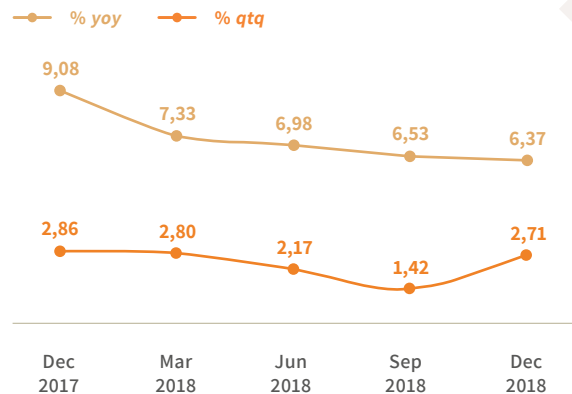
Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
Mar '18	47,80	79,23
Jun '18	48,77	79,37
Sep '18	48,82	79,47
Des '18	49,65	79,93

B. Dana Pihak Ketiga

DPK BUK tumbuh melambat 6,37% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 9,08% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua komponen DPK, utamanya pada deposito yang memiliki porsi terbesar (43,70%) yang tumbuh 5,90% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,76% (yoy). Secara umum, pengumpulan DPK masih terpusat di pulau Jawa, yaitu sebesar 78,13% dari total DPK BUK perbankan Indonesia, dan 50,97% di antaranya berpusat di DKI Jakarta.

Namun demikian, secara triwulanan DPK BUK tumbuh 2,71% (qtq), meningkat dibandingkan posisi September 2018 yang tumbuh 1,42% (qtq). Pertumbuhan DPK triwulanan didorong oleh tabungan yang tumbuh 5,71% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,11% (qtq).

Grafik I - 16 — Tren Pertumbuhan DPK



Sumber : SPI, Desember 2018

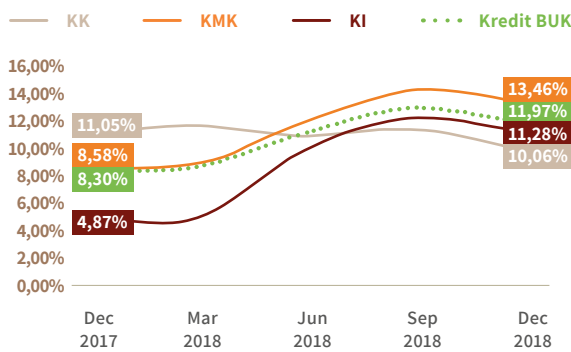
C. Kredit

Pada triwulan IV-2018, kredit BUK tumbuh 11,97% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,30% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) tumbuh masing-masing 13,46% (yoy) dan 11,28% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 8,58% (yoy) dan 4,87% (yoy). Peningkatan pada kredit produktif tersebut menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Kredit Konsumsi (KK) tercatat sedikit melambat yaitu tumbuh 10,06% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,05% (yoy). Perlambatan KK didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit kendaraan bermotor dan kredit KPR/KPA, yang mengindikasikan masyarakat cenderung menahan pembelian kendaraan bermotor dan tempat tinggal.

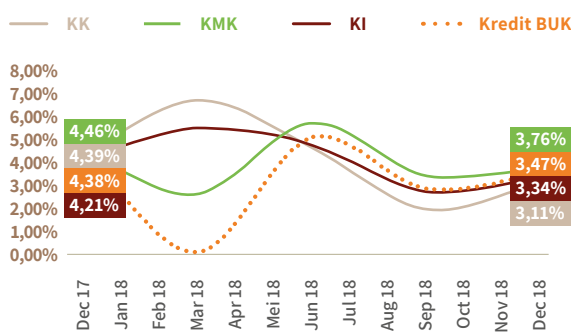
Secara triwulanan kredit tumbuh lebih tinggi yaitu 3,47% (*qta*) pada Desember 2018 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,87% (*qta*). Peningkatan penyaluran kredit terjadi pada semua jenis penggunaan, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif.

Grafik I - 17 — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)



Sumber : SPI, Desember 2018

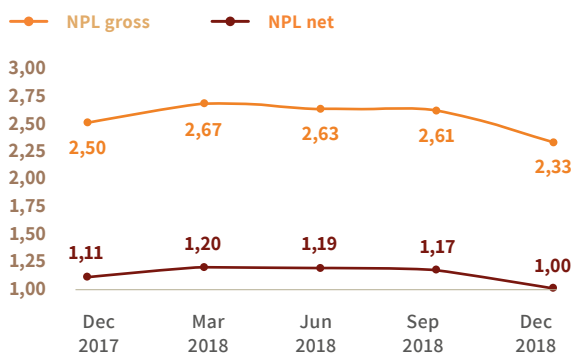
Grafik I - 18 — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (*qta*)



Sumber : SPI, Desember 2018

Di tengah pertumbuhan kredit, kualitas kredit berlanjut menunjukkan tren perbaikan. *NPL gross* BUK turun 17 *bps* (*yoy*) menjadi 2,33% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,50%. Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI mengalami penurunan *NPL* terbesar masing-masing turun 29 *bps* dan 13 *bps* menjadi 2,80% dan 2,31%. Sementara itu, *NPL* KK masih relatif rendah dan tercatat menurun sebesar 3 *bps* menjadi 1,53%.

Grafik I - 19 — Tren *NPL* (%)

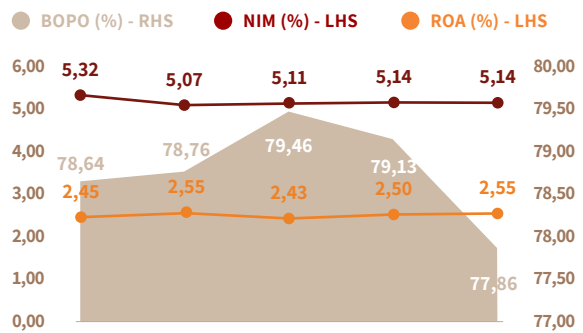


Sumber : SPI, Desember 2018

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan mengalami peningkatan terlihat dari naiknya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,55%. Kenaikan ROA didukung oleh tumbuhnya laba sebesar 13,15% (*yoy*). Selain itu, rasio BOPO juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 78,64% menjadi 77,86%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pendapatan utamanya dari pendapatan bunga dan net keuntungan transaksi *spot* dan *derivative* dari fluktuasi nilai tukar. Seiring dengan kenaikan suku bunga acuan, suku bunga DPK menyesuaikan lebih cepat dibanding suku bunga kredit sehingga membuat NIM menyempit menjadi 5,14%.

Grafik I - 20 — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber : SPI, Desember 2018

E. Permodalan

Pada triwulan IV-2018 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 23,50%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23,18%. Peningkatan CAR dipengaruhi oleh tumbuhnya modal seiring dengan peningkatan laba, serta melambatnya ATMR. Perlambatan ATMR terjadi pada semua jenis risiko utamanya pada ATMR pasar seiring dengan mulai terkendalinya nilai tukar pada akhir tahun.

1.2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Industri BPR menunjukkan kondisi yang baik dengan pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun masih dibayangi DPK yang tumbuh

melambat. Ketahanan BPR didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, dengan risiko kredit yang tercatat menurun.

Tabel I - 8 ——— Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18	Des '17	Sep '18	Des '17	Des '18
Total Aset (Rp Milyar)	125.945	131.508	135.693	+2,74%	+3,18%	+10,96%	+9,18%
Kredit (Rp Milyar)	89.482	95.800	98.220	+1,61%	+2,53%	+9,55%	+11,97%
DPK (Rp Milyar)	84.861	88.744	91.956	+2,83%	+3,62%	+12,06%	+6,37%
- Tabungan (Rp Milyar)	26.723	27.935	29.491	+4,68%	+5,57%	+12,53%	+6,80%
- Deposito (Rp Milyar)	58.137	60.810	62.465	+2,01%	+2,72%	+11,85%	+5,90%
CAR (%)	22,95	22,75	23,35	3	60	18	40
ROA (%)	2,55	2,49	2,48	1	(1)	(4)	(7)
BOPO (%)	80,50	81,24	80,74	(50)	(50)	(69)	24
NPL Gross (%)	6,15	7,16	6,37	1	(79)	32	22
NPL Net (%)	4,52	5,38	4,74	(3)	(63)	32	22
LDR (%)	75,36	76,94	76,54	(66)	(40)	(88)	118
CR (%)	19,86	16,17	18,84	23	266	85	(103)

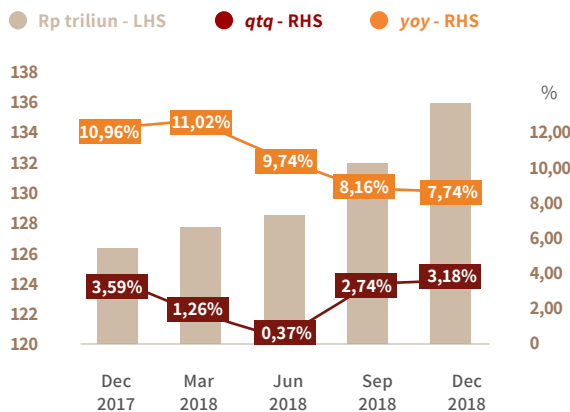
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2018

a. Aset

Aset BPR pada Desember 2018 tumbuh 7,74% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,96% (yoy). Melambatnya pertumbuhan aset salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya DPK BPR.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (57,02%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 23,04%. Dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Maluku Utara tumbuh tertinggi sebesar 60,22% (yoy), meskipun memiliki porsi yang rendah yaitu 0,12% dari total aset BPR. Sementara peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 10,38% (yoy) dan Bali yang tumbuh 10,61% (yoy).

Grafik I - 21 ——— Tren Aset BPR

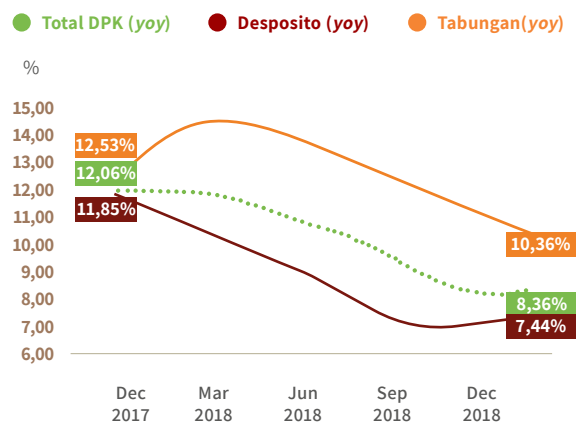


Sumber : SPI BPR, Desember 2018

b. DPK

DPK BPR pada Desember 2018 tumbuh 8,36% (yoy) menjadi Rp91,96 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2017 sebesar 12,06% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen, baik pada deposito dan tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 10,36% (yoy) (Des'17=12,53%, yoy) dan 7,44% (yoy) (Des'17=11,85%, yoy). Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK tertinggi dengan porsi 67,93%, diikuti tabungan sebesar 32,07%.

Grafik I - 22 ——— Tren Aset DPK (yoy)



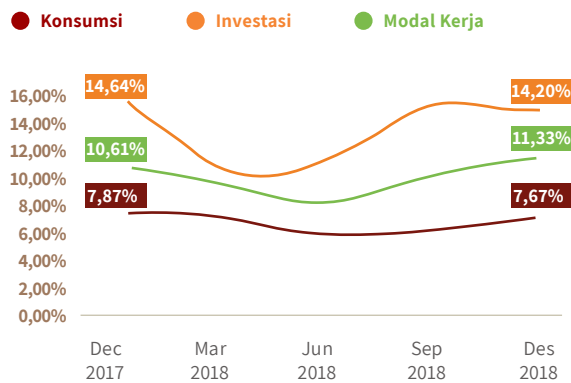
Sumber : SPI BPR, Desember 2018

c. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada Desember 2018 tumbuh 9,77% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,55% (yoy). Penyaluran kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit produktif, yaitu sebesar 52,60%. Sedangkan porsi kredit untuk tujuan konsumsi tercatat sebesar 47,40%.

Pertumbuhan KMK mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,33% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Utamanya didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini sesuai dengan siklus tahunan penyaluran kredit BPR, di mana akhir dan awal tahun KMK meningkat yang digunakan untuk modal usaha. Sementara itu, pertumbuhan KI dan KK mengalami perlambatan pertumbuhan, masing-masing menjadi sebesar 14,20% (yoy) dan 7,67% (yoy).

Grafik I - 23 Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

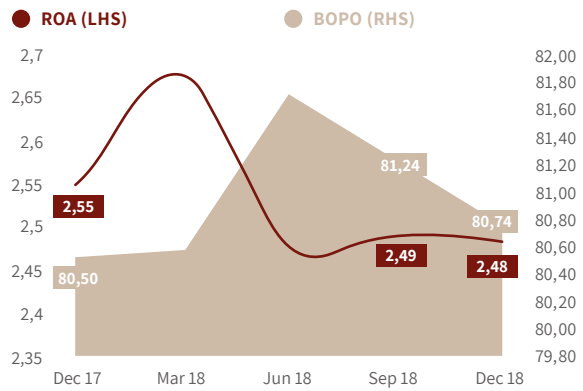


Sumber : SPI BPR, Desember 2018

d. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Desember 2018 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin dari ROA sebesar 2,48% dan laba yang melambat sebesar 5,03%. Efisiensi BPR juga mengalami penurunan tercermin dari peningkatan rasio BOPO sebesar 7 bps menjadi 80,74%.

Grafik I - 24 Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber : SPI BPR, Desember 2018

e. Permodalan

Permodalan BPR masih terjaga dengan CAR sebesar 23,35%, meningkat 40 bps (yoy) dibandingkan Desember 2017 sebesar 22,95%. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan IV-2018, kredit UMKM tumbuh 9,85% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,08% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh melambatnya penyaluran kredit UMKM pada beberapa sektor terutama pada industri pengolahan yang hanya tumbuh 6,28% (yoy). Namun demikian, pada periode laporan pertumbuhan masih cukup baik, utamanya ditopang oleh kredit UMKM ke sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,89% (yoy) lebih baik dari tahun sebelumnya.

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 4,81% (qtq) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,24% (qtq). Peningkatan tersebut ditopang oleh naiknya kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi terbesar (51,47%) pada triwulan IV-2018 yang tumbuh 2,50% seiring dengan pola musiman perayaan natal dan tahun baru.

Tabel I - 9 ——— Konsentrasi Penyaluran UMKM

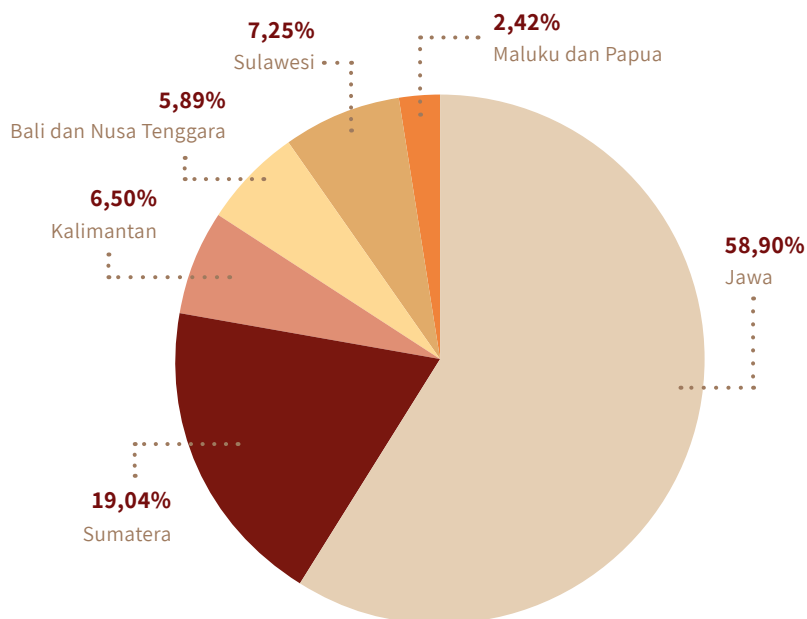
Sektor Ekonomi	Nominal (Rp miliar)			Porsi		qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	462.729	487.080	499.248	52,41%	51,47%	1,36%	2,50%	6,97%	7,89%
NPL	17.498	18.960	17.170	3,78%	3,44%	-4,70%	-9,44%	5,70%	-1,87%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	93.175	94.648	99.028	10,55%	10,21%	1,52%	4,63%	10,66%	6,28%
NPL	3.122	3.640	3.292	3,35%	3,32%	-4,49%	-9,56%	-1,74%	5,45%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan									
Baki Debet	78.731	83.881	89.560	8,92%	9,23%	0,53%	6,77%	17,48%	13,75%
NPL	2.424	2.229	2.073	3,08%	2,31%	-11,51%	-7,00%	-6,31%	-14,48%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.577	2.891	4.307	0,41%	0,44%	-17,33%	48,98%	43,00%	20,41%
NPL	168	123	135	4,70%	3,13%	-82,38%	9,76%	134,79%	-19,64%
Lainnya									
Baki Debet	244.770	256.951	277.829	27,72%	28,64%	1,41%	8,13%	13,40%	13,51%
NPL	11.966	10.722	9.751	4,89%	3,51%	-20,34%	-9,06%	28,07%	-18,51%
Baki Debet UMKM	882.982	925.451	969.972			1,24%	4,81%	10,08%	9,85%
NPL UMKM	35.178	35.674	32.421	3,98%	3,34%	-11,66%	-9,12%	10,85%	-7,84%

Keterangan : Shaded area merupakan rasio NPL. Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2018

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,90%, terutama terpusat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dilihat dari pertumbuhannya, kredit UMKM di wilayah Sulawesi Barat tumbuh tertinggi yaitu

sebesar 22,55% (yoy), diikuti wilayah Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan 19,39% (yoy). Tumbuhnya kredit UMKM di kedua wilayah tersebut dapat menunjukkan adanya perluasan akses keuangan kepada masyarakat di wilayah bagian timur Indonesia.

Grafik I - 25 ——— Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2018

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,90%) dan BUSN (34,89%). Dilihat dari nominalnya, peningkatan kredit tertinggi terdapat pada kelompok BUMN sejalan dengan

skala usahanya yang besar dengan pertumbuhan sebesar 11,46% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok KCBA dan Campuran sebesar 31,70% (yoy).

Tabel I - 10 ——— Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
BUMN	495.186	532.987	551.935	56,90%	0,98%	3,56%	10,84%	11,46%
BUSN	310.222	313.857	338.455	34,89%	0,39%	7,84%	10,64%	9,10%
BPD	70.366	70.952	70.089	7,23%	7,22%	-1,22%	16,37%	-0,39%
KCBA dan Campuran	7.208	7.654	9.493	0,98%	2,35%	24,03%	-50,27%	31,70%
Total UMKM	882.982	925.451	969.972	3,34%	1,24%	4,81%	10,08%	9,85%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2018

1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Berdasarkan program prioritas Pemerintah, terdapat enam sektor ekonomi lapangan usaha yang menjadi fokus/prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap krusial bagi perekonomian Indonesia karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sektor-sektor ini juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya

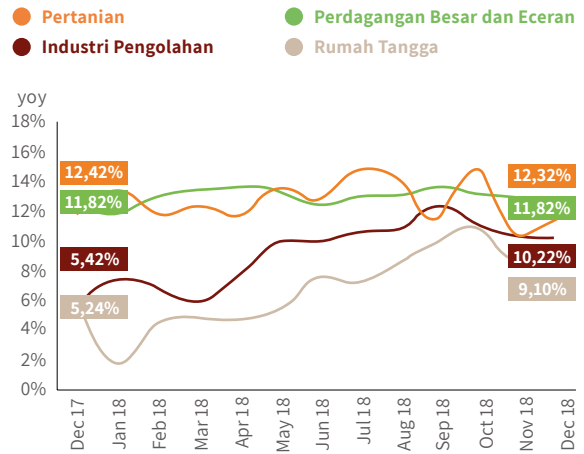
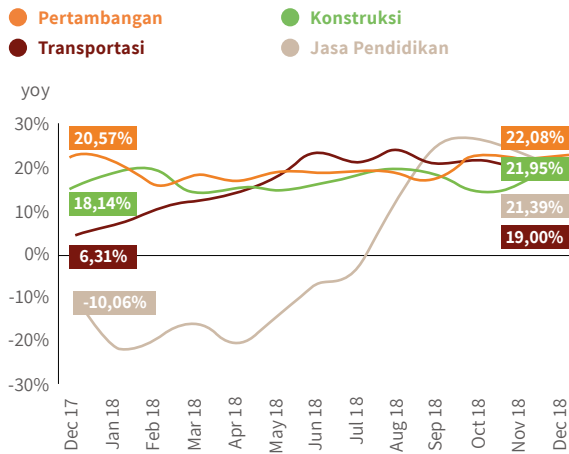
dan menjadi kontributor yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan masih merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 18,43% dan 16,98%, sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,38% terhadap total kredit.

Tabel I - 11 ——— Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp miliar)			qtq		yoy		Porsi
	Des '17	Sep '18	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18	
Lapangan Usaha								
1. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	317,38	338,57	354,88	1,21%	4,82%	11,82%	11,82%	6,70%
2. Perikanan	11,27	11,52	12,14	2,72%	5,36%	18,93%	7,66%	0,23%
3. Pertambangan dan Penggalian	113,62	137,18	137,91	20,85%	0,53%	-10,06%	21,38%	2,60%
4. Industri Pengolahan	824,11	868,92	899,09	2,97%	3,47%	5,42%	9,10%	16,98%
5. Listrik, Gas, dan Air	146,13	173,48	170,19	5,34%	-1,90%	7,88%	16,46%	3,21%
6. Konstruksi	258,93	290,87	316,10	4,92%	8,67%	20,57%	22,08%	5,97%
7. Perdagangan Besar dan Eceran	885,45	961,47	975,99	3,38%	1,51%	5,24%	10,23%	18,43%
8. Penyediaan Akomodasi dan PMM	97,89	97,80	99,75	0,03%	2,00%	4,81%	1,91%	1,88%
9. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	182,63	210,08	217,32	-1,93%	3,45%	6,31%	19,00%	4,10%
10. Perantara Keuangan	214,19	225,95	244,49	-2,09%	8,21%	10,44%	14,15%	4,62%
11. Real Estate	221,92	238,36	248,22	3,71%	4,13%	5,68%	11,85%	4,69%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2018

Grafik I - 26 — Penyebaran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber : SPI, Desember 2018

Penyaluran kredit bank umum triwulan IV-2018 tumbuh 11,75% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,24% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan pemulihan ekonomi global. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 22,08% (yoy), seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung bangunan sipil yang tumbuh sebesar 22,55% (yoy), dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol.

Pada posisi kedua, sektor jasa pendidikan tumbuh tinggi 21,95% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,23%). Sebagian besar kredit pada sektor ini disalurkan oleh kelompok Bank BUSN Devisa (56,25%). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh tingginya kredit pada sub sektor jasa pendidikan tinggi.

Sektor pertambangan dan penggalian juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 21,38% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 51,60% (yoy).

Selanjutnya, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 20,37% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor jasa telekomunikasi yang tumbuh 44,60% (yoy). Pertumbuhan kredit pada subsektor jasa telekomunikasi ini cukup tinggi, seiring dengan berjalannya program Palapa Ring dari Pemerintah, yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati internet 4G dengan kecepatan 30 mbps.

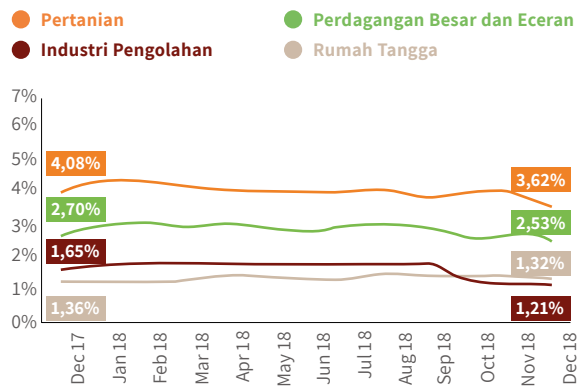
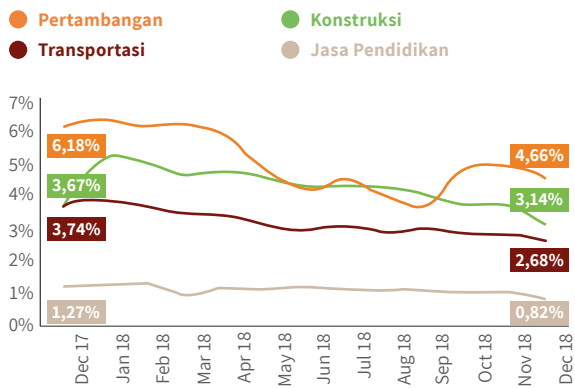
Sementara itu, berdasarkan porsi penyalurannya, porsi kredit terbesar (23,38%) disalurkan ke sektor rumah tangga yang tumbuh sebesar 12,32% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh 13,31% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,10% (yoy).

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor andalan Bank dalam menyalurkan kreditnya (18,43%) juga tercatat tumbuh signifikan yaitu sebesar 10,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,24% (yoy). Hal ini didorong oleh naiknya kredit subsektor perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) yang tumbuh sebesar 8,04% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,45% (yoy), antara lain pada perdagangan eceran komoditi makanan, minuman atau tembakau.

Sektor industri pengolahan/manufaktur juga menyerap kredit cukup besar, dengan porsi kredit sebesar 16,98%. Kredit ke sektor ini tumbuh 9,10% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,42% (yoy). Porsi penyaluran kredit terbesar pada sektor ini adalah industri makanan dan minuman yang masih tetap tumbuh sebesar 3,87% (yoy) meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (10,41%, yoy). Namun demikian, subsektor lainnya banyak yang mengalami peningkatan pertumbuhan, diantaranya industri makanan lainnya seperti roti, gula, coklat, kembang gula dan industri makaroni, mie, dan sejenisnya.

Sektor pertanian juga masih tumbuh 11,82% (yoy), stabil dari tahun sebelumnya yang juga tumbuh 11,82% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini utamanya didorong oleh tingginya penyaluran kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 11,12% (yoy).

Grafik I - 27 — NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber : SPI, Desember 2018

Kualitas kredit perbankan pada triwulan IV-2018 membaik yang tercermin dari turunnya NPL *gross* menjadi 2,33%, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,50%. Hampir semua sektor ekonomi mengalami perbaikan kualitas kredit, namun perlu diperhatikan terkait NPL pertambangan, yang meskipun masih dalam

tren penurunan, namun kembali meningkat dalam 3 bulan terakhir. Peningkatan tren NPL pertambangan pada triwulan IV- 2018 ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas yang didorong oleh kelebihan pasokan komoditas di pasar seiring dengan pembatasan impor yang dilakukan oleh Tiongkok.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Perdagangan efek selama triwulan IV-2018 sangat dipengaruhi oleh sentimen global dan domestik. Beberapa sentimen yang mempengaruhi diantaranya ketidakpastian perang dagang antara AS-Tiongkok, kebijakan kenaikan suku bunga The Fed untuk keempat kalinya selama tahun ini sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 2,25%-2,50% dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi global di mana perekonomian AS cenderung melaju tidak bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, Jepang dan beberapa negara kawasan *Emerging Market*. Ketidakpastian perekonomian global di antara sebagaimana disebutkan sebelumnya, menjadikan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dalam *outlook* ekonomi terbarunya yang dirilis awal Oktober 2018 kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2018-2019 masing-masing menjadi 3,7% dan 3,7% dari sebelumnya pada April 2018 sebesar 3,9% dan 3,9%.

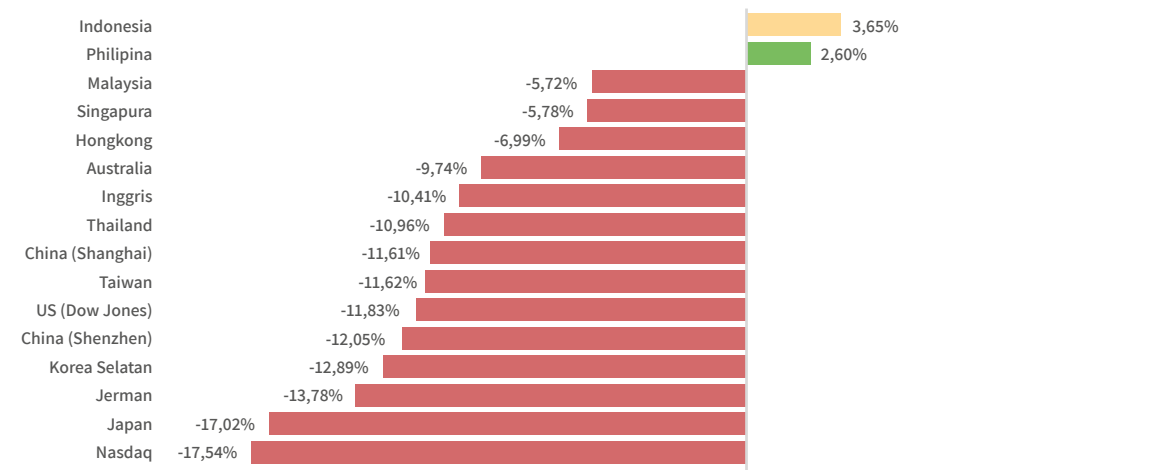
Berbeda dengan kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian, kondisi perekonomian domestik

cenderung stabil dan terjaga, di tengah kondisi neraca pembayaran yang defisit, terdapat apresiasi terhadap kinerja perekonomian dalam negeri di mana nilai inflasi yang terjaga dan pendapatan negara tahun 2018 mencapai Rp 1.942,3 triliun pada akhir 2018 atau sebesar 102,5% melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Hal ini juga didukung oleh kinerja emiten yang *listing* di Bursa yaitu dari 593 Emiten, 75,21% membukukan laba, dan 57% Emiten membukukan peningkatan kinerja.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan IV-2018 berada pada posisi 6,194.50 atau mengalami peningkatan sebesar 3,65% jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Perdagangan saham pada triwulan IV-2018, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan *capital inflow* (*net buy*) di pasar saham yaitu sebesar Rp 426,51 miliar.

Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan penguatan sebesar Rp387,- atau 2,59% menjadi Rp 14.542,-/ USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 28 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)



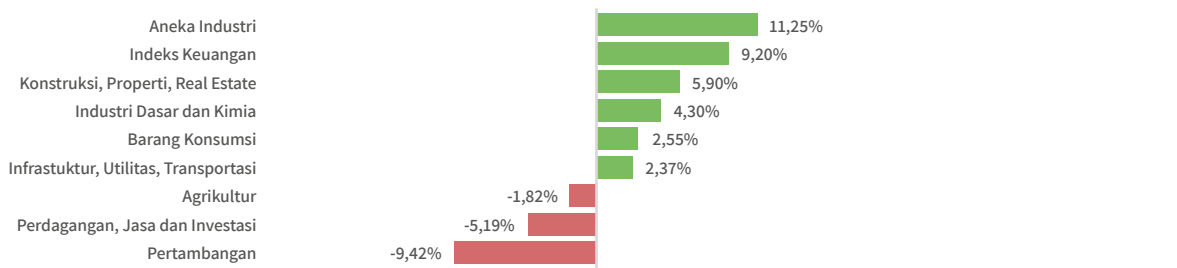
Sumber : Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 4,25% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp 7.023,50 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp725,98 miliar (9,46%) menjadi sebesar Rp8.402,19 miliar untuk nilai, peningkatan sebesar 1.737,06 juta (18,83%) menjadi sebesar Rp10,96 miliar untuk volume, dan peningkatan sebesar 16 ribu kali (4,43%) menjadi 386 ribu kali transaksi. Pada triwulan ini

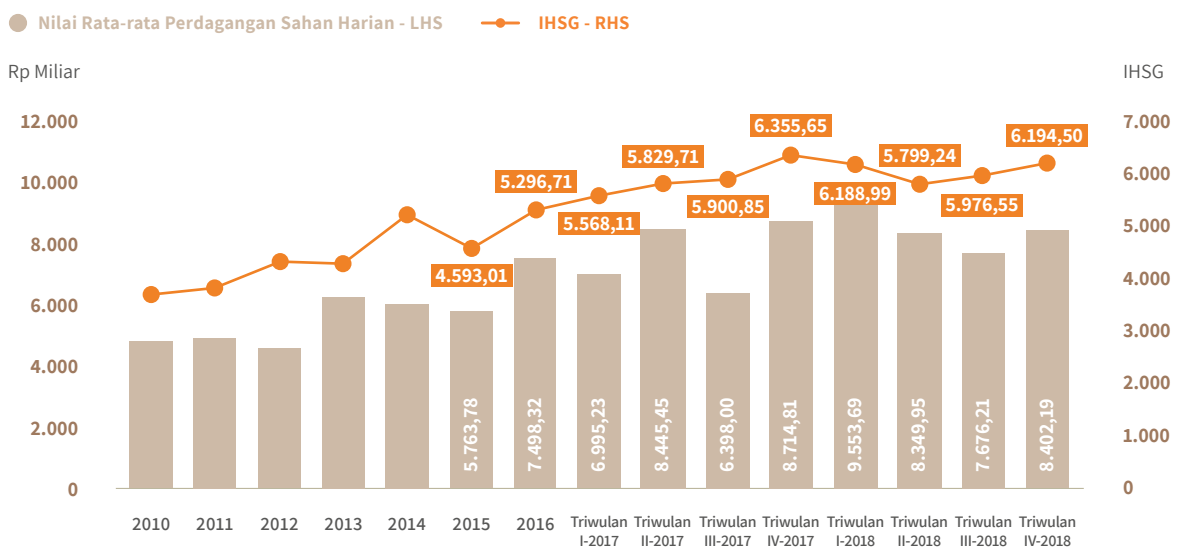
kinerja IHSG menempati urutan pertama dan mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,65% (qoq).

Sebagian besar kinerja indeks sektoral pada triwulan IV-2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan terbesar terdapat pada indeks sektor aneka industri sebesar 11,25%. Sedangkan sektor *mining* mencatatkan penurunan kinerja indeks sebesar -9,42% (qoq).

Grafik I - 29 — Perkembangan Indeks Industri (qta)



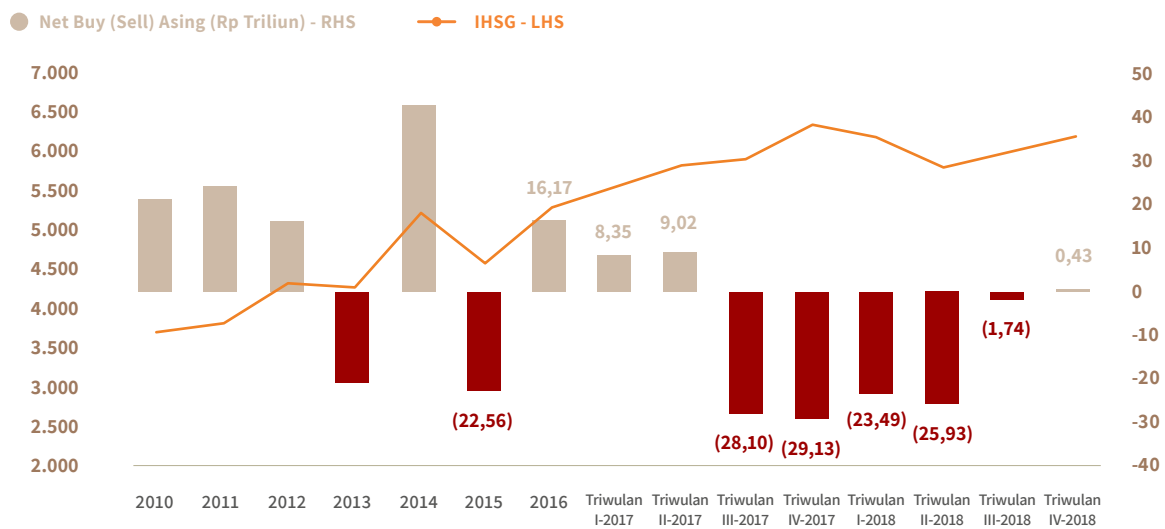
Grafik I - 30 — Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Tabel I - 12 ——— Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-Rata Harian)	2017				2018			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar)	6.995,23	8.445,45	6.397,99	8.714,81	9.553,69	8.349,94	7.676,20	8.402,19
Investor Asing (Rp miliar)								
Beli	2.411,95	3.365,73	2.167,99	2.960,76	3.516,68	3.120,26	2.791,47	2.731,24
Jual	2.227,32	3.195,46	2.621,32	3.438,38	3.895,62	3.600,51	2.819,62	2.724,36
Investor Domestik (Rp miliar)								
Beli	4.583,28	5.079,71	4.230,00	5.754,05	6.037,01	5.224,68	4.884,73	5.670,95
Jual	4.717,91	5.249,99	3.776,68	5.276,43	5.658,07	4.749,44	4.856,59	5.677,83
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	336.568	301.152	291.847	318.829	384.845	409.065	369.900	386.281

Grafik I - 31 ——— Perkembangan IHSG dan Net Asing



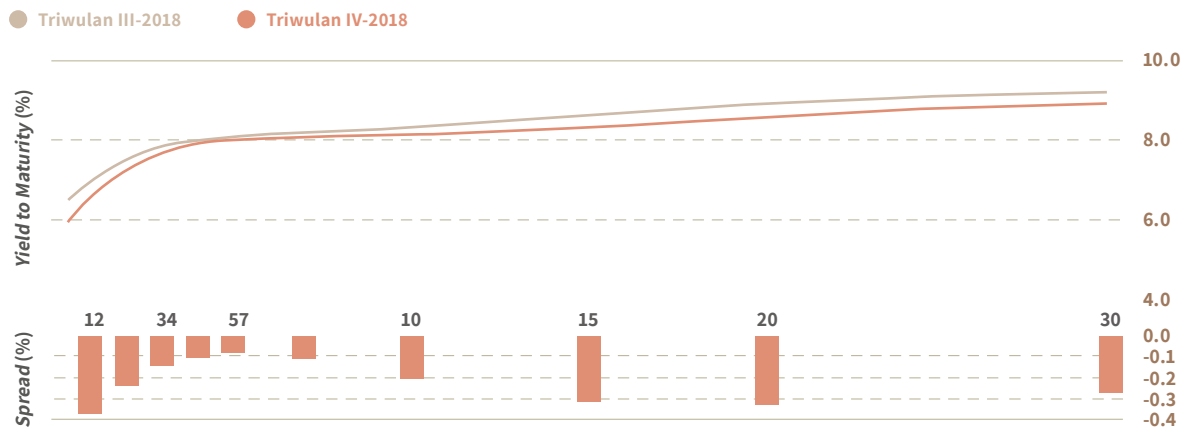
Tabel I - 13 ——— Perkembangan IHSG

Periode	IHSG	Net Sell/Buy (Rp Triliun)
2015	4.593,01	(22.589,03)
2016	5.296,71	16.169,49
2017	Triwulan I	5.568,11
	Triwulan II	5.829,71
	Triwulan III	5.900,85
	Triwulan IV	6.355,65
Total		(39.869,15)
2018	Triwulan I	6.188,98
	Triwulan II	5.799,24
	Triwulan III	5.976,55
	Triwulan IV	6.194,50
Total		(50.745,84)

Selama triwulan IV-2018 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp426,51 miliar (*qtq*)

dan secara tahunan membukukan *net sell* sebesar Rp 50,745.84 (*ytd*).

Grafik I - 32 — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan IV-2018 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan *trend* penurunan dengan

rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -25,5 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -21,2 bps, -9,6 bps, dan -28,4 bps.

Tabel I - 14 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan IV-2017			Triwulan III-2018			Triwulan IV-2018		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi :									
Korporasi	108,79	109,33	9.518	103,87	103,30	8.371	72,52	72,13	7.337
SBN	896,30	937,71	49,654	1.084,00	1.036,43	51.470	1.260,53	1.143,54	48.348
Total	1.005,09	1.047,03	59.172	1.187,87	1.139,73	59.841	1.333,05	1.215,66	48.355
Repo	60,57	59,90	350	116,48	108,92	335	391,18	304,14	405

Sumber : Data Pelaporan di PLTE

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Negara pada triwulan IV-2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pada triwulan III-2018. Volume perdagangan Obligasi Negara pada triwulan IV-2018 mengalami kenaikan sebesar 16,28% menjadi Rp1.260,53 triliun. Nilai perdagangan juga mengalami kenaikan sebesar 10,33% menjadi Rp1.143,54 triliun. Namun frekuensi transaksi mengalami penurunan -6,07% menjadi 48.348 kali.

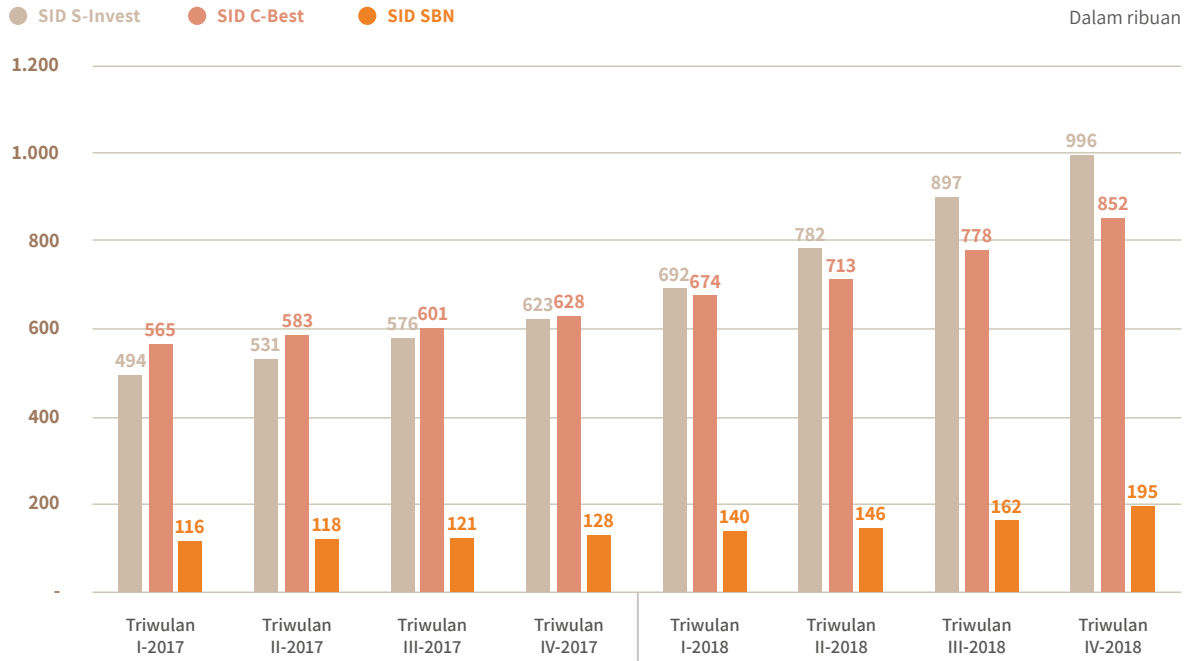
Adapun aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan IV-2018 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan III-2018. Volume perdagangan turun sebesar -30,18% menjadi Rp72,52 triliun. Nilai perdagangan turun -30,18% menjadi Rp72,13 triliun dan frekuensi perdagangan turun -12,35% menjadi 7.337 kali.

Perkembangan Jumlah SID

Pada triwulan IV-2018 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST per 28 Desember 2018 mencapai 852.240 atau mengalami peningkatan sebanyak 73.956 (9,50%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 778.284.

Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 995.510 atau mengalami peningkatan 98.012 (10,92%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 897.498. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 195.277 atau mengalami peningkatan sebanyak 32.944 (20,29%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 195.277.

Grafik I - 33 — Perkembangan Jumlah SID



Tabel I - 15 — Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	3
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	83
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		124

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek atas permohonan sendiri yaitu PT ING Sekuritas Indonesia. Selain itu, terdapat 1 penerbitan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yaitu PT Surya

Fajar Sekuritas, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 124 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 13 lokasi selain Kantor Pusat dan 4 penutupan lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan IV-2018.

Tabel I - 16 — Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek Selain Kantor Pusat

Periode	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	686	695

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorang sebanyak 131 izin dengan rincian 113 izin Wakil Perantara Pedagang

Efek (WPPE) dan sebanyak 18 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.888 WPPE dan 2.144 WPEE.

Tabel I - 17 — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan III-2018		Triwulan IV-2018		Izin Total s/d Triwulan III	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	107	89	113	113	388	9.888
WPEE	46	37	21	18	81	2.144
Total	153	126	134	131	469	12.032

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 2.001 perpanjangan izin dengan rincian 1.670 perpanjangan izin WPPE dan 331 perpanjangan izin WPEE sehingga secara

total OJK telah menerbitkan 2.342 perpanjangan izin dengan rincian 1.912 perpanjangan izin WPPE dan 430 perpanjangan izin WPEE.

Tabel I - 18 — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan III-2018		Triwulan IV-2018		Izin Total s/d Triwulan IV	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	443	137	3.042	1.670	1.912	1.912
WPEE	171	90	407	331	430	430
Total	614	227	3.449	2.001	2.342	2.342

Pada periode laporan, OJK menerima 238 dokumen perizinan WPPEP dan menerbitkan 215 izin WPPEP.

Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 1.082 dan WPPEPT sebanyak 81.

Tabel I - 19 — Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan III-2018		Triwulan IV-2018		Izin Total s/d Triwulan III	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPEP	87	88	238	215	543	1.082
WPPEPT	0	1	0	0	8	81
Total	87	89	238	215	551	1.163

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan IV-2018 mengalami peningkatan sebesar Rp10,30 triliun (2,08%) menjadi Rp505,39 triliun dibandingkan dengan triwulan III-2018 sebesar Rp495,09 triliun. NAB Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu Rp6,86 triliun (5,01%), diikuti oleh Reksa Dana Syariah sebesar Rp2,69 triliun (8,46%), Reksa

Dana Terproteksi sebesar Rp2,21 triliun (1,59%), ETF sebesar Rp0,94 triliun (8,85%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp0,76 triliun (3,21%), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,31 triliun (6,18%). Namun demikian, Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Pendapatan Tetap masing-masing mencatatkan penurunan NAB sebesar Rp2,43 triliun (-5,37%) dan Rp1,06 triliun (-1,03%).

Tabel I - 20 ——— Perkembangan Pengelolaan Investasi

Dalam triliun rupiah

NAB Per Jenis Reksa Dana	2017		2018			
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
RD Pasar Uang	52,11	49,82	59,45	49,99	45,22	42,79
RD Pendapatan Tetap	91,43	107,55	104,06	101,89	102,66	101,60
RD Saham	115,23	120,85	138,91	137,44	136,94	143,80
RD Campuran	24,66	26,94	25,35	23,93	23,64	24,40
RD Terproteksi	99,27	107,55	122,07	126,61	139,20	141,41
RD Indeks	1,95	3,99	4,99	4,71	5,02	5,33
ETF	7,94	7,97	10,54	9,82	10,62	11,56
RD Syariah*	21,43	28,31	31,11	32,17	31,80	34,49
Total	414,03	457,51	496,50	486,56	495,09	505,39

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 1,62% menjadi Rp26,15 triliun pada triwulan IV-2018. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT

mengalami kenaikan sebesar 5,08% menjadi 62 RDPT dari sebelumnya 59 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan IV-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

Tabel I - 21 — Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Dalam triliun rupiah

Jenis Investasi	2017		2018			
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Reksa Dana						
Jumlah	1.667	1.777	1.849	1.921	2.035	2.098
Total NAB	414,03	457,51	496,50	486,56	495,09	505,39
RDPT						
Jumlah	73	54	55	62	59	62
Total NAB	19,59	18,30	18,57	23,39	26,58	26,15
EBA						
Jumlah	8	7	7	7	8	8
Nilai Sekuritisasi	7,32	6,98	6,59	6,32	7,49	7,21
EBA-SP						
Jumlah	4	4	5	5	5	5
Nilai Sekuritisasi	2,36	2,23	4,11	3,75	3,66	3,66
DIRE						
Jumlah	3	3	3	3	4	7
Total Nilai	0,59	0,59	0,59	0,61	0,62	0,62
KPD						
Jumlah	385	395	423	440	478	494
Total Nilai	192,65	202,87	197,59	189,30	196,72	204,77
DINFRA						
Jumlah	-	-	-	-	2	4
Total Nilai	-	-	-	-	0,33	0,34

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah KIK-EBA tetap sebanyak delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,21 triliun.

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) pada triwulan IV-2018 bertambah sebanyak tiga KIK, sehingga jumlah KIK-DIRE menjadi tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,62 triliun.

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,66 triliun atau turun sebesar 2,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV-2018, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 3,35% menjadi 494 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp204,77 triliun atau meningkat sebesar 4,09% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Selama triwulan IV-2018 OJK menerbitkan dua izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA), sehingga jumlah KIK DINFRA menjadi empat KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,34 triliun.

OJK sampai dengan triwulan IV-2018 telah menerbitkan 516 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 22 ——— Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	27
Reksa Dana Campuran	26
Reksa Dana Pendapatan Tetap	30
Reksa Dana Pasar Uang	22
Reksa Dana Terproteksi	332
Reksa Dana Indeks	12
ETF - Saham	4
ETF - Indeks	6
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	9
Reksa Dana Syariah Campuran	3
Reksa Dana Syariah Saham	15
Reksa Dana Syariah Indeks	2
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	11
Reksa Dana Syariah Pasar Terproteksi	17
Total	516

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 195 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 180 Reksa Dana Konvensional dan 15 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 149 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 123 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 25 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Lima Reksa Dana Campuran terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena diperintahkan OJK;
- Delapan Reksa Dana Saham terdiri dari enam Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan dua Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- 12 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, satu Reksa Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan delapan Reksa Dana karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Lima Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari tiga Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut dan dua Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Indeks yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek luar negeri yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Berbasis Efek Sukuk yang dibubarkan karena karena kesepakatan MI dan BK;
- 11 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari 10 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana yang dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Syariah Campuran yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

Tabel I - 23 ——— Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	2017		2018			
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Wakil Manajer Investasi (WMI)	1.967	2.031	2.101	2.165	2.215	2.332
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	24.149	24.972	25.714	26.450	26.958	27.466
Penasehat Investasi (PI)	4	4	4	4	5	6
Institusi						
Manajer Investasi (MI)	87	90	90	90	90	92
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	35	37	37	37	38	40
Penasihat Investasi (PI)	3	4	4	5	5	5
MI sebagai PI	1	3	5	6	7	7
APERD sebagai PI	-	-	-	1	1	1

Selama triwulan IV-2018, OJK memberikan 2 Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan 2 izin Manajer Investasi (MI) sehingga jumlah APERD dan MI masing-masing meningkat sebesar 5,26% dan 2,22%. Selain itu OJK tidak mengeluarkan izin baru PI Institusi sehingga PI Institusi tetap berjumlah 5 PI.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WMI sebesar 5,28%, WAPERD sebesar 1,88%, dan PI Individu sebesar 20%

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan IV-2018, jumlah Penawaran Umum sebanyak 168, terdiri dari 58 Penawaran Umum Perdana Saham, 28 Penawaran Umum Terbatas, dan 82 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Tabel I - 24 ——— Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I-IV 2017		Triwulan I-IV 2018		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	38	9.599	58	16.456	53%	71%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	35	88.185	28	35.455	-20%	-60%
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	88	156.712	82	114.177	-7%	-27%
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	12	12.360	11	11.726	-8%	-5%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 1	26	48.120	30	28.949	15%	-40%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 2, 3 dst	50	96.232	41	73.502	-18%	-24%
Total Emisi	161	254.496	168	166.087	4%	-35%

Tabel I - 25 ——— Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
1.	Perbankan	2.089.020	10.669.806	26.665.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	818.845	787.176	51.014.100
3.	Sekuritas dan Investasi	40.000	1.737.536	300.000
4.	Perdagangan	3.216.226	806.694	7.318.000
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.437.207	7.092.738	11.505.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	4.059.280	560.002	1.200.000
7.	Properti dan Perhotelan	2.793.116	-	600.000
8.	Real Estate dan Konstruksi	436.500	555.298	8.651.500
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	696.667	-
10.	Barang Konsumsi	110.214	-	500.000
11.	Aneka Industri Lainnya	188.153	463.895	-
12.	Industri Dasar	106.272	-	2.500.000
13.	Industri Logam	-	495.000	-
14.	Industri Kimia	614.596	10.251.481	1.100.000
15.	Agrobisnis	386.463	-	1.000.000
16.	Pertambangan dan Kehutanan	160.000	1.338.595	1.823.000
Total		16.455.891	35.454.887	114.176.600

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Sampai triwulan IV-2018, terdapat 76 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak

13 Perusahaan melakukan penawaran umum pada triwulan IV-2018 dengan nilai emisi sebesar Rp2,341 triliun.

Tabel I - 26 ——— Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Yelooo Integra Datanet Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	48.750.000.000
2.	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	Aneka Industri Lainnya	50.400.000.000
3.	PT Shield On Service Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	41.250.000.000
4.	PT Kotasatu Properti Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	58.500.000.000
5.	PT Dewata Freightinternational Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	45.000.000.000
6.	PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	632.142.815.000
7.	PT Sentral Mitra Informatika Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	44.061.541.500
8.	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.	Properti dan Perhotelan	432.000.000.000
9.	PT Satria Mega Kencana Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	66.000.000.000
10.	PT Mega Perintis	Perdagangan	58.706.000.000
11.	PT Sentra Food Indonesia Tbk.	Barang Konsumsi	20.250.000.000
12.	PT Estika Tata Tiara Tbk.	Agrobisnis	128.133.250.000
13.	PT Pollux Investasi Internasional Tbk.	Properti dan Perhotelan	657.442.165.500
Total			2.341.887.725.000

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Sampai dengan triwulan IV-2018, terdapat 31 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan dua Emiten melaksanakan Penawaran Umum

Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) atau *right issue* pada triwulan IV-2018 dengan nilai emisi dari perusahaan tersebut sebesar Rp35,45triliun.

Tabel I - 27 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Smartfren Telecom Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	6.740.881.556.600
2.	PT Intikeramik Alamasri Tbk.	Aneka Industri Lainnya	463.894.786.440
Total			35.454.887.165.611

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Sampai dengan triwulan IV-2018 terdapat 11 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi, 30 Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap

I dan 41 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp114,18triliun.

Tabel I - 28 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Penawaran Umum Obligasi				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis Emisi	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Bank Cimb Niaga Tbk.	Perbankan	Obligasi Subordinasi III	150.000.000.000
2.	PT Kapuas Prima Coal Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	Obligasi I	73.000.000.000
Total				11.726.000.000.000

Tabel I - 29 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap I				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis Emisi	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT XL Axiata Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi Subordinasi III	1.000.000.000.000
			Sukuk	1.000.000.000.000
2.	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	Perbankan	Sukuk	1.000.000.000.000
3.	PT Summarecon Agung Tbk.	Properti dan Perhotelan	Obligasi	600.000.000.000
4.	PT Angkasa Pura II (Persero)	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi	750.000.000.000
5.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Industri Kimia	Obligasi	500.000.000.000
6.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	800.000.000.000
7.	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Perbankan	Obligasi	500.000.000.000
8.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perbankan	Obligasi	750.000.000.000
9.	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	1.000.000.000.000
10.	PT Bank UOB Indonesia	Perbankan	Obligasi	100.000.000.000
Total				28.948.500.000.000

Tabel I - 30 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

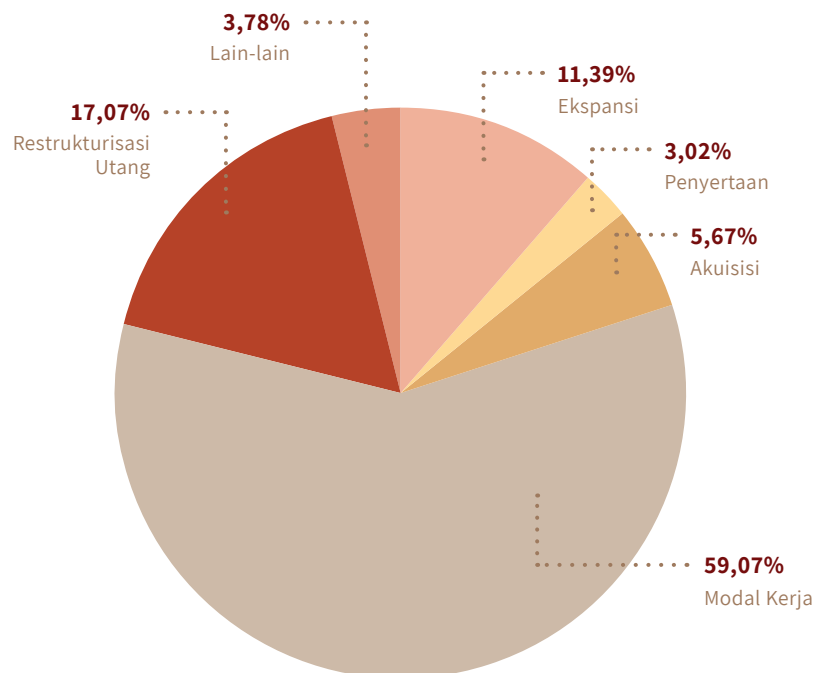
PUB Obligasi Tahap II dst				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB Tahap II dst	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT XL Axiata Tbk.	Perdagangan	PUB III Tahap II	832.000.000.000,00
			Sukuk Ijarah III Tahap II	224.000.000.000,00
2.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB III Tahap II	628.000.000.000,00
3.	PT Sarana Multigriya Finansial	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap VI	2.000.000.000.000,00
4.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap III	379.000.000.000,00
5.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB IV Tahap III	1.500.000.000.000,00
			Sukuk Mudharabah I Tahap II	1.000.000.000.000,00
6.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap III	1.500.000.000.000,00
Total				73.502.100.000.000,00

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan sampai dengan triwulan IV-2018 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 59,07% atau sekitar Rp97,36 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 17,07% atau sekitar Rp28,14 triliun untuk

restrukturisasi utang; 11,39% atau sekitar Rp18,77 triliun untuk ekspansi; 3,02% atau sekitar Rp4,98 triliun untuk penyertaan; 5,67% untuk akuisisi atau sekitar Rp9,34 triliun dan 3,78% atau sekitar Rp6,24 triliun untuk lainnya.

Grafik I - 34 — Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 31 — Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

Dalam jutaan rupiah

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1.	Perbankan	2.029.504	-	248.178	35.408.970	148.907	754.720
2.	Asuransi dan Pembiayaan	2.056.640	198.444	214.307	48.654.997	3.855.217	-
3.	Sekuritas dan Investasi	33.790	789.029	-	725.209	506.500	19
4.	Perdagangan	8.812.557	289.474	19.739	1.190.631	2.610.690	265.199
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.527.518	222.374	-	2.502.027	12.698.681	965.704
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	668.862	1.368.575	269.937	844.478	1.716.261	797.792
7.	Properti dan Perhotelan	359.095	969.531	715.690	149.601	838.447	48.657
8.	Real Estate dan Konstruksi	1.340.734	194.453	60.842	5.383.976	219.563	659.070
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	69.304	242.565	-	381.174	-
10.	Barang Konsumsi	40.000	17.526	-	536.806	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	79.651	28.000	98.100	404.002	27.812	-
12.	Industri Dasar	1.243.160	-	-	920.232	422.674	-
13.	Industri Logam	-	478.602	-	13.686	-	-
14.	Industri Kimia	319.023	183.129	7.470.299	358.968	802.136	2.690.761
15.	Agrobisnis	106.145	153.992	-	60.594	990.000	55.971
16.	Pertambangan dan Kehutanan	157.480	13.949	-	204.195	2.917.633	-
Total		18.774.159	4.976.384	9.339.656	97.358.371	28.135.695	6.237.892

*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

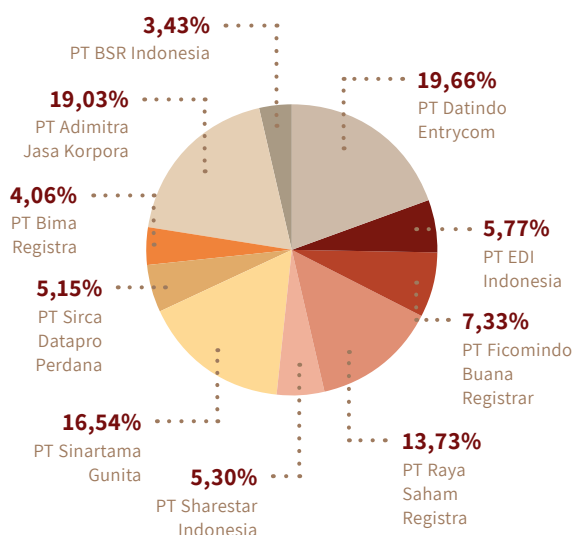
1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek

Tabel I - 32 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2018		Jenis
	Triwulan III	Triwulan IV	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	20	20	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemingkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

Grafik I - 35 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 19,66%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 19,03%, PT Sinartama Gunita sebanyak 16,54% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3,43%, PT Bima Registra sebanyak 4,06%, dan PT Sirca Datapro Perdana sebanyak 5,15%.

Pemingkat Efek

Sampai dengan triwulan IV-2018, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemingkat Efek sebanyak 174 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemingkat Efek adalah PT Pemingkat Efek Indonesia sebanyak 74 Perusahaan dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 100 Perusahaan:

Grafik I - 36 Market Share Company Rating



Dari 174 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemingkat Efek, sebanyak 157 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade*.

Tabel I - 33 Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*

Pemingkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
PT Pemingkat Efek Indonesia	63	62	10	12
PT Fitch Ratings Indonesia	97	95	3	5
Total	160	157	13	17

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode Triwulan IV-2018:

1. OJK telah menerbitkan 104 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan enam Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:

a.	Akuntan	91 STTD
b.	Konsultan Hukum	5 STTD
c.	Penilai	6 STTD
d.	Notaris	2 STTD
e.	ASPM	6 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan

2. OJK telah menetapkan 34 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:

a.	Akuntan	23 pembatalan STTD
b.	Konsultan Hukum	5 STTD
c.	Penilai	6 STTD
d.	Notaris	2 STTD

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 34 ——— Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Akuntan	585	653
Konsultan Hukum	737	739
Penilai	240	245
Notaris	1.295	1.290
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	86	92

Selama triwulan IV-2018 tidak tercatat profesi penunjang yang mengalami pencabutan izin PPPK, meninggal dunia maupun memasuki usia pensiun. Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 35 ——— Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)

No.	Judul Kegiatan	Profesi	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1.	<i>Year End Reminder</i> Audit Laporan Keuangan Emiten	Akuntan	35 orang
2.	Regulasi Terkini Terkait Aksi Korporasi serta Aspek Akuntansi dan Auditnya	Akuntan	12 orang
3.	<i>Update</i> POJK Nomor 53/POJK.04/2017 dan POJK Nomor 54/POJK.04/2017 serta Aspek Akuntansi dan Audit Emiten Skala Kecil dan Menengah (UKM)	Akuntan	47 orang
4.	Sosialisasi Standar Profesi Nomor 2 Tanggal 8 Agustus 2018	Konsultan Hukum	150 orang
5.	<i>Workshop</i> Penilaian Properti dan Bisnis pada Industri Pertambangan untuk kepentingan Pasar Modal	Penilai	43 orang
6.	Hal-hal yang Perlu diketahui Dalam Penilaian Merger dan Akuisisi	Penilai	20 Orang

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan IV-2018, kinerja Industri Keuangan

Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 1,83% menjadi Rp2.307,29 triliun didukung dengan kenaikan aset dari industri Asuransi Konvensional & BPJS dan Dana Pensiun.

Tabel I - 36 Total Aset IKNB

Dalam triliun rupiah

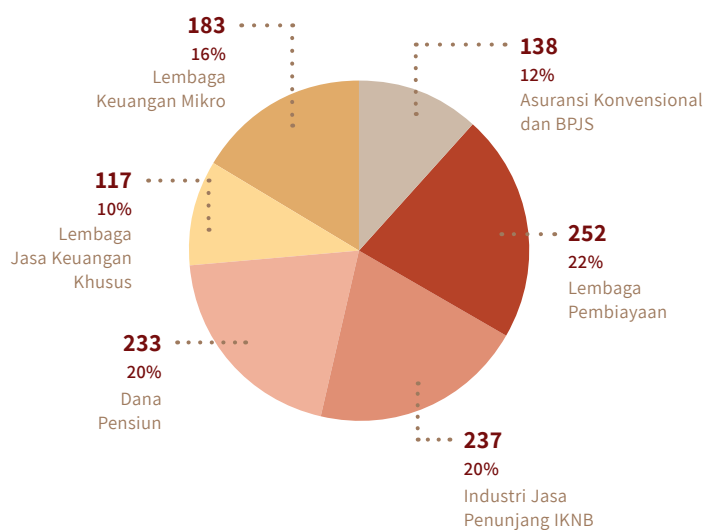
No.	Industri	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.132,60	1.147,14	1.150,10	1.175,11	1.209,63
2.	Dana Pensiun Konvensional	264,50	264,68	260,71	263,54	269,51
3.	Lembaga Pembiayaan*)	556,99	560,27	577,83	593,69	589,57
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	207,66	211,99	219,13	224,14	228,50
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	8,05	8,05	8,98	8,98	9,61
6.	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***)	0,33	0,33	0,34	0,40	0,40
Total Aset		2.170,13	2.192,46	2.217,09	2.265,86	2.307,29

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah
 **) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB triwulan III-2018 menggunakan data per semester I-2018
 ***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan menggunakan data kuartal III-2018

Berdasarkan jumlah pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku terbesar sebanyak 252 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa

Penunjang IKNB, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 37 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB



1. Data Pelaku IKNB per Desember 2018
2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 2,94% menjadi Rp1.209,63 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset ini diiringi dengan peningkatan jumlah investasi yang naik sebesar 3,0% menjadi Rp1.036,64 triliun. Portofolio investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah deposito yang tumbuh Rp16,68 triliun, Reksa Dana yang naik Rp7,16 triliun, dan saham yang tumbuh Rp6,1 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan membaiknya kondisi pasar dan stabilnya perekonomian (IHSG Des'18: 6.194,5; IHSG Sep'18: 5.976,55). Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS dan asuransi jiwa menjadi

penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar Rp21,27 triliun dan Rp5,08 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi, pendapatan premi masih menunjukkan tren yang positif, meskipun tidak sebaik triwulan sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 6,75% (yoy) menjadi Rp433,3 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 42,9%, diikuti oleh BPJS sebesar 33,9%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 20,4%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,8%.

Tabel I - 37 — Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1. Aset						
	Asuransi Jiwa	512,95	516,27	509,37	516,34	520,64
	Asuransi Umum dan Reasuransi	146,17	154,99	159,71	161,65	166,46
	Asuransi Wajib	132,40	131,12	128,23	129,07	133,73
	BPJS	341,09	344,76	352,79	368,05	388,80
	Jumlah	1.132,60	1.147,14	1.150,10	1.175,11	1.209,63
2. Investasi						
	Asuransi Jiwa	458,59	458,97	453,06	458,88	463,96
	Asuransi Umum dan Reasuransi	77,08	80,22	79,93	82,21	83,20
	Asuransi Wajib	111,90	116,77	112,88	114,33	117,19
	BPJS	324,50	328,72	334,85	351,02	372,29
	Jumlah	972,08	984,67	980,71	1.006,44	1.036,64
3. Pendapatan Premi						
	Asuransi Jiwa	183,85	49,54	95,47	141,14	186,05
	Asuransi Umum dan Reasuransi	79,65	21,58	43,44	62,74	88,28
	Asuransi Wajib	11,90	2,92	5,67	8,87	12,07
	BPJS	130,49	32,55	70,32	107,18	146,90
	Jumlah	405,88	106,59	214,90	319,93	433,30
4. Klaim Bruto						
	Asuransi Jiwa	115,77	34,74	72,93	108,88	142,36
	Asuransi Umum dan Reasuransi	33,51	7,77	15,57	25,20	37,02
	Asuransi Wajib	11,79	3,33	6,46	10,18	13,74
	BPJS	109,81	31,60	55,88	88,80	123,01
	Jumlah	270,88	77,44	150,84	233,06	316,13
5. Liabilitas						
	Asuransi Jiwa	421,96	425,40	425,71	435,42	445,65
	Asuransi Umum dan Reasuransi	85,82	93,40	98,90	100,06	102,63
	Asuransi Wajib	105,49	104,90	108,60	109,02	112,46
	BPJS	51,20	57,42	64,19	64,61	67,27
	Jumlah	664,47	681,11	697,39	709,11	728,02

Tabel I - 38 — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Deposito Berjangka	133,08	117,20	108,60	108,24	124,93
2.	Sertifikat Deposito	0,33	0,32	0,39	0,34	0,25
3.	Saham	216,96	214,85	214,80	221,64	227,75
4.	Obligasi	111,13	109,67	110,51	114,57	109,13
5.	MTN	1,95	2,36	1,95	2,16	2,74
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	246,40	264,87	269,42	277,71	280,29
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,88	0,86	0,90	0,90	0,90
8.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	0,00	-	-
9.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	0,02	-	-	-
10.	Reksa Dana	225,81	236,41	233,53	238,29	245,45
11.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	2,56	2,93	2,72	3,54	3,42
12.	Dana Investasi Real Estat	0,20	0,20	0,21	0,21	0,08
13.	REPO	-	-	-	-	-
14.	Penyertaan Langsung	15,24	16,31	18,20	18,64	18,51
15.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	13,90	14,88	15,42	16,07	19,42
16.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,58	0,50	0,53	0,53	0,54
17.	Emas Murni	0,00	0,00	0,00	-	-
18.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,17	0,24	0,26	0,30	0,20
19.	Pinjaman Polis	1,97	2,03	2,10	2,13	2,15
20.	Investasi Lain	0,90	1,03	1,18	1,18	0,89
	Total	972,08	984,67	980,71	1.006,44	1.036,64

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (27,0%), Reksa Dana (23,7%), Saham (22,0%) dan Deposito Berjangka (12,1%).

Sementara itu, tidak terdapat perubahan jumlah pelaku dibanding triwulan sebelumnya yaitu masih dengan jumlah 138 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 39 — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Asuransi Jiwa					
a.	BUMN	1	1	1	1	1
b.	Swasta Nasional	30	30	30	30	30
c.	Patungan	23	22	22	22	22
	Sub Total	54	53	53	53	53
2.	Asuransi Kerugian					
a.	BUMN	2	2	2	2	2
b.	Swasta Nasional	50	50	50	50	50
c.	Patungan	22	22	22	22	22
	Sub Total	74	74	74	74	74
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total	139	138	138	138	138

Tabel I - 40 — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Premi Bruto (Rp miliar)	385.809	405.234	420.331	411.158	411.022
Penetrasi	2,84%	2,98%	3,09%	3,03%	3,02%
Densitas (Rp ribu)	1.501,20	1.576,79	1.635,53	1.569,90	1.569,39

Densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi turun sebesar 0,03% menjadi Rp1.569.386 per tahun. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang

menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,02% atau turun 0,01%.

Tabel I - 41 — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Asuransi Jiwa	521,0%	480,6%	455,1%	430,5%	440,6%
Asuransi Umum dan Reasuransi	321,0%	321,9%	333,0%	315,3%	332,5%

Sementara itu, RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 440,6%, atau naik 10,1% dibanding periode

sebelumnya. Sedangkan untuk RBC Asuransi Umum, mengalami peningkatan sebesar 17,2% menjadi 332,5% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan IV-2018, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar 2,27% dari Rp263,53 triliun menjadi Rp269,51 triliun. Peningkatan aset terbesar dialami oleh DPPK-PPMP dan DPLK masing-masing sebesar

Rp2,56 triliun, kemudian DPPK-PPIP sebesar Rp0,86 triliun atau naik 2,70%. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun naik sebesar Rp6,51 triliun dari Rp254,43 triliun menjadi Rp260,94 triliun.

Tabel I - 42 — Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

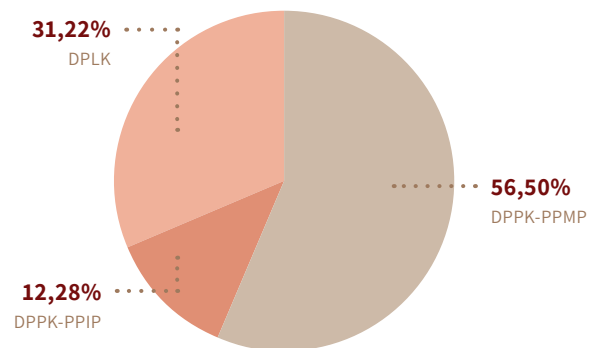
Jenis Program	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
DPPK-PPMP	154,50	154,60	150,25	151,48	154,02
<i>Growth</i>	1,40%	0,07%	-2,81%	0,81%	1,69%
DPPK-PPIP	30,95	31,55	31,43	31,84	32,70
<i>Growth</i>	0,15%	1,94%	-0,38%	1,29%	2,70%
DPLK	75,50	78,53	79,03	80,22	82,78
<i>Growth</i>	-0,21%	4,01%	0,63%	1,51%	3,19%
Total Aset	260,96	264,68	260,71	263,53	269,51
<i>Growth</i>	0,8%	1,4%	-1,5%	1,08%	2,3%

Tabel I - 43 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

Jenis Program	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
DPPK-PPMP	149,61	149,10	144,42	144,38	147,45
<i>Growth</i>	1,96%	-0,34%	-3,13%	-0,03%	2,12%
DPPK-PPIP	30,36	30,84	30,62	31,15	32,04
<i>Growth</i>	0,53%	1,58%	-0,71%	1,73%	2,87%
DPLK	74,52	77,08	77,55	78,90	81,45
<i>Growth</i>	7,34%	3,44%	0,61%	1,74%	3,24%
Total Investasi	254,48	257,02	252,60	254,43	260,94
<i>Growth</i>	1,18%	1,00%	-1,72%	0,73%	2,6%

Grafik I - 38 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 44 — Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Surat Berharga Negara	58,36	58,46	57,24	57,96	59,30
2.	Tabungan	0,29	0,68	0,58	0,50	0,40
3.	Deposito <i>On Call</i>	1,17	1,47	2,06	1,05	1,06
4.	Deposito Berjangka	67,00	66,27	66,44	66,04	68,31
5.	Sertifikat Deposito	1,59	1,42	1,36	1,21	1,49
6.	Sertifikat Bank Indonesia	-	0,05	-	-	-
7.	Saham	31,61	31,14	29,11	30,29	30,60
8.	Obligasi	52,70	54,15	53,50	55,18	55,29
9.	Sukuk	3,02	3,32	3,15	3,24	3,34
10.	Unit Penyertaan Reksa Dana	15,92	16,07	16,01	15,78	16,88
11.	<i>Medium Term Note</i>	0,20	0,16	0,17	0,19	0,17
12.	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	1,14	1,14	1,06	1,05	1,01
13.	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,12	0,12	0,13	0,11	0,11
14.	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15.	<i>Repurchase Agreement</i>	-	-	-	-	-
16.	Penempatan Langsung pada Saham	8,18	8,55	8,67	8,79	9,37
17.	Tanah	4,71	4,82	3,99	4,03	4,08
18.	Bangunan	1,98	2,11	2,27	2,09	2,53
19.	Tanah dan Bangunan	6,48	7,09	6,84	6,91	7,00
	Total	254,48	257,02	252,60	254,43	260,94

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (27,31%), obligasi (22,47%), SBN (22,72%), dan saham (11,73%).

Selama periode triwulan IV-2018 terdapat dua pembubaran Dana Pensiun dan dua pembentukan Dana Pensiun, sehingga sampai dengan periode laporan jumlah pelaku adalah 232 entitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 45 — Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
DPPK PPMP	169	167	167	164	164
DPPK PPIP	44	44	44	44	44
DPLK	23	23	23	24	24
Total	236	234	234	232	232

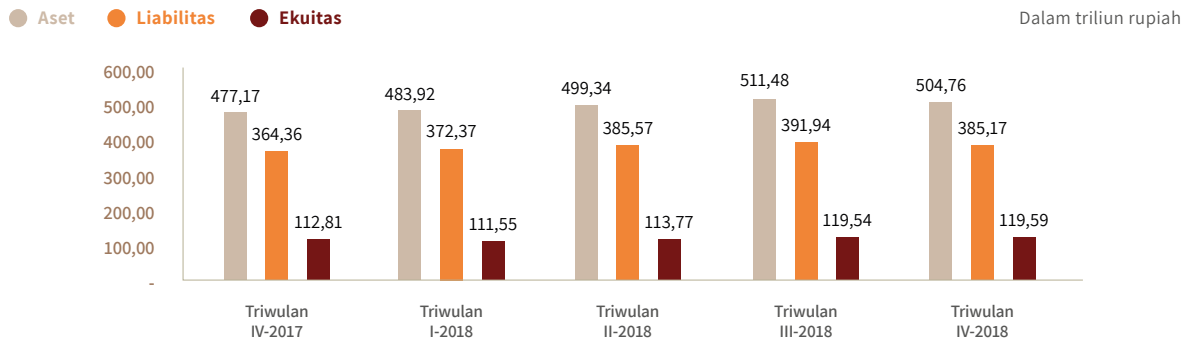
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,31% dan 1,73% dibandingkan triwulan

sebelumnya. Sementara, total ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 0,04% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 39 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode triwulan IV-2018 terdapat tiga pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan sebesar 185 perusahaan.

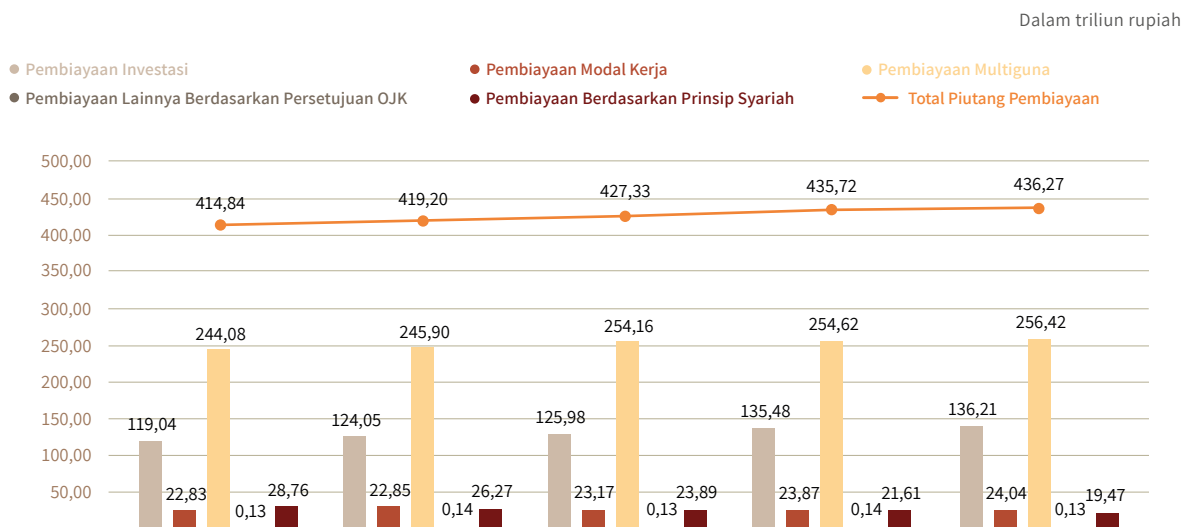
Berdasarkan total aset, sebanyak 72 perusahaan pembiayaan menguasai 92% aset industri, sedangkan 113 perusahaan pembiayaan menguasai 8% aset industri.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp0,54 triliun atau 0,12% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan

Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 58,78% dan 31,22%. Sementara itu, dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 77,16% (Rp349,18 triliun).

Grafik I - 40 — Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 46 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam triliun rupiah

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha		331,67	335,16	340,96	347,72	349,18
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,40	20,17	18,18	18,43	18,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	23,74	24,65	26,21	28,95	29,56
3.	Industri Pengolahan	38,34	39,88	37,55	38,17	38,29
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	19,26	21,66	18,79	19,83	16,25
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,35	0,35	0,36	0,40	0,41
6.	Konstruksi	14,50	14,64	16,58	16,46	16,14
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	71,82	69,37	73,65	75,18	77,51
8.	Transportasi dan Pergudangan	26,25	27,82	29,23	30,51	31,62
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,85	9,93	10,01	9,98	9,73
10.	Informasi dan Komunikasi	3,55	3,73	3,96	3,71	3,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,35	4,44	4,87	4,98	6,23
12.	Real Estate	1,83	2,04	2,07	2,16	2,49
13.	Jasa profesional, Ilmiah dan Teknis	2,62	2,48	2,95	3,21	3,40
14.	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	39,23	40,63	42,39	43,44	44,46
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,18	7,01	7,34	7,25	7,06
16.	Jasa Pendidikan	4,84	4,73	4,71	4,62	4,76
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,41	9,28	9,28	9,19	9,08
18.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2,13	2,22	2,27	2,30	2,41
19.	Kegiatan Jasa Lainnya	22,05	20,58	21,46	21,27	21,01
20.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	9,90	9,48	9,01	7,61	7,06
21.	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,06	0,07	0,09	0,11	0,11
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha		97,87	99,58	102,59	103,95	103,38
1.	Rumah Tangga	61,45	61,55	63,99	65,68	65,35
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	36,42	38,03	38,59	38,27	38,03
Jumlah		429,54	434,74	443,55	451,67	452,57

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 47 — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Indikator	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
FAR (%)	86,94%	86,63%	85,58%	85,19%	86,43%
NPF (%)	2,96%	3,25%	3,15%	3,17%	2,71%
Gearing Ratio (kali)	2,99	3,08	3,14	3,03	2,99

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR, (*Financing to Asset Ratio*), kualitas piutang pembiayaan (NPF) dan *Gearing Ratio* masih terjaga

pada batas ketentuan yaitu masing-masing pada rasio 86,43%, 2,71% dan 2,99 kali.

Tabel I - 48 — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha		3,10%	3,36%	3,28%	3,23%	2,67%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,87%	2,18%	1,86%	2,27%	2,66%
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,22%	5,36%	4,99%	5,75%	5,14%
3.	Industri Pengolahan	2,04%	2,08%	2,52%	2,96%	2,28%
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,13%	0,12%	0,16%	0,15%	0,18%
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	1,98%	1,78%	2,69%	2,34%	1,36%
6.	Konstruksi	2,95%	2,84%	2,47%	2,19%	2,28%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,35%	3,59%	3,77%	3,01%	1,83%
8.	Transportasi dan Pergudangan	12,27%	12,00%	11,39%	9,99%	8,97%
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,10%	5,11%	1,82%	1,98%	1,84%
10.	Informasi dan Komunikasi	1,18%	0,86%	0,98%	0,91%	0,89%
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04%	2,78%	1,47%	1,82%	1,42%
12.	Real Estate	3,61%	4,02%	3,92%	3,92%	2,93%
13.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,57%	2,49%	2,24%	2,02%	1,31%
14.	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1,53%	1,69%	1,56%	1,51%	1,40%
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35%	1,51%	1,41%	1,35%	1,17%
16.	Jasa Pendidikan	1,30%	1,58%	1,82%	1,62%	1,53%
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%	1,68%	1,40%	1,26%	1,23%
18.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,20%	0,92%	1,06%	1,13%	1,13%
19.	Kegiatan Jasa Lainnya	1,59%	1,75%	1,79%	3,35%	1,55%
20.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	1,79%	1,87%	2,42%	2,08%	1,54%
21.	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1,13%	0,86%	1,52%	1,70%	2,44%
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha		2,48%	2,89%	2,73%	2,95%	2,85%
1.	Rumah Tangga	2,17%	2,15%	2,27%	2,28%	2,15%
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,01%	4,08%	3,50%	4,09%	4,05%
Jumlah		2,96%	3,25%	3,15%	3,17%	2,71%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, laba bersih industri perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar 20,80% atau naik dari Rp13,27 triliun pada triwulan IV-2017 menjadi Rp16,02 triliun pada triwulan IV-2018.

F. Jenis Valuta Pinjaman

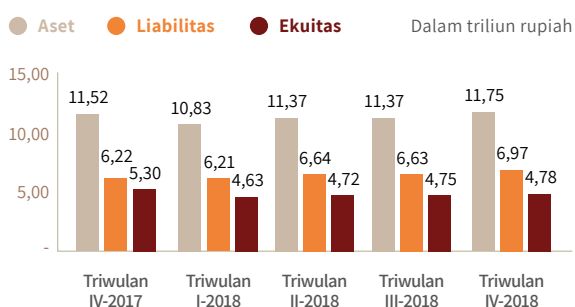
Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan IV-2018 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp286,07 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 52,19% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh *US Dollar* 39,26%, Yen Jepang 8,53%, dan *Singapore Dollar* 0,02%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,35%, 5,18%, dan 0,81% menjadi Rp11,75 triliun, Rp6,97 triliun, dan Rp4,78 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



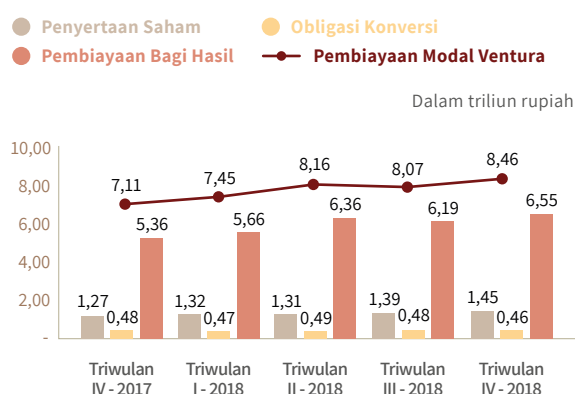
B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan IV-2018 terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura 65 perusahaan.

C. Pembiayaan atau Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 4,89% menjadi Rp8,46 triliun (*q4q*). Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 77,45% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp6,55 triliun. Sementara itu, berdasarkan jenis sektor ekonomi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan atau penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp3,72 triliun atau sebesar 43,52%.

Grafik I - 42 — Pertumbuhan Pembiayaan atau Penyertaan Modal



Tabel I - 49 — Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam miliar rupiah

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	742	761	814	668	707
2.	Pertambangan	463	481	485	490	507
3.	Perindustrian	554	526	567	735	745
4.	Konstruksi	436	422	462	497	490
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	3.094	3.362	3.772	3.597	3.716
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	153	142	157	137	135
7.	Jasa Pendukung Bisnis	578	770	797	787	932
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	163	174	182	177	174
9.	Lain-Lain	787	889	1.007	1.064	1.132
Jumlah		6.970	7.528	8.243	8.152	8.538

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) dapat digambarkan sebagai berikut:

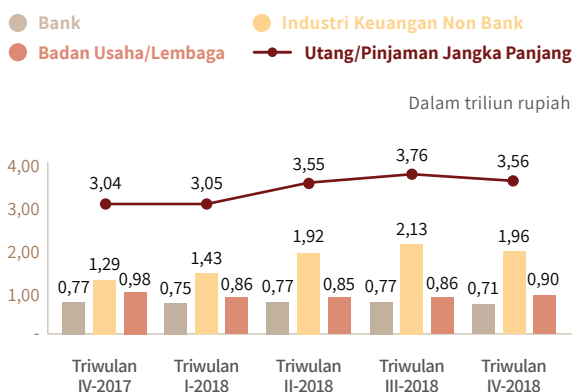
Tabel I - 50 Rasio Keuangan Modal Ventura

Rasio Keuangan	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Δ
BOPO	94,29%	91,49%	-2,8
IFAR	70,93%	71,98%	+1,05
ROA	1,34%	1,93%	+0,59
ROE	2,10%	3,37%	+1,27

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan IV-2018 adalah sebesar Rp3,56 triliun atau turun sebesar 5,2% dibandingkan triwulan sebelumnya.

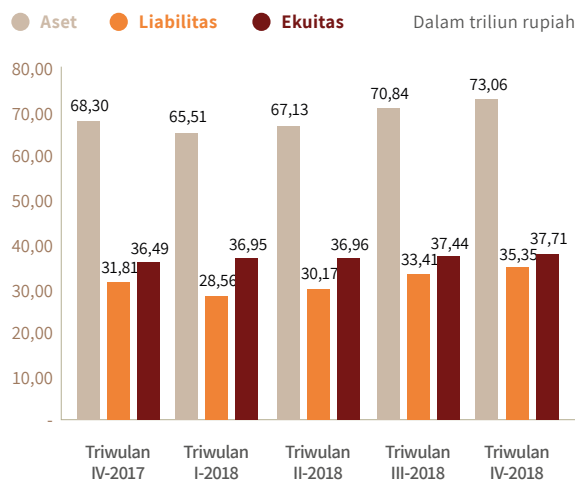
Grafik I - 43 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp73,06 triliun. Total liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp35,35 triliun dan Rp37,71 triliun pada triwulan IV-2018. Secara *quarter-to-quarter* total aset, liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,12%, 5,81% dan 0,72%.

Grafik I - 44 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Tabel I - 51 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

Dalam triliun rupiah

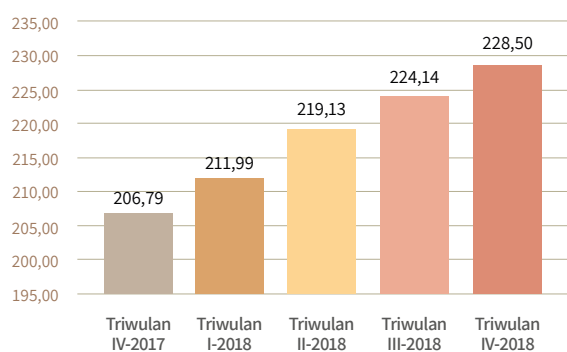
Jenis Infrastruktur	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Air Minum	0,62	0,84	1,24	1,24	1,43
Jalan	9,07	8,76	10,63	12,51	13,95
Ketenagalistrikan	15,54	15,28	15,14	17,68	18,56
Infrastruktur Lainnya	4,48	4,13	4,40	5,47	6,62
Minyak dan Gas Bumi	3,19	3,15	3,38	3,49	2,83
Telekomunikasi	2,25	1,95	1,92	1,92	3,34
Transportasi	4,43	4,46	3,15	4,24	5,57
Total	39,59	38,58	39,85	46,54	52,29

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total Aset LJKK naik 1,94% pada triwulan IV-2018 menjadi Rp228,50 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 45 Pertumbuhan Aset LJKK

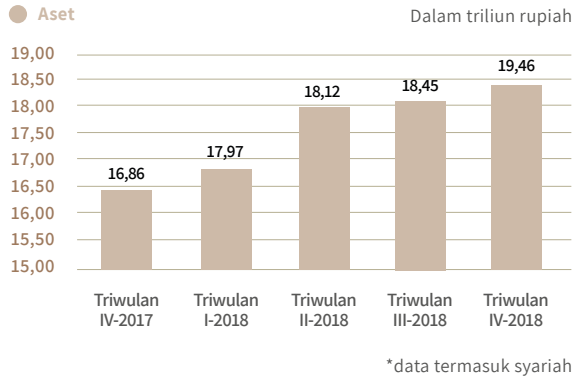
Dalam triliun rupiah



A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 5,46% menjadi Rp19,46 triliun.

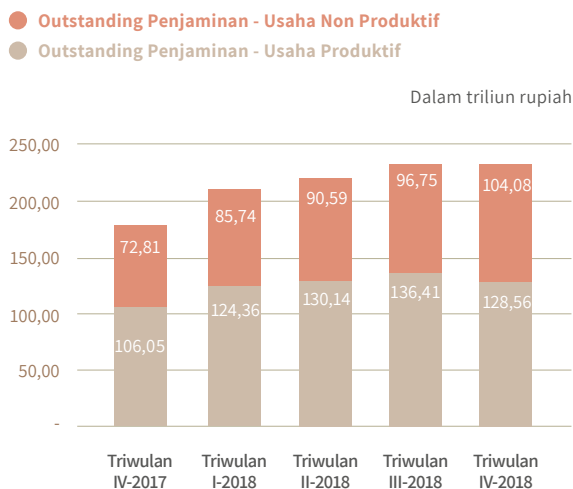
Grafik I - 46 — Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan IV-2018 mengalami penurunan 0,22% menjadi Rp232,64 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh turunnya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 5,75% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp128,56 triliun. Di sisi lain, nilai *outstanding* penjaminan usaha non-produktif meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,57% menjadi Rp104,08 triliun.

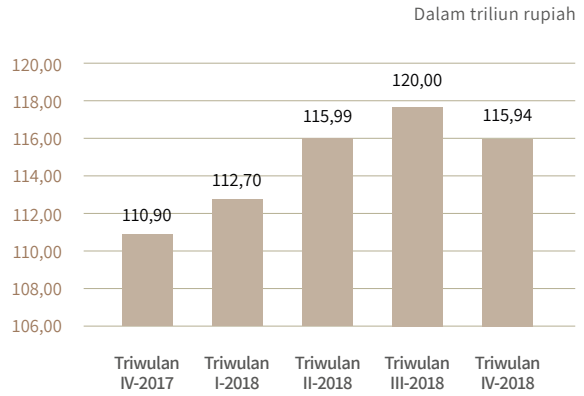
Grafik I - 47 — *Outstanding* Penjaminan



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

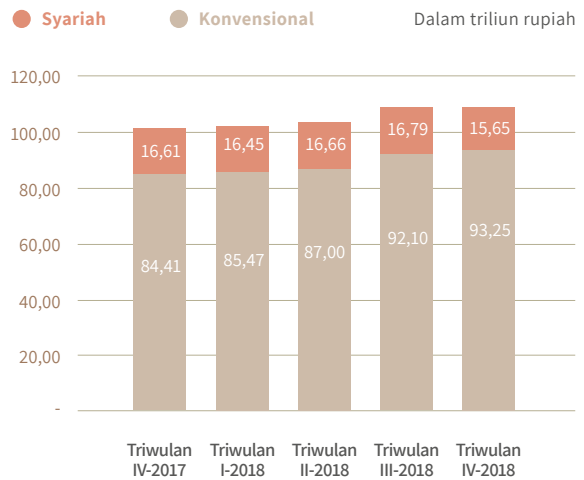
Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI turun 1,45% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp117,65 triliun menjadi Rp115,94 triliun.

Grafik I - 48 — Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Pada periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp108,90 triliun, atau naik 0,01% dari periode sebelumnya. Sedangkan piutang melalui sistem syariah turun 6,83% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp15,65 triliun.

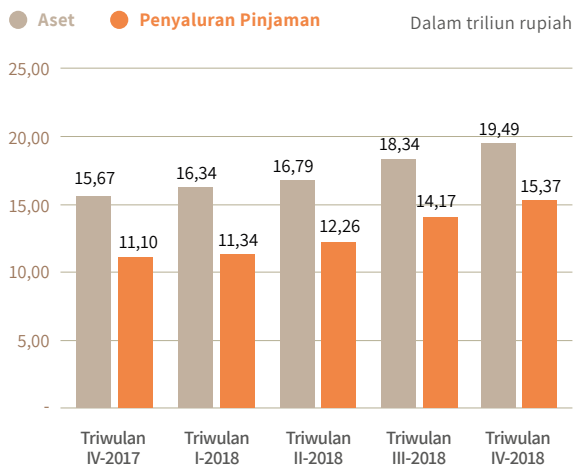
Grafik I - 49 — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan IV-2018 naik 6,28% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp19,49 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan nilai pinjaman yang disalurkan yang mengalami kenaikan sebesar 8,48% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp15,37 triliun.

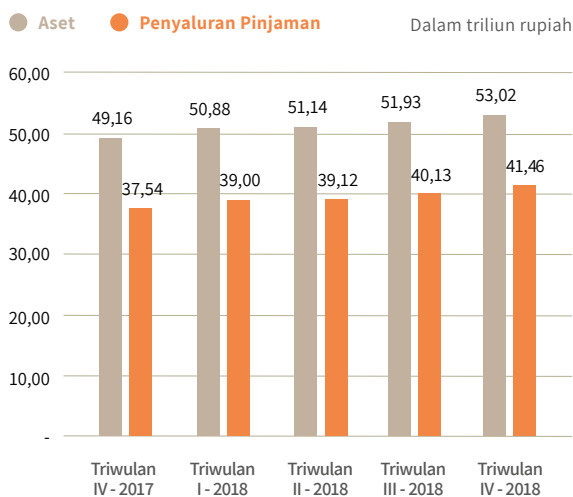
Grafik I - 50 — Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan IV-2018, terdapat 71 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri (67 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan empat perusahaan pergadaian swasta syariah) serta 19 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh ijin dari OJK (17 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan dua perusahaan pergadaian swasta syariah). Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 2,10% menjadi Rp53,02 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan IV-2018 sebesar Rp41,46 triliun, atau naik 3,32% dibandingkan triwulan sebelumnya.

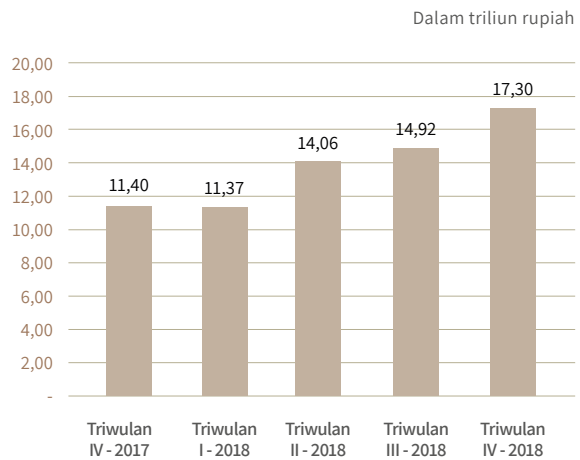
Grafik I - 51 — Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian



E. PT PNM (Persero)

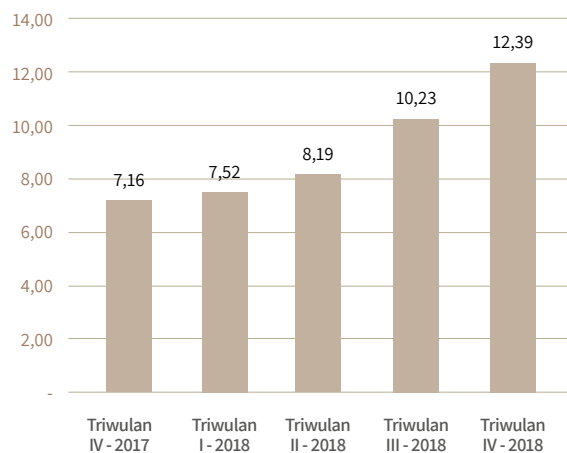
Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp17,30 triliun, naik 15,99% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 52 — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Sesuai tujuan pendiriannya, kegiatan usaha utama PT PNM (Persero) adalah pemberian pinjaman dan modal untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada triwulan IV-2018, pemberian pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) mengalami kenaikan sebesar 21,07% dari periode sebelumnya menjadi Rp12,39 triliun.

Grafik I - 53 — Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)



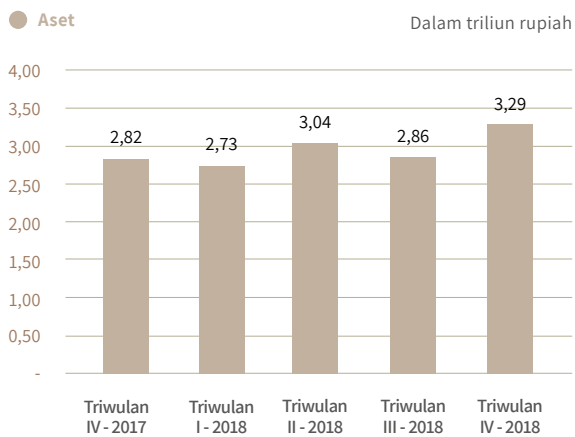
F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan IV-2018 sebesar Rp3,29 triliun, mengalami kenaikan 15,03% dari triwulan sebelumnya.

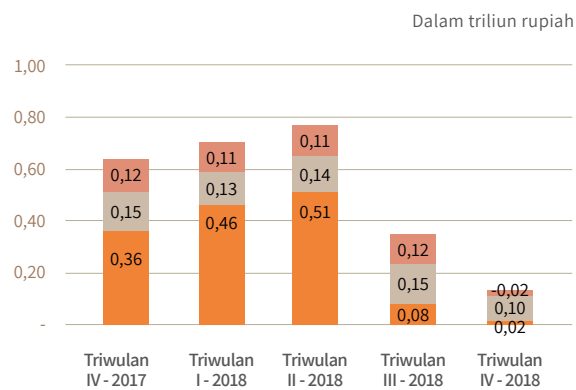
Grafik I - 54 — Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan IV-2018 tercatat sebesar Rp0,14 triliun, turun 60,82% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 55 — Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)

- Efek yang Dimiliki hingga Jatuh Tempo - Bersih
- Efek yang Dimiliki hingga Jatuh Tempo - Bersih
- Efek yang Diperdagangkan



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester II-2018 naik 7,02% menjadi Rp9,61 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan mengalami kenaikan 24,61% menjadi Rp2,38 triliun dibandingkan semester II-2017.

Tabel I - 52 — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Indikator	Semester I-2017	Semester II-2017	Semester I-2018	Semester II-2018
1.	Aset	8,26	8,05	8,98	9,61
2.	Liabilitas	5,78	5,64	6,31	6,94
3.	Modal Sendiri	5,06	2,41	2,67	2,67
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,92	1,91	1,21	2,38
5.	Laba/(Rugi)	0,21	0,57	0,30	0,69

Selama periode pelaporan hanya terdapat satu izin perubahan nama Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 237 perusahaan.

Tabel I - 53 — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Pialang Asuransi	168	165	167	166	167
2.	Pialang Reasuransi	43	43	43	43	43
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah		238	235	237	236	237

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode kuartal III-2018 adalah sebanyak 183 LKM dengan 123 LKM Konvensional dan 60 full syariah. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan kuartal III 2018 adalah sebesar Rp470,10 miliar.

Tabel I - 54 Jumlah Lembaga Keuangan Mikro

No.	Jenis Badan Usaha	Kuartal III-2017	Kuartal I-2018	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018
Konvensional					
1.	Koperasi	132	133	125	101
	PT	19	21	21	22
Syariah					
2.	Koperasi	29	38	46	59
	PT	-	1	1	1
Jumlah		180	193	193	183

Tabel I - 55 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Dalam miliar rupiah

No.	Jenis Indikator	Kuartal III-2017	Kuartal I-2018	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018
1.	Aset	332,95	339,89	402,49	470,10
2.	Liabilitas	214,11	216,61	236,25	268,46
3.	Ekuitas	118,84	123,29	166,23	201,65
4.	Pinjaman Yang Diberikan	264,98	250,53	295,62	344,99
5.	Simpanan/Tabungan	186,76	188,52	195,22	219,88

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan IV-2018 sebanyak 88 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp22,7 triliun atau naik 63,8% dari periode sebelumnya sebesar Rp13,8 triliun.

Tabel I - 56 Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Penyelenggara Terdaftar	29	39	64	70	88
2.	Pemberi Pinjaman	100.940	145.965	123.633	161.297	207.507
3.	Penerima Pinjaman	259.635	1.032.776	1.090.306	2.300.007	4.359.448
4.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	2.5	4.5	7.6	13.8	22.7

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Hingga akhir triwulan IV-2018, tercatat 41 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 33 kabupaten telah menyalurkan pembiayaan kepada 9.191 orang nasabah, dengan total pembiayaan sebesar Rp10,3 miliar. Akses keuangan mikro syariah melalui Bank Wakaf Mikro tidak hanya menjangkau masyarakat di Pulau Jawa, tetapi juga telah tersebar untuk masyarakat di Pulau Sumatera, Kalimantan hingga ke Papua. Dalam mengeksplorasi pengembangan Bank Wakaf Mikro di Indonesia, OJK juga telah melakukan sosialisasi kepada pimpinan lembaga di Kuwait, yaitu Zakat House Kuwait dan The International Islamic Charity Organization of Kuwait. Ke depan, OJK akan terus aktif mensosialisasikan program Bank Wakaf Mikro, baik di dalam maupun luar negeri sehingga pada akhirnya turut dapat mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Tabel I - 57 Pemberian Izin LKM Syariah Bank Wakaf Mikro (BWM) Triwulan IV-2018

No.	Nama LKM Syariah
1.	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Mawaridussalam
2.	Koperasi LKMS Sinar Mandiri Sejahtera
3.	Koperasi LKMS BWM Sunan Pandan Aran
4.	Koperasi LKMS Pondok Pesantren As'ad
5.	Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al-Masthuriyah
6.	Koperasi LKMS Amal Dana Bergulir
7.	Koperasi LKMS Minhajut Thullab
8.	Koperasi LKMS Honai Sejahtera Papua

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan IV-2018, terdapat 29 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, terdiri dari 27 BUK (termasuk 14 BPD) dan dua BUS. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan IV-2018 mencapai 1.004.547 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan BSA juga bertambah 791.549 nasabah menjadi sebanyak 22.832.105 nasabah dan menghimpun nominal BSA sebesar Rp1,57 triliun. Tabungan BSA tersebut tumbuh 5,37% (q_{tq}) atau 52,43% (y_{oy}).

Tabel I - 58 — Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2018

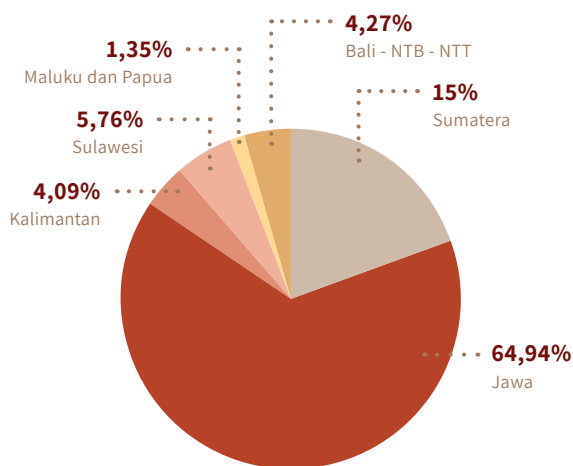
Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
975.884	28.663

Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
22.832.105	Rp 1,57 triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (66,94%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Sumatera sebesar 19,59% dan sisanya sebesar 15,47% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran nasabah BSA yang sebagian besar berada di pulau Jawa (70,79%) dan Sumatera (15,54%), sementara sisanya sebesar 13,67% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik I - 56 — Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan IV-2018



Sumber: OJK

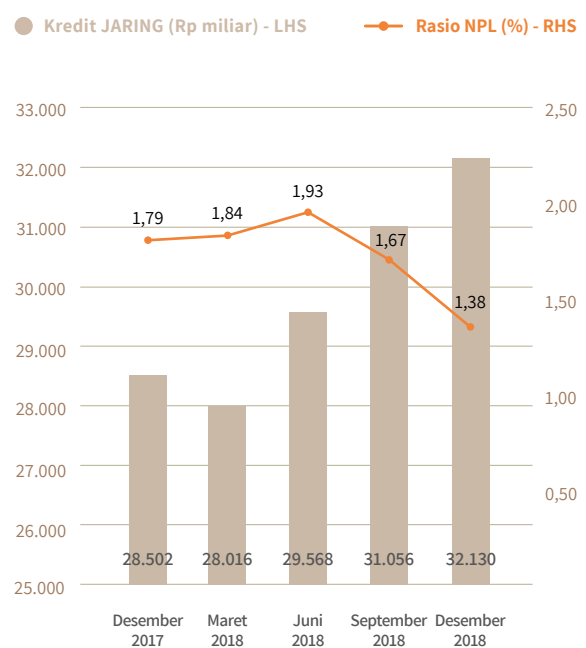
Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen tersebut telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai dengan triwulan IV-2018, terdapat tiga bank yang sudah menyalurkan kredit mikro melalui agen, yaitu dua bank menyalurkan KUR Mikro dan satu bank menyalurkan kredit mikro non KUR. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan IV-2018, penyaluran kredit program JARING tumbuh 12,73% (yoy) atau 3,46% (qto) menjadi Rp32,13 triliun. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 17,71% (yoy). Perlambatan terbesar terjadi pada kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 7,13% (yoy). Di tengah perlambatan tersebut, kredit subsektor perdagangan hasil perikanan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,26% (yoy), ditopang oleh tumbuhnya kredit ke subsektor ekspor hasil perikanan utamanya ekspor udang yang masih menjadi primadona ekspor hasil perikanan Indonesia.

Meskipun terjadi perlambatan kredit sektor perikanan dan kelautan, kualitas kredit sektor ini terjaga dengan NPL gross yang turun dari tahun sebelumnya 1,79% menjadi 1,38%. Perbaikan kualitas kredit terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor jasa sarana produksi yang dipengaruhi oleh turunnya kredit macet serta naiknya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

Grafik I - 57 — Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 59 — NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	Desember 2017	September 2018	Desember 2018
Penangkapan	4,13	2,97	2,57
Budidaya	2,10	1,56	1,50
Jasa Sarana Produksi	5,34	4,54	3,90
Industri Pengolahan	0,79	0,42	0,36
Perdagangan	2,32	2,66	2,21
NPL	2,29	1,93	1,67

Sumber: OJK

* Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

1.5.4 Simpanan Pelajar (SimPel)

OJK terus mendorong produk tabungan Simpanan Pelajar atau SimPel untuk dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh pelajar seluruh Indonesia.

Grafik I - 58 — Perkembangan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)



Kampanye Bersama *Pilot Project Bank Goes To School* pada Agustus-Desember 2018. Pada periode tersebut, terlaksana 14 kegiatan edukasi keuangan bekerja sama dengan 14 sekolah dengan capaian total peserta 5.681 siswa TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan MTs di wilayah Jabodetabek dan 715 siswa dan guru di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan berjalan baik atas dukungan dan sinergi dengan LJK Perbankan. Sebagai capaian inklusi keuangan, terdapat pembukaan 4.108 rekening baru bagi siswa yang sebagian besar merupakan rekening SimPel/SimPel iB.

1.5.5 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

a. Emiten Sektor Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, maka diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin baik. Saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Perusahaan dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan melakukan antara lain penjualan saham, penerbitan obligasi atau sukuk. Selama triwulan IV-2018 terdapat Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar Rp 28,05 triliun.

b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 1,62% menjadi Rp26,15 triliun pada triwulan IV-2018. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT mengalami kenaikan sebesar 5,08% menjadi 62 RDPT dari sebelumnya 59 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan IV-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

c. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor.

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,66 triliun atau turun sebesar 2,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

d. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama periode laporan, jumlah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah KIK-EBA tetap sebanyak delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,21 triliun.

e. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi *Real Estate* (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset *Real Estate*, Aset Yang Berkaitan Dengan *Real Estate*, dan/atau kas dan setara kas. Selama periode laporan, Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) bertambah sebanyak tiga KIK, sehingga jumlah KIK-DIRE menjadi tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,62 triliun.

1.5.6 Program 1.000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan IV-2018, OJK menyelenggarakan seminar aktuaris di Universitas Halu Oleo di kota Kendari. Jumlah aktuaris (ASAI dan FSAI) mengalami kenaikan sejumlah 54 orang, sehingga sampai dengan triwulan IV-2018 terdapat 568 aktuaris.

1.5.7 Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)

AOTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai

besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AOTP.

AOTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AOTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AOTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan IV-2018, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp161,73 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 1.446.399 orang dan luas lahan terdaftar adalah 901,42 ha (90,14%). Jumlah luas lahan yang diklaim adalah 18,995 ha dengan nilai klaim berjalan sebesar Rp113,97 miliar.

1.5.8 Asuransi Nelayan

Selama triwulan IV-2018, realisasi premi Asuransi Nelayan adalah sebesar Rp46,148 miliar dengan nilai klaim berjalan mencapai Rp22,990 miliar dari sebanyak 573.084 orang nelayan.

1.5.9 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan IV-2018, realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp24 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp19,2 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp4,8 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 120.000 ekor sapi (100%) di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 74.508 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp39,617 miliar.

1.5.10 Asuransi Budidaya Udang (AUBU)

AUBU merupakan program perlindungan bagi pembudidaya udang atas penyakit yang mengakibatkan matinya udang

yang diasuransikan, atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan mencapai $\geq 50\%$. Realisasi premi dan nilai klaim per triwulan IV-2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel I - 60 Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan	Realisasi Premi		Realisasi Klaim	
			Luas Lahan (Ha)	Nilai Premi	Luas Lahan (Ha)	Nilai Klaim
1.	Aceh	200	204,61	92.072.250,00	24,90	124.500.000
2.	Banten	41	140,30	63.135.000,00	7,37	36.833.000
3.	Gorontalo	35	96,50	43.425.000,00	1,00	5.000.000
4.	Jawa Barat	129	325,55	146.497.500,00	19,19	95.970.000
5.	Jawa Tengah	225	405,79	182.605.500,00	32,07	160.350.000
6.	Jawa Timur	263	219,20	98.640.000,00	24,91	124.525.000
7.	Kalimantan Selatan	19	44,50	20.025.000,00	-	-
8.	Lampung	90	136,58	61.458.750,00	16,00	80.000.000
9.	Nusa Tenggara Barat	53	31,11	13.999.500,00	-	-
10.	Sulawesi Barat	8	9,35	4.207.500,00	-	-
11.	Sulawesi Selatan	789	1.368,18	615.681.000,00	5,50	27.500.000
12.	Sulawesi Tengah	18	39,80	17.910.000,00	-	-
13.	Sulawesi Tenggara	109	262,00	117.900.000,00	2,00	10.000.000
14.	Sumatera Utara	25	16,54	7.443.000,00	0,28	1.400.000
Total		2.004	3.300	1.485.000.000,00	133,22	666.078.000

1.5.11 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan

ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Selama triwulan IV-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp3,8 triliun.

BAB 2

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Rp





Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 5 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, 7 POJK yang mengatur Pasar Modal, 5 POJK mengatur IKNB, dan 2 POJK mengenai Manajemen Strategis
 - Pemberian Tanda Terdaftar kepada 19 Penyelenggara *Fintech Lending*
-



Pengembangan

- Pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bank
 - Penetapan Pedoman Pengawasan Rencana Bisnis BPR/BPRS dan Tata Kelola
 - Penerbitan ketentuan mengenai Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 ke T+2
 - MoU OJK dengan Bank of Thailand tentang pengawasan perbankan lintas batas dan pertukaran Informasi
 - MoU OJK dengan *Monetary Authority of Singapore (MAS)* tentang *FinTech*
-



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Sosialisasi POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Banyuwang, Kediri, dan Surabaya
 - Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan dengan puncak acara FinEXPO & Sundown Run 2018 di Jakarta
 - Peluncuran Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)
 - Peluncuran 7 TPAKD Kabupaten/Kota dan 2 TPAKD Provinsi
 - Asistensi Layanan Konsumen OJK dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Cirebon, Tegal, Jember, Jayapura, Riau, Samarinda, dan Malang
 - Edukasi Keuangan Komunitas Pengusaha Kecil dan Menengah, Mahasiswa, Karyawan dan Pekerja Migran Indonesia di Pekalongan, Sorong, Jakarta, serta luar Indonesia di Busan, Seoul dan Madinah
-

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan IV-2018, telah diterbitkan tiga ketentuan terkait bank umum, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas

Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum

POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta sebagai mitigasi risiko kredit terutama terkait risiko konsentrasi akibat penyediaan dana yang terlalu besar kepada satu pihak. Adapun pokok ketentuan yang diatur antara lain mengenai penambahan definisi penyediaan dana besar (*large exposure*), perubahan persentase dan basis modal dalam perhitungan BMPK, penyesuaian dalam kriteria penetapan pihak terkait, baik dari hubungan kepemilikan maupun hubungan kepengurusan dan perubahan perhitungan nilai penyediaan dana.

2. POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

POJK ini merupakan konversi sekaligus amandemen dari ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP). Adapun pokok ketentuan yang diatur antara lain pemberlakuan POJK bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, obyek penilaian kembali, faktor penyebab penilaian kembali, tahapan tata cara penilaian kembali dan konsekuensi hasil penilaian kembali.

3. POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

POJK ini merupakan penguatan prinsip kehati-hatian BPR melalui penyesuaian kriteria penetapan kualitas kredit dengan mempertimbangkan praktik yang lazim dalam industri jasa keuangan dan *international best practices*. Pokok ketentuan yang diatur antara lain mengenai penilaian kualitas kredit bagi debitur dengan plafon lebih dari Rp5 miliar Perubahan penggolongan kualitas kredit dari 4 menjadi 5, dengan menambahkan golongan kedua yaitu 'Dalam Perhatian Khusus' dengan kewajiban pembentukan PPAP sebesar 3% yang penerapannya diberlakukan secara bertahap. Kualitas kredit tersebut terdiri dari Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan IV-2018 OJK menerbitkan Peraturan Industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

POJK ini merupakan revisi atas POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain persyaratan kompetensi WPEE dan WPPE, batas berlakunya sertifikat keahlian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di OJK dan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek serta Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

2. POJK Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek

POJK ini mengatur mengenai lingkup kegiatan usaha LPE, pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPE, persyaratan pihak yang dapat memperoleh pendanaan LPE, kewajiban LPE terkait akses informasi perkreditan dan pembukaan sub rekening Efek bagi kepentingan nasabah penerima pendanaan LPE, Kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain, dan Permodalan LPE.

3. POJK Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

POJK ini merupakan revisi POJK Nomor 25/POJK.04/2014. Adapun substansi perubahan pada POJK ini antara lain ketentuan permohonan untuk memperoleh atau memperpanjang izin Wakil Manajer Investasi melalui sistem elektronik, simplifikasi persyaratan dokumen permohonan izin Wakil Manajer Investasi, jangka waktu proses permohonan izin Wakil Manajer Investasi serta kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

4. POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

Ketentuan baru dalam POJK ini memungkinkan adanya penerimaan OJK yang tujuan penggunaannya untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan.

POJK ini memperkenalkan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada upaya pemulihan atau perbaikan kondisi akibat suatu pelanggaran dengan tetap mengupayakan terwujudnya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Upaya tersebut antara lain dengan dimungkinkannya pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau manfaat lain dari pelaku pelanggaran.

5. POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

POJK ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pihak yang menggunakan layanan urun dana, mengingat semakin maraknya kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*) di Indonesia. Adapun ketentuan yang dimuat dalam POJK ini mencakup empat topik utama yaitu mengenai Penyelenggara, Layanan Urun Dana, Penerbit, dan Pemodal.

6. POJK Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek

POJK ini merupakan revisi dari Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek. POJK ini mengatur antara lain persyaratan dan dokumen untuk memperoleh perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, Permodalan dan pemegang saham, Operasional dan pengendalian intern, Ketentuan sanksi, peralihan dan lain-lain. Adapun perubahan pengaturan dalam POJK ini dibandingkan peraturan sebelumnya yaitu:

- Penambahan beberapa definisi dan penyesuaian terminologi sesuai dengan IOSCO Code Of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies 2015.
- Pengaturan penugasan analis dari yang bersifat kuantitatif, menjadi berdasarkan kualitatif.

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

- SEOJK Nomor 14/SEOJK.04/2018 tentang Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
- SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

2.1.3 Pengaturan IKNB

OJK menerbitkan peraturan di Bidang IKNB sebanyak delapan peraturan sebagai berikut:

1. POJK mengenai Perubahan Investasi bagi Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Penjaminan, yang terdiri dari empat paket POJK berikut:

- POJK nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- POJK nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- POJK nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- POJK nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan

atas POJK nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Keempat POJK tersebut ditetapkan untuk mendukung program pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pendanaan yang berasal dari Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan obligasi/sukuk daerah dan mendorong peranan investor domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan aspek kehati-hatian. Pokok-pokok pengaturan yang diubah adalah terdapat penambahan jenis investasi yang diperkenankan beserta pengaturan batasan kualitatif dan kuantitatif.

2. SEOJK nomor 15/SEOJK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi serta Pemberian Insentif yang Wajar untuk Tim Likuidasi bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya likuidasi serta pemberian insentif yang wajar untuk tim likuidasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

3. SEOJK Nomor 16/SEOJK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur penyusunan neraca sementara likuidasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

4. SEDK nomor 2/SEDK.05/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian

Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pergadaian.

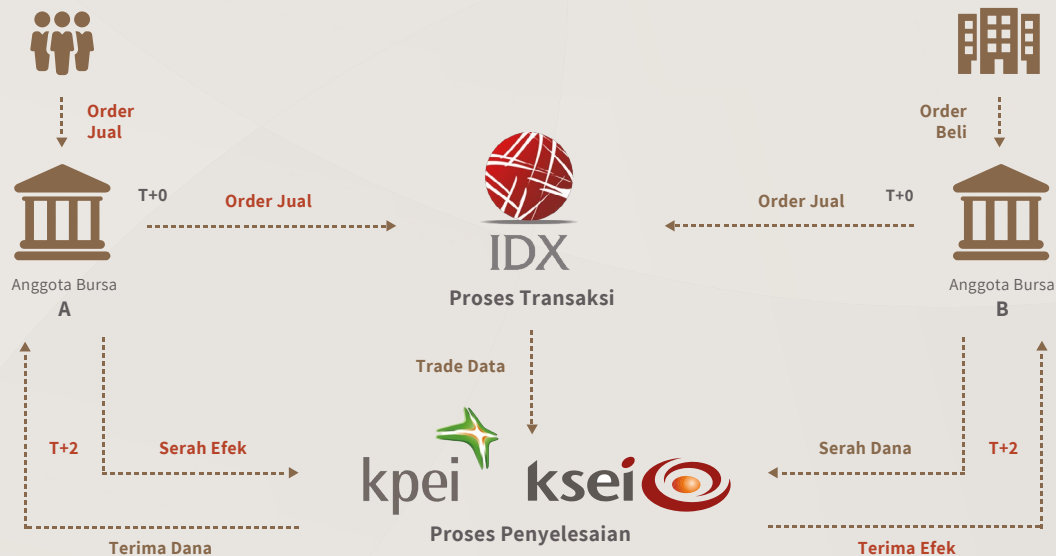
5. SEDK nomor 3/SEDK.05/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kualitas (Quality Assurance) Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan Risiko

Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengendalian kualitas dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan non bank berdasarkan risiko yang sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/PDK.05/2014 tentang Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Berbasis Risiko.



Sehari Lebih Cepat,
Selangkah Lebih Efisien

OJK Menerbitkan Peraturan mengenai Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa (T+2)



OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa. Hal ini menyesuaikan dengan *internasional best practice* dalam peningkatan efisiensi penyelesaian transaksi bursa dan implementasi T+2 di pasar modal global seperti Jerman, Hongkong, India, Korea Selatan, Rusia, Taiwan, dan Thailand. Pengaturan tersebut bertujuan meningkatkan likuiditas melalui percepatan *re-investment* dari modal investor maupun efisiensi operasional dan kapasitas transaksi Perusahaan Efek.

26 November 2018 merupakan hari pertama Perdagangan dengan Siklus Penyelesaian T+2 dapat disimpulkan bahwa penerapan Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2 di Pasar Modal Indonesia dinyatakan sukses. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan rata-rata volume transaksi harian dan rata-rata nilai transaksi harian dalam satu bulan awal penerapan kebijakan tersebut. Hal ini menjadi tonggak sejarah untuk Pasar Modal Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara yang telah menerapkan Siklus Penyelesaian T+2 setelah Vietnam dan Thailand.

Manfaat T+2

1. Efisiensi Proses Penyelesaian

Siklus Penyelesaian T+2 merampingkan proses penyelesaian saat ini sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya penyelesaian bagi pelaku secara jangka panjang.

2. Penyelarasan Waktu Penyelesaian dengan Bursa Dunia
Berbagai Bursa dari Kawasan Eropa, Asia Pasifik, Australia, New Zealand, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Kanada sudah menerapkan Siklus Penyelesaian T+2. Bursa-bursa lainnya juga telah mengumumkan rencana untuk mempercepat Siklus Penyelesaian mereka.

3. Likuiditas Pasar Menjadi Lebih Tinggi

Dengan waktu Penyelesaian yang lebih cepat, efek yang telah dibeli oleh investor dapat dijual kembali dalam waktu yang lebih singkat sehingga pasar menjadi lebih likuid.

4. Perputaran dan Pemanfaatan Dana yang Lebih Cepat

Sama halnya dengan efek, penjual akan menerima dana dan merealisasi gain 1 hari lebih cepat serta mempermudah investor untuk melakukan *switching* ke instrumen investasi lainnya.

5. Penurunan Risiko Counterparty dan Pasar

Semakin lama waktu Penyelesaian transaksi, semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak. Mempercepat siklus Penyelesaian akan membantu memitigasi risiko pasar dengan mengurangi exposure antara pihak yang bertransaksi dan Lembaga Kliring dan Penjaminan itu sendiri.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Sampai akhir triwulan IV-2018, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.341 kantor bank yang terdiri dari 1.781 Kantor Pusat (KP) dan 560 Kantor Cabang (KC). Realisasi pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap 105 Bank Umum, lima UUS, dan 1.671 BPR dan BPRS.

Tabel II - 1 — Pemeriksaan Umum Bank

Jenis Bank	Rencana 2018			Realisasi 2018		
	KP	KC	Jumlah Kantor	KP	KC	Tidak Lulus
BUK	102	428	530	102	454	556
BUS	3	5	8	3	5	8
UUS	5	12	17	5	12	17
BPR	1.547	75	1.622	1.535	83	1.618
BPRS	136	6	142	136	6	142
Total	1.793	526	2.319	1.781	560	2.341

Sumber : OJK

Selain melakukan pemeriksaan umum, pengawas juga melaksanakan pemeriksaan khusus yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank.

Selama tahun 2018, telah dilakukan 551 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain terkait aktivitas operasional, setoran modal, teknologi dan informasi, fraud, joint audit, aktivitas treasury, GCG, penetapan pencabutan izin, dan lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

Tabel II - 2 — Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	2018
Aktivitas Operasional	199
Setoran Modal	144
Teknologi & Informasi	38
Fraud	27
Joint Audit	9
Aktivitas Treasury	5
GCG	2
Penetapan Pencabutan Izin	2
Lainnya	125
Total	551

Sumber : OJK

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Sampai akhir triwulan IV-2018, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK cukup beragam, yaitu mencapai 542 produk yang sebagian besar terkait dengan *bancassurance* dan reksa dana.

Tabel II - 3 — Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Produk/Aktivitas Baru	2018
<i>Bancassurance</i>	231
Reksadana	162
<i>E-banking</i>	29
Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	18
APMK	12
<i>Structured Product</i>	12
Pendanaan	5
<i>Cash Management</i>	4
Aktivitas <i>Call Center</i>	3
Perkreditan/Pembiayaan	2
Fitur SMS Notifikasi	2
<i>e-Commerce</i>	2
<i>Referral Retail Brokerage</i>	2
Lainnya	58
Total	542

Sumber : OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan IV-2018, terdapat 30 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 10 kantor bank (dua kantor BU dan delapan kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi.

Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, pada triwulan IV-2018 terdapat 32 PKP pada 11 kantor bank (dua kantor BU, sembilan kantor BPR) yang diinvestigasi (termasuk *carryover* PKP yang diterima tahun sebelumnya), dengan rincian penanganan yaitu 11 PKP pada empat kantor bank masih dalam proses pemeriksaan investigasi dan 21 PKP pada tujuh kantor bank masih dalam proses pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK. Sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, selama triwulan IV-2018 terdapat 12 PKP pada delapan kantor bank (tiga kantor BU, lima kantor BPR) yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Tabel II - 4 ——— Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

No.	Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2018						Total 2018	
		Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total		Kantor Bank	Kasus (PKP)
		BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank	Kasus (PKP)		
1.	PKP yang diterima *)	2	8	7	23	10	30	45	110
2.	PKP yang dikembalikan sebelum investigasi atas dasar analisis tim **)	0	4	0	8	4	8	10	23
3.	PKP yang diinvestigasi *)	2	9	5	27	11	32	27	65
	a. <i>On Going Process</i> Pemeriksaan Investigasi	1	3	2	9	4	11	4	11
	b. Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satuan Kerja Penyidikan OJK	1	6	3	18	7	21	23	54
4.	Pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK	3	5	5	7	8	12	19	30

*) Termasuk *Carryover* PKP yang diterima dari tahun sebelumnya

**) Termasuk *Carryover* PKP yang diterima dari triwulan sebelumnya
Sumber : OJK

Dengan demikian, selama tahun 2018 telah diterima 110 PKP yang terjadi pada 45 kantor bank, dengan penanganan 65 PKP pada 27 kantor bank telah diinvestigasi dan terdapat 30 PKP pada 19 kantor bank yang dilimpahkan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan IV-2018 seluruh kasus dugaan tipibank terjadi pada bidang perkreditan. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Pejabat Eksekutif (tujuh orang atau 54%), diikuti Direksi (lima orang atau 38%) dan Pemegang Saham (satu orang atau 8%). Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi *anti fraud*, pada triwulan IV-2018 telah dilakukan sosialisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan kepada industri perbankan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, serta sosialisasi kepada Perguruan Tinggi di Pontianak, Padang, dan Solo.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan IV-2018 terdapat 19 pemberian keterangan ahli dan satu pemberian keterangan saksi. Sebanyak 19 pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan RI, sementara satu pemberian keterangan saksi merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kejaksaan RI.

Tabel II - 5 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Polri	0	16	16
2.	Kejaksaan RI	1	13	4
Total		1	19	20

Sumber: OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

D. Kelembagaan Bank Umum

1. Perizinan

Pada triwulan IV-2018 telah diselesaikan 81 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, *merger*, dan pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri di Indonesia. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan perubahan status Kantor Kas (KK) menjadi KCP masing-masing sebanyak 16 perizinan. Adapun persetujuan *merger* terjadi antara PT Bank Sumitomo Indonesia ke dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.

Tabel II - 6 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU*

No.	Jenis Kegiatan	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
	b. Kantor Cabang (KC)	5	2
	c. Kantor Cabang (KC)	3	4
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	2	4
	e. Kantor Cabang (KC)	-	4
2.	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	-	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2	3
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	9
	e. Kantor Fungsional (KF)	74	2
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	2	2
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
	c. Kantor Cabang (KC)	3	4
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	21	16
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	2
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-
4.	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status		
	• KCP menjadi KC	5	1
	• KK menjadi KCP	3	16
	• KF menjadi KCP	-	-
	• KK menjadi KC	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum		
	• KP menjadi KC	-	-
	• KC menjadi KCP	2	-
	• KCP menjadi KF/KK	5	8
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-	-
6.	Perubahan Badan Hukum	-	-
7.	Merger Bank Umum	-	1
8.	Izin Bank Devisa	-	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	0	3
Jumlah		152	81

Sumber: LKPBU

*)Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2018, jaringan kantor BUK berkurang 871 unit menjadi 138.063 jaringan kantor. Pengurangan terbesar utamanya didorong oleh berkurangnya ATM/ADM sebesar 816 unit. Pengurangan ATM/ADM dipengaruhi oleh mulai beralihnya pengembangan perbankan ke *branchless banking* maupun *digital banking*, yang juga dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan biaya operasional. Sementara itu, peningkatan terbanyak terdapat pada kas keliling/kas mobil/kas terapung yang bertambah 139 unit.

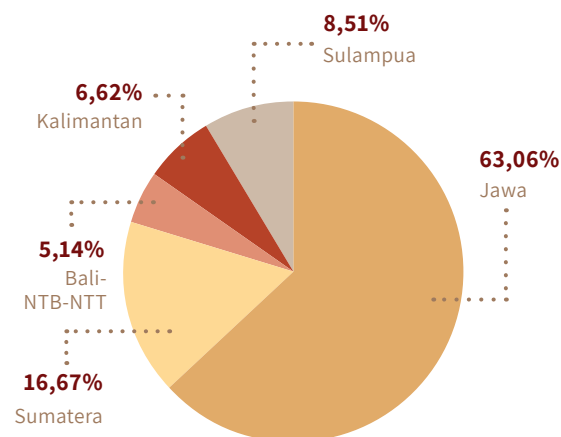
Tabel II - 7 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

Jenis Kegiatan	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Kantor Pusat Operasional	50	48
Kantor Pusat Non Operasional	54	54
Kantor Cabang Bank Asing	9	9
Kantor Wilayah	174	174
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.872	2.877
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	26	26
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.178	16.143
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-
Kantor Kas	10.443	10.326
Kantor Fungsional	1.158	1.076
Payment Point	2.018	2.056
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.191	1.330
Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14*)	13	12
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
ATM/ADM	104.748	103.932
Total	138.934	138.063

Sumber : LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 87.067 jaringan kantor (63,06%), diikuti pulau Sumatera 23.013 (16,67%), Sulampua 11.749 (8,15%), Kalimantan 9.137 (6,62%), dan Bali-NTB-NTT 7.097 (5,14%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa utamanya pada ATM/ADM yang berkurang 899 unit. Sementara itu, terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor di wilayah Sulampua dan Kalimantan masing-masing sebanyak 111 jaringan kantor dan 87 jaringan kantor.

Grafik II - 1 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan IV-2018, dari 121 pemohon terdapat 67 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 36 calon pengurus yang lulus sebagai pengurus dan PSP BUK dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengurus, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 9 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel II - 8 FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak Ditindaklanjuti	Triwulan IV-2018
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	0	3	0	0	5
Dewan Komisaris	18	1	10	1	4	34
Direksi	47	4	23	3	5	82
Total	67	5	36	4	9	121

Sumber : OJK

Fit and Proper New Entry adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon Pengurus baru (Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak

Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan pelaksanaan pada SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

E. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan IV-2018, terdapat empat jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu pendirian usaha BPR, *merger*, konsolidasi dan pencabutan izin usaha BPR dengan rincian sebagai berikut:

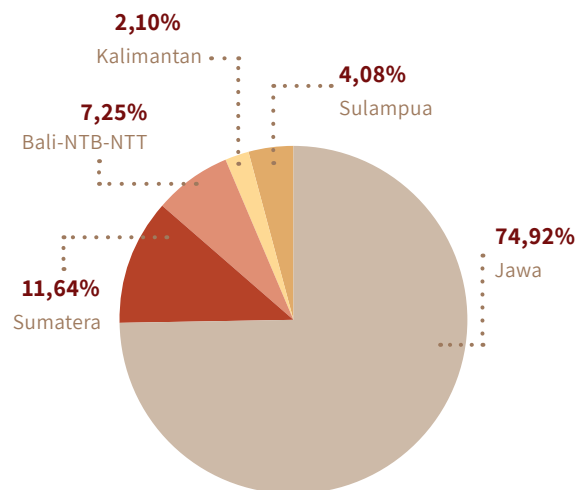
- a. Izin pendirian usaha BPR diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Sampuraga Cemerlang;
- b. Proses *Merger*, yaitu:
 - i. PT BPR Bintang Mas Maesan, PT BPR Kalisat Arthawira, PT BPR Manuk Walet, dan PT BPR Manuk Wari ke dalam PT BPR Manuk Ayu.
 - ii. PT BPR Sukowono Arthajaya dan PT BPR Purwoharjo Lestari ke dalam PT BPR Blambangan Makmur.
 - iii. PT BPR Kredit Mandiri Jabar ke dalam PT BPR Kredit Mandiri Indonesia;
- c. Konsolidasi PT BPR Surabaya Lestari, PT BPR Porong Lestari, PT BPR Babat Lestari dan PT BPR Jember Lestari menjadi PT BPR Lestari Nusantara Indonesia; dan
- d. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sinareman Permai Jatiasih dan PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera.

2. Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan IV-2018 berkurang 1 bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.597 BPR, sementara jumlah jaringan kantor BPR bertambah 31 unit menjadi 6.273 jaringan kantor. Pengurangan jumlah BPR tersebut belum termasuk BPR yang mengalami *merger* maupun konsolidasi dikarenakan masih dalam proses persiapan operasional.

Penyebaran jaringan kantor BPR di Indonesia masih terpusat di wilayah Jawa (74,92% atau 4.700 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,64% atau 730 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,25% atau 455 kantor), wilayah Sulampua (4,08% atau 256 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,10% atau 132 kantor).

Grafik II - 2 — Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber : OJK. Desember 2018

3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan IV-2018, telah dilakukan FPT *New Entry* kepada 875 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 723 calon (82,63% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 152 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel II - 9 — Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Pemohon FPT	Triwulan IV-2018		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	201	53	254
Komisaris	136	23	159
PSP	49	0	49
Jumlah	723	152	875

Sumber : OJK

Fit and Proper New Entry adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon Pengurus baru (Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan pelaksanaan pada SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai triwulan IV-2018, OJK melakukan *monitoring* terhadap 65 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. Dari jumlah tersebut, 11 saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan, 41 saham telah diputuskan untuk ditutup setelah dilakukan analisis lebih lanjut dengan hasil tidak terindikasi pelanggaran, serta 13 saham masih dalam tahap *monitoring*.

OJK juga melakukan penelaahan terhadap 13 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, satu saham telah dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan Pasar Modal, sembilan saham telah ditingkatkan ke tahap pemeriksaan teknis, satu saham telah diputuskan untuk ditutup setelah dilakukan analisis lebih lanjut dengan hasil tidak terindikasi pelanggaran, dan dua saham masih dalam tahap penelaahan. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap 11 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, sembilan saham telah dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan Pasar Modal dan dua saham masih dalam tahap pemeriksaan.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Terkait pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya OJK telah melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Agustus, September dan Oktober berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing sebanyak 19, 21 dan 21 Partisipan dengan total frekuensi keterlambatan pelaporan masing-masing sebanyak 79, 92 dan 105 kali.

OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Oktober, November dan Desember yang menghasilkan 3.476 *alert* Obligasi Pemerintah, 3.012 *alert* Obligasi Korporasi dan 467 *alert* waran. OJK melakukan *monitoring* terhadap 11 seri Obligasi Pemerintah, tujuh seri Obligasi Korporasi dan tiga seri Waran dan telah diselesaikan kertas kerja *monitoring* sebanyak 10 seri Obligasi Pemerintah, tujuh Obligasi Korporasi dan sembilan seri Waran.

Terkait obligasi, OJK Melakukan penelaahan atas laporan evaluasi pembatalan pelaporan transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari Bursa Efek Indonesia periode Oktober, November dan Desember. Jumlah Partisipan yang melakukan pembatalan pelaporan transaksi EBUS masing-masing sebanyak 39, 39, dan 31 partisipan. Pembatalan pelaporan bulan Oktober, November, dan Desember didominasi dengan alasan *Trade Cancel*.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan IV-2018, OJK melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). OJK memberikan Persetujuan revisi RKAT PT Bursa Efek Indonesia tahun 2018 dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 2018, Penyampaian Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia Pengganti Terpilih Masa Jabatan 2017 s.d. 2020, Tanggapan atas konsep laporan final ROSC A&A Indonesia 2017/2018, Persetujuan dan Rekomendasi Terhadap Penggunaan Data Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2019, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2019 dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2019, Penetapan Sistem Elektronik untuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 SRO sebagai prioritas PKSI 2019, Persetujuan RKAT PT KSEI, BEI dan KPEI Tahun 2019.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan IV-2018, OJK telah memberi persetujuan terhadap 22 perubahan susunan direksi, 35 perubahan susunan komisaris, dan dua proses persetujuan perubahan pemegang saham.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 124 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan IV-2018 sebesar Rp23,48 triliun atau naik 1,12% dari rata-rata triwulan III-2018. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 106 Perusahaan Efek Anggota Bursa, semua Perusahaan Efek Anggota Bursa memenuhi nilai MKBD yang dipersyaratkan.

OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 35 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 30 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.

Atas pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2018 terdapat empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE bulan September 2018 dan empat Perusahaan Efek Oktober 2018, sedangkan empat Perusahaan Efek bulan November 2018 yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspensi.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan IV-2018, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Adapun fokus pemeriksaan KSEI adalah perjalanan dinas, pendaftaran efek dan pengembangan sistem AKSes Next-G.

6. Pemeriksaan Kepatuhan dan Teknis Perusahaan Efek

Pada triwulan IV-2018, OJK melakukan pemeriksaan terhadap empat Kantor Pusat Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan pada Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh perusahaan efek. Pada triwulan ini juga telah selesai disusun 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Efek.

Di samping itu, pada periode ini juga telah dilakukan pendampingan pemeriksaan setempat terhadap lima kantor cabang Perusahaan Efek di wilayah lima Kantor OJK Regional dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang pengawasan Pasar Modal ke Kantor OJK Regional dan Kantor OJK.

Terkait pemeriksaan teknis, OJK sedang menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan teknis terhadap satu kantor pusat Perusahaan Efek terkait dengan pemasaran *Medium Term Notes* (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 24 kantor pusat MI, tiga Perusahaan Efek sebagai APERD, sembilan kantor pusat APERD, lima Bank Kustodian, dan delapan Produk Investasi (satu EBA dan tujuh RDPT).

Sampai dengan triwulan IV-2018, tujuh MI masih dalam proses permintaan konfirmasi dan 17 MI dalam tahap finalisasi LHP. Pemeriksaan kepatuhan terhadap dua PE APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi dan satu PE APERD dalam tahap finalisasi LHP.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi dan enam APERD dalam tahap finalisasi LHP. Sedangkan untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap Bank Kustodian (BK), satu BK masih dalam proses permintaan konfirmasi dan empat BK dalam tahap finalisasi LHP.

Adapun untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap delapan produk investasi, dua produk investasi saat ini masih dalam proses konfirmasi dan lima produk investasi telah finalisasi LHP.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring*, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan IV-2018, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Oktober 2018 dan seluruh MI yang menyampaikan laporan X.N.1 bulan November dan Desember 2018 tepat waktu.

Sementara itu, terkait penyampaian laporan MKBD, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Oktober 2018 dan seluruh MI menyampaikan laporan MKBD periode November dan Desember 2018 dengan tepat waktu.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel II - 10 — Aksi Korporasi

No.	Aksi Korporasi	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		IV-2017	III-2018	IV-2018
1.	Transaksi Afiliasi	68	29	71
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	-	1	-
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	6	7	21
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	8	1	5
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	2	-	-
6.	Pembagian Saham Bonus	-	-	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	9	19	15
8.	Pembagian Dividen Saham	-	-	1
10.	Laporan Buyback Saham	1	9	-
11.	Laporan Buyback Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	-	-
12.	Pembelian Kembali Obligasi	1	-	-
13.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	5	5	-
14.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	-	1	1
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	-	1	1
16.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	2	-	-
17.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	9	2	4
18.	Penelaahan Go Private	-	-	-

OJK juga melakukan pengawasan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 11 — Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2017		LT 2017		LKTT 2018	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	577	81,8%	547	77,4%	605	87,1%
2.	Terlambat	64	9,1%	88	12,4%	50	7,2%
3.	Belum Menyampaikan	6	0,9%	16	2,3%	16	2,3%
4.	Emiten Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	0	0%	0	0%	0	0%
5.	Belum Wajib Menyampaikan	58	8,2%	56	7,9%	24	3,5%

Berdasarkan pengawasan OJK sampai dengan triwulan IV-2018 terdapat 183 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang disampaikan tepat waktu dan 20 yang disampaikan terlambat. Selanjutnya OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 430 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 55 laporan hasil pemeringkatan efek, 65 hasil RUPS, serta 26 laporan penjatahan Penawaran Umum. Selain itu, OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan IV-2018 sebanyak 432 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

Selama triwulan IV-2018, OJK juga telah melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 16 Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;

- d. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyusun Laporan Keuangan yang akan datang;
- h. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyusun Laporan Keuangan yang akan datang dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- i. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- j. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan POJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- k. Tiga Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 54/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- l. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- m. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan pengungkapan informasi dalam Situs Web Perseroan, pemutakhiran

informasi atas perkembangan peminjaman dana dari Pihak ketiga dan/atau Pihak terafiliasi untuk kelangsungan usaha Perseroan, dan memahami dan melihat langsung bisnis proses dan kondisi Perseroan terkini.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama triwulan IV-2018 dilakukan penelaahan atas 34 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 10 laporan dari Akuntan, 16 laporan dari Konsultan Hukum, lima laporan dari Penilai, satu laporan perubahan data Notaris dan dua laporan Perubahan Data Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap tiga Biro Administrasi Efek (BAE), dua Wali Amanat (WA), dan tiga Bank Kustodian (BK) serta telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas seluruh pemeriksaan kepatuhan (*onsite*). Kegiatan Monitoring (*onsite*) sampai dengan triwulan IV-2018 telah dilakukan terhadap dua BK dan Laporan Hasil Monitoring (LHM) telah diselesaikan.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap enam profesi Penilai dengan ruang lingkup pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal serta terhadap lima Konsultan Hukum dengan ruang lingkup kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional oleh Konsultan Hukum dengan kode etik, standar profesi sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.04/2017 dan penerapan/pelaksanaan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum. LHP atas seluruh kegiatan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap profesi tersebut telah diselesaikan.

Selanjutnya OJK telah melakukan pemetaan/*mapping* (*onsite*) terhadap tiga Notaris Pasar Modal dengan ruang lingkup pendalaman terhadap kegiatan Notaris sebagai Notaris Pasar Modal khususnya dalam penyusunan Akta Notariil dan penerapan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Akuntan, sampai dengan triwulan IV-2018 OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 12 KAP dengan ruang lingkup Pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP. Terkait Laporan Hasil Pendalaman (LHP) SPM untuk 12 KAP dimaksud telah selesai disusun pada triwulan IV-2018.

Selama triwulan IV-2018, OJK telah melakukan penelaahan atas tujuh permohonan izin perorangan sebagai Ahli

Syariah Pasar Modal (ASPM). Pada triwulan IV-2018, OJK telah mengeluarkan enam Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai dengan triwulan IV-2018, OJK telah melaksanakan pemeriksaan Pasar Modal 70 kali yang terdiri dari tiga pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran, 30 pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran dan 37 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran.

Selain itu terdapat lima pemeriksaan yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan dengan dugaan pelanggaran ketentuan antara lain terkait manipulasi pasar, larangan dan ketentuan larangan bagi setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan IV-2018, OJK telah menetapkan sebanyak 74 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 12 — Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif		Pencabutan Izin
	Peringatan Tertulis	Denda	
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	12	37 dengan total denda sebesar Rp 1,98 miliar	-
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	8 dengan total denda sebesar Rp 550 juta	-
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus	16	-	-
Total	29	45	-

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2017 dan 2018, selama triwulan IV-2018 OJK menetapkan 18 Surat Teguran Pertama, 19 Surat Teguran Kedua dan delapan pelimpahan piutang macet ke PUPN

terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 11 rekomendasi sanksi administratif, 17 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta dua rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama triwulan IV-2018, OJK menindaklanjuti 21 Permohonan Keberatan di mana sembilan Keberatan telah ditanggapi dan 12 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan IV-2018, OJK melakukan analisis terhadap delapan laporan keuangan berkala Perusahaan Perasuransian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 13 — Analisis Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
Oktober 2018	2	2	-	-
November 2018	-	-	-	-
Desember 2018	1	3	-	-

2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan IV-2018, OJK melakukan pemeriksaan terhadap dua Perusahaan Asuransi Umum, 10 Perusahaan Asuransi Jiwa, satu Asuransi Wajib, dan satu Perusahaan Reasuransi. Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan tiga LHP yang terdiri dari satu LHP Sementara dan dua LHP Final.

3. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Sampai dengan triwulan IV-2018 jumlah rekomendasi yang telah dilaksanakan sebanyak 485 rekomendasi dan yang belum dilaksanakan adalah 58 rekomendasi.

OJK mengenakan sanksi dan/atau pencabutan sanksi kepada 22 perusahaan. Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari empat surat pencabutan sanksi peringatan pertama. Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi pada triwulan IV-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 14 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	Pencabutan Sanksi PKU
	SP I	SP2	SP3	SP I	SP 2	SP3		
Jumlah Komisaris Independen	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah Komisaris	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan Pelaporan Penutupan Kantor di Luar Kantor Pusat	1	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan Dana Jaminan	1	-	-	-	-	-	-	-
Telah Menyampaikan Laporan Program Reasuransi/Retroseso Otomatis	-	-	-	-	1	-	-	-
Telah Menyelenggarakan Rapat Direksi dan Mendokumentasikan dengan Baik	-	-	-	1	-	-	-	-
Terlambat Menyampaikan Perubahan Alamat Kantor di Luar Kantor Pusat Jakarta Kemayoran	1	-	-	-	-	-	-	-
Belum Menyelesaikan dan Melaporkan Seluruh Pelaksanaan Rekomendasi LHPLF	-	1	-	-	-	-	-	-
Investasi SBN Sesuai Ketentuan	-	-	-	1	-	-	-	-
Denda Keterlambatan Menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan I-2018	-	-	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan I-2018	-	-	-	1	-	-	-	-
Keterlambatan menyampaikan Laporan Audit Independen Tahun 2017	-	-	-	1	-	-	1	-
Telat Lapor Tenaga Kerja Asing	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan telah menjadi Anggota LAPS	-	-	-	-	1	-	-	-
RBC, RKI, dan Modal Sendiri Tidak Memenuhi Ketentuan	-	-	-	1	-	-	-	-
Pembayaran Klaim Lebih Dari 30 hari	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan Pencatatan Perubahan Alamat Kantor di luar Kantor Pusat	1	-	-	-	-	-	-	-
Belum Memenuhi Jumlah Minimum Direksi	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Belum Melunasi Denda Administratif	-	-	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Baru Mengumumkan Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2017 yang Telah Diaudit pada Tanggal 29 Oktober 2018	1	-	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Menyampaikan Laporan Aktuaris Tahunan 2017 Pada Tanggal 25 September 2018	1	-	-	-	-	-	1	-
Telah Melaksanakan Seluruh Rekomendasi yang ditetapkan Dalam LHPLF Tanggal 17 Mei 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Telah Memenuhi Ketentuan Penempatan Investasi SBN Bagi Perusahaan Asuransi Umum	-	-	-	-	1	-	-	-
Perusahaan Belum Melunasi Denda Administratif	-	-	-	-	-	-	1	-
Kepemilikan SBN	-	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah	10	1	1	5	4	-	6	-

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2018, OJK menindaklanjuti 57 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

5. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahaan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2018, OJK telah memproses 18 permohonan pencairan atau penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan IV-2018, OJK menerima 25 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan IV-2018, terdapat empat permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan pada triwulan IV-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 15 — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Okt 2018	Nov 2018	Des 2018	Okt 2018	Nov 2018	Des 2018
Dana Pensiun Pemberi Kerja	207	208	203	1	0	5
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23	24	23	2	1	2
Total	230	232	226	3	1	7

Selama triwulan IV-2018, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Oktober, November, dan Desember 2018 dan enam laporan keuangan bulanan periode Oktober, November, dan Desember 2018 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pada triwulan IV-2018, OJK telah menerbitkan satu LHP Sementara dan sembilan LHP Final Dana Pensiun. Pada triwulan IV-2018, OJK mengenakan sanksi peringatan tertulis, teguran dan denda administrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 16 — Penegakan Kepatuhan terhadap Dana Pensiun

Penyebab	Peringatan			Teguran			Denda Administrasi
	SP 1	SP2	SP3	SP 1	SP 2	SP3	
Keterlambatan Menyampaikan Laporan Evaluasi Dewan Pengawas Terkait Kinerja Investasi Semester 1 Tahun 2018	-	-	-	17	-	-	-
Belum Dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama	3	1	-	-	-	-	-
Keterlambatan Pembayaran Pungutan OJK	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan Penyampaian Laporan Bulanan	9	-	-	-	-	-	-
Tidak Menyampaikan Rekomendasi Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan SBN	3	6	5	-	-	-	-
Pelanggaran Batasan Investasi Per Pihak dan Per Jenis	-	-	-	1	-	-	-
Keterlambatan Penyampaian Penunjukan AP dan/atau KAP Dalam Rangka Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	1
Tidak Menyampaikan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2017	-	-	-	1	-	-	-
Tidak Menyampaikan Rencana Pengkinian Data Tahun 2018	-	-	-	2	-	-	-
Keterlambatan Penyampaian Laporan Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT	-	-	-	-	-	-	8
Belum Menyampaikan Laporan Investasi Audited Tahun 2017	-	-	-	-	-	1	-
Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun 2017	-	-	-	-	-	-	2
Keterlambatan Penyampaian <i>Action Plan</i> Penerapan Program APU dan PPT	-	-	-	-	-	-	1
Total	21	7	5	21	0	1	12

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan IV-2018, pengawasan *off-site* dilakukan dengan menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan

perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode September-November 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 17 — Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	September 2018	Oktober 2018	November 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018
LBPP	5	3	6	183	185	179
LBPMV	3	2	4	63	64	61
LBPPI	0	0	0	2	2	2

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari 11 Perusahaan Pembiayaan, satu Perusahaan Modal Ventura, dan satu Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS). Berdasarkan pemeriksaan tersebut OJK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 18 ——— Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
Pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara	17
Pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan Final	15

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan IV-2018, OJK mengenakan 248 sanksi administratif terhadap lembaga pembiayaan yang terdiri dari 133 sanksi peringatan pertama (SP 1), 64 sanksi peringatan kedua (SP 2), 51 sanksi peringatan ketiga (SP 3), dan 40 sanksi pembekuan kegiatan usaha.

4. Sosialisasi Fidusia

Selama triwulan IV-2018 telah dilakukan Sosialisasi Fidusia di Pekalongan, Cirebon, Malang, Medan, Jember, dan Banjarmasin. Peserta kegiatan sosialisasi adalah pimpinan atau perwakilan kantor cabang perusahaan pembiayaan. Sementara itu, pihak yang terlibat terdiri dari OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM yang bertindak selaku narasumber.

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pemberian Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Selama triwulan IV-2018, OJK memberikan izin usaha sebanyak 17 izin usaha penuh LKM, enam di antaranya merupakan LKM yang telah memiliki izin bersyarat.

Sementara itu, terdapat 27 izin usaha LKM yang tidak berlaku kembali, sehingga sampai dengan triwulan IV-2018 terdapat 179 LKM.

Tabel II - 19 ——— Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha selama Triwulan IV-2018

No.	Nama LKM	Jenis Usaha	Asal Daerah
1.	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Mawaridussalam	Syariah	Deli Serdang
2.	Koperasi LKM Gapoktan Demang Tani	Konvensional	Kebumen
3.	Koperasi LKM Hatantiring Manggatang Utus	Konvensional	Kotawaringin Timur
4.	Koperasi LKMS Sinar Mandiri Sejahtera	Syariah	Tuban
5.	Koperasi LKMS BWM Sunan Pandan Aran	Syariah	Sleman
6.	Koperasi LKMA Gapoktan Manunggal, Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran	Konvensional	Pekalongan
7.	Koperasi LKMA Gapoktan Melati Makmur	Konvensional	Pekalongan
8.	Koperasi LKMA Gapoktan Lumbung Pangan	Konvensional	Pekalongan
9.	Koperasi LKMA Gapoktan Sari Makmur	Konvensional	Kota Metro
10.	Koperasi LKMS Pondok Pesantren As'ad	Syariah	Jambi
11.	Koperasi LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	Syariah	Semarang
12.	Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al-Masthuriyah	Syariah	Sukabumi
13.	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Purwokerto	Konvensional	Banyumas
14.	Koperasi LKMS Amal Dana Bergulir	Syariah	Bogor
15.	Koperasi LKMS Minhajut Thullab	Syariah	Banyuwangi
16.	Koperasi LKMS Honai Sejahtera Papua	Syariah	Jayapura
17.	Koperasi LKMA Gapoktan Maju Jaya Desa Talun Kecamatan Talun	Konvensional	Pekalongan

2. Pelaksanaan Pendampingan Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM

Selama triwulan IV-2018, OJK melakukan pendampingan LKM di 10 kota dengan total kegiatan pendampingan pada 22 LKM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 20 — Pelaksanaan Pendampingan LKM

No.	Lokasi	Nama LKM
1.	Banten	1. Koperasi LKMS Lan Taburo
		2. Koperasi LKMS EI-Manahij
		3. Koperasi LKMS Pesantren An Nawawi Tanara
2.	Indramayu	Koperasi LKM Mina Sumitra
3.	Bengkulu	1. Koperasi LKM Kemala Aman
		2. Koperasi LKMS MM Sejahtera
		3. Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani
4.	Lampung	Koperasi LKMS Waysulan Mandiri Sejahtera
5.	Tegal	1. Koperasi LKMS BTM Artha Surya
		2. Koperasi LKMS BTM Kota Tegal
6.	Ponorogo	PT LKM BKD Ponorogo
7.	Padang	1. Koperasi LKMA Kola Jaya
		2. Koperasi LKMA Anduring Jaya
		3. Koperasi LKMA Salingka Permai
		4. Koperasi LKMA Baringin Sakti
		5. Koperasi LKMA Saiyo Sakato Koperasi LKM Gapoktan Tanah
8.	Kediri	1. Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirboyo
		2. Koperasi LKMS Amanah Makmur Sejahtera
9.	Jawa Tengah	1. Koperasi LKM LKD Rejo Makmur
		2. Koperasi LKM Sati Mulyo Taman Sari
		3. Koperasi LKM Pundi Mataram Pati
10.	Pandeglang	PT LKM Pandeglang Berkah

3. Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Selama triwulan IV-2018, OJK melakukan asistensi perizinan badan kredit desa (BKD) menjadi LKM bagi 104 BKD di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan IV-2018, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 12 Lembaga Keuangan Khusus. Berdasarkan pemeriksaan langsung yang telah diselesaikan, telah diterbitkan sebanyak 12 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 21 — Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan	Lokasi
1.	PT Jamkrida Papua	Jayapura
2.	PT Jamkrida Kaltim	Samarinda
3.	PT Jamkrida Bali Mandara	Denpasar
4.	PT Jamkrida NTT	Kupang
5.	PT Sili Gadai Nusantara	Surabaya
6.	PT GDC Solusi Gadai	Surabaya
7.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor Pusat	Jakarta
8.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor Cabang Makassar	Makassar
9.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor Cabang Malang	Malang
10.	PT Svaraputra Penjuru Vijaya	Tangerang
11.	PT Jamkrida Jateng	Semarang
12.	PT HBD Gadai Nusantara	Jakarta

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Hingga triwulan IV-2018, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

- Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus 46 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, dengan rincian 39 Perusahaan Pialang Asuransi, lima Perusahaan Pialang Reasuransi, dan dua Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- Penerbitan 42 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 23 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF);
- Tindak lanjut 10 pengaduan mengenai jasa penunjang IKNB;
- Sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 63 sanksi yang terdiri dari 23 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 19 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), 12 Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), empat Sanksi Administratif berupa Denda, dan lima Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan IV-2018.

G. Pengawasan *Financial Technology* (*Fintech*)

Pada triwulan IV-2018, OJK telah memberikan tanda terdaftar terhadap 19 Penyelenggara *Fintech Lending*,

sehingga terdapat sebanyak 88 Penyelenggara *Fintech Lending* terdaftar pada tahun 2018.

Tabel II - 22 — Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar

No.	Nama Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	Nama Platform	Nomor dan Tanggal Keputusan
1.	PT Adiwisista Finansial Teknologi	Danai	S-960/NB.213/2018 tanggal 16 Oktober 2018
2.	PT Pinduit Teknologi Indonesia	Pinduit	S-961/NB.213/2018 tanggal 16 Oktober 2018
3.	PT Pinjam Meminjam Global	Pinjam	S-962/NB.213/2018 tanggal 16 Oktober 2018
4.	PT Dana Aguna Nusantara	Danamart	S-1059/NB.213/2018 tanggal 28 November 2018
5.	PT Sejahtera Sama Kita	Samakita	S-1060/NB.213/2018 tanggal 28 November 2018
6.	PT Minitch Finance Indonesia	Saya Modalin	S-1061/NB.213/2018 tanggal 28 November 2018
7.	PT Nusantara Digital Techno	Plaza Pinjaman	S-1073/NB.213/2018 tanggal 07 Desember 2018
8.	PT Tujuh Mandiri Sejahtera	Vestia P2P Lending Platform	S-1074/NB.213/2018 tanggal 07 Desember 2018
9.	PT Adiwisista Finansial Teknologi	Singa	S-1075/NB.213/2018 tanggal 07 Desember 2018
10.	PT Pembiayaan Digital Indonesia	AdaKami	S-1108/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
11.	PT Indo Fintek Digital	ModalUsaha	S-1109/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
12.	PT Pintar Inovasi Digital	Asetku	S-1110/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
13.	PT Danafix Online Indonesia	Danafix	S-1111/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
14.	PT Lumbung Dana Indonesia	Lumbung Dana	S-1112/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
15.	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	Lahansikam	S-1113/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
16.	PT Solusi Teknologi Finansial	Modal Nasional	S-1114/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
17.	PT Dana Bagus Indonesia	Dana Bagus	S-1115/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
18.	PT Lentera Dana Nusantara	ShopeeKredit	S-1116/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018
19.	PT Investdana Fintek Nusantara	ikredo online	S-1117/NB.213/2018 tanggal 21 Desember 2018

Sementara itu, terdapat sebanyak 23 Penyelenggara *Fintech Lending* terdaftar dalam proses penetapan izin

usaha yaitu sebagai berikut:

Tabel II - 23 — Proses Penetapan Izin Usaha Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar

No.	Nama Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	Nama Platform	No.	Nama Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	Nama Platform
1.	PT Investree Radhika Jaya	Investree	13.	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Akseleran
2.	PT Creative Mobile Adventure	KIMO	14.	PT Indonusa Bara Sejahtera	Taralite
3.	PT Lunaria Annuar Teknologi	Koinworks	15.	PT Fintegra Homido Indonesia	FINTAG
4.	PT Amarnya Mikro Fintek	Amartha	16.	PT Sol Mitra Fintec	Invoila
5.	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Modalku	17.	PT Digital Tunai Kita	TunaiKita
6.	PT Mediator Komunitas Indonesia	CROWDO	18.	PT iGrow Resources Indonesia	Igrow
7.	PT Esta Kapital Fintek	Esta Kapital	19.	PT Cencil Solusi Mitra Teknologi	Cencil
8.	PT Pendanaan Teknologi Nusa	Danacepat	20.	PT Intekno Raya	Dana Merdeka
9.	PT Aman Cermat Cepat	KlikACC	21.	PT Kas Wagon Indonesia	Cash Wagon
10.	PT Indo Fin Tek	Dompеткиlat	22.	PT Ammana Fintek Syariah	Ammana
11.	PT Digital Alpha Indonesia	UangTeman	23.	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Gradana
12.	PT Simplefi Teknologi Indonesia	AwanTunai			

Pada triwulan IV-2018 terdapat 13 permohonan perubahan kepemilikan Penyelenggara *Fintech Lending*

terdaftar yang masih dalam proses sebagai berikut:

Tabel II - 24 — Proses Persetujuan Perubahan Kepemilikan Penyelenggara *Fintech Lending* pada Triwulan IV-2018

No.	Nama Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	Nama Platform	No.	Nama Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Terdaftar	Nama Platform
1.	PT Digital Tunai Kita	Tunai Kita	8.	PT Grha Dana Bersama	Avantee
2.	PT Indonusa Bara Sejahtera	Taralite	9.	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Gradana
3.	PT Dana Pinjaman Inklusif	PinjamanGo	10.	PT Glotech Prima Vista	Do-it
4.	PT Oriente Mas Sejahtera	Finmas	11.	PT Mediator Komunitas Indonesia	Crowdo
5.	PT Mapan Global Reksa	Findaya	12.	PT Crowde Membangun Bangsa	Crowde
6.	PT Finacel Digital Indonesia	Kredivo	13.	PT Pinduit Teknologi Indonesia	Pinduit
7.	PT Artha Permata Makmur	Cash Cepat			

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan kepada 2 Penyelenggara *Fintech Lending* dan melaksanakan acara Sosialisasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Penyelenggara *Fintech Lending* beserta Ekosistemnya yang bertema 'OJK Fintech Days' di Bali. Kegiatan

sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan masyarakat umum di daerah terkait *Fintech Lending*, ekonomi digital dan arah serta kebijakan OJK.

H. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan IV-2018, OJK menerima 1.345 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Rincian permohonan

perizinan kelembagaan IKNB selama triwulan IV-2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 25 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi*)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Jumlah				
Pemberian Izin Usaha/Pendaftaran	80	28	108	77	19	-	12
Pencabutan Izin Usaha	23	6	29	22	4	3	-
Likuidasi	31	8	39	19	12	8	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	36	11	47	15	25	2	5
Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP	381	65	446	260	123	13	50
Perubahan Nama	11	4	15	11	1	2	1
Kantor Cabang	754	169	923	838	61	24	-
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	317	101	418	395	19	4	-
Produk	1.266	413	1.679	1.560	104	15	-
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	939	289	1.228	1.023	152	53	-
Pelaporan Pengurus	518	176	694	678	3	13	-
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	319	20	339	339	-	-	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	140	32	172	167	5	-	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	112	23	135	122	13	-	-
Total	4.927	1.345	6.272	5.526	541	137	68

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

1. Pemberian Izin Usaha/Pendaftaran

Pada periode triwulan IV-2018, OJK telah menyelesaikan 77 permohonan izin usaha IKNB.

Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 26 — Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	2	3	-	2	-	1
Dana Pensiun	8	1	9	4	4	-	1
Perusahaan Pembiayaan	3	2	5	-	4	-	1
Perusahaan Modal Ventura	4	1	5	1	2	-	2
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha	25	-	25	13	7	-	5
Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran	39	22	61	59	-	-	2
Total	80	28	108	77	19	-	12

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Tabel II - 27 — Penetapan Izin IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Capital Life	Dana Pensiun
2.	Dana Pensiun Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia	Dana Pensiun
3.	PT Pegadaian DPM Sejahtera	Perusahaan Pergadaian
4.	PT Sinar Gadai Pratama	Perusahaan Pergadaian

Tabel II - 28 — Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan Pergadaian

No.	Nama Perusahaan Pergadaian	No.	Nama Perusahaan Pergadaian
1.	Koperasi Rizky Abadi	16.	Maju Bersama
2.	KSU Tunas Mulia	17.	KSU Bintang Timur
3.	Koperasi Bangun Citra Mandiri	18.	Kopensa
4.	UD Mitra Usaha	19.	Koperasi Cahaya Jaya
5.	Unit Primer Simpan Pinjam Yasper	20.	Aldi
6.	Kembar Gadai	21.	Bonar Jaya Gadai
7.	Unit Primer Simpan Pinjam Kosipral	22.	Bedjo Gadai
8.	Kertaraharja Gadai	23.	Gadai Hinalang Jaya
9.	Pegadaian TOKO Mas Kresno	24.	Koperasi Rap Maju
10.	Arta Gadai	25.	Mangun Jaya Gadai
11.	Gadai Mitra Sima	26.	Martua
12.	Mangun's Jaya Gadai	27.	Barokah Gadai Sejahtera
13.	Gadai Arta Sima	28.	UD MMT
14.	Gemah Ripah Gadai	29.	Gadai Putra Salomo
15.	Koperasi Manfaat Bersama	30.	KSP Karunia Sejahtera Pratama

2. Pencabutan Izin Usaha

Selama triwulan IV-2018, terdapat tujuh pencabutan izin usaha yang telah diselesaikan, yaitu:

Tabel II - 29 — Pencabutan Izin IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	Dana Pensiun Karyawan PT Igaras	Dana Pensiun
2.	PT Capitalinc Finance	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Tossa Salimas Finance	Perusahaan Pembiayaan
4.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Sejahtera	Dana Pensiun
5.	PT Sosial Entrepreneur Indonesia	Perusahaan Modal Ventura
6.	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	Perusahaan Pembiayaan
7.	PT UAF Jaminan Kredit	Perusahaan Penjaminan

Sampai dengan triwulan IV-2018, jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 731 perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 30 — Jumlah IKNB Konvensional

No.	Jenis Industri	Jumlah
I.	Asuransi dan Reasuransi*	
1.	Asuransi Jiwa	53
2.	Asuransi Umum	74
3.	Reasuransi	6
4.	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BRJS Kesehatan dan BRJS Ketenagakerjaan	3
5.	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2
	Total Asuransi dan Reasuransi	138
II.	Dana Pensiun	
1.	DPPK PPIP	44
2.	DPPK PPMP	164
3.	DPLK	25
	Total Dana Pensiun	
III.	Lembaga Pembiayaan*	
1.	Perusahaan Pembiayaan	182
2.	Modal Ventura	63
3.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
	Total Lembaga Pembiayaan	247
IV.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*	
1.	Perusahaan Penjaminan	22
2.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4.	Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha	19
5.	Perusahaan Pergadaian –Pendaftaran	70
	Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	113
	TOTAL LJKNB (Konvensional)	731

3. Likuidasi

Sampai dengan triwulan IV-2018 telah diselesaikan tiga permohonan terkait proses likuidasi perusahaan dan 22

permohonan terkait proses likuidasi dana pensiun.

4. Pengambilalihan (Akuisisi)

Selama periode triwulan IV-2018, terdapat 15 permohonan pengambilalihan perusahaan asuransi dan

perusahaan pembiayaan yang telah diselesaikan. Rincian pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 31 — Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	4	3	7	3	2	2	-
Perusahaan Pembiayaan	32	8	40	12	23	-	5
Total	36	11	47	15	25	2	5

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Tabel II - 32 — Persetujuan Pengambilalihan IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Nusa Surya Ciptadana	Perusahaan Pembiayaan
2.	PT Verena Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Sarana NTT Ventura	Perusahaan Modal Ventura
4.	PT IBJ Verena Finance	Perusahaan Pembiayaan
5.	PT Celebes Artha Ventura	Perusahaan Modal Ventura

5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)
Sampai dengan triwulan IV-2018 telah diselesaikan 260 persetujuan/pencatatan/pengesahan sebagai berikut:

Tabel II - 33 — Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	71	24	95	60	28	2	5
Dana Pensiun	134	6	140	79	40	2	19
Perusahaan Pembiayaan	105	23	128	72	29	7	20
Perusahaan Modal Ventura	51	8	59	34	19	1	5
Perusahaan Penjaminan	16	3	19	12	5	1	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1	-	1	1	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	1	3	2	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-
Total	381	65	446	260	123	13	50

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

6. Perubahan Nama

Pada triwulan IV-2018, OJK menyelesaikan 11 perubahan nama IKNB dengan rincian pelaporan perubahan nama IKNB disajikan sebagai berikut:

- a. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (d/h PT Tugu Pratama Indonesia);
- b. PT Akulaku Finance Indonesia (d/h PT Maxima Auto Finance);
- c. PT China Life Insurance Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia);
- d. PT PFI Mega Life Insurance (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia);
- e. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (d/h PT Malacca Trust Wuwungan Insurance);
- f. PT Asuransi Jiwa Bumiputera (d/h PT Bhinneka Life Indonesia);
- g. PT Asuransi Jiwa Advista (d/h PT Asuransi Jiwa Millenium);
- h. PT Caturusa Sejahtera Finance (d/h PT Malaca Trust Finance);
- i. PT Fuji Finance Indonesia (d/h PT Jaya Fuji Leasing Pratama);
- j. PT Asuransi Simas Insurtech (d/h PT Asuransi Simas Net); dan
- k. PT Pool Advista Finance Tbk (d/h PT Pool Advista Finance)

7. Kantor di Luar Kantor Pusat (Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran)

Sampai dengan triwulan IV-2018, terdapat 923 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi dan reasuransi serta lembaga pembiayaan, dengan

838 di antaranya telah diselesaikan. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 34 — Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
Pembukaan Kantor Cabang	6	9	15	7	4	4
Penutupan Kantor Cabang	7	5	12	11	-	1
Perubahan Alamat	21	5	26	23	-	3
Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	7	4	11	10	1	-
Lembaga Pembiayaan dan LJKK						
Pembukaan Kantor Cabang	235	33	268	248	20	-
Penutupan Kantor Cabang	79	13	92	79	7	6
Perubahan Alamat	399	100	499	460	29	10
Total	754	169	923	838	61	24

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Sementara itu, sampai dengan triwulan IV-2018, OJK menyelesaikan 395 pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor pemasaran Perusahaan

Asuransi dan Reasuransi dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Rincian pelaporan kantor selain kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 35 — Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	198	86	284	265	17	2
Perusahaan Pembiayaan	119	15	134	130	2	2
Total	317	101	418	395	19	4

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

8. Pelaporan/Persetujuan Produk dan Persetujuan *Bancassurance*

Sampai dengan triwulan IV-2018 OJK telah menerima 1.679 permohonan/pelaporan dan telah menyelesaikan sebanyak 1.560 permohonan/

pelaporan. Rincian pelaporan/persetujuan produk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 36 — Rekapitulasi Pelaporan Produk

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Pencatatan Nama Lain	18	5	23	22	1	-
Pencatatan Perubahan Produk	245	100	345	314	28	3
Pencatatan Produk Baru	54	8	62	62	-	-
Persetujuan <i>Bancassurance</i>	373	128	501	500	-	1
Persetujuan Perubahan Produk	69	9	70	64	6	-
Persetujuan Produk Baru	502	161	663	584	68	11
Persetujuan ASO**	13	2	15	14	1	-
Total	1.266	413	1.679	1.560	104	15

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

***) Harus memperoleh persetujuan dari OJK dengan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Sampai dengan triwulan IV-2018, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 1.023 permohonan

dengan rincian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 37 — Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB

Perusahaan	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	248	93	341	301	33	7
Dana Pensiun	175	85	260	215	-	45
Perusahaan Pembiayaan	351	76	427	346	81	-
Perusahaan Penjaminan	32	17	49	34	15	-
Perusahaan Modal Ventura	133	18	151	127	23	1
Total	939	289	1.228	1.023	152	53

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Dari sejumlah 1.023 permohonan PKK yang telah diselesaikan, terdapat 872 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya terdiri dari 360 komisaris/dewan

pengawas, 436 direksi/pengurus, 32 pemegang saham pengendali, 24 aktuaris, dan 20 auditor internal.

10. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

Selama triwulan IV-2018, terdapat 176 pelaporan perubahan pengurus IKNB dan 518 pelaporan merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Dari jumlah dimaksud, sebanyak 678 telah dicatat dan

sebanyak 16 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 38 — Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	135	38	173	160	3	10
Dana Pensiun	177	84	261	258	-	3
Perusahaan Pembiayaan	168	37	205	205	-	-
Perusahaan Modal Ventura	31	12	43	43	-	-
Perusahaan Penjaminan	7	5	12	12	-	-
Total	518	176	694	678	3	13

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

11. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Pada triwulan IV-2018, terdapat 339 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB telah diselesaikan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 39 — Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	241	3	244	244	-	-
Perusahaan Pembiayaan	78	17	95	95	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Total	319	20	339	339	-	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

12. Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

Selama triwulan IV-2018, telah diselesaikan 167 pelaporan aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya

merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 40 — Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Tenaga Ahli dan Aktuaris	121	26	147	144	3	-
Auditor Internal	19	6	25	23	2	-
Total	140	32	172	167	5	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

13. Pelaporan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan IV-2018, terdapat 122 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan yang telah diselesaikan.

Tabel II - 41 — Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III - 2018	Triwulan IV - 2018	Total			
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	83	15	98	85	13	-
Perusahaan Pembiayaan	26	7	33	33	-	-
Perusahaan Modal Ventura	2	1	3	3	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	-	1	1	-	-
Total	112	23	135	122	13	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pada triwulan IV-2018, OJK melakukan pengembangan pengawasan Bank Umum dengan melakukan finalisasi atas beberapa ketentuan internal yaitu pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bank terkait penetapan tindak lanjut status pengawasan Bank dan pengkinian pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pengawas Bank Umum. Kedua pedoman ini ditetapkan

pada Oktober 2018 dan dapat digunakan sebagai panduan bagi Pengawas Bank Umum.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Bank Umum dalam melakukan pemeriksaan Bank, telah dilakukan *capacity building* terkait Pemeriksaan Berdasarkan Risiko. Metode yang digunakan melalui *workshop* dan *case study* dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan

Pengawas dengan mempelajari kasus-kasus perbankan yang telah terjadi serta membuat langkah pencegahan apabila kejadian tersebut terjadi pada Bank yang diawasi.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan IV-2018, terdapat dua pedoman pengawasan BPR yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pedoman Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, yang bertujuan untuk menyediakan panduan bagi pengawas dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memantau pengawasan terkait Rencana Bisnis BPR dan BPRS serta mendukung efektivitas proses pengawasan BPR dan BPRS; dan
2. Pedoman Pengawasan Tata Kelola BPR, yang bertujuan untuk menyediakan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola BPR dan mengevaluasi laporan-laporan terkait Tata Kelola BPR.

Selain itu, OJK juga menyusun Kajian mengenai pengawasan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi BPR dan BPRS. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan ketentuan internal mengenai Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT bagi Pengawas BPR dan BPRS.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal

Kajian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan implementasi atau penggunaan Peraturan Bapepam LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal oleh Profesi Penilai dan kebutuhan pengawasan serta proses penelaahan internal OJK. Permasalahan tersebut antara lain terkait penggunaan dua pendekatan penilaian (*valuation approach*) dan metode penilaian (*valuation method*) serta rekonsiliasi hasil penilaian dengan Metode Rata-Rata Tertimbang.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Sejak dicabutnya PSAK 49 belum terdapat keseragaman bentuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Reksa Dana di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jumlah Reksa Dana berbentuk KIK yang begitu pesatnya serta munculnya jenis produk investasi KIK lainnya yaitu EBA dan DIRE, rancangan peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif (Reksa Dana, EBA, dan

DIRE) ini diharapkan dapat memberikan pedoman/standar sehingga dapat mempermudah pemahaman pengguna laporan keuangan KIK dengan kualitas pelaporan dan keterbukaan yang lebih baik serta meningkatkan daya banding laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK di Indonesia.

3. Kajian Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2017

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan keterbukaan informasi terkait struktur dan pelaksanaan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gambaran praktik tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik terkini. Dalam kajian ini dilakukan pengkajian *database* yang bersumber dari Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik 2017.

4. Kajian Tata Kelola Penerbitan *Project Bond*

Kajian ini disusun untuk mendukung program pemerintah terkait pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan *bond*. Kajian ini bertujuan untuk melihat aspek tata kelola dalam penerbitan *project bond* (definisi, pihak yang terlibat, persyaratan diterbitkannya *project bond*, serta perjanjian yang terikat mengenai *project bond/important contractual structured*).

5. Studi Penggunaan Bank Sentral Dalam Penyelesaian Dana di Pasar Modal Secara Penuh (*Full Central Bank Money*)

Studi ini dilakukan dalam rangka menganalisis kemungkinan penggunaan Central Bank Money (CeBM) secara penuh dalam penyelesaian dana atas transaksi pasar modal dengan mengidentifikasi alternatif sumber fasilitas *intraday* bagi Pemegang rekening yang membutuhkan untuk penyelesaian dana atas transaksi pasar modal.

B. Sosialisasi dan Edukasi

1. Sosialisasi Pengembangan Perusahaan Efek Daerah 2018

Selama triwulan IV-2018, telah dilakukan FGD terkait Pengembangan Perusahaan Efek Daerah di Solo, Malang, Manado, dan Padang. Rangkaian acara dalam kegiatan tersebut antara lain *sharing* terkait *outlook* ekonomi dan potensi pasar modal di daerah, Kebijakan Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Efek Sebagai *Intermediaries* Pasar Modal, *Consultation Desk* PED dan *Sharing Session* Pengawasan Pasar Modal.

2. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2018

Selama triwulan IV-2018, telah dilakukan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2018 di Denpasar dan Pematangsiantar. Rangkaian acara dalam kegiatan tersebut antara lain Media Gathering dan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Pendalaman Materi Pasar Modal, Pertemuan dengan Perwakilan BPD, BPR dan PE, Seminar Investasi Pasar Modal di Universitas serta OJK Mengajar.

3. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Sosialisasi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional telah diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya.

C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

1. Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa Dari T+3 ke T+2

Kemajuan dan integrasi sistem teknologi informasi memungkinkan penyelesaian transaksi lebih cepat dari T+3 guna meningkatkan likuiditas serta menurunkan persyaratan permodalan dan agunan. Perkembangan proyek saat ini yaitu proses penyusunan peraturan di OJK dan SRO.

2. Pengembangan *Electronic Book Building* (EBB)

Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam Pasar Perdana baik dalam pembentukan harga maupun Penawaran Umum; meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses Penawaran Umum dan harga IPO yang telah ditetapkan serta memperluas partisipasi Perusahaan Efek sebagai *selling agent* dalam proses Penawaran Umum dilakukan pengembangan dan penyusunan struktur untuk sistem *Electronic Book Building/EBB (Front-End EBB)*, pengujian *Front-End* sistem EBB melalui aplikasi *Cloud* dengan Anggota Bursa yang menjadi *volunteer*, OJK dan SRO. Adapun hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan atas konsep *front-end* EBB yang telah dibangun dan pengujian area pengembangan (*on premise*) PT BEI yang terintegrasi dengan *Back-End* SRO.

3. Program Sistem Penyampaian Dokumen Pencatatan Secara Elektronik (*E-Registration*)

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan kecepatan proses evaluasi Penawaran Umum dan Pencatatan dan kemudahan akses penyampaian dokumen oleh calon Emiten serta perlunya penyimpanan data/ dokumen secara elektronik, OJK bekerja sama dengan bursa membangun sistem yang dapat digunakan oleh Calon Emiten dan Underwriter dalam melakukan penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK dan Permohonan Pencatatan kepada BEI satu pintu dan terintegrasi dalam sistem SPRINT OJK.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan IV-2018, OJK menyelenggarakan seminar aktuaris di Universitas Halu Oleo, Kendari. Jumlah aktuaris (ASAI dan FSAI) mengalami kenaikan sejumlah 54 orang, sehingga sampai dengan triwulan IV-2018 terdapat 568 aktuaris.

B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan IV-2018, yaitu melakukan koordinasi terkait penyusunan SKKNI Bidang Perasuransian.

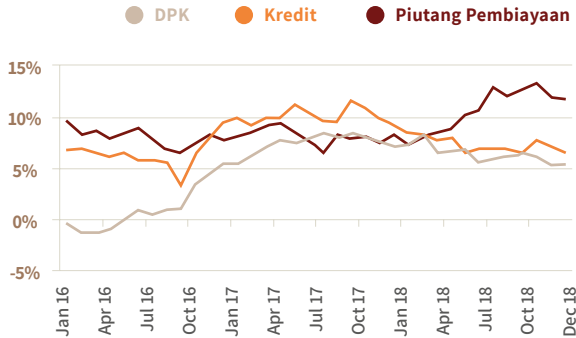
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik di triwulan IV-2018, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang solid, solvabilitas yang tinggi, dan tingkat risiko yang terkendali. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, OJK akan terus mengawasi dinamika perekonomian dan pasar keuangan global secara berkala dan berkoordinasi dengan lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan terpantau solid. Kredit perbankan kembali tumbuh *double digit* sebesar 11,75% (yoy) (Des 17: 8,2% yoy), yang sebagian besar pendanaannya bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 6,45% (yoy) (Des 17: 9,35% yoy). Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh moderat sebesar 5,36% (yoy) (Des 17: 7,32% yoy).

Grafik II - 3 — Kinerja Intermediasi IJK

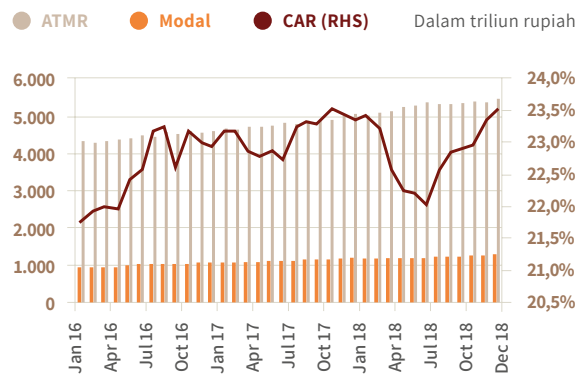


Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber pendanaan korporasi domestik masih terpantau tinggi. Sepanjang tahun 2018, perhimpunan dana di pasar modal mencapai Rp166 triliun (2017: Rp255 triliun). Secara keseluruhan, terdapat 168 penawaran umum di tahun 2018, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 161 penawaran umum. Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan korporasi sebagai modal kerja (58,94%) dan pembayaran hutang (16,12%).

Pasar keuangan terus melanjutkan penguatan di triwulan IV-2018. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 6.194,50 (3,65% *qta*) di akhir tahun. *Yield* Surat Berharga Negara (SBN) tercatat turun rata-rata 26,5 bps, dengan penurunan terbesar berasal dari *yield* tenor jangka panjang sebesar 30,1 bps. Performa pasar keuangan yang positif ini sejalan dengan *net buy investor* non residen di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp0,4 triliun dan Rp42,4 triliun.

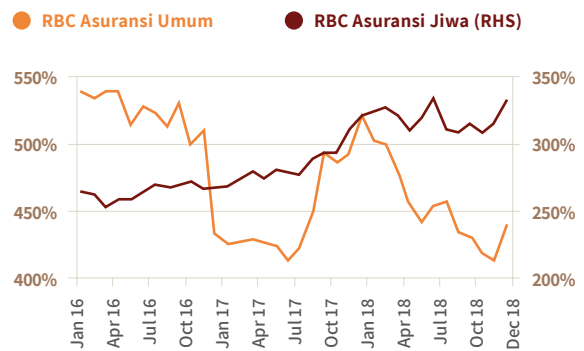
Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai sangat kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan, Risk-Based Capital (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Desember 2018 tercatat sebesar 23,5%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Desember 2018 tercatat masing-masing sebesar 441%, dan 332%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Desember 2018 tercatat sebesar 2,88 kali. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi industri jasa keuangan untuk tumbuh lebih lanjut.

Grafik II - 4 — CAR Perbankan



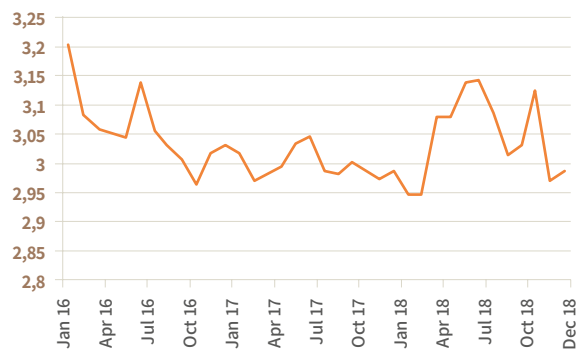
Sumber: OJK

Grafik II - 5 — RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

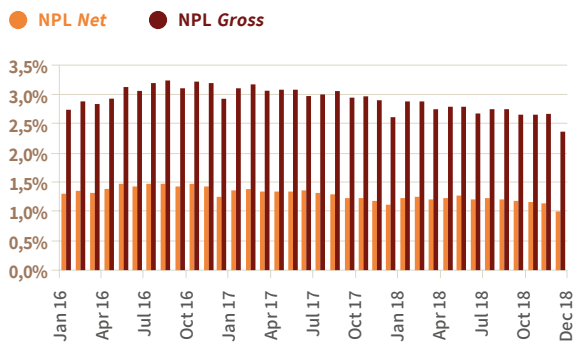
Grafik II - 6 — *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

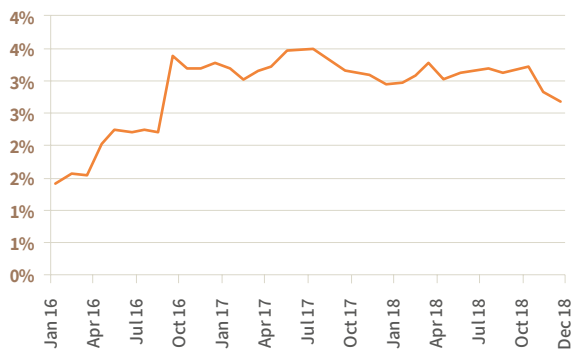
Risiko kredit industri jasa keuangan terpantau masih rendah. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Desember 2018 tercatat masing-masing sebesar 2,37% dan 1,00%. Sejalan dengan penurunan NPL, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan turun ke level 2,71%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang terkendali.

Grafik II - 7 — Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 8 — Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih rendah. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 102,52% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 21,89%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercemin dari rasio Posisi Devisa Neto yang masih rendah di tingkat 1,73%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) di akhir tahun 2018 naik 2,08% (*qtq*) serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing naik 2,92% (*qtq*) dan 2,55% (*qtq*).

Stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Pertumbuhan kredit perbankan masih berada di atas rata-rata *peer group*, dengan pertumbuhan DPK yang masih mampu menopang pertumbuhan kredit. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang terkecil sehingga relatif lebih tahan terhadap tekanan nilai tukar dibandingkan dengan negara lainnya.

Tabel II - 42 — Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	11,75	6,45	2,37	1,72	23.50
Malaysia	4,93	5,35	1,60	10,19	16.98
Thailand	7,18	6,15	3,08	N.A.	17.56
Filipina	17,08	11,04	1,76	2,22	15.23
Vietnam	19,53	14,02	2,32	N.A.	12.39
India	12,05	10,26	10,34	6,40	15.90

Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK akan terus mengawasi dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional secara berkala. Selain itu, OJK akan terus mengambil *policy measures* yang tepat dan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memitigasi dampak tekanan volatilitas global di domestik.

Dengan meningkatnya risiko di pasar keuangan, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang berkaitan dengan risiko pasar dan risiko likuiditas. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. OJK juga akan melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkuat ketahanan pasar domestik.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan IV-2018, telah dilaksanakan berbagai pertemuan level teknis untuk membahas sejumlah isu, di antaranya pertukaran data dan informasi di antara lembaga anggota KSSK dan persiapan kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Selain itu, keempat anggota KSSK telah melaksanakan kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang bertujuan untuk menguji kerangka kerja penyelesaian permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Selain Bank Sistemik (BSBS), terutama BSBS besar, untuk mengidentifikasi gap kerangka kerja, menguji efektivitas koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan terhadap protokol manajemen krisis yang telah disusun. Secara umum, pelaksanaan simulasi berhasil mengidentifikasi beberapa gap dalam beberapa ketentuan dan mekanisme penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank serta telah menunjukkan peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga KSSK.

UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Untuk triwulan IV-2018, telah dilaksanakan Rapat KSSK yang dihadiri oleh keempat lembaga anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan IV-2018, KSSK menyimpulkan bahwa, di tengah volatilitas pasar keuangan yang masih berlanjut, stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan relatif terjaga.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Penelitian dan Pengaturan

A. Sosialisasi Ketentuan

Pada triwulan IV-2018, OJK menyelenggarakan sosialisasi ketentuan OJK khususnya mengenai EPK di Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Banyuwangi, Kediri, dan Surabaya. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, media lokal. Materi yang disampaikan antara lain adalah:

- a. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK LPK)
- b. Peraturan mengenai literasi dan inklusi keuangan, yaitu:
 1. POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat,
 2. SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dan
 3. SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

- c. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit 2017*)

B. Sosialisasi dan Workshop SiPEDULI

Dalam rangka sosialisasi implementasi SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan upaya meningkatkan jumlah partisipasi PUJK dalam pelaporan rencana serta realisasi edukasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan sosialisasi dan workshop SiPEDULI di Medan, Makassar, dan Bandung. Peserta merupakan perwakilan dari PUJK dari seluruh wilayah Sumatera Utara, Makassar, Jakarta dan Bandung serta sekitar Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh total 366 peserta. Peserta menerima materi terkait ketentuan literasi dan inklusi keuangan, penyampaian laporan rencana dan realisasi edukasi melalui SiPEDULI dan penyampaian laporan rencana dan realisasi inklusi melalui SiPEDULI.

2.5.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Sepanjang triwulan IV-2018 telah terbentuk 9 TPAKD dengan rincian 7 Kabupaten/Kota dan 2 TPAKD Provinsi. Dengan demikian jumlah TPAKD yang telah dikukuhkan sepanjang 2018 adalah 82 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota.

B. Bulan Inklusi Keuangan



Bulan Inklusi Keuangan (BIK) adalah kegiatan inklusi keuangan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *stakeholders* terkait secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. *Tagline* dalam kegiatan BIK adalah “Inklusi Keuangan Untuk Semua” yang bertujuan mencapai peningkatan inklusi keuangan secara signifikan untuk seluruh kalangan masyarakat.

Pada penyelenggaraan BIK 2018, tercatat pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan di 189 kota dan pembukaan sebanyak 7.511.700 rekening baru. Selain itu, terdapat 2.223 kegiatan yang diselenggarakan oleh 557 LJK.

Sebagai puncak kegiatan BIK tahun 2018, OJK mendukung penyelenggaraan kegiatan FinEXPO & Sundown Run 2018 yang merupakan inisiasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah sebanyak 10.000 orang yang terdiri dari 7.000 orang yang berasal dari calon nasabah dan keluarga nasabah PUJK serta 3.000 orang peserta Sundown Run.

C. Peluncuran Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

OJK meluncurkan Tabungan SiMUDA bersama dengan 8 Bank Peserta SiMUDA. Tabungan SiMuda adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain: SiMuda InvestasiKu, SiMuda EmasKu dan SiMuda RumahKu. Diharapkan melalui peluncuran produk tabungan SiMUDA, kaum millennial dapat belajar menggunakan produk keuangan yang identik dengan kaum dewasa serta dapat belajar berinvestasi sejak dini melalui fitur tabungan berjangka.

D. OJK-Fintech Talk

OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan seminar *Fintech Talks* dengan tema “*Utilizing Fintech as a Platform for Enhancing SMEs and Islamic Financing*”. Pelaksanaan seminar tersebut dibagi menjadi dua panel yaitu Panel pertama, pembahasan terkait “*Utilizing Fintech Platform as a Tool for Enhancing MSMEs and Financial Inclusion*”. Panel kedua yaitu terkait dengan “*Fintech Models for Islamic Financing*”.

Pada September 2018, penyaluran kredit UMKM oleh *Peer-to-Peer (P2P) Lending* mencapai Rp13,83 triliun. Meski terbilang kecil, potensi penyaluran kredit oleh *P2P Lending* berpotensi meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya UMKM yang *unbankable* sehingga pilihan untuk melakukan pinjaman melalui *P2P Lending* memiliki kemungkinan untuk meningkat. Sehingga diharapkan industri *P2P Lending* dapat mendukung akses inklusi keuangan dan peningkatan akses pendanaan bagi UMKM.

Melalui seminar tersebut, diharapkan untuk mendapatkan masukan terkait model pemanfaatan *financial technology* oleh UMKM dan model *fintech* untuk pembiayaan syariah.

E. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

OJK kembali menggelar KOINKU pada tahun 2018 sebagai salah satu strategi OJK dalam rangka mencari ide kreatif dan inovatif terkait model inklusi keuangan. Tema KOINKU tahun 2018 adalah “Model Inklusi Keuangan Perdesaan”. Penyelenggaraan KOINKU tahun ini berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini peserta diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan *bootcamp* selama tiga hari. Dalam kegiatan tersebut, didapatkan inovasi inklusi keuangan antara lain:

1. Menuju Masyarakat Perdesaan yang *Well Literate* Melalui BRISave
2. Koperasi Susu Perah di Perdesaan
3. E-Kopi; Ngopi Sambil Investasi
4. Memberantas Rentenir Melalui Pengajian dan Pemberdayaan Umat
5. Mengoptimalkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Inklusi Keuangan di Perdesaan

F. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Disabilitas

Kegiatan “Studi Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia” merupakan kerja sama antara OJK, Bappenas, KOMPAK dan DEFINIT. Sebagai rangkaian dari studi dimaksud, telah dilakukan *baseline survey* “Tingkat Kesadaran (*Awareness*) Lembaga Keuangan terhadap Kebutuhan Akses Layanan Keuangan bagi Penyandang Disabilitas”. Survei tersebut melibatkan 84 responden dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa 84,47% responden belum memiliki kebijakan maupun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) khusus untuk penyandang disabilitas.

Atas dasar hal tersebut, salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah pengembangan PTO untuk pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas. Dalam rangka pengembangan PTO dimaksud, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), kementerian/lembaga, regulator, dan LJK guna meminta masukan dalam rangka penyusunan PTO. Saat ini telah diterbitkan surat kepada PUJK terkait Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagi penyandang disabilitas. Bentuk regulasi dari PTO akan didiskusikan lebih lanjut.

2.5.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Edukasi Keuangan

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan delapan kegiatan edukasi keuangan di Pekalongan, Sorong, Jakarta, Busan, Seoul dan Madinah. Kegiatan tersebut berfokus kepada sasaran target peserta dalam Revisit Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017.

Secara umum peserta yang hadir dalam keseluruhan acara tersebut mencapai 1.877 orang dengan berbagai latar belakang seperti Komunitas Pengusaha Kecil dan Menengah, Mahasiswa, Karyawan dan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* sebesar 10-30%.

B. Galeri Investasi Mobile (GIM) dan Seminar Pasar Modal

OJK bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melaksanakan kegiatan Peluncuran Galeri Investasi Mobile (GIM) Universitas Methodist Indonesia dan Seminar Investasi di Pasar Modal Indonesia. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk mendorong Galeri Investasi agar lebih proaktif dalam melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat sekitar khususnya mahasiswa, menanamkan pentingnya perencanaan keuangan, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa di sektor pasar modal, membuka akses keuangan masyarakat atas sektor dimaksud, serta menghimbau untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 168 peserta. Peserta menerima materi terkait Pengelolaan Keuangan dan Waspada Investasi dan Pengenalan Produk Pasar Modal Indonesia. Pada kegiatan tersebut terdapat kenaikan pemahaman peserta sebesar kurang lebih 3,24%.

C. OJK Goes To Campus

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada segmen mahasiswa, OJK menyelenggarakan *OJK Goes to Campus*. Pada kegiatan ini disampaikan materi pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, dan Investasi di Pasar Modal. Selain penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar berinvestasi melalui pembukaan rekening efek di perusahaan sekuritas untuk mulai berinvestasi saham.

Tabel II - 43 ——— Pelaksanaan *OJK Goes to Campus*

No.	Kampus	Kota	Jumlah Peserta	Rata-rata Peningkatan Pemahaman Peserta
1.	Universitas Katholik Santo Thomas	Medan	280	15,13%
2.	Universitas Muhammadiyah	Sorong	170	18,73%
3.	Universitas Flores	Ende	242	19,28%

D. Pagelaran Wayang

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk perluasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Himbara, telah menyelenggarakan Edukasi Keuangan dan Sosialisasi Bantuan Sosial Non Tunai melalui seni pagelaran wayang kulit dan golek di Kabupaten Banyumas, Madiun dan Ciamis dengan total peserta sebanyak 3.000 orang dari berbagai kalangan masyarakat umum.

E. Monitoring dan Evaluasi Outreach Program bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Sebagai tindak lanjut pendampingan dan *monitoring* bulan ke-2 yang telah dilaksanakan oleh trainers, dilakukan *monitoring* dan evaluasi *outreach program* melalui rapat evaluasi dengan trainers dalam rangka kunjungan langsung ke tempat tinggal peserta dan kelas konsultasi. Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui *monitoring* dan evaluasi program tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku keuangan masyarakat bukanlah hal yang sederhana dan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti komitmen yang tinggi dari trainers dalam melakukan pendampingan, kerja sama yang baik dengan lembaga jasa keuangan untuk menyediakan produk/layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta, serta komitmen OJK sebagai pelaksana dalam memfasilitasi kegiatan pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi.

F. Edukasi Waspada Investasi

OJK melaksanakan dua kegiatan Edukasi Waspada Investasi bagi Pengurus dan Anggota Bhayangkari Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resor Manggarai Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat dan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan edukasi tersebut, total peserta yang hadir adalah sebanyak 255 peserta. Peserta mendapatkan materi Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga, Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Tindakan Hukum Atas Investasi Ilegal, Pengenalan Investasi Tabungan Emas dan Pengenalan Investasi di Pasar Modal. Melalui kegiatan ini, peserta menjadi lebih memahami pengelolaan keuangan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, terinspirasi dan lebih paham cara berinvestasi untuk masa depan, serta memahami cara berhemat dan menyisihkan uang.

G. Kampanye Pekan Edukasi Investor Sedunia/ World Investor Week (WIW) Tahun 2018

OJK telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan kampanye pekan edukasi investor sedunia atau World

Investor Week (WIW) 2018 bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pelaku usaha jasa keuangan di sektor pasar modal.

Kegiatan kampanye WIW 2018 terbagi ke dalam dua tahap yaitu pra-acara yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat berinvestasi di pasar modal melalui kampanye di media sosial dan stasiun radio populer. Sebagai acara utama dalam kampanye tersebut, dilaksanakan edukasi pasar modal bagi mahasiswa yang dilakukan oleh Sekolah Pasar Modal (SPM) dan BEI, serta Indonesia Investment Festival (Investival).

H. Sosialisasi Lembar Singkap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

OJK turut serta dalam mendukung keberhasilan Program Pemerintah dalam rangka perluasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Edukasi dan Sosialisasi BPNT bekerja sama dengan Himbara dan Kementerian/ Lembaga yang tergabung dalam Tim Penyusun Lembar Balik BPNT (Bank Indonesia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan/Kemenko PMK).

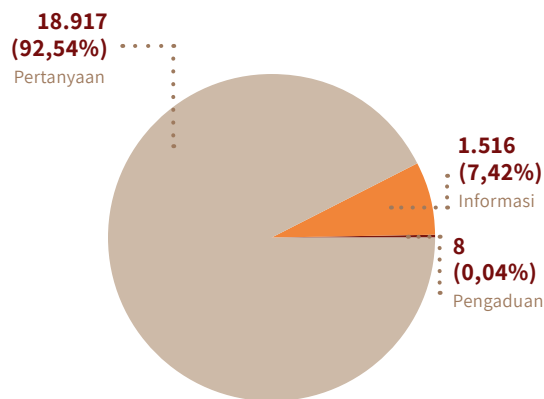
Tujuan kegiatan edukasi dan sosialisasi BPNT ini adalah menjelaskan konten lembar balik BPNT dan mendemonstrasikan cara penggunaan lembar balik BPNT. Cakupan materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi mencakup penjelasan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penggunaannya; Jenis bantuan non tunai yang disalurkan; Mekanisme pemanfaatan BPNT dan *e-warong*; Cara aman menggunakan KKS dan alur pengaduan KPM; dan Tips bijak mengelola dana bantuan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai mekanisme penyaluran BPNT dan perencanaan keuangan dalam pemanfaatan BPNT.

2.5.4 Perlindungan Konsumen

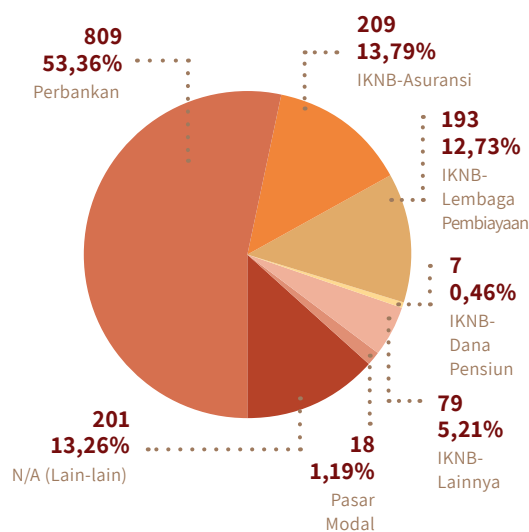
A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan IV-2018, layanan konsumen OJK menerima 20.441 layanan yang terdiri dari 1.516 penerimaan informasi, 18.917 pemberian informasi dan delapan pengaduan. Dari 18.917 pemberian informasi, terdapat 215 layanan yang diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.

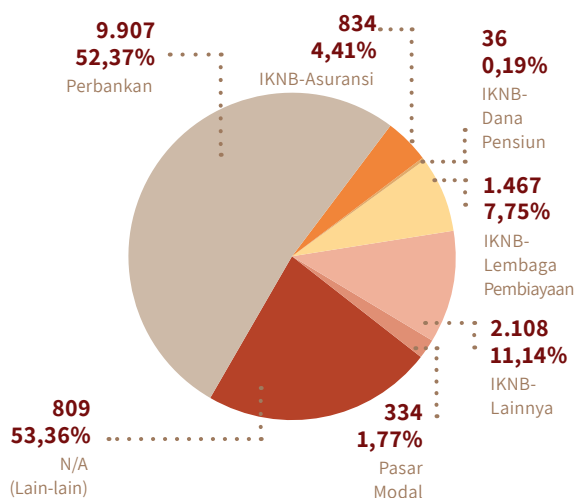
Grafik II - 9 — Penerimaan Layanan Konsumen Terintegrasi



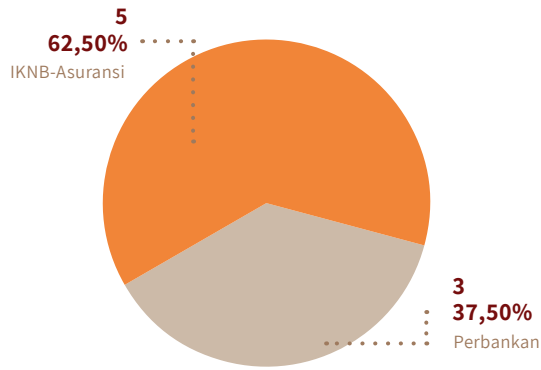
Grafik II - 10 — Layanan Informasi



Grafik II - 11 — Layanan Pertanyaan

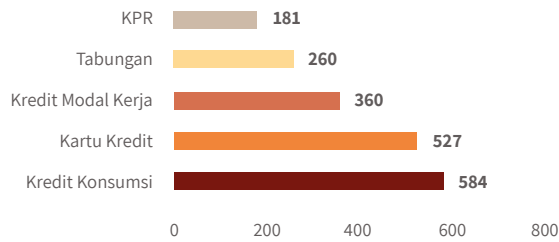


Grafik II - 12 — Layanan Pengaduan

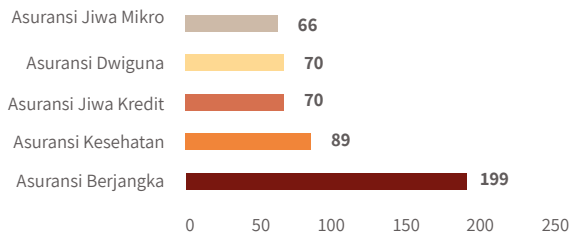


Dari masing-masing sektor terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu kredit konsumsi pada perbankan, obligasi pada pasar modal, produk asuransi berjangka (*term life*) pada perasuransian, produk iuran pasti pada industri dana pensiun, produk pembiayaan konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan penerima pinjaman dana pada IKNB-lainnya. Pada produk penerima pinjaman dana, sebagian besar berkaitan dengan industri *financial technology* (*fintech*).

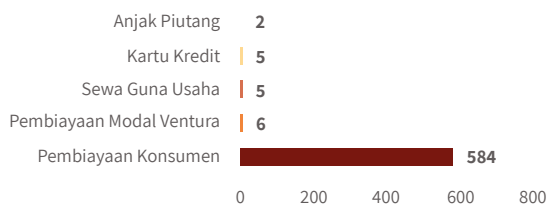
Grafik II - 13 — Jenis Produk Perbankan



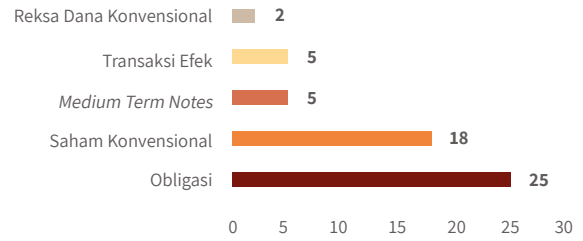
Grafik II - 14 — Jenis Produk Perasuransian



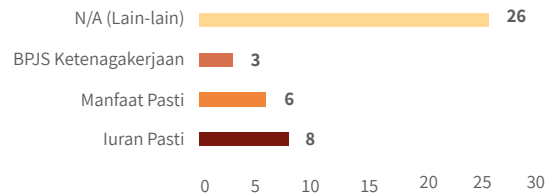
Grafik II - 15 — Jenis Produk Lembaga Pembiayaan



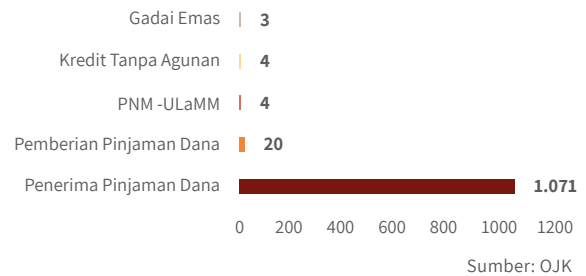
Grafik II - 16 — Jenis Produk Pasar Modal



Grafik II - 17 — Jenis Produk pada Dana Pensiun

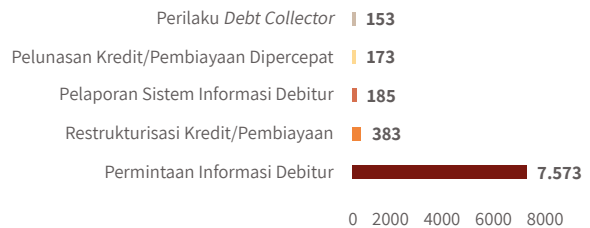


Grafik II - 18 — Jenis Produk IKNB Lainnya

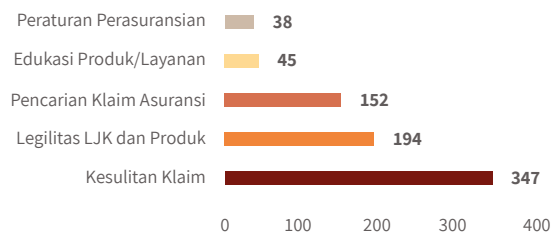


Pada triwulan IV-2018, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu permintaan informasi debitur pada perbankan, pertanyaan peraturan pada pasar modal, kesulitan klaim pada perasuransian, pencairan manfaat pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya.

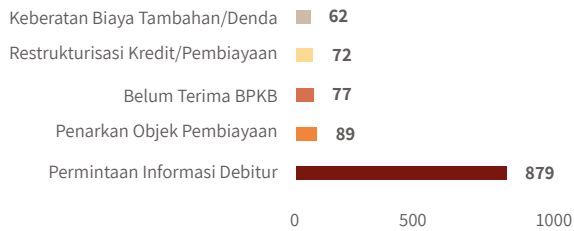
Grafik II - 19 — Jenis Permasalahan Perbankan



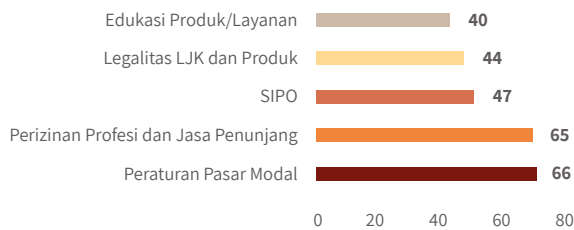
Grafik II - 20 — Jenis Permasalahan Perasuransian



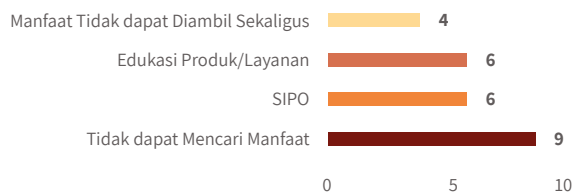
Grafik II - 21 — Jenis Permasalahan Lembaga Pembiayaan



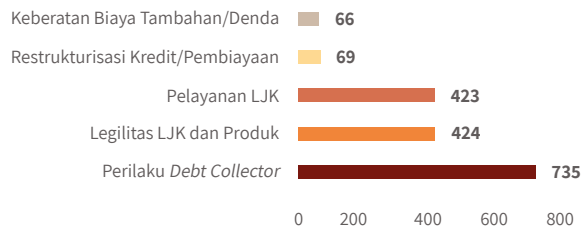
Grafik II - 22 — Jenis Permasalahan Pasar Modal



Grafik II - 23 — Jenis Permasalahan Dana Pensiun



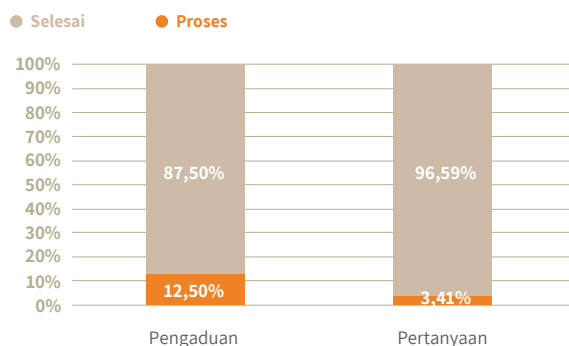
Grafik II - 24 — Jenis Permasalahan IKNB Lainnya



Sumber: OJK

Pada layanan yang masuk di triwulan IV-2018, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 96,59% (18.271 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebanyak tujuh pengaduan.

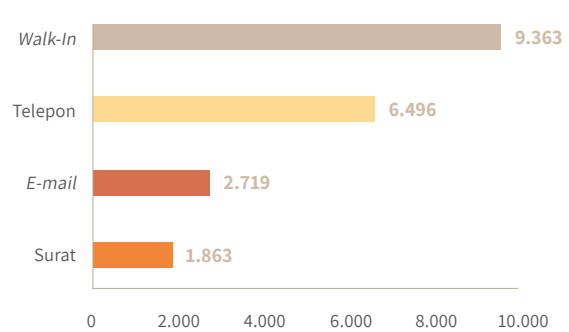
Grafik II - 25 — Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan IV-2018)



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 26 — Kanal Layanan (Triwulan IV-2018)



Sumber: OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan IV-2018, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui *walk in* atau datang langsung ke kantor OJK.

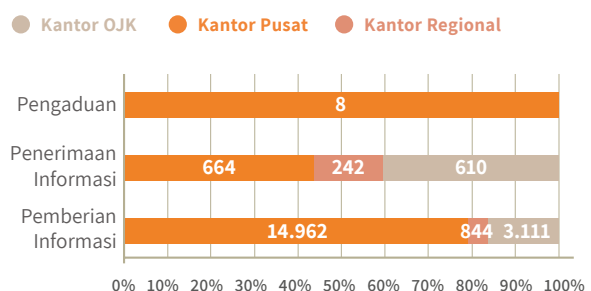
Tabel II - 44 — Penerimaan Layanan Meja Pengaduan OJK

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	15.634
Kantor Regional	1.086
Kantor OJK	3.721
Total	20.441

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 76,48% dari total penerimaan layanan pada triwulan IV-2018.

Grafik II - 27 — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja

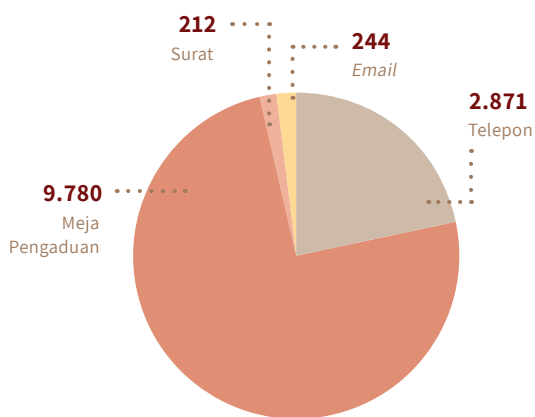


Sumber: OJK

B. Data Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya dapat mendatangi pusat layanan SLIK di kantor OJK masing-masing wilayah pada pukul 09.00–15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak lagi terbatas hanya pada industri perbankan. Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR, 142 BPRS, 32 Lembaga Pembiayaan, lima Perusahaan Modal Ventura, delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan satu Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut yang diberikan melalui *platform* informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer.

Grafik II - 28 — Penerimaan Layanan Berdasarkan Kanal Penyampaian



Sumber: OJK

Pada triwulan IV-2018, sebanyak 13.107 masyarakat telah menerima layanan SLIK baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor OJK maupun *call center*. Permintaan informasi yang dilayani antara lain mengenai data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. Di samping itu, SLIK juga dapat memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

C. *Workshop* Perlindungan Konsumen pada Industri *Financial Technology*

Pada triwulan IV-2018, OJK mengadakan *Workshop* Perlindungan Konsumen pada Industri *Financial*

Technology. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penyelenggara *fintech* terhadap ketentuan perlindungan konsumen, pemahaman tentang penanganan pengaduan konsumen *fintech* melalui optimalisasi *Internal Dispute Resolution* (IDR) serta memberikan pengetahuan tentang penanganan penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK.

Workshop ini dihadiri oleh 69 penyelenggara *fintech* dan dua asosiasi *fintech*. Materi yang disampaikan dalam *workshop* adalah terkait perlindungan konsumen pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan penanganan penyelesaian pengaduan konsumen *fintech*.

D. Asistensi Layanan Konsumen OJK dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Sepanjang triwulan IV-2018, OJK melakukan tujuh kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di Cirebon, Tegal, Jember, Jayapura, Riau, Samarinda dan Malang.

Pada kegiatan tersebut dilakukan Asistensi Layanan Konsumen OJK, yaitu penyampaian materi yang mencakup statistik dan data perkembangan penanganan pengaduan OJK di masing-masing kota serta sosialisasi Perlindungan Konsumen dengan peserta perwakilan dari PUJK dan OJK.

Pelaksanaan kegiatan Asistensi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sesuai Perubahan PDK No.1/PDK.07/2016, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan pengaduan dan meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM serta penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS.

E. Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk memperkenalkan tugas dan fungsi OJK serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan kepada kalangan akademisi, mahasiswa, dan PUJK, OJK menyelenggarakan sosialisasi bekerja sama dengan beberapa LAPS.

a. Sosialisasi Bersama BMDP

OJK menyelenggarakan sosialisasi bekerja sama Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) di Jakarta. Sosialisasi dimaksud dihadiri oleh 120 orang yang berasal dari perwakilan PUJK dana pensiun yang merupakan anggota BMDP, pengurus BMDP, serta internal OJK.

b. Sosialisasi Bersama LAPSPI

OJK menyelenggarakan dua sosialisasi bekerja sama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan

Indonesia (LAPSPI) di Medan. Sosialisasi diikuti peserta mahasiswa dan perwakilan PUJK dari kota Medan dan sekitarnya.

c. Sosialisasi Bersama BAMPPPI

OJK bersama dengan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) melaksanakan sosialisai dengan tema “Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” di Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh 118 peserta yang merupakan dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

d. Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Bersama BMPPVI

OJK bersama dengan Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) melaksanakan sosialisasi di Bandung. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PUJK sektor pembiayaan, pergadaian, dan ventura terutama yang merupakan anggota BMPPVI, mengenai ketentuan perlindungan konsumen oleh OJK serta tata cara penyelesaian sengketa di LAPS khususnya BMPPVI. Peserta sosialisasi adalah 68 perwakilan PUJK pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura di daerah Bandung dan sekitarnya.

F. Working Group Internal Dispute Resolution

Dalam rangka memperkuat infrastruktur perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk *Working Group Internal Dispute Resolution/WG IDR* yang beranggotakan 40 PUJK yang terdiri dari 22 sektor perbankan, 12 sektor asuransi, dan enam sektor pembiayaan. OJK telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan anggota WG IDR secara aktif, seperti pembahasan isu perlindungan konsumen terkini, meninjau usulan ketentuan baru, pembahasan kajian, dan sosialisasi kebijakan baru OJK.

OJK menyelenggarakan pertemuan dengan WG IDR yang mengusung konsep “*Coffee Morning* dengan ADK EPK” Jakarta. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk menyampaikan *update* kegiatan strategis perlindungan konsumen selama tahun 2018 dan mendiskusikan aspek pemasaran produk keuangan serta pengaduan di bidang *fintech*.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (ADK EPK). Peserta yang hadir sebanyak 72 orang dari anggota WG IDR dan wartawan dari media massa nasional.

2.5.5 Market Conduct

A. Pengawasan Market Conduct

Pada triwulan IV-2018 OJK melaksanakan pengawasan *market conduct* di satu PUJK sampel di Provinsi Bengkulu.

Pemeriksaan tematik *market conduct* meninjau konten dari klausula terkait aspek eksonerasi/eksemsi dan penyalahgunaan keadaan, serta format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat oleh Bank Pembangunan Daerah agar seimbang, adil, wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku.

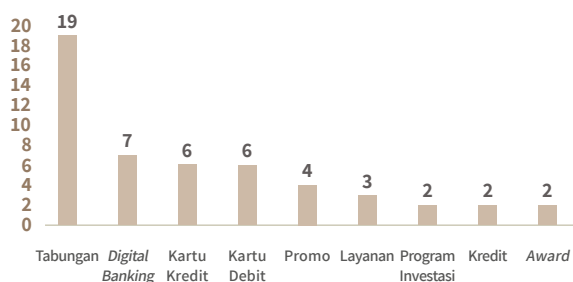
B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan *screening* data atas iklan yang masuk ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI) dari total 82 iklan dari media cetak dan media *online* di Indonesia. Sepanjang triwulan IV-2018, terdapat 52 iklan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Sektor Perbankan mendominasi penawaran produk dan/atau layanan melalui media massa sampel sepanjang triwulan IV-2018. Sebaran sektor iklan jasa keuangan yang tidak merata disebabkan oleh karakteristik segmentasi pasar ketiga sektor berbeda.

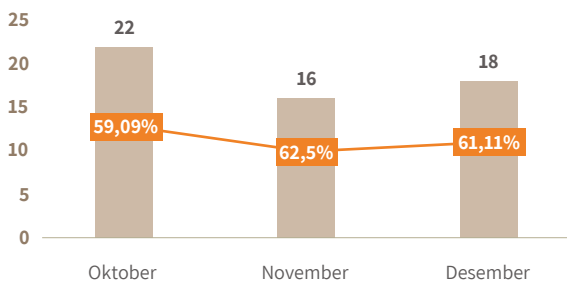
Berikut ini data 10 besar iklan berdasarkan produk yang ditawarkan:

Grafik II - 29 — Iklan Berdasarkan Produk yang Ditawarkan



Iklan sektor jasa keuangan di media massa didominasi oleh produk perbankan. Jumlah iklan per produk yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah iklan keseluruhan menunjukkan variasi produk yang beragam.

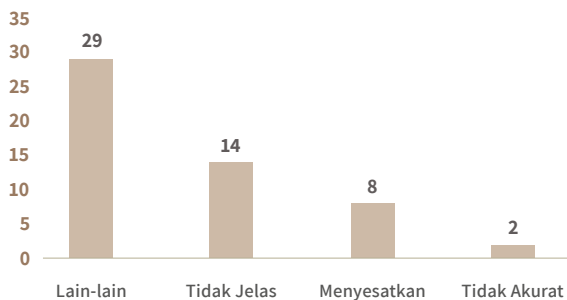
Grafik II - 30 — Tren Pelanggaran Iklan



Tren pelanggaran pada menunjukkan bahwa lebih dari 50% iklan melanggar ketentuan OJK karena umumnya PUJK menggunakan satu desain iklan yang sama untuk dipasang selama kurun waktu tertentu, sehingga pelanggaran yang dilakukan berulang.

Berikut ini grafik klasifikasi dugaan pelanggaran berdasarkan kategori yang disyaratkan sesuai POJK dan SEOJK:

Grafik II - 31 — Klasifikasi Pelanggaran



Kategori lain-lain melesat menjadi kategori yang paling banyak dilanggar pada triwulan IV-2018, karena pernyataan “PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” yang tidak memenuhi standar terbaca, mulai diperhitungkan sebagai iklan melanggar. Selain itu kategori tidak jelas, menyesatkan, dan tidak akurat masih banyak dilanggar PUJK yang tidak melakukan transparansi dalam beriklan, salah satunya dengan mencantumkan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa tautan informasi yang jelas. Selain itu pencantuman “gratis”, “free”, dan kata yang dipersamakan dengan itu, serta pencantuman janji “aman” dalam iklan.

Menindaklanjuti hal tersebut, OJK menyusun Pedoman Iklan Jasa Keuangan sebagai *guide line* bagi PUJK untuk melaksanakan promosi melalui iklan di media massa sesuai dengan ketentuan. Pedoman ini akan mulai diluncurkan dan diimplementasikan pada tahun 2019.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.6.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan IV-2018, OJK telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), tujuh pelimpahan berkas

perkara ke Kejaksaan, dan terdapat tujuh berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21).

Sehingga selama tahun 2018, OJK telah melaksanakan kegiatan Penyidikan yang terdiri dari:

Tabel II - 45 — Kegiatan Penyidikan Per Bidang

Penyidikan		
Perkara Perbankan	1 perkara BPD 12 perkara BPR/S	13
Perkara Pasar Modal	1 perkara Emiten 1 perkara Perusahaan Efek	2
Perkara IKNB	1 perkara Asuransi 1 perkara Pembiayaan	2
Total		17

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya telah mengirimkan 15 berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tabel II - 46 — Pemberkasan Kejaksaan

Perkara	Pemberkasan Kejaksaan	P-21
Perbankan	12 Berkas Perkara BPR/S	12
Pasar Modal	-	-
IKNB	1 Berkas Perkara Pembiayaan 2 Berkas Perkara Asuransi	3
Total		15

2.6.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

OJK secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya penyidik sesuai dengan formasi efektif, penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, dan penyusunan kajian terkait di bidang tindak pidana sektor jasa keuangan. Selama tahun 2018, telah dilakukan penyelesaian dua SEDK dan empat kajian.

2.6.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga terkait antara lain Kejaksaan Republik Indonesia, LPS, dan PPAK.

2.6.4 Satgas Waspada Investasi Daerah

Pada triwulan IV-2018, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat di Ambon dan Padang serta pembekalan tim kerja SWID KOJK Padang dan KOJK Jambi.

Selain kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembekalan tim kerja SWID, Satgas Waspada Investasi juga melaksanakan kegiatan kuliah umum di Universitas Negeri Andalas Padang dan Universitas STIKOM Bali. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat.

2.6.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada triwulan IV-2018, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 24 entitas yang melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin dan menghentikan 224 kegiatan *fintech peer to peer lending* berdasarkan informasi dari satuan kerja Pengawasan *Fintech*.

Selanjutnya, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha dari 108 entitas dan 628 entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK. Dari yang telah dihentikan kegiatan usahanya, terdapat 12 Entitas yang telah diproses hukum oleh kepolisian dan tiga Entitas telah mendapatkan putusan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan putusan pengadilan.

2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.7.1 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Faktor yang menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan rezim APU PPT di Indonesia adalah penerapan program APU PPT berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*). Dengan menggunakan RBA, setiap negara, otoritas yang berwenang dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapinya serta melakukan mitigasi risiko secara lebih efektif.

Selaku otoritas pada sektor jasa keuangan, OJK menerapkan pengawasan penerapan program APU PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan dengan optimalisasi sumber daya manusia yang sepadan dengan tingkat risiko dari PJK yang diawasinya. Hal ini memungkinkan OJK mengalihkan sumber daya ke area yang dianggap berisiko tinggi, sehingga OJK dapat menggunakan sumber daya dan sarana pengawasan lainnya secara lebih efektif.

Sejalan dengan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), OJK telah menerbitkan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Pedoman Penerapan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK mengenai penerapan program APU dan PPT berbasis risiko di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan terhadap penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan juga menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Pada triwulan IV-2018, OJK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan periode Semester I tahun 2018. Pemeriksaan program APU PPT dilakukan terhadap dua aspek yaitu pemeriksaan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APU PPT Semester I Tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan atas sektor Perbankan sejumlah 596 PJK dengan perincian 13 Bank Umum (terdiri dari BUK dan BPD), dua Bank Umum Syariah, 544 Bank Perkreditan Rakyat dan 37 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Untuk sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sejumlah 12 PJK dengan perincian tujuh Perusahaan Asuransi, tiga Perusahaan Asuransi Syariah dan dua Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

2.7.2 Mutual Evaluation Review (MER) 2018

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) yang telah dilaksanakan oleh *Asia Pacific Group* (APG) pada 21st APG *Annual Meeting*, APG telah menetapkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dinilai sangat memadai. Indonesia telah memperoleh nilai yaitu 6 *compliant*, 29 *largely compliant*, 4 *partially compliant* dan 1 *non-compliant* untuk penilaian terhadap *Technical Compliance Assessment* (TCA). Sementara itu, hasil untuk *effectiveness* atau *Immediate Outcome* (IO), Indonesia memperoleh nilai 5 *substantial* dan 5 *moderate* dan 1 *low*.

Terkait dengan penerapan APU PPT di SJK, OJK telah memberikan kontribusi positif atas keberhasilan Indonesia dalam MER tahun 2018. Hal ini tertuang dalam beberapa penilaian terhadap OJK maupun pelaku usaha di SJK yang telah berperan aktif dalam mengimplementasikan APU PPT secara efektif. OJK, selaku *major financial supervisors* dinilai telah memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan kerentanan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan telah secara efektif melakukan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko terhadap sektor yang memiliki risiko TPPU/TPPT tinggi, yaitu perbankan dan pasar modal. Dari sisi PJK, efektivitas penerapan APU PPT juga dinilai baik antara lain terlihat dari pemahaman mayoritas PJK yang telah memadai mengenai risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT. Mayoritas PJK juga memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko tinggi dari *Politically Exposed Person* (PEP) dan *Non-Profit Organization* serta telah memiliki mekanisme mitigasi risiko. Terkait dengan kerjasama, OJK dinilai telah memiliki mekanisme kerjasama antar otoritas yang memadai dan telah melakukan pertukaran informasi dengan otoritas negara lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan APU PPT di sektor jasa keuangan telah diterapkan secara efektif.

Selanjutnya, untuk pertama kalinya Indonesia telah hadir dalam sidang *Financial Action Task Force (FATF) Plenary Meeting* di Paris. Pada kesempatan ini, terdapat dua isu yaitu (i) Indonesia hadir dengan tempat duduk dan bendera sendiri serta berstatus *observer* yaitu sebagai yurisdiksi terpisah atau tidak lagi di bawah bendera APG serta (ii) Indonesia mengajukan usulan waktu pelaksanaan penilaian kepatuhan oleh FATF dalam tahun 2019, yang akan dilanjutkan dengan *on site visit* serta pembahasan hasil MER FATF Indonesia (*FATF Plenary*) untuk menentukan dapat tidaknya Indonesia menjadi anggota FATF.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka pada periode ini, OJK memiliki tanggung-jawab untuk melakukan pemenuhan terhadap *Priority Actions Plan (PAC)* dari hasil penilaian MER tersebut yang mencakup (i) Penyempurnaan ketentuan APU PPT di SJK, (ii) Penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di seluruh SJK, (iii) Penguatan pengawasan APU PPT terhadap grup konglomerasi, (iv) Penerapan sanksi administratif secara tepat waktu yang lebih keras jika tindakan lain tidak meningkatkan kepatuhan, (v) Peningkatan pemahaman risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT, serta penerapan APU PPT berbasis risiko, kepada pelaku industri jasa keuangan, (vi) Peningkatan kerja sama terkait APU PPT di tingkat nasional dan internasional, dan (vii) Statistik APU PPT.

Dalam rangka mendukung MER FATF tersebut, peran pelaku di sektor jasa keuangan baik PJK maupun asosiasi diharapkan tetap berperan aktif untuk mencapai keberhasilan MER FATF mendatang.

2.7.3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur penting dalam menjaga kualitas penerapan program APU dan PPT, untuk itu peningkatan SDM sangat penting bagi OJK. Pengembangan kapasitas SDM ini merupakan wujud *recycling program* dari OJK kepada PJK, yang mana OJK memiliki tugas dan tanggung jawab berkontribusi untuk mengembangkan SDM baik kepada internal OJK dalam bentuk *in house training* kepada para pengawas maupun kepada eksternal yaitu pelaku di sektor jasa keuangan sebagai wujud pengembalian sebagian pungutan (*levy*) kepada PJK dalam bentuk *capacity building, workshop* pendampingan maupun sosialisasi sehingga seluruh pihak memiliki daya saing di tingkat regional dalam kepatuhan terhadap rezim APU dan PPT.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian program pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dalam triwulan IV-2018 ini telah dilakukan beberapa *workshop* pendampingan dan sosialisasi, antara lain:

1. *Workshop* Pendampingan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

Workshop pendampingan dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi dari PJK dalam menerapkan program penanganan APU PPT yang berbasis risiko. *Workshop* pendampingan dilakukan melalui kerjasama antara OJK dengan narasumber yang berasal dari beberapa perwakilan dari sektor jasa keuangan, otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta konsultan yang berkompeten dalam penanganan APU PPT yang berbasis risiko. Pada triwulan IV-2018 dilaksanakan pendampingan penerapan APU PPT bagi sektor IKNB.

Dari hasil *workshop* dimaksud diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta *workshop* sebesar 7,6% dengan nilai rata-rata *post test* 82%.

2. Sosialisasi Terkait *Sectoral Risk Assessment (SRA)* pada Sektor Jasa Keuangan

OJK melaksanakan sosialisasi terkait *Sectoral Risk Assessment (SRA)* dalam bentuk seminar “Pendalaman Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Sektor Jasa Keuangan-Berdasarkan Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi” yang bertujuan untuk menginternalisasikan hasil penilaian risiko APU dan PPT untuk sektor jasa keuangan yang telah disusun oleh OJK pada tahun 2017. Sosialisasi tersebut ditujukan bagi PJK di wilayah Jabodetabek.

Selain itu sosialisasi dimaksud juga dimaksudkan untuk internalisasi penilaian risiko TPPU/TPPT berdasarkan tindak pidana asal berisiko tinggi yang berada di bawah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Narasumber pada sosialisasi dimaksud berasal dari keempat lembaga terkait yaitu OJK, KPK, DJP dan BNPT.

SRA yang telah diterbitkan oleh OJK memetakan risiko APU PPT pada SJK dengan empat profil risiko yaitu risiko nasabah, risiko produk dan layanan, risiko area geografis serta risiko jaringan distribusi (*delivery channel*). Dengan memahami risiko yang telah diidentifikasi dalam SRA tersebut diharapkan PJK mampu melaksanakan pengelolaan risiko atas acuan tersebut untuk memitigasi adanya potensi TPPU/TPPT pada industri jasa keuangan.

2.7.4 Pengembangan Kebijakan APU PPT

Pada triwulan IV-2018 ini, OJK melakukan finalisasi penyempurnaan terhadap (i) Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Pedoman Penerapan APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan; (ii)

Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta (iii) Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK (RSEDK) tentang Pedoman Pengawasan Penerapan program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB). Ketiga rancangan pengaturan dimaksud bertujuan untuk mendukung penerapan program APU PPT yang sesuai dengan Rekomendasi FATF dan mencegah terjadinya TPPU/ TPPT di sektor jasa keuangan.

2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.8.1 Kerjasama Domestik

OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan lembaga negara untuk menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang.

Selama periode triwulan IV-2018, OJK telah menyelenggarakan 86 kegiatan yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Salah satu bentuk kegiatan kelembagaan yang telah dilaksanakan berupa sosialisasi. Hal tersebut diselenggarakan di beberapa daerah dengan sejumlah tema, antara lain perkembangan lembaga pembiayaan syariah di Nusa Tenggara Barat, pengelolaan keuangan yang legal dan logis, perlindungan konsumen, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, peran OJK dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui lembaga keuangan mikro, mengenal lembaga keuangan bukan bank, kredit melawan renternir, pencegahan investasi ilegal, gerakan edukasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat, pencegahan penipuan investasi bodong di Indonesia, wirausaha sebagai spirit kemandirian bangsa, dan masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi umat.

Kemudian, OJK melaksanakan kunjungan kerja bersama Komisi XI DPR RI. Fokus kegiatan tersebut mengenai pengawasan perkembangan perekonomian sebelum dan pascagempa Lombok, pengawasan perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, perkembangan sektor jasa keuangan, perkembangan dan permasalahan pada Kredit Usaha Rakyat, bentuk perlindungan konsumen

dan masyarakat yang telah dilakukan oleh OJK. Selain itu, OJK juga menyelenggarakan rapat koordinasi kehumasan dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2018 dan persiapan rencana kerja tahun 2019.

2.8.2 Kerjasama Internasional

a. Penandatanganan MoU dengan Instansi Internasional

Peningkatan Kerjasama Internasional OJK, melalui realisasi perjanjian kerjasama internasional. Pada triwulan IV-2018, terdapat dua perjanjian kerjasama internasional yaitu:

1. MoU OJK dengan Bank of Thailand tentang pengawasan perbankan lintas batas dan pertukaran informasi, telah mencapai tahap finalisasi dan dikirim ke Bank of Thailand.
2. MoU OJK dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) tentang *FinTech*

b. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dalam Lingkup Pasar Modal

Posisi Indonesia atas inisiatif internasional antara lain:

1. Dalam mengikuti inisiatif internasional, ASEAN *Capital Market Forum (ACMF)-Working Group A* telah merevisi POJK terkait prospektus penawaran umum yang mengakomodir ASEAN *disclosure standard*.
2. Dalam mengikuti inisiatif internasional dalam *Asian Bond Market Initiative (ABMI)*, saat ini telah diterbitkan POJK terkait Penawaran Umum kepada Investor Profesional dan sedang disusun POJK terkait Penerbitan Surat Utang Non-IPO.
3. Indonesia telah memenuhi *bond scorecard* dalam *Working Committee on Capital Market development (WC-CMD)*, kecuali:
 - *Acceptance of international MTN programmes.*
 - *No Restrictions on non-resident local currency (LCY).*
 - *Availability of active futures market.*

Rangkaian Kegiatan IMF-World Bank Annual Meetings



OJK menggelar lima kegiatan sebagai upaya memberikan nilai tambah perhelatan pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia yang berlangsung di Bali 12-13 Oktober 2019 yaitu *High Level Policy Dialogue Forum: The Future of Finance*, *Fintech Talk Seminar*, *International Seminar Research of Financial Sector and the Future of Finance*, *Financial Service Authority (FSA) of Asia Coordination Meeting* dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bank of Thailand dan MAS Singapura.

Selain itu, dalam rangka mendukung pemberdayaan lingkungan hidup berkelanjutan, OJK juga akan mengadakan acara penanaman pohon Gaharu bersama pimpinan pelaku industri Jasa Keuangan. Diharapkan bibit-bibit pohon yang ditanam akan tumbuh baik dan dapat dimanfaatkan serta memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat sekitar.

1. *OJK High Level Policy Dialogue Forum: The Future of Finance*

OJK memfasilitasi forum bagi pimpinan otoritas dan akademisi/ahli terpendang dari luar negeri berinteraksi dan berdiskusi bersama para pimpinan industri jasa keuangan, lembaga multilateral mengenai transformasi sektor jasa keuangan di tengah era revolusi teknologi digital dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2. *OJK Fintech Talk Seminar*

OJK menyelenggarakan seminar dalam rangka mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh dalam mendalami peran Fintech sebagai *platform* inklusi keuangan dan peningkatan akses pendanaan bagi segmen mikro dan SME serta Keuangan Syariah. Seminar yang juga didukung oleh *Asian Development Bank (ADB)* ini mengangkat tema besar “*Utilizing FinTech as a Platform as a Tool for Enhancing Micro,*

Small, Medium Enterprises and Financial Inclusion” dan “*Fintech Models for Islamic Banking*”.

3. *OJK International Seminar Research on Financial Sector and the Future of Finance*

Seminar riset ini bertujuan untuk menampilkan hasil penelitian terkini dari berbagai universitas luar negeri dan riset OJK bersama universitas dalam negeri mengenai isu-isu sektor keuangan yang sedang berkembang pada saat ini. Seminar riset yang didukung oleh *International Finance Corporation (IFC)* ini mengangkat tema “*Financial Sector Development and The Future of Finance*” dan menunjukkan inisiatif OJK dalam membangun iklim riset dan bertujuan antara lain untuk menyediakan forum bagi akademisi, ahli, regulator, dan profesional industri jasa keuangan untuk meningkatkan pemahaman masing-masing mengenai isu terkini di sektor keuangan.

4. *Pertemuan Koordinasi Financial Service Authority (FSA) di Asia*

Forum koordinasi antar-FSA di Asia ini merupakan inisiatif OJK dan merupakan forum awal bagi FSA di Asia yang bentuknya independen, yakni fungsi pengawasan industri jasa keuangannya terintegrasi dan tidak menyatu dengan fungsi bank sentral. Hadir dalam pertemuan tersebut otoritas keuangan dari Korea dan Jepang. Forum koordinasi ini juga membahas berbagai isu yang berkembang dalam era transformasi digital seperti tantangan kerangka pengawasan *Fintech* dan risiko *cybersecurity*.

5. *Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bank of Thailand dan MAS Singapura*

Penandatanganan MOU dengan Bank of Thailand dan MAS Singapura merupakan bentuk tindak lanjut OJK dalam mengimplementasi hasil nyata pertemuan-pertemuan antar pimpinan sebelumnya.

Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 3

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH



Pengembangan



Penerbitan 3 POJK yang mengatur Perbankan Syariah dan IKNB Syariah



Kajian Harmonisasi Ketentuan DPS



Kajian *Outlook* Perbankan Syariah



Kajian Kualitas Layanan Perbankan Syariah



Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian



Kajian Pengaturan Pemisahan (*spin-off*) Unit Syariah Perusahaan Perasuransian



Kajian Percepatan Konversi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah

Event



Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018



Kegiatan iB *Vaganza* di Jakarta, iB *Goes To Public Area* di Jakarta dan iB *Goes To Local Industry* di Yogyakarta bekerjasama dengan FoSSEI



ToT IKNB Syariah bagi Dosen dari 57 perwakilan Universitas dan Sekolah Tinggi di Jawa Barat



Sosialisasi IKNB Syariah di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bengkulu, dan Makassar

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 14 bps (*qtq*). Fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik tercermin dari pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 3,16% (*qtq*) dan 4,62% (*qtq*), sehingga pertumbuhan

aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 4,45% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD berada di atas *threshold* 50%, yaitu sebesar 131,86%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas *threshold* 10%, yaitu sebesar 24,30%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan perbaikan dengan menurunnya NPF *gross* sebesar 37 bps (*qtq*) menjadi sebesar 2,85%.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan IV-2017	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan III-2018		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan IV-2018		Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan IV-2018	
				Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	435,02	468,82	489,69	24,39	+ 5,49	20,87	+ 4,45	54,67	+ 12,57
Share Aset Perbankan Syariah (BUS + UUS + BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS + BUK + BPRS + BPR)	5,78	5,92	5,96	-	+ 0,22	-	+ 0,03	-	+ 0,17
DPK (Rp triliun)	341,71	363,19	379,96	14,80	+ 4,25	16,78	+ 4,62	38,26	+ 11,20
Pembiayaan (Rp triliun)	293,46	319,20	329,28	15,66	+ 5,16	10,08	+ 3,16	35,82	+ 12,21
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,82	11,01	9,98	0,33	+ 3,14	-1,03	- 9,39	-1,85	- 15,61
Jumlah Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BUS	13	14	14	1,00	7,69	0,00	0,00	1,00	7,69
- UUS	21	20	20	-1,00	-4,76	0,00	0,00	-1,00	-4,76
- BPRS	167	168	168	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60
Jumlah Kantor	2.610	2.670	2.724	36,00	1,37	54,00	2,02	114,00	4,37
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF <i>Gross</i> (%)	3,87	3,22	2,85	-	- 0,06	-	- 0,37	-	- 1,02
NPF <i>Net</i> (%)	2,13	1,99	1,74	-	+ 0,11	-	- 0,25	-	- 0,39
ROA (%)	1,17	1,73	1,59	-	+ 0,04	-	- 0,14	-	+ 0,41
BOPO (%)	89,62	84,20	85,49	-	- 0,58	-	+ 1,30	-	- 4,13
FDR (%)	85,31	87,36	86,11	-	+ 0,90	-	- 1,25	-	+ 0,80
BUS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	288,03	306,12	316,69	11,80	+ 4,01	10,57	+ 3,45	28,66	+ 9,95
DPK (Rp triliun)	238,22	251,48	257,61	10,41	+ 4,32	6,12	+ 2,43	19,38	+ 8,14
Pembiayaan (Rp triliun)	189,79	198,54	202,30	8,86	+ 4,67	3,76	+ 1,90	12,51	+ 6,59
Jumlah NPF (Rp triliun)	9,05	7,59	6,60	0,32	+ 4,43	- 1,00	- 13,11	- 2,45	- 27,09
CAR (%)	17,91	21,25	21,39	-	+ 0,93	-	+ 0,14	-	+ 3,48
NPF <i>Gross</i> (%)	4,77	3,82	3,26	-	- 0,01	-	- 0,56	-	- 1,50
ROA (%)	0,63	1,41	1,28	-	+ 0,04	-	- 0,13	-	+ 0,64
BOPO (%)	94,91	88,08	89,18	-	- 0,66	-	+ 1,09	-	- 5,74
FDR (%)	79,65	78,95	78,53	-	+ 0,27	-	- 0,42	-	- 1,12
Jumlah Kantor	1.825	1.862	1.875	36,00	1,97	13,00	0,70	50,00	2,74
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	136,15	150,80	160,64	11,92	+ 8,58	9,83	+ 6,52	24,48	+ 17,98
DPK (Rp triliun)	96,49	103,96	114,22	3,82	+ 3,81	10,26	+ 9,87	17,73	+ 18,37
Pembiayaan (Rp triliun)	95,91	111,98	117,89	6,64	+ 6,30	5,91	+ 5,28	21,99	+ 22,93
Jumlah NPF (Rp triliun)	2,02	2,41	2,53	0,01	+ 0,43	0,12	- 5,06	0,51	+ 25,25
NPF <i>Gross</i> (%)	2,11	2,15	2,15	-	- 0,13	-	0,00	-	+ 0,04
ROA (%)	2,47	2,43	2,24	-	+ 0,03	-	- 0,19	-	- 0,23
BOPO (%)	74,15	72,88	75,38	-	+ 0,26	-	+ 2,50	-	+ 1,23
FDR (%)	99,39	107,71	103,22	-	+ 2,52	-	- 4,50	-	+ 3,83
Jumlah Kantor	344	340	354	-9,00	-2,58	14,00	4,12	10,00	10,00
BPRS									
Total Aset BPRS (Rp triliun)	10,84	11,89	12,36	0,67	+ 5,99	0,47	+ 3,92	1,52	+ 14,03
DPK (Rp triliun)	6,99	7,74	8,13	0,57	+ 8,00	0,40	+ 5,11	1,15	+ 16,42
Pembiayaan (Rp triliun)	7,76	8,68	9,08	0,16	+ 1,86	0,40	+ 4,66	1,32	+ 17,01
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,75	1,01	0,84	0,00	+ 0,27	- 0,16	- 16,05	0,09	+ 12,60
CAR (%)	20,81	19,78	19,33	-	- 0,18	-	- 0,45	-	- 1,48
NPF <i>Gross</i> (%)	9,68	11,60	9,30	-	- 0,18	-	- 2,29	-	- 0,38
ROA (%)	2,55	2,30	1,87	-	- 0,11	-	- 0,42	-	- 0,68
BOPO (%)	85,34	86,18	87,66	-	+ 0,21	-	+ 1,48	-	+ 2,32
FDR (%)	111,12	112,15	111,67	-	- 6,77	-	- 0,48	-	+ 0,56
Jumlah Kantor	441	468	495	9,00	1,96	27,00	5,77	54,00	54,00

Sumber : OJK, diolah.

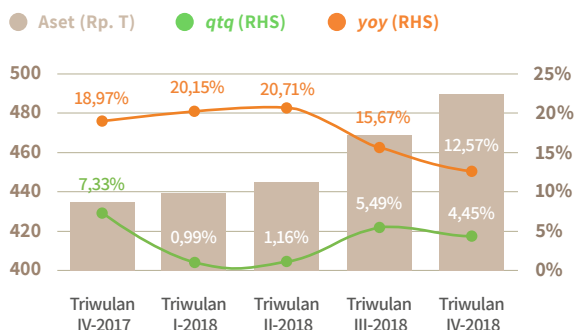
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2018

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga *double digit* (12,57%, *yoy*), dengan pangsa aset mencapai 5,96% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,92%. Kontributor terbesar adalah UUS yang tumbuh 6,52% (*qtq*), sementara BUS dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 3,45% (*qtq*) dan 3,92% (*qtq*). Berdasarkan komposisi asetnya, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 64,67%, 32,80%, dan 2,52% dari total aset perbankan syariah.

Komponen utama aset perbankan syariah merupakan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dengan porsi sebesar 67,24%, penempatan pada Bank Indonesia (12,81%), dan surat berharga yang dimiliki (13,47%). PYD tumbuh dengan laju yang cukup terjaga (3,16% *qtq*, atau 12,21% *yoy*), penempatan pada Bank Indonesia meningkat 12,00% (*qtq*) meski secara tahunan menurun dengan laju -2,18% (*yoy*). Di lain pihak, penempatan pada surat berharga yang dimiliki perbankan syariah mengalami peningkatan 9,27% (*qtq*) atau 47,60% (*yoy*). Di sisi pasiva, pertumbuhan aset dipengaruhi oleh meningkatnya DPK yang meningkat sebesar 4,62% (*qtq*), sementara modal mengalami penurunan sebesar 5,97% (*qtq*). Sampai dengan triwulan IV-2018, secara akumulatif penambahan modal disetor bank syariah mencapai Rp6 triliun.

Grafik III - 1 — Tren Aset Perbankan Syariah

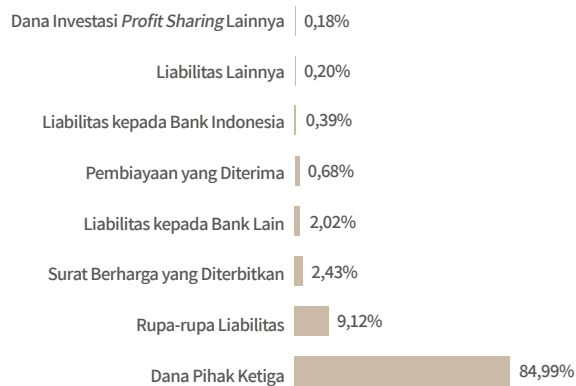


Sumber : SPS, Desember 2018

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 84,99% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 9,12%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 2,43% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 2,02%.

Grafik III - 2 — Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah

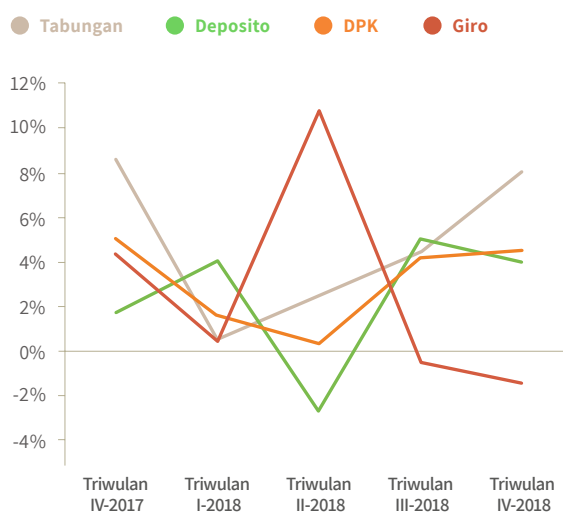


Sumber : SPS, Desember 2018

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 5,17% (*qtq*) atau 12,04% (*yoy*). Pertumbuhan sumber dana perbankan syariah ditopang oleh DPK yang tumbuh 4,62% (*qtq*) atau 11,20% (*yoy*), tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,25% (*qtq*). Deposito memiliki porsi sebesar 57,62%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 30,91%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 11,47%.

Pada periode triwulan IV-2018, deposito tumbuh dengan laju sebesar 4,06% (*qtq*), mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% (*qtq*). Di sisi lain, tabungan tumbuh sebesar 8,19% (*qtq*), pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2018 dengan pertumbuhan sebesar 4,50%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tabungan BUS yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,89% (*qtq*) atau secara nominal meningkat Rp7,2 triliun. Di sisi lain, giro menurun sebesar -1,50% (*qtq*). Secara tahunan, pertumbuhan Giro, Deposito, dan Tabungan masing-masing sebesar 8,87%, 9,12%, dan 16,24% (*yoy*).

Grafik III - 3 — Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber : SPS, Desember 2018

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan IV-2018 tumbuh 3,16% (*qtq*), sedikit melambat dibandingkan posisi triwulan III-2018 yang tumbuh sebesar 5,16% (*qtq*). Perlambatan pertumbuhan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan pembiayaan untuk jenis penggunaan Konsumsi dan Investasi, sementara

pembiayaan Modal Kerja menunjukkan tren peningkatan laju pertumbuhan. Pada periode laporan, pembiayaan Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,95% (*qtq*), 3,95% (*qtq*), dan 1,58% (*qtq*). Berdasarkan porsi, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 43,66% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 32,95% dan 23,40%.

Tabel III - 2 ——— Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2017		2018		Porsi	<i>qtq</i> (%)			<i>yoy</i> (%)		
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan IV - 2017		Triwulan III - 2018	Triwulan IV-2018	Triwulan IV - 2017	Triwulan III - 2018	Triwulan IV-2018	
Modal Kerja	102.781	106.801	108.483	+ 32,95%	4,54%	1,39%	1,58%	14,07%	8,63%	5,55%	
Investasi	68.079	74.118	77.047	+ 23,40%	5,46%	6,73%	3,95%	11,30%	14,82%	13,17%	
Konsumsi	122.598	138.280	143.747	+ 43,66%	5,45%	7,39%	3,95%	18,56%	18,94%	17,25%	
Total	293.459	319.198	329.277	+ 100,00%	5,13%	5,16%	3,16%	15,23%	14,35%	12,21%	

Sumber : SPS, Desember 2018

Berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 56,46% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan IV-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,63% (*qtq*) atau 8,47% (*yoy*), atau meningkat sebesar Rp4,64 triliun (*qtq*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,16% (*qtq*) atau meningkat Rp2,07 triliun.

Sektor Perantara Keuangan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi pertumbuhan terbesar kedua dengan laju sebesar 7,42% (*qtq*) atau mengalami peningkatan sebesar Rp1,35 triliun. Kontributor

peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh 3,25% (*qtq*) atau meningkat Rp0,76 triliun.

Sementara itu, pada sektor non-produktif, pembiayaan yang disalurkan pada sektor Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 4,15% (*qtq*). Pada kategori Rumah Tangga, kontributor pertumbuhan triwulanan terbesar merupakan pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal dan Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang tumbuh 4,57% (*qtq*) dan 5,57% (*qtq*) atau secara nominal masing-masing meningkat Rp3,14 triliun (*qtq*) dan Rp2,42 triliun (*qtq*).

Tabel III - 3 — Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS & UUS (Rp Miliar)	2017	2018		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan IV-2017	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan IV-2017	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
Lapangan Usaha	166.674	176.147	180.785	56,46%	5,00%	3,54%	2,63%	13,07%	10,97%	8,47%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	10.419	11.844	11.497	3,59%	6,97%	- 0,68%	- 2,92%	22,14%	21,59%	10,35%
Perikanan	1.462	1.187	1.204	0,38%	6,74%	- 0,31%	1,43%	4,08%	- 13,32%	- 17,63%
Pertambangan dan Penggalian	6.864	5.769	5.410	1,69%	- 2,11%	3,87%	- 6,23%	3,95%	- 17,73%	- 21,19%
Industri Pengolahan	21.463	23.595	24.363	7,61%	5,09%	2,89%	3,25%	8,70%	15,54%	13,52%
Listrik, Gas, dan Air	11.044	16.430	16.600	5,18%	42,82%	21,02%	1,04%	36,06%	112,46%	50,30%
Konstruksi	22.198	22.579	24.648	7,70%	3,05%	2,48%	9,16%	53,78%	4,82%	11,04%
Perdagangan Besar dan Eceran	32.839	33.258	33.166	10,36%	3,92%	0,98%	- 0,28%	8,31%	5,25%	1,00%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.613	4.162	4.728	1,48%	1,99%	0,91%	13,59%	18,73%	17,49%	30,86%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	10.087	10.221	9.374	2,93%	0,67%	3,86%	- 8,29%	- 7,64%	2,02%	- 7,06%
Perantara Keuangan	19.583	18.217	19.569	6,11%	0,10%	2,52%	7,42%	3,35%	- 6,88%	- 0,07%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	12.326	12.662	13.315	4,16%	2,33%	3,64%	5,16%	- 3,68%	5,12%	8,02%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	7	4	0,00%	- 10,39%	67,62%	- 44,96%	- 18,16%	- 16,19%	- 48,52%
Jasa Pendidikan	4.905	5.147	5.460	1,71%	4,53%	4,05%	6,08%	29,58%	9,68%	11,30%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.021	4.174	4.788	1,50%	9,92%	8,06%	14,71%	32,70%	14,12%	19,09%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	4.973	6.143	5.353	1,67%	1,91%	- 4,82%	- 12,86%	7,72%	25,87%	7,63%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	331	360	369	0,12%	0,54%	1,84%	2,37%	- 1,77%	9,27%	11,25%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	0	-	0,00%	-	-	-	- 100,00%	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	538	391	938	0,29%	- 6,34%	- 2,59%	139,51%	- 29,20%	- 31,90%	74,14%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	116.186	128.289	133.611	41,73%	5,40%	4,82%	4,15%	19,05%	16,38%	15,00%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	60.663	68.744	71.887	22,45%	4,78%	5,40%	4,57%	18,49%	18,74%	18,50%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	1.956	2.514	2.670	0,83%	7,99%	12,23%	6,23%	29,42%	38,78%	36,51%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.142	3.261	3.272	1,02%	0,71%	4,49%	0,35%	1,32%	4,53%	4,15%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	10.122	10.330	9.919	3,10%	7,45%	3,17%	- 3,97%	17,60%	9,66%	- 2,00%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	40.303	43.441	45.862	14,32%	6,10%	3,94%	5,57%	21,46%	14,36%	13,79%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2.835	6.082	5.797	1,81%	8,61%	142,30%	- 4,69%	- 5,67%	133,00%	104,47%
Total	285.695	310.519	320.193	100,00%	5,20%	5,25%	3,12%	15,20%	14,34%	12,08%

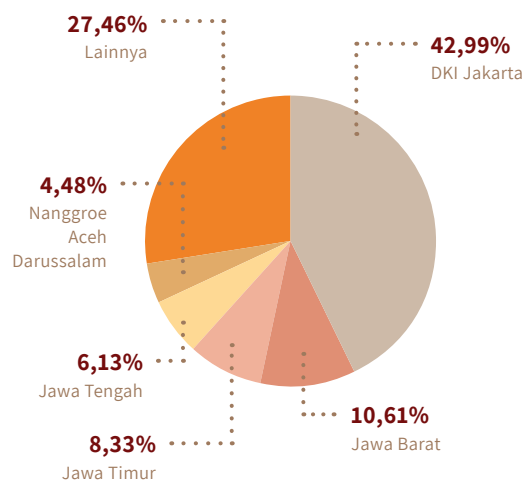
Sumber : SPS, Desember 2018

Kualitas pembiayaan bank syariah membaik, tercermin dari rasio NPF *gross* triwulan IV-2018 yang menurun sebesar 37 bps (*qtq*) dibandingkan posisi triwulan III-2018 menjadi sebesar 2,85%. Perbaikan kualitas pembiayaan utamanya terjadi pada sektor lapangan usaha (produktif) yang mengalami penurunan NPF sebesar 48 bps (*qtq*) menjadi 3,83%.

Perbaikan terbesar pada sektor lapangan usaha terjadi pada sektor *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang mampu menurunkan NPF sebesar 507 bps (*qtq*) atau sebesar Rp615 miliar (*qtq*) sehingga rasio NPF yang pada triwulan sebelumnya 9,93% menjadi 4,86% pada triwulan IV-2018. Sektor Transportasi, perdagangan dan komunikasi juga mengalami penurunan NPF sebesar 189 bps (*qtq*) menjadi sebesar 4,07% pada periode laporan. Usaha perbaikan kualitas pembiayaan yang dilakukan menunjukkan perbankan syariah mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,16%, khususnya DKI Jakarta (42,99%), Jawa Barat (10,61%), Jawa Timur (8,33%), dan Jawa Tengah (6,13%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi pembiayaan sebesar 4,48%. Kelima provinsi dengan pembiayaan terbesar tersebut menyumbang 63,72% dari pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dengan peningkatan pembiayaan secara kumulatif sebesar Rp9,69 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik III - 4 ——— Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber : SPS, Desember 2018

D. Likuiditas

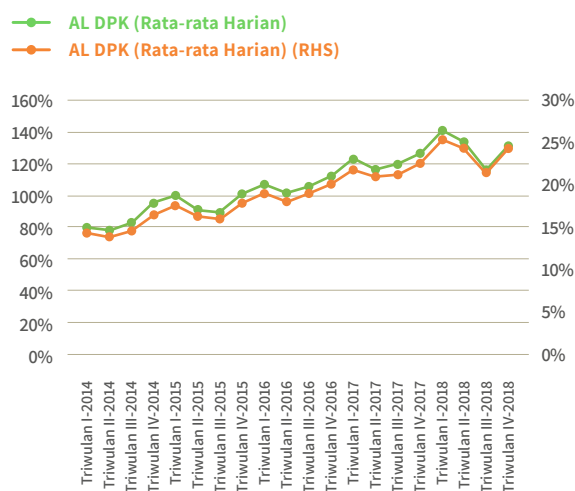
Likuiditas perbankan syariah memadai tercermin dari rasio FDR yang selalu terjaga dalam *threshold*. Pada triwulan IV-2018, FDR perbankan syariah sebesar 86,11%, turun 1,25% (*qtq*) dibandingkan triwulan III-2018 yang sebesar 87,36%, dan secara tahunan meningkat sebesar 0,80% (*yoy*) dari triwulan IV-2017 yang sebesar 85,31%. Penurunan FDR selama triwulan IV-2018 didorong oleh penurunan FDR UUS sebesar 4,50% (*qtq*) menjadi sebesar 103,22% pada triwulan IV-2018. FDR BUS mengalami penurunan sebesar 0,42% (*qtq*) menjadi sebesar 78,53%. FDR BPRS juga menurun sebesar 0,48% menjadi sebesar 111,67% pada triwulan IV-2018.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan IV-2018 sebesar 131,86%, meningkat dibandingkan pada triwulan III-2018 sebesar 116,92%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang meningkat menjadi sebesar 24,30%.

Tabel III - 4 ——— Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	Triwulan IV-2014	Triwulan IV-2015	Triwulan IV-2016	Triwulan IV-2017	Triwulan IV-2018
AL/NCD	95,30%	101,05%	112,53%	126,88%	131,86%
AL/DPK	16,54%	17,85%	20,06%	22,61%	24,30%

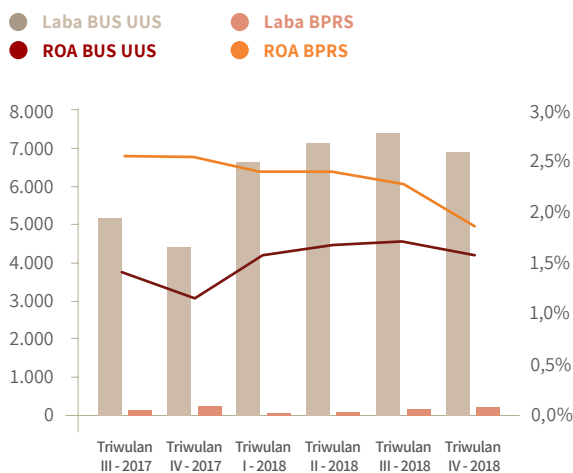
Grafik III - 5 ——— Indikator Likuiditas Harian BUS



E. Rentabilitas dan Efisiensi

Rentabilitas BUS dan UUS terjaga, tercermin dari rasio ROA pada triwulan IV-2018 sebesar 1,59%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan III-2018 yang mencapai 1,73%. Penurunan tersebut merupakan fenomena tahunan di mana pada akhir tahun terjadi peningkatan aset yang cukup signifikan. Pembukuan laba BUS dan UUS mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 56,76% (yoy) dari Rp4,42 triliun menjadi Rp6,93 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan pembiayaan dan membaiknya efisiensi perbankan syariah. BOPO BUS dan UUS mencapai 85,49%, turun 413 bps (yoy) dari triwulan IV-2017 yang sebesar 89,62%, sementara pada triwulan III-2018 sebesar 84,20%.

Grafik III - 6 — Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber : SPS, Desember 2018

Selain itu, pada BPRS, rasio ROA mengalami penurunan sebesar 43 bps (qtq) dari triwulan III-2018 yang sebesar 2,30% menjadi 1,87%. Meski ROA BPRS mengalami penurunan, laba BPRS mengalami peningkatan sebesar 22,10% (qtq) menjadi Rp240,20 miliar.

E. Permodalan

Sampai akhir triwulan IV-2018, OJK terus mendorong penguatan permodalan perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat semakin baik dalam melakukan ekspansi usahanya. Pada periode laporan, rasio CAR BUS mencapai 21,39% atau meningkat dari triwulan IV-2017 (17,91%) maupun triwulan III-2018 (21,25%). Di sisi lain, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan meski masih memadai, dari 19,78% pada triwulan III-2018 menjadi 19,33% pada triwulan IV-2018.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, Pasar Modal Syariah mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada saham syariah, baik jumlah saham yang dikategorikan sebagai saham syariah pada saat Penawaran Umum perdana sahamnya dinyatakan efektif oleh OJK maupun dari sisi Indeks saham syariah beserta kapitalisasinya. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan juga terjadi pada sukuk korporasi maupun sukuk negara dilihat dari jumlah maupun nilai *outstandingnya*. Selain itu, Reksa Dana Syariah juga mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun NAB.

A. Perkembangan Saham Syariah

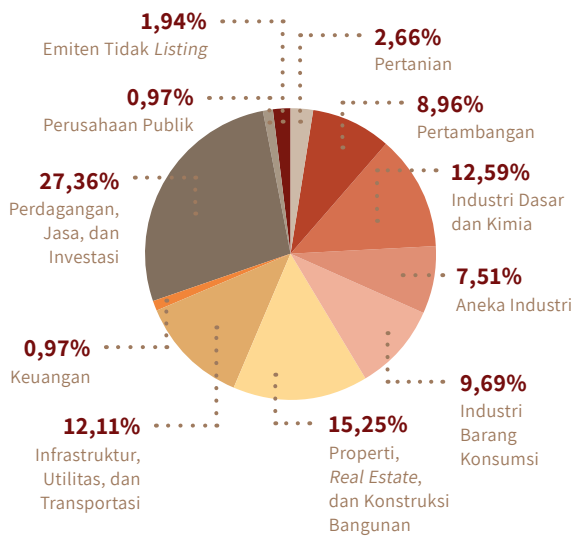
OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah yang meliputi 407 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II sampai akhir triwulan IV-2018, terdapat penambahan enam saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu:

Tabel III - 5 — Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten
1.	PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk.
2.	PT. Satria Mega Kencana Tbk.
3.	PT. Mega Perintis Tbk.
4.	PT. Sentra Food Indonesia Tbk.
5.	PT. Estika Tata Tiara Tbk.
6.	PT. Pollux Investasi Internasional Tbk.

Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES berjumlah 413 saham. Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 113 saham (27,36%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi sebanyak 63 saham (15,25%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 52 saham (12,59%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 50 saham (12,11%) dan 135 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 7 — Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Selama periode laporan, ISSI ditutup pada level 184,00 poin atau meningkat sebesar 3,32% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 178,09. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham ISSI sebesar Rp3.666,70 triliun atau meningkat sebesar 3,48% jika dibandingkan pada akhir periode triwulan III-2018 sebesar Rp3.543,32 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII dan Kapitalisasi JII masing-masing ditutup pada level 685,22 dan Rp2.239,51 triliun atau meningkat masing-masing sebesar 3,05% dan 8,04% dibandingkan periode sebelumnya.

Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan indeks JII70, yang terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Pada akhir periode laporan, JII70 ditutup pada level 227,55, meningkat 2,63% dibandingkan pada akhir periode sebelumnya. Kapitalisasi JII70 ditutup pada level Rp2.715,85 atau meningkat 6,33% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel III - 6 — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Dalam triliun rupiah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	1.672,10	2.557,85	-	4.219,02
2014	1.944,53	2.946,89	-	5.228,04
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
Triwulan I-2018	2.123,50	3.584,60	-	6.884,88
Triwulan II-2018	2.047,17	3.427,58	2.510,03	6.511,73
Triwulan III-2018	2.072,79	3.543,32	2.554,25	6.737,43
Triwulan IV-2018	2.239,51	3.666,69	2.715,85	7.023,50

Tabel III - 7 — Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	585,11	143,71	-	4.274,18
2014	691,04	168,64	-	5.226,95
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,71
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
Triwulan I-2018	704,28	183,59	-	6.188,99
Triwulan II-2018	654,77	173,25	217,42	5.799,24
Triwulan III-2018	664,92	178,09	221,72	5.976,55
Triwulan IV-2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan IV-2018, OJK menerbitkan 18 Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp5,72 triliun, dan terdapat 5 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo sebesar Rp1,04 triliun. Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 104 seri atau meningkat sebesar 7,22% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp 22,02 triliun atau meningkat sebesar 9,77% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel III - 8 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2013	11.949	64	7.562	36
2014	12.872	71	7.114	35
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	15.740	79
Triwulan I-2018	27.583	144	16.104	84
Triwulan II-2018	29.933	156	16.338	90
Triwulan III-2018	33.657	164	20.062	97
Triwulan IV-2018	36.545	177	22.023	104

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

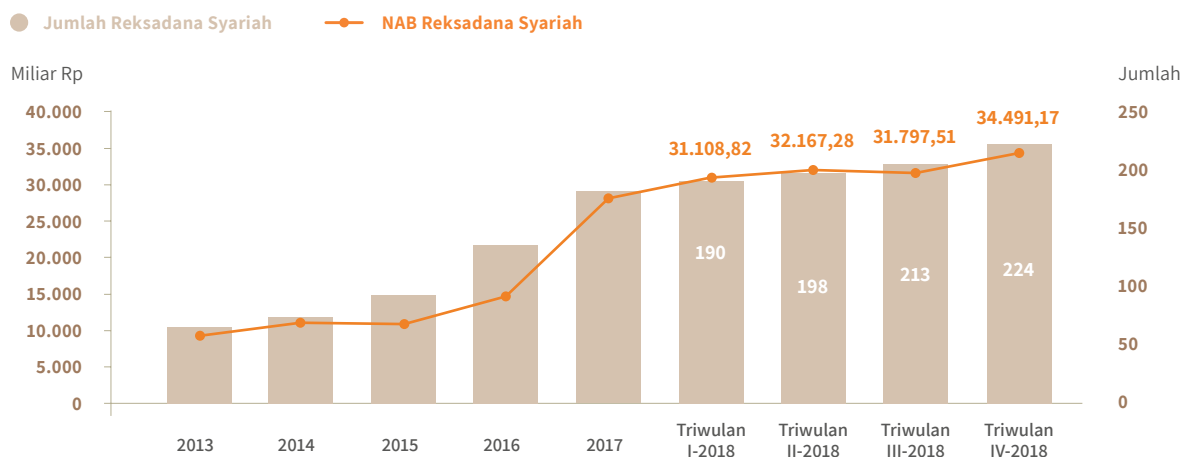
Selama triwulan IV-2018, terdapat 18 Reksa Dana Syariah efektif terbit dan 7 Reksa Dana Syariah bubar. Reksa Dana bubar karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam

120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 224, dengan NAB sebesar Rp34,49 triliun atau meningkat 5,16% dari sisi jumlah dan meningkat 8,47% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya.

Tabel III - 9 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%
Triwulan I-2018	190	1.659	1.849	10,28%	31.108,82	465.395,08	496.503,90	6,27%
Triwulan II-2018	198	1.723	1.921	10,31%	32.167,28	454.394,70	486.561,99	6,61%
Triwulan III-2018	213	1.822	2.035	10,47%	31.797,51	463.292,76	495.090,27	6,42%
Triwulan IV-2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82%

Grafik III - 8 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

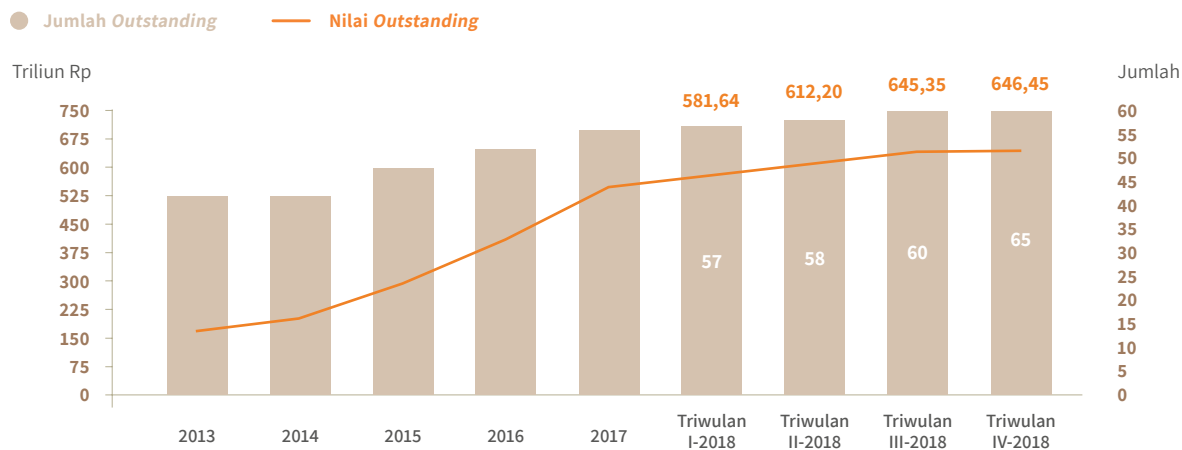


D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada triwulan IV-2018, jumlah keseluruhan SBSN/Surat Negara yang *outstanding* sebanyak 65 seri, terdapat

penambahan 5 seri *outstanding* atau meningkat 8,33% dibandingkan periode sebelumnya, dengan nilai sukuk negara *outstanding* sebesar Rp646,45 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 0,17% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik III - 9 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



Tabel III - 10 — Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (Rp triliun)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	297,58	48
2016	412,63	52
2017	551,56	56
Triwulan I-2018	581,64	57
Triwulan II-2018	612,20	58
Triwulan III-2018	645,35	60
Triwulan IV-2018	646,45	65

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Selama periode laporan, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- Satu Manajer Investasi Syariah yaitu PT. Paytren Aset Manajemen,
- 53 Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Syariah (UPIS),
- 28 Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi,
- 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES,
- 14 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah,
- 13 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah (sistem *online trading* syariah),
- Delapan Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwalianan penerbitan Sukuk Korporasi, dan
- 92 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan IV-2018, aset IKNB Syariah menurun sebesar 2,04% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp96,91 triliun. Aset industri perasuransian

syariah mendominasi porsinya yaitu sebesar 42,86% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 11 — Aset IKNB Syariah

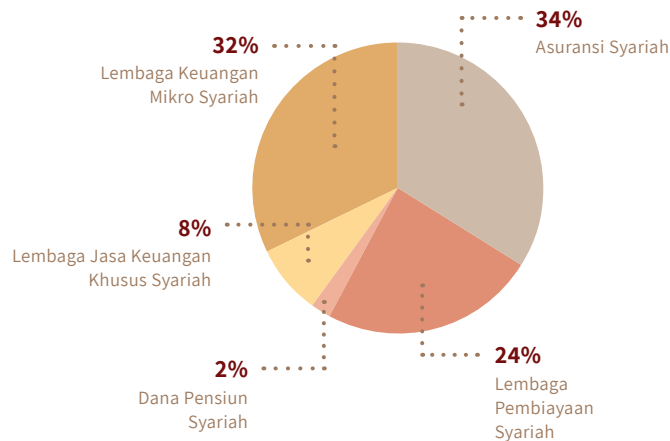
Dalam triliun rupiah

No.	Industri	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Perasuransian Syariah	40,52	42,77	41,85	41,82	41,96
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	34,48	32,77	29,51	28,23	25,71
3.	Dana Pensiun Syariah	1,30	1,32	2,98	3,16	3,27
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	22,74	22,50	23,85	26,48	26,71
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,10	0,12	0,16	0,25	0,25
Total		99,13	99,48	98,34	99,94	96,91

Sampai akhir triwulan IV-2018, terdapat 62 perusahaan perasuransian syariah, 44 lembaga pembiayaan syariah, empat Dana Pensiun Syariah, 15 lembaga jasa keuangan

syariah khusus, dan 56 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, terdapat lima penambahan jumlah entitas IKNB Syariah.

Grafik III - 10 — Jumlah Entitas IKNB Syariah



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan IV-2018, industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, nilai investasi, kontribusi bruto dan klaim bruto masing-masing sebesar 0,34%, 0,83%, 42,57% dan 48,42% menjadi Rp41,96

triliun, Rp36,99 triliun, Rp13,76 triliun, dan Rp7,58 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Kewajiban juga mengalami peningkatan sebesar 2,55% menjadi Rp7,73 triliun.

Tabel III - 12 — Aset Industri Perasuransian Syariah

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	32,53	35,23	34,36	34,38	34,47
	Asuransi Umum Syariah	5,37	5,76	5,69	5,62	5,62
	Reasuransi Syariah	1,70	1,78	1,80	1,83	1,86
	Jumlah	40,61	42,77	41,85	41,82	41,96
2.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	11,34	3,38	6,69	7,70	11,09
	Asuransi Umum Syariah	1,88	0,51	0,99	1,31	1,85
	Reasuransi Syariah	0,78	0,20	0,41	0,64	0,83
	Jumlah	14,00	4,09	8,09	9,65	13,76
3.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,53	0,88	1,90	4,11	6,20
	Asuransi Umum Syariah	0,89	0,21	0,37	0,57	0,79
	Reasuransi Syariah	0,53	0,13	0,28	0,43	0,60
	Jumlah	4,95	1,23	2,55	5,11	7,58
4.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	30,45	31,47	31,26	31,71	31,88
	Asuransi Umum Syariah	3,68	3,89	3,81	3,70	3,78
	Reasuransi Syariah	1,22	1,24	1,23	1,25	1,31
	Jumlah	33,34	36,59	36,30	36,66	36,99
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,33	4,55	4,29	4,05	4,20
	Asuransi Umum Syariah	2,86	2,94	2,86	2,72	2,73
	Reasuransi Syariah	0,59	0,68	0,72	0,77	0,81
	Jumlah	7,78	8,17	7,86	7,54	7,73

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah, 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi

syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari dua Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan dua paket investasi syariah dari Dana Pensiun dengan aset sebesar Rp 3,27 triliun.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Pada triwulan IV-2018, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah menurun sebesar 10,81%

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp22,18 triliun.

Tabel III - 13 ——— Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

Dalam triliun rupiah

No.	Komponen	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Kas dan Setara Kas	1,10	1,35	0,55	0,65	0,58
2.	Aset Tagihan Derivatif	0,00	0,01	0,04	0,05	0,02
3.	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	28,65	26,17	23,80	21,75	19,30
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga	-	-	-	0,01	0,00
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	0,09	0,06	0,05	0,02	0,02
8.	Aset tetap dan Inventaris - Neto	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
9.	Aset Pajak Tangguhan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10.	Rupa-Rupa Aset	2,28	2,66	2,53	2,25	2,13
Total		32,26	30,39	27,12	24,87	22,18

Sampai akhir triwulan IV-2018 terdapat 35 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 32 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat

perusahaan berbentuk *full fledged* dan empat perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1,23 triliun. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp2,30 triliun.

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari enam Perusahaan Penjaminan Syariah yang terdiri dari dua *Full Fledged* dan empat UUS, satu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menjalankan kegiatan unit usaha syariah, lima Perusahaan Pergadaian Syariah yang terdiri dari empat *Full Fledged* dan satu UUS, dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)

Syariah yang memiliki kegiatan Unit usaha Syariah. Aset kegiatan syariah pada Perusahaan Penjaminan, LPEI, PT Pegadaian (Persero) dan PPSP masing-masing sebesar Rp1,29 triliun, Rp16,20 triliun, Rp7,11 triliun dan Rp1,90 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 51 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp247,34 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2018, OJK telah menerbitkan dua ketentuan yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu:

- 1. POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
POJK tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 38 dan dimaksudkan untuk menciptakan industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi akibat semakin kompleksnya produk dan aktivitas, serta risiko yang dihadapi oleh BPRS. Secara umum pokok pengaturan yang diatur antara lain kewajiban BPRS dalam menerapkan Manajemen Risiko secara efektif; kewajiban membentuk Komite Manajemen Risiko bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80 miliar; dan kewajiban BPRS menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada OJK paling lama 1 bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS dengan materi selain laporan profil Risiko yang diwajibkan.
- 2. POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
POJK tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34 dan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan syariah. Pokok pengaturan yang diatur antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPRS; dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan IV-2018, OJK mengeluarkan peraturan yang memuat substansi IKNB Syariah yaitu POJK Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan ini bertujuan memperbesar kesempatan perusahaan menanamkan investasi perusahaan Perasuransian ke dalam instrumen yang lebih bervariasi.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

A. Pengawasan

Selama periode laporan, tren pertumbuhan positif dalam penyaluran pembiayaan di perbankan syariah (BUS) masih terus berlanjut tercermin dari pertumbuhan sebesar 7,22% (yoy) atau menjadi Rp198,8 triliun. Sektor industri yang menopang pertumbuhan tersebut dan mendominasi pembiayaan adalah sektor rumah tangga yang tumbuh 15,40% (yoy) sehingga menjadi Rp131,14 triliun. Penyaluran pembiayaan pada sektor produktif lainnya masih cenderung rendah bahkan beberapa di antaranya menurun (secara yoy), seperti sektor pertambangan dan penggalian (-19,5% yoy) serta sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi (-7,65% yoy). Selain itu, terjadi perbaikan NPF (yoy) dari 4,76% (2,57%) menjadi 3,93% (2,33%).

Dalam rangka mendukung pencapaian “industri perbankan yang tumbuh berkualitas”, OJK terus mengawal *awareness* BUS terhadap substansi penerapan manajemen risiko kredit, dan hal tersebut menjadi bagian dari *supervisory concern* OJK terhadap perbankan syariah. Sejalan dengan upaya mencapai “industri perbankan yang tumbuh berkualitas”, OJK terus mendorong penguatan permodalan di perbankan syariah. Hal tersebut diwujudkan BUS melalui penambahan modal secara berkesinambungan, tercermin dari *trend* permodalan BUS yang meningkat, sehingga rasio KPMM BUS mencapai 21,39% pada triwulan IV-2018. Penguatan permodalan tersebut menunjukkan persepsi positif dari para *stakeholders*, terutama di perbankan syariah, terhadap potensi perekonomian nasional.

Dari sisi operasional, efisiensi di perbankan syariah masih memerlukan penyempurnaan, terutama akibat struktur dana BUS masih didominasi oleh dana mahal (deposito mencapai 57,72% dari total DPK) dan rendahnya *fee based income*, sebagaimana tercermin dari rasio BOPO yang masih tergolong tinggi, yaitu 89,17% di triwulan IV-2018, meski cenderung membaik dari triwulan sebelumnya (94,91% di triwulan IV-2017). Terkait hal tersebut, masing-masing BUS terus mengoptimalkan perbaikan efisiensi dan terus meningkatkan daya saing antara lain dengan menyempurnakan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktivitas karyawan dan mengoptimalkan jaringan kantor, termasuk menjalin sinergi operasional dan bisnis dengan bank induk. Di sisi lain, para *stakeholders* juga mulai membuka kesempatan pemanfaatan layanan perbankan syariah dalam aktivitas usahanya. Sebagai langkah *supervisory action*, OJK masih menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern*

(khususnya kegiatan *on-site supervision*) terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDI dan kecukupan pengendalian intern.

Selanjutnya, profil risiko Perbankan Syariah cenderung stabil akibat upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing BUS dan didukung oleh efektivitas *supervisory action* OJK dalam menjaga kelangsungan bank, maka *rating* peringkat RBBR di Perbankan Syariah masih sejalan dengan periode sebelumnya, yaitu tergolong Cukup Sehat.

B. Perizinan

Selama triwulan IV-2018, OJK melaksanakan proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap satu calon pemegang saham pengendali, 48 pengurus Bank Syariah dan 11 pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan hasil 18 calon pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan satu calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak). Selanjutnya, tiga calon Pengurus Bank Syariah tidak disetujui, satu calon pemegang saham pengendali dan satu calon Pengurus Bank Syariah dibatalkan. Selain itu, terdapat lima dokumen calon pengurus Bank Syariah dan dua calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun terdapat 21 proses perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pengurus Bank Syariah dan delapan calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian.

Di bidang perizinan produk baru, terdapat delapan permohonan masuk dengan hasil satu perizinan produk baru disetujui, satu perizinan produk baru dinyatakan tidak disetujui dan enam perizinan produk baru yang masih dalam proses penyelesaian. Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 50 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, perubahan status kantor dan pembukaan kegiatan LSB dengan hasil 23 permohonan telah disetujui, satu permohonan tidak disetujui dan 26 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada triwulan IV-2018, OJK juga menerima 15 permohonan perizinan lainnya yaitu berupa enam permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah, satu permohonan izin usaha Bank Syariah, tiga permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), satu permohonan pemisahan (*spin off*), dan empat permohonan merger dan/atau akuisisi. Selanjutnya dari permohonan yang OJK terima tersebut, satu permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah telah disetujui, satu permohonan merger dan/atau akuisisi dibatalkan, dua permohonan merger dan/atau akuisisi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 11 permohonan perizinan lainnya masih dalam proses penyelesaian.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES, pada periode triwulan-IV 2018 telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan kepada satu Pihak Penerbit DES dan laporan hasil pemeriksaan tersebut telah diselesaikan.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS), Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF), dan melakukan pemeriksaan *on-site* industri sebagai berikut:

LHPLS	<ul style="list-style-type: none">• Enam perusahaan perasuransian Syariah• Satu perusahaan pembiayaan Syariah
LHPLF	<ul style="list-style-type: none">• Tujuh perusahaan perasuransian Syariah• Satu perusahaan pembiayaan Syariah• Satu perusahaan penjaminan Syariah• Satu perusahaan modal ventura Syariah
<i>On-site</i>	<ul style="list-style-type: none">• Dua perusahaan perasuransian Syariah• Satu perusahaan pembiayaan Syariah

Pada triwulan IV-2018 OJK memberikan izin konversi Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta menjadi Dana Pensiun Syariah dan izin pendirian kepada PT Gadai Arthata Niaga Sejahtera Syariah. Selain itu, OJK mencabut izin Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi Bangun Askrida.

OJK mencatat perizinan dan pelaporan terkait Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Unit Syariah, Kantor selain Kantor Cabang Syariah, serta Kantor di luar Kantor Pusat sebanyak 100 kantor. Perubahan susunan Direksi, Komisaris, DPS, Pimpinan UUS serta tenaga ahli di bidang IKNB Syariah yang dicatat oleh OJK sebanyak 21 orang.

OJK melakukan pencatatan sebanyak 35 akad/produk IKNB Syariah. OJK juga telah melakukan pencatatan pelaporan kelembagaan, meliputi perubahan alamat, kepemilikan, nama, anggaran dasar dan pelaporan kelembagaan lainnya, sebanyak 19 pelaporan.

OJK telah melaksanakan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebanyak 20 pihak utama di Bidang IKNB Syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2018, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) atas Aset yang Berasal dari Transaksi Syariah

OJK melakukan kajian terkait metodologi penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, kaidah akuntansi, dan *international best practice*, bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penyusunan kajian tersebut telah selesai dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI untuk menjadi referensi dalam penyusunan Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang akan dilakukan oleh DSAS IAI.

2. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik (Pokja Pertanian Organik) di Indonesia

Pokja Pertanian Organik bagi bank syariah merupakan wadah bank syariah dan *stakeholder* lainnya (Bank Indonesia, Dinas Pertanian, NGO, dan lembaga lainnya) dalam menjalin komunikasi dan menggali informasi mengenai pertanian organik. Selama triwulan IV-2018, dilaksanakan kegiatan kunjungan lapangan (OTS) ke UUS BPD Jateng dan PT Bumi Laras Hijau dan petani binaan di Sragen. Selanjutnya dari kegiatan tersebut akan dilakukan *monitoring* secara triwulan terkait realisasi pembiayaan pertanian Organik oleh BUS dan UUS peserta Pokja Pertanian Organik.

Selanjutnya, keluaran dan kegiatan dari proses *review* kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah selama Triwulan IV-2018 adalah sebagai berikut :

1. Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis tersebut, industri perbankan syariah harus melakukan berbagai pembenahan dan penataan ulang bahkan melakukan transformasi agar dapat terus bertumbuh secara sehat dan mempunyai daya saing yang kuat sehingga dapat meningkatkan kontribusi kepada perekonomian nasional.

Industri perbankan syariah menghadapi berbagai isu strategis dan tantangan yang semakin kompleks baik

dari sisi internal maupun eksternal industri. Mulai dari perubahan demografi masyarakat, berkembangnya industri halal, perkembangan teknologi informasi sampai kepada rendahnya tingkat efisiensi operasional perbankan syariah karena keterbatasan permodalan, kuantitas dan kualitas SDM, serta persaingan yang tidak sehat antar industri keuangan.

2. Kajian *Spin-Off*

Dalam rangka mempersiapkan industri perbankan syariah menyambut kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) pada tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, saat ini sedang disusun kajian komprehensif sebagai panduan penyusunan pengaturan terkait pemisahan unit usaha tersebut. Kajian ini bertujuan agar BUS hasil pemisahan memiliki kapasitas dan kualitas operasional yang memadai, konsisten dengan kualitas layanan dan *strategic value* BUK induk atau grup usaha serta menjadikan kewajiban pemisahan UUS sebagai momentum penguatan industri perbankan syariah.

3. Kajian Indeks *Return* Sektor Riil

Kajian Pengembangan Indeks *Return* Sektor Riil merupakan kajian bersama antara OJK dan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menyusun indeks yang dapat merepresentasikan kinerja sektor riil sesuai prinsip syariah menggunakan metode *Cash Recovery Rate* (CRR). CRR adalah penghitungan imbal hasil bisnis yang menitikberatkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari investasi yang dilakukan dengan mengabaikan suku bunga. Kajian yang dilakukan pada 2018 ini bertujuan untuk merumuskan dan menghitung CRR dari sisi bisnis melalui nasabah-nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Selama triwulan IV-2018, OJK melakukan analisis atas data yang telah terkumpul, baik yang bersumber dari bank-bank syariah maupun data perusahaan publik. Dalam *pilot project* ini, dianalisis perilaku investasi perusahaan dengan menggabungkan analisis CRR (*cash basis*) dan ROI (*accrual basis*), sehingga dapat dilihat keterkaitan antara tren *rate of return* yang sesungguhnya dihasilkan oleh perusahaan sektor riil dan imbal hasil pembiayaan.

4. Kajian *Outlook* Perbankan Syariah

Dalam rangka akan berakhirnya POJK Stimulus (POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank) pada tanggal 31 Januari 2019, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan POJK tersebut untuk menentukan apakah POJK Stimulus akan

diperpanjang atau tidak. Selain itu perlu juga dianalisis kajian dampak kepada industri jika POJK Stimulus tidak diperpanjang.

Pada triwulan IV-2018, OJK melakukan Kajian Layanan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengetahui tentang kualitas layanan perbankan syariah dan mengukur kualitas layanan perbankan syariah dalam rangka peningkatan kualitas layanan perbankan syariah. Survei dilakukan dengan observasi langsung di 90 Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah yang tersebar ke dalam 12 kota administratif/kabupaten di Jabodetabek.

5. Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah

Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan Expo iB *Vaganza* yang bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah baru baik nasabah perbankan syariah, maupun keuangan syariah. Selama periode laporan, iB *Vaganza* Jakarta diikuti oleh 19 BUS/UUS dan tiga BPRS Syariah dengan perolehan sejumlah 4.239 rekening baru dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp512 miliar.

6. Kajian Produk *Sharia Restricted Intermediary Account*

Dalam hal pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan perbankan syariah melalui pengembangan variasi produk keuangan syariah, telah disusun kajian Produk *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA). Dalam produk ini Bank syariah bertindak sebagai *intermediary* antara investor dengan pemilik proyek. Model bisnis yang diprioritaskan untuk dapat diimplementasikan yaitu Model bisnis *One to Many Mudharabah Muqayyadah* dan Model bisnis *Many to One Mudharabah Muqayyadah*.

7. *Workshop* Keuangan Syariah

Dalam rangka memperluas target sosialisasi dan edukasi perbankan syariah serta mendukung pengembangan perbankan syariah, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. *Workshop "iB Goes To Public Area"* untuk warga dan ibu PKK sekitar RPTRA bekerjasama dengan FoSSEI di Jakarta Selatan.
- b. *Workshop "iB Goes To Local Industry"* untuk *business owner local industry* dan beberapa komunitas yang tergabung dalam *local industry* (kerajinan perak, batik, makanan/oleh-oleh) bekerjasama dengan FoSSEI di Yogyakarta.
- c. *Workshop* Strategi Pengembangan Pasar, Produk dan Edukasi Perbankan Syariah di Yogyakarta.

- d. Pelaksanaan *Ijtima' Sanawi* di Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi DPS LKS antara lain melalui kegiatan sosialisasi kebijakan OJK, diskusi permasalahan yang dihadapi oleh DPS di lapangan. Kegiatan tersebut diharapkan DPS mampu menjalankan tugas secara efektif untuk mengawasi LKS.
- e. Diskusi Forum Komunikasi Perbankan Syariah di Jakarta. Forum ini sebagai wadah komunikasi OJK dan industri perbankan syariah nasional guna membahas isu-isu strategis perbankan syariah.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Kajian Optimalisasi Peran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dalam rangka Penjualan Reksa Dana Syariah

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh jumlah APERD yang menjual produk Reksa Dana Syariah dan WAPERD saat ini sudah banyak, namun *Asset Under Management* (AUM) Reksa Dana Syariah masih relatif kecil dibandingkan AUM reksa dana secara keseluruhan serta *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah tahun 2017-2019 yang mengamanahkan perlu adanya peningkatan peran Bank Syariah dalam kegiatan pasar modal yang salah satunya berperan sebagai APERD.

2. Kajian Mengenai Skema Sukuk

Kajian tersebut disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi skema penerbitan sukuk yang telah digunakan. Kumpulan skema sukuk tersebut dapat memberikan gambaran terkait jenis skema penerbitan sukuk yang paling tepat dan sesuai bagi *stakeholders* pasar modal syariah.

3. Kajian Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda

Kajian ini merupakan Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda dilakukan sebagai salah satu upaya OJK dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah yang masih sangat rendah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan program inklusi keuangan bersama lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait yang menasar komunitas masyarakat tertentu.

4. Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian

Kajian penerapan prinsip syariah di pasar modal pada kustodian bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan prinsip syariah di pasar modal pada kustodian. Latar belakang dari kajian ini adalah belum adanya ketentuan khusus mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal pada kustodian dari investasi syariah.

5. Kajian Terkait *Market Maker* Sukuk

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini *market share* sukuk masih di bawah 5% dan perdagangannya di pasar sekunder relatif tidak likuid. Rendahnya likuiditas tersebut berpotensi menghambat perkembangan sukuk di Indonesia, karena akan menghasilkan *liquidity premium* yang tercermin dalam besaran imbal hasil sukuk. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan likuiditas tersebut, salah satunya dengan melakukan analisis terkait *market maker* sukuk.

6. Kajian Terkait Aspek Syariah Transaksi Efek Syariah (Aspek Syariah Kliring dan Penjaminan)

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh industri pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang dari tahun ketahun. Namun, persentase jumlah investor pasar modal dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, maka terdapat potensi yang besar bagi peningkatan jumlah investor pasar modal syariah. Upaya peningkatan investor tersebut harus didukung dengan berbagai hal, salah satu upaya tersebut adalah memastikan bahwa pasar modal syariah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Penelitian IKNB Syariah

Pada periode yang sama, OJK telah menyelesaikan penelitian untuk pengembangan Keuangan Syariah secara umum dan IKNB Syariah secara khusus sebagai berikut:

1. Kajian Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Industri Jasa Keuangan Syariah

Kajian ini dilakukan oleh secara terintegrasi dengan melihat pengaturan baik di sektor perbankan syariah,

pasar modal syariah dan IKNB syariah. Kajian ini merupakan amanat dari *Roadmap* Keuangan Syariah 2017-2019. Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut mengidentifikasi sebaran data DPS di setiap sektor industri jasa keuangan syariah; mengidentifikasi pengaturan DPS di masing-masing sektor industri jasa keuangan syariah; dan menganalisa persamaan dan perbedaan pengaturan DPS di masing-masing sektor industri jasa keuangan syariah.

2. Kajian Pengaturan Pemisahan (*spin-off*) Unit Syariah Perusahaan Perasuransian

Kajian ini merupakan persiapan dari pelaksanaan batas *spin-off* Unit Syariah Perusahaan Perasuransian sesuai amanat Undang Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 yaitu 10 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan. Tujuan kajian ini adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif atas pengaturan mengenai *spin-off*, meliputi aspek ketentuan umum, perizinan, kelembagaan, tata kelola, operasional, dan perpajakan; mengidentifikasi pengaturan untuk memperjelas peraturan yang ada maupun mengubah dengan pengaturan yang lebih relevan, meliputi aspek ketentuan umum, perizinan, kelembagaan, tata kelola, operasional, dan perpajakan; serta memberikan usulan perubahan pengaturan aspek ketentuan umum, perizinan, kelembagaan, tata kelola, operasional, dan perpajakan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *spin-off*.

3. Kajian Percepatan Konversi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah

Kajian ini merupakan bagian pengembangan industri dana pensiun syariah untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai jumlah industri ini yang masih sangat minim. Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain mengetahui peta kondisi aktual pelaku dana pensiun syariah; mengetahui potensi penyelenggaraan program pensiun syariah; dan mengetahui kendala/hambatan konversi menjadi DPPK Syariah.

4. Penelitian mengenai Peningkatan Penetrasi Pasar Industri Penjaminan Syariah

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang spesifik menjelaskan tentang permasalahan di industri penjaminan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan amanat dari *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019. Tujuan kajian antara lain menganalisis kebutuhan pelaku ekonomi, yaitu bank dan pembiayaan syariah dalam hal penjaminan syariah dan kesesuaian layanan yang diberikan oleh lembaga

penjaminan syariah saat ini; dan memberikan rekomendasi terkait strategi pengembangan produk dan layanan penjaminan syariah agar dapat diterapkan bagi perusahaan penyedia layanan penjaminan.

B. Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan pengembangan IKNB Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, khususnya IKNB Syariah. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Terkait IKNB Syariah

OJK melakukan serangkaian kegiatan edukasi terkait pengenalan produk IKNB Syariah, dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan IKNB Syariah dengan detail kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Sosialisasi	Lokasi
Sosialisasi Asuransi Syariah	Jakarta
Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	Yogyakarta
Sosialisasi dan Expo IKNB Syariah	Jawa Timur & Yogyakarta
Roadshow Seminar <i>Multifinance</i> Syariah	Bengkulu, Bandung & Makassar

2. *Training of Trainers* IKNB Syariah

OJK juga mengadakan *Training of Trainers* Industri Keuangan Non Bank Syariah di wilayah Jawa Barat dengan peserta dosen sebanyak 57 perwakilan universitas/sekolah tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah khususnya Industri Keuangan Non Bank Syariah di wilayah Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 4

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI





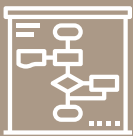
Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 Serta Penilaian Kinerja 2018



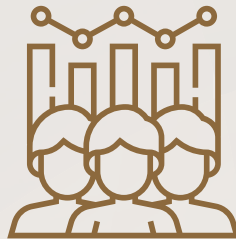
Penghargaan KPK Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan LHKPN Terbaik 2018



25 Siaran Pers, 5 Jumpa Pers dan *Media Briefing* serta 57 Liputan OJK TV



Penyusunan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018 – 2022



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



8 Kunjungan *Visit* OJK dengan 600 Peserta

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja di OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap dan pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat untuk periode 2018 yaitu evaluasi Peta Strategi OJK *Wide* 2018 dan penilaian kinerja organisasi OJK-*Wide* selama 2018 melalui pengisian capaian masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Selain itu, OJK juga memasuki siklus tahap kedua untuk periode 2019 yaitu *cascading* Peta Strategis OJK 2019 ke seluruh Satuan Kerja di lingkungan OJK. OJK juga menerbitkan Laporan Triwulan III-2018 sebagai pertanggungjawaban kegiatan OJK kepada publik.

Grafik IV - 1 — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki Peta Strategi 2018 yang di dalamnya terdapat enam Sasaran Strategis OJK yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kepuasan *Stakeholders* terhadap kinerja OJK dengan melakukan survei yang ditujukan kepada *Stakeholders* OJK seperti Lembaga Jasa Keuangan, Media, Akademisi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat konsumen sektor jasa keuangan. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui indeks integritas organisasi dan pengelolaan keuangan yang andal.

2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan

Sasaran Strategis ini dinilai berdasarkan indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK antara lain rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui peningkatan indeks inklusi keuangan.

3. Mewujudkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing

Sasaran Strategis dimaksud dinilai melalui pelaksanaan penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, penguatan *surveillance* stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan serta penerapan *best fit international standard*.

4. Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan

Penilaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan kontribusi SJK pada sektor ekonomi prioritas, peningkatan kontribusi SJK bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK.

5. Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui perlindungan konsumen yang kredibel, peningkatan produk keuangan mikro dan optimalisasi pemanfaatan *Fintech*.

6. Mewujudkan Ekonomi Syariah Melalui Peningkatan Keuangan Syariah

Sasaran strategis ini ditinjau melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah.

Penghargaan Atas Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 2018



OJK kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaik Tahun 2018. Penghargaan di bidang



sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang ketiga kalinya diterima OJK, setelah juga diterima OJK pada 2016 dan 2017. Penghargaan atas pengelolaan LHKPN Terbaik merupakan yang kedua kalinya setelah juga diterima OJK tahun 2017.



4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) dan Program Khusus (PK) OJK

Inisiatif Strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK Wide 2018. Sehubungan dengan pelaksanaan IS dan PK OJK 2018 sampai dengan triwulan-IV 2018 OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan detail sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selama, triwulan IV-2018 telah disusun RPOJK Inovasi Keuangan Digital dalam Bahasa Inggris, penyelenggaraan Seminar Nasional "*Financial Sector 4.0 – Synergizing Financial Technology and Financial Institutions*", penyusunan *Roadmap* Inovasi Keuangan Digital – tahap II dan pedoman kerja *Regulatory Sandbox*.

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI) yang andal dan aman. Terdapat dua aplikasi yang menjadi fokus pengembangan sistem informasi yaitu (i) OJK Box (O-BOX), yang merupakan aplikasi yang menyajikan informasi rasio dan data keuangan dari industri jasa keuangan untuk dirangkum menjadi suatu data atau format di mana data atau format tersebut merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pengawas pada saat melakukan pemeriksaan; dan (ii) Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO), yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi penyampaian pelaporan, khususnya dari Bank kepada OJK secara *online*. APOLO memungkinkan pihak OJK untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan penyampaian pelaporan Bank yang diawasi, serta memperoleh *basic report* atas pelaporan yang telah disampaikan.

Sampai dengan triwulan IV-2018, progres penyelesaian pengembangan aplikasi O-BOX telah mencapai 60%, dengan *mock-up* aplikasi yang telah selesai dikembangkan. Untuk APOLO, telah diselesaikan penyusunan *user requirement* dan konsep *design condensed report* yang akan dihadirkan pada aplikasi.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Tujuan IS ini adalah pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam upaya

pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya konkrit yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (i) Pengembangan *Dashboard* pemantauan capaian target Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar keuangan (SNPPPK); (ii) Pengembangan *e-Registration* tahap II serta *user acceptance test* (UAT); (iii) Penerbitan POJK No 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa dan *go-live* percepatan siklus penyelesaian transaksi dari tiga hari bursa menjadi dua hari bursa (T+3 menjadi T+2).

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Tujuan pelaksanaan Inisiatif Strategis ini adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV-2018 antara lain: (i) penyusunan kajian kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pengawasan IKNB, (ii) penyusunan kajian penguatan permodalan kelembagaan IKNB; (iii) penyusunan kajian penyempurnaan *exit policy* yang efektif dan efisien; (iv) penyusunan kajian penguatan penerapan manajemen risiko sektor IKNB; (v) penyusunan pedoman dan simulasi *early warning system* (EWS) perusahaan asuransi dan reasuransi.

5. IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Selama triwulan IV-2018, OJK telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (i) *enhancement* SI-AUTO sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan; dan (ii) kajian standarisasi dan penyusunan draft ketentuan terkait *Activity Based Costing* (ABC).

6. IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis

Tujuan dari pelaksanaan Inisiatif Strategis ini adalah terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada IS-6 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV-2018 antara lain: (i) Penyusunan RPOJK Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan telah disusun dan sudah pada tahap proses *Legal Review*; (ii) Penetapan SEDK Pedoman penyusunan Proses Bisnis dan Standar Prosedur Operasional; (iii) Pembangunan sistem *Record Management System* (RMS) dalam tahap *system integration testing* (SIT) dan UAT; serta (iv) *Enhancement* aplikasi *monitoring Rule Making Rule* (SISIMPU).

Selain pelaksanaan keenam IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dalam Proyek Khusus (PK) OJK. Sampai triwulan IV-2018, progres pelaksanaan PK adalah sebagai berikut:

- 1. PK-1 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis**
OJK telah melakukan pembahasan dengan Direksi Industri Jasa Keuangan terkait rencana Penyaluran KUR pada *replanting*/peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat berbasis *Cluster*. Selain itu, OJK juga melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait rencana penyaluran KUR untuk perikanan di Toli-toli bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk pengadaan Kapal di Natuna. Sampai triwulan IV-2018, OJK mencatat bahwa realisasi KUR sebesar Rp118 triliun atau 95% dari target Rp123,8 triliun.
- 2. PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (*Research Based Policy*)**
OJK telah melaksanakan kegiatan riset OJK-wide dengan topik antara lain: (i) Pemetaan Peluang dan Tantangan Perbankan Digital; (ii) Teknologi Digital dan Tenaga Kerja Perbankan dan (iii) Risiko dan Kontribusi *Fintech Peer-to-Peer Lending* Terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. Selain itu, OJK melakukan pengumpulan data primer berupa survei tentang perbankan digital dan asuransi berkelanjutan dan data sekunder.
- 3. PK-3 *Digital Economy* dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa Keuangan**
OJK melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung perkembangan *Digital Economy*, antara lain: (i) menganalisa manfaat teknologi yang menjadi pendorong *digital economy* dalam kegiatan operasional industri jasa keuangan; dan (ii) mengkaji dampak, manfaat dan risiko kegiatan usaha *e-commerce* yang menyerupai kegiatan usaha sektor jasa keuangan.

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

4.2.1 Pelaksanaan Audit

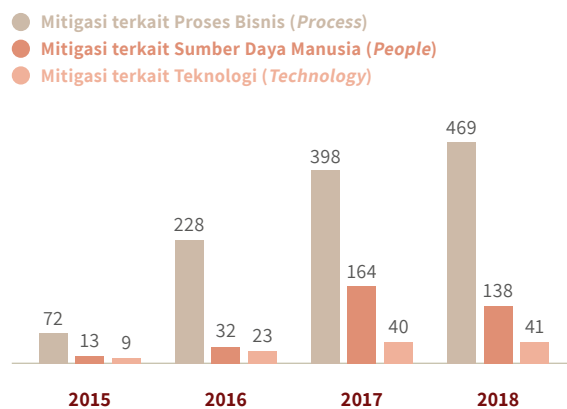
Selama periode laporan, OJK menyelesaikan 39 penugasan audit. Penugasan audit terdiri dari 22 penugasan audit dilakukan di Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan, 11 penugasan audit sesuai dengan tema *assurance* dan 6 penugasan audit khusus. OJK juga menyampaikan 37 Laporan Hasil Audit (LHA) ke Satuan Kerja terkait.

4.2.2 Mitigasi Risiko OJK Wide

Mitigasi risiko merupakan perlakuan risiko yang berfungsi untuk memantau level risiko agar tetap terkendali. Jumlah mitigasi risiko OJK selama 2018 berjumlah 648 rincian mitigasi. Banyaknya mitigasi telah berhasil menekan pengelolaan risiko di OJK. Berdasarkan pengelompokan, untuk periode triwulan IV-2018 dapat dirinci sebagai berikut :

1. 469 rincian mitigasi (72,38%) terkait Proses Bisnis (*Process*);
2. 138 mitigasi (21,30%) terkait Sumber Daya Manusia (*People*);
3. 41 mitigasi (6,32%) terkait Teknologi (*Technology*).

Grafik IV - 2 — Tren Mitigasi dan Risiko



4.2.3 Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Pelaksanaan Standar Pengendalian Kualitas (SPK) merujuk pada Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/PDK/2017 tentang Standar Pengendalian Kualitas OJK. Tujuan dilakukannya SPK adalah untuk menilai efektifitas atas pelaksanaan proses bisnis di OJK. SPK diawali dengan: (1) Identifikasi proses bisnis inti di Satuan Kerja; dan (2) Pendampingan baik secara *onsite* maupun *off site*. Dalam pendampingan tersebut dilakukan pengisian *checklist*, *scoring* dan pemberian predikat; (3) Pemberian predikat kualitas atas proses bisnis Satuan Kerja. Selama triwulan IV-2018, telah dilakukan pendampingan *on-site* atas implementasi SPK telah dilakukan di 12 Kantor Pusat maupun KR/KOJK.

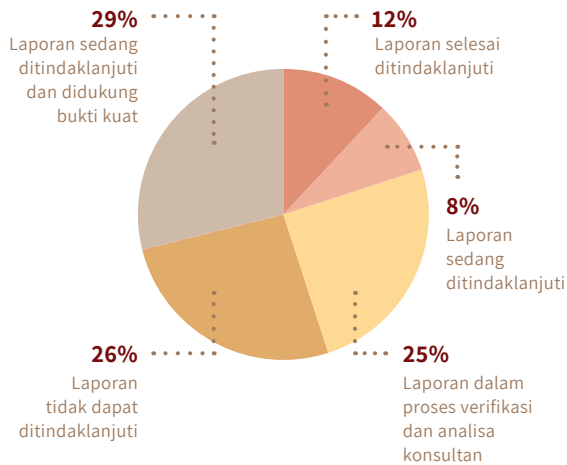
4.2.4 Program Pengendalian Gratifikasi

Selama periode laporan, OJK telah menerima dan mengelola 179 laporan gratifikasi. Total laporan gratifikasi yang telah dikelola sejak 2015 sejumlah 723 laporan dengan jumlah total uang dan barang yang dilaporkan yaitu ±Rp 6,192 miliar.

4.2.5 Whistle Blowing System

Whistle Blowing System (WBS) OJK merupakan sarana yang disediakan untuk melaporkan Insan OJK yang diindikasikan melakukan *fraud*. Pada triwulan IV-2018, Laporan WBS OJK sebanyak 351 laporan dengan rincian sebagai berikut:

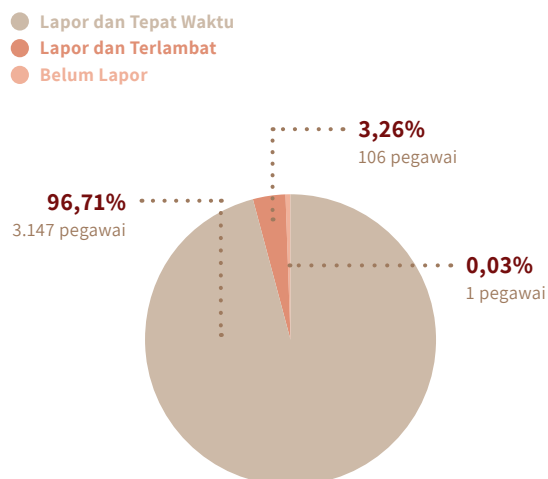
Grafik IV - 3 — Rekapitulasi Penerimaan Laporan WBS



4.2.6 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pegawai OJK selama periode pelaporan sejumlah 99,9%. OJK juga melakukan *monitoring* dan *reminder* terhadap pegawai yang akan memasuki masa pensiun untuk melaporkan LHKPN di akhir masa jabatan.

Grafik IV - 4 — Rincian Laporan LHKPN



4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Selama triwulan IV-2018, Dewan Komisiner menyelenggarakan 17 kali RDK yang antara lain bersifat laporan, meliputi laporan *Market Update* rutin mingguan mengenai perkembangan terkini dan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan, serta laporan persiapan penyelenggaraan kegiatan internasional OJK. Selain laporan, Dewan Komisiner juga menyetujui sejumlah kebijakan strategis yang dituangkan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) atau produk hukum lainnya.

Grafik IV - 5 — Gambaran Materi RDK



Di industri Perbankan, Dewan Komisiner menyetujui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Selain dalam rangka mengadopsi dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), perubahan ketentuan ini juga diharapkan dapat memitigasi risiko konsentrasi penyaluran kredit oleh bank. Ketentuan lain yang juga disesuaikan dengan dokumen BCBS adalah pengaturan mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Dalam rangka penguatan industri BPR dan BPRS, Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR, RPOJK tentang Manajemen Risiko BPRS dan RPOJK tentang Tata Kelola BPRS.

Di industri Pasar Modal, beberapa RPOJK yang disetujui antara lain RPOJK tentang Waktu Transaksi Bursa untuk mempercepat penyelesaian transaksi bursa menjadi

dua hari bursa atau T+2, RPOJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi yang di antaranya mengatur penggunaan sistem perizinan elektronik, RPOJK tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal yang merupakan konversi dari Peraturan Pemerintah dan penambahan pengaturan mengenai Perintah Tertulis, dan RPOJK tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek yang disesuaikan dengan IOSCO *Code of Conduct* 2015.

Ketentuan lainnya di industri Pasar Modal adalah RPOJK tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Penerbitan peraturan ini sejalan dengan inovasi teknologi dalam penyediaan sumber pendanaan berbasis teknologi informasi dan semakin maraknya kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya, sebagai bagian dari pelaksanaan arah Kebijakan OJK dalam merevitalisasi Pasar Modal, Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Penyelenggara Pasar Alternatif yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengembangan transparansi dan likuiditas di pasar Efek bersifat utang dan sukuk. Dewan Komisiner juga menyetujui ketentuan yang mengatur Perantara Pedagang Efek bersifat utang dan sukuk.

Di IKNB, dalam rangka meningkatkan aspek prudensial Perusahaan Pembiayaan, Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. RPOJK ini merupakan penyesuaian atas POJK yang terbit 2014.

Selain ketentuan yang mengatur masing-masing industri, Dewan Komisiner juga menyetujui ketentuan terintegrasi yaitu RPOJK tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Beberapa ketentuan internal OJK yang telah disetujui oleh Dewan Komisiner dalam RDK triwulan ini meliputi perubahan PDK tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keuangan dengan beberapa perubahan pada *Service Level Agreement* (SLA), perubahan ketentuan terkait keuangan, pengadaan, SDM dan organisasi di OJK.

Topik kelembagaan industri jasa keuangan meliputi keputusan Dewan Komisiner atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus di industri Perbankan dan IKNB.

Kebijakan strategis lainnya yang diputuskan oleh Dewan Komisiner di antaranya penetapan daerah terdampak bencana yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank, penetapan Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022, penyesuaian besaran pungutan untuk produk Obligasi Daerah sebagai bagian dari upaya OJK dalam mendorong pengembangan pasar instrumen Obligasi Daerah, program legislasi OJK 2019, dan kebijakan strategis lainnya.

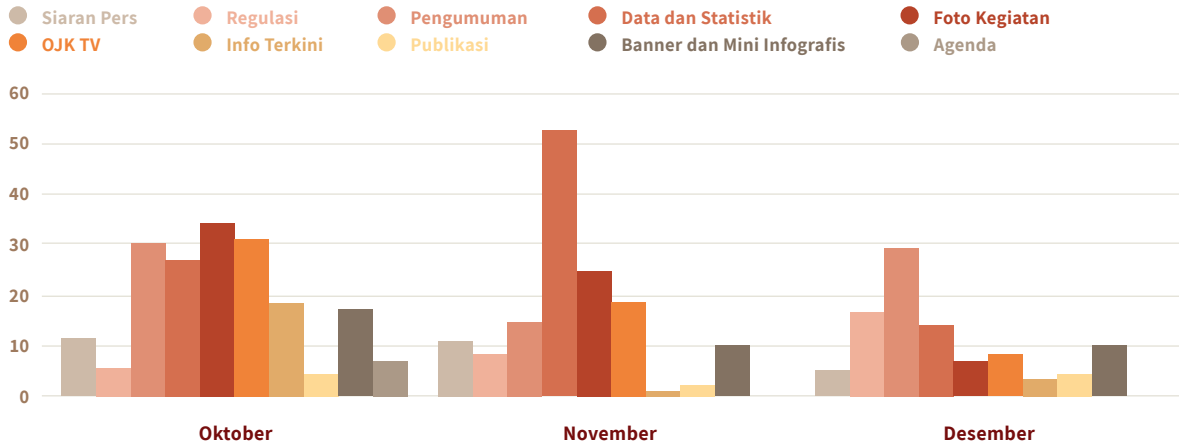
Dewan Komisiner melalui Forum *Board Seminar* (BS) menerima laporan *roadmap Fintech* dan pedoman *regulatory sandbox*, *OJK Outlook 2019* dan *Financial Stability Review*, Inisiatif strategis dan proyek khusus OJK 2019, serta beberapa laporan lainnya. Forum BS juga merupakan media bagi Dewan Komisiner untuk menyampaikan arahan atau masukan terhadap rancangan ketentuan yang akan diterbitkan oleh OJK, sebelum ketentuan tersebut diputuskan dalam RDK.

4.4 KOMUNIKASI

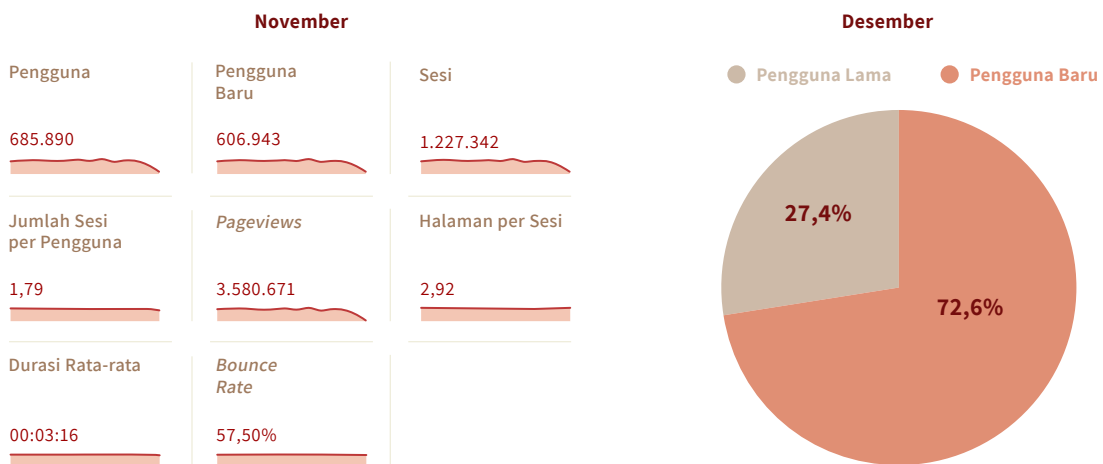
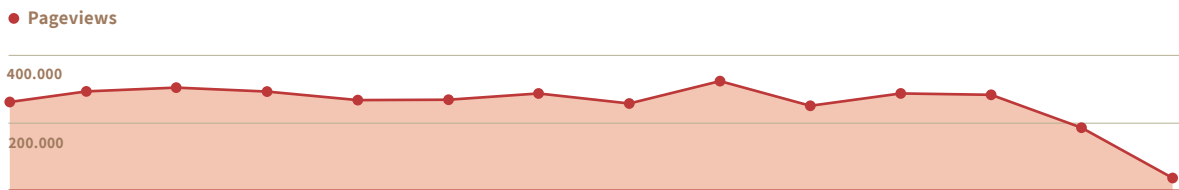
4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

Grafik IV - 6 Jumlah Publikasi di Website OJK



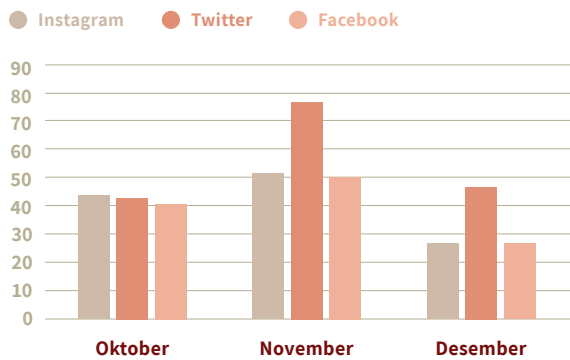
Grafik IV - 7 Statistik Pengunjung Website OJK



Selama triwulan IV-2018, *website* OJK telah mengunggah 417 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini, agenda dan sebagainya. *Website* OJK juga memiliki 15 *minisite*. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung *website* mengalami kenaikan 25,94% dari sebelumnya 544.600 menjadi 685.890 pengguna dengan jumlah halaman yang diakses naik 13,69% dari 3.149.509 menjadi 3.580.671 *pageviews*.

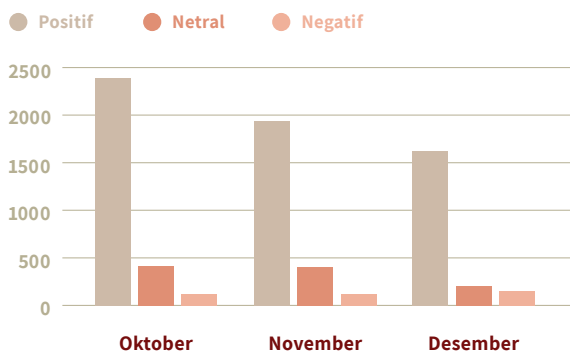
Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (*Twitter*, *Facebook* dan *Instagram*), publikasi OJK pada periode triwulan IV-2018 mengalami peningkatan sebesar 115% menjadi 408 materi yang meliputi infografis, kultweet, foto dan video kegiatan OJK. Media sosial *Twitter* OJK memiliki lebih dari 43.000 *followers*, *facebook* OJK memiliki lebih dari 39.286 *followers* dan *Instagram* OJK memiliki lebih dari 131.000 *followers*.

Grafik IV - 8 — Jumlah Publikasi di Media Sosial OJK



Mengenai pengelolaan opini publik, OJK melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 234 media cetak, 4.211 media *online*, 11 stasiun televisi nasional dan media sosial.

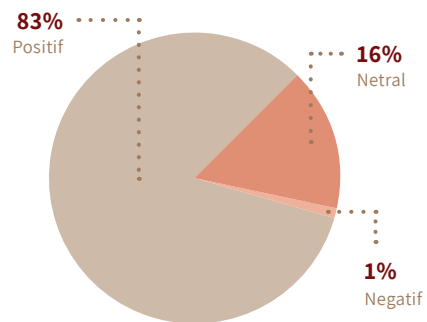
Grafik IV - 9 — Jumlah Pemberitaan



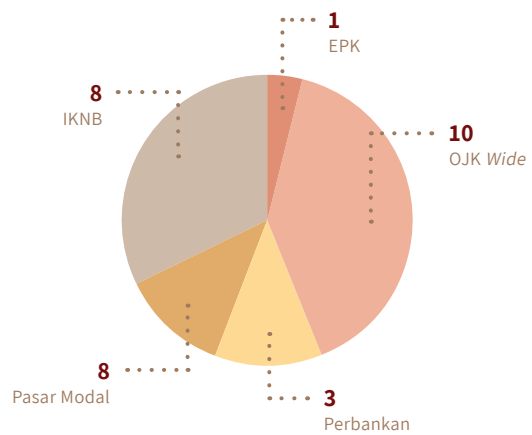
Total pemberitaan selama triwulan IV-2018 mengalami kenaikan sebesar 3,18% yang sebelumnya 7.186 menjadi sebanyak 7.415 berita, dengan rata-rata 2.471 berita perbulan atau sekitar 80 berita per harinya. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 83% (6.134 berita), *tone* netral sebesar 16% (1.212 berita), dan *tone* negatif sebesar 1% (69 berita).

Terkait relasi media, selama triwulan IV-2018, OJK telah menerbitkan 25 siaran pers yang didominasi oleh topik OJK *Wide* sebanyak 10 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Grafik IV - 10 — Persentase *Tone* Berita



Grafik IV - 11 — Siaran Pers Per Bidang



Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 1 — Judul Siaran Pers Triwulan

No.	Judul Siaran Pers	Bidang
1.	OJK Kenakan Sanksi Terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor - PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	OJK Wide
2.	OJK Tindakanjuti Temuan BPK	OJK Wide
3.	OJK Gelar Kegiatan Dukung Pertemuan Tahunan IMF – Bank Dunia di Bali	OJK Wide
4.	Berdayakan Ekonomi Masyarakat, Presiden Republik Indonesia Meluncurkan Program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	IKNB
5.	Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan Yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah	OJK Wide
6.	OJK Monitor Penyelesaian Kewajiban PT Jiwasraya (Persero)	IKNB
7.	OJK dan Industri Jasa Keuangan Bantu Korban Bencana di Palu	OJK Wide
8.	RDK Oktober: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga	OJK Wide
9.	OJK dan Industri Jasa Keuangan Luncurkan Empat Program Inklusi Dan Perlindungan Konsumen - Gelar Financial Institution (FinEXPO) dan SunDown Run 2018	EPK
10.	OJK Dorong Pertumbuhan Industri di Daerah Melalui Pasar Modal	Pasar Modal
11.	OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih Bekasi	Perbankan
12.	OJK dan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Meluncurkan Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	IKNB
13.	OJK Optimalkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Peresmian BUMDes Center Maju Bersama Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang	IKNB
14.	OJK Resmikan Program Klaster Pembatik Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta	IKNB
15.	OJK Resmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo	IKNB
16.	OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera Tangerang Selatan	Perbankan

17.	Perdagangan Pasar Modal Mulai Terapkan Percepatan Transaksi Dua Hari (T+2)	Pasar Modal
18.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga	OJK Wide
19.	Penyelesaian Transaksi Bursa Dua Hari (T+2) Berjalan Lancar	Pasar Modal
20.	Perbankan Nasional Siap Terapkan Kelanjutan Standar Basel III	Perbankan
21.	Dukung Budaya Antikorupsi OJK Kembali Raih Penghargaan KPK-Pengelolaan LHKPN Dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik	OJK Wide
22.	OJK Dukung Upaya Peningkatan Adopsi Standar IFSB Wimboh Santoso Hadiri Pertemuan ke-33 Dewan Islam Financial Services Board (IFSB)	OJK Wide
23.	OJK Minta Masyarakat Berhubungan Dengan <i>Fintech</i> Terdaftar/Berizin Serta Waspada <i>Fintech Lending</i> Illegal	IKNB
24.	OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro Presiden Jokowi Resmikan Tiga BWM di Jombang	IKNB
25.	Sektor Jasa Keuangan Pada Tahun 2018 Tumbuh Stabil Dengan Kinerja Intermediasi Yang Baik	OJK Wide

Selain itu, OJK menyelenggarakan jumpa pers dan *Media Briefing* sebanyak lima kali yang terdiri dari beberapa topik yaitu tiga OJK Wide, satu Pasar Modal dan satu IKNB. Program ini merupakan upaya OJK dalam menjalin kerja sama yang erat dengan para wartawan media. Topik jumpa pers dan *media briefing* pada triwulan IV-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 2 — Jumpa Pers dan *Media Briefing*

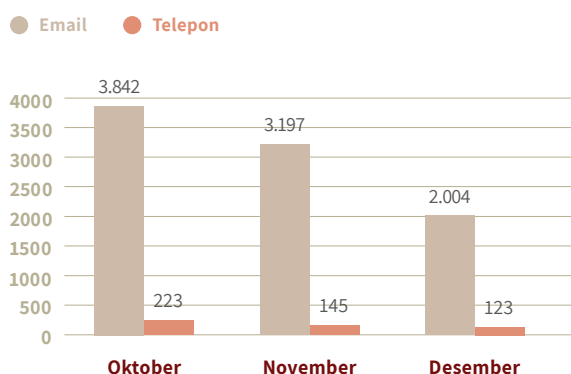
No.	Tema Kegiatan
1.	Isu Jasa Keuangan Khususnya Dampak Bencana di Palu
2.	Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
3.	Implementasi Percepatan Penyelesaian Transaksi Bursa T+2
4.	OJK Minta Masyarakat Berhubungan Dengan <i>Fintech</i> Terdaftar/Berizin Serta Waspada <i>Fintech Lending</i> Illegal
5.	Sektor Jasa Keuangan Pada Tahun 2018 Tumbuh Stabil Dengan Kinerja Intermediasi Yang Baik

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200.

Selama periode triwulan IV-2018, OJK telah menerima surat elektronik sebanyak 9.043 dan menerima telepon sebanyak 491 yang meliputi pengaduan dan pelaporan lembaga jasa keuangan, permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, serta peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan.

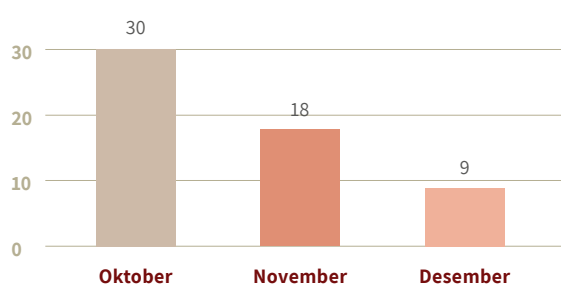
Grafik IV - 12 — Jumlah Layanan Informasi



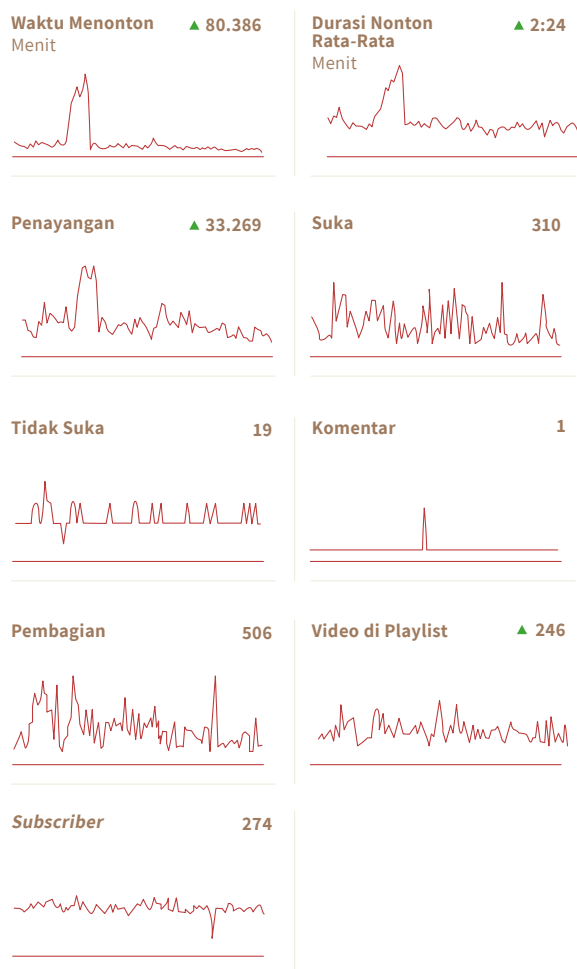
4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal *Youtube* dengan akun *Jasa Keuangan* dan disiarkan di *IDX Channel* (TV Bursa). Selama triwulan IV-2018, OJK TV memproduksi 57 liputan yang terdiri dari 28 liputan OJK *Wide*, 14 liputan di bidang IKNB, sembilan liputan di bidang EPK, lima liputan di bidang Pasar modal dan satu liputan di bidang Perbankan. Kanal *Youtube* *Jasa Keuangan* telah disaksikan lebih dari 33.269 *viewers*.

Grafik IV - 13 — Liputan OJK TV



Grafik IV - 14 — Statistik OJK TV



4.5 KEUANGAN

4.5.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK Tahun 2018 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp4.715,08 miliar atau 94,73% dari pagu anggaran Rp4.977,19 miliar. Rapat Dewan Komisioner (RDK) memutuskan agar sisa anggaran OJK digunakan untuk pembayaran kewajiban PPh Badan maka realisasi anggaran menjadi 100%.

4.5.2 Penetapan Anggaran 2019

Anggaran OJK 2019 adalah sebesar Rp5.679,70 miliar. Anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi XI DPR-RI melalui Laporan Singkat yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam Rapat Dewan Komisioner.

4.5.3 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

OJK meluncurkan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO) yang mengintegrasikan fungsi dalam enam aplikasi sebelumnya yang terdiri dari empat aplikasi keuangan, satu aplikasi pengelolaan aset dan satu fungsi pembayaran dalam aplikasi Mandiri *Cash Management*. Implementasi SI-AUTO diharapkan mendukung transformasi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. SI-AUTO menyatukan tahapan pengelolaan keuangan secara menyeluruh, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran, perpajakan, serta pelaporan keuangan.

Di samping transformasi keuangan melalui SI-AUTO, OJK melakukan transformasi keuangan melalui tiga aspek lainnya yaitu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja atau *Performance Based Budgeting* (PBB), persiapan implementasi Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan *International Organization for Standardization* (ISO) 9001:2015, serta penyempurnaan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran, OJK menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja atau PBB. PBB merupakan konsep penyusunan anggaran yang menghubungkan antara sasaran strategis dengan anggaran yang tersedia, sehingga setiap program kerja yang dianggarkan mendukung *Destination Statement* dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan OJK. PBB tersebut telah diimplementasikan dalam penyusunan RKA 2018 dan 2019. Dalam rangka mendukung implementasi PBB, OJK melakukan kajian konsep *Activity Based Costing* (ABC). Konsep ABC bertujuan meningkatkan kewajaran dalam alokasi anggaran kegiatan OJK antar satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi anggaran.

OJK melakukan persiapan Implementasi ISO 9001:2015 atas penyusunan Laporan Keuangan OJK untuk memastikan penyusunan Laporan Keuangan OJK telah mengikuti aturan prosedur maupun standar baku yang telah ditetapkan.

OJK juga bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan reviu terhadap Kebijakan dan Pedoman Akuntansi OJK untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OJK. Hasil reviu IAI tersebut diharapkan dapat menjadi kajian penyempurnaan kerangka kerja (*framework*) Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

4.6 SISTEM INFORMASI

4.6.1 Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022

Dalam rangka mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, handal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, OJK menyusun Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022.

Penyusunan RBSI OJK tahun 2018 – 2022 berdasarkan *best practice*, tren teknologi informasi terkini, *Destination Statement* OJK 2017-2022, arahan Anggota Dewan Komisiner OJK, dan kebutuhan Satuan Kerja. Dalam proses penyusunannya, juga melalui proses *Quality Assurance* dari para ahli di Bidang Teknologi Informasi (TI) yang mewakili Industri Jasa Keuangan, praktisi TI, dan akademisi TI dengan kapasitas yang telah diakui secara nasional.

RBSI OJK tahun 2018 – 2022 menggambarkan kondisi yang ditargetkan OJK untuk dicapai pada 2022, baik dari aspek bisnis, data, aplikasi, maupun teknologi (Arsitektur Target), serta prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 (Prinsip Arsitektur). RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan diimplementasikan secara menyeluruh, baik kegiatan dari sisi bisnis (seperti penyesuaian proses bisnis, penyusunan ketentuan, dan manajemen perubahan) maupun kegiatan pengembangan Sistem Informasi. Adapun beberapa program strategis yang akan dilaksanakan pada 2019 antara lain:

1. Implementasi bertahap *Reference and Master Data Management* untuk meningkatkan kualitas data di OJK;
2. Implementasi bertahap *Data Warehouse* dan *Big Data* untuk mendukung proses pengambilan keputusan di OJK;
3. Integrasi pelaporan OJK - BI untuk memudahkan Lembaga Jasa Keuangan dalam melakukan pelaporan kepada OJK dan Bank Indonesia.

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Industri Jasa Keuangan. Sampai dengan triwulan IV-2018, OJK mengimplementasikan beberapa aplikasi sebagai berikut:

1. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi sebagai *end to end solution* dalam proses perizinan Lembaga Jasa Keuangan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan, mengurangi frekuensi korespondensi, dan memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Adapun modul yang diimplementasikan pada triwulan IV-2018 adalah modul perizinan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

2. Sistem Aplikasi Pelaporan, Pengawasan dan Monitoring

OJK juga terus mengembangkan sistem untuk memperkuat fungsi pengawasan antara lain: Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) modul *Early Warning System* (EWS), *Dashboard* Konglomerasi Keuangan, *Dashboard* Pendalaman Pasar Keuangan, Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) modul *Risk Based Approach* (RBA), Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM), dan Sistem *e-Monitoring* Pengelolaan Investasi.

4.6.3 Penguatan Sistem Informasi untuk Peningkatan Kapasitas Organisasi

Pengembangan Sistem Informasi Internal juga terus dikembangkan untuk mengoptimalkan fungsi manajemen internal. Selama periode laporan, OJK mengimplementasikan beberapa aplikasi antara lain: Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal (SIAI), Sistem Tata Persuratan dan Kearsipan OJK (RMS - *Record Management System*), Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA), Pembangunan *E-Procurement* OJK, dan Aplikasi *Mobile* Sumber Daya Manusia (SMART HR).

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Selama periode laporan, OJK menyelesaikan proses penataan dan pemindahan beberapa Satuan Kerja kantor pusat ke gedung kantor pusat baru. Secara paralel OJK masih akan tetap mengkaji mengenai kepemilikan gedung kantor pusat terpadu secara mandiri, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran serta koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OJK.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini Kantor yang telah terpisah dari gedung Bank Indonesia baik yang telah merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga akhir periode laporan adalah sebanyak 31 Kantor, dengan rincian lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel IV - 3 — Daftar Lokasi KR/KOJK

A.	Menempati Gedung Milik OJK	KR 2 Provinsi Jawa Barat - Bandung
B.	Menempati Gedung Pemerintah Provinsi	1) KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara - Kendari 2) KOJK Provinsi Sulawesi Utara - Manado 3) KOJK Provinsi Kalimantan Timur - Samarinda
C.	Menempati Gedung Bank Indonesia	1) KR 1 Provinsi DKI Jakarta - Jakarta 2) KR 4 Provinsi Jawa Timur - Surabaya 3) KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat - Mataram/Lombok 4) KOJK Malang - Malang
D.	Menempati Gedung Sewa	1) KR 3 Provinsi Jawa Tengah & D.I.Y - Semarang 2) KR 5 Provinsi Sumatera Bagian Utara - Medan 3) KR 6 Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua - Makassar 4) KR 7 Provinsi Sumatera Bagian Selatan - Palembang 5) KR 8 Provinsi Bali & Nusa Tenggara - Denpasar 6) KR 9 Provinsi Kalimantan - Banjarmasin 7) KOJK Tasikmalaya - Tasikmalaya 8) KOJK Tegal - Tegal 9) KOJK Purwokerto - Purwokerto 10) KOJK Jember - Jember 11) KOJK Kediri - Kediri 12) KOJK Provinsi Kepulauan Riau - Batam 13) KOJK Provinsi N.A.D - Banda Aceh 14) KOJK Provinsi Sulawesi Tengah - Palu 15) KOJK Provinsi Maluku - Ambon 16) KOJK Provinsi Papua dan Papua Barat - Jayapura 17) KOJK Provinsi Lampung - Bandar Lampung 18) KOJK Provinsi Jambi - Jambi 19) KOJK Provinsi Bengkulu - Bengkulu 20) KOJK Provinsi Nusa Tenggara Timur - Kupang 21) KOJK Provinsi Kalimantan Tengah - Palangkaraya 22) KOJK Cirebon - Cirebon 23) KOJK Provinsi Riau - Pekanbaru 24) KOJK Provinsi Kalimantan Barat - Pontianak 25) KOJK Provinsi Sumatera Barat - Padang 26) KOJK Solo - Solo 27) KOJK Provinsi D.I.Y - Yogyakarta

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK menetapkan beberapa ketentuan demi mendukung implementasi Pengadaan Barang/Jasa OJK yang mandiri, yakni Peraturan Pengadaan Barang/Jasa OJK; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa OJK; Peraturan terkait *Tender Management*; Peraturan terkait *Vendor Management*.

OJK juga menetapkan ketentuan kearsipan OJK dan beberapa ketentuan terkait Manajemen Aset, yakni tentang Pemanfaatan Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lainnya (BMPL), Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas BMOJK dan BMPL, dan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam hal pengembangan sistem kelogistikan, OJK mempersiapkan implementasi dari SI PROJEK (Sistem Informasi *Procurement* OJK) sebagai sarana pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa OJK secara elektronik yang mandiri. Sementara itu, untuk sistem informasi persuratan dan kearsipan yakni *Record Management System* (RMS) saat ini telah memasuki tahapan *User Acceptance System* (UAT). Diharapkan kedua sistem kelogistikan tersebut dapat sepenuhnya diimplementasikan pada 2019.

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

OJK melakukan restrukturisasi organisasi melalui Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 5/PDK.01/2018 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. PDK ini mencabut beberapa PDK Organisasi sebelumnya, yakni:

1. PDK Nomor: 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan
2. PDK Nomor: 11/PDK.02/2017 tentang Perubahan atas PDK Nomor: 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.
3. PDK Nomor: 6/PDK.01/2017 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor: 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.

4.8.2 Peraturan Mengenai Pemenuhan Sumber Daya Manusia

OJK melakukan penyempurnaan ketentuan terkait proses promosi melalui Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (SEDK) Nomor: 7/SEDK.01/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 26/SEDK.02/2017 tentang Sistem Pemenuhan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan, proses promosi kini melibatkan Forum SDM.

Forum SDM merupakan forum pembahasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi SDM. Forum ini beranggotakan pejabat setingkat Deputi Komisiner dari masing-masing bidang. Salah satu kewenangan Forum SDM adalah memberikan rekomendasi *shortlist* kandidat promosi ke level jabatan Kepala Departemen atau setingkat, Direktur atau setingkat, Deputi Direktur atau setingkat, dan Kepala Bagian atau setingkat untuk dikonfirmasi kepada Anggota Dewan Komisiner masing-masing Bidang. Keterlibatan Forum SDM dalam proses promosi diharapkan meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan mendorong asas keterbukaan/transparansi dalam mekanisme promosi.

4.8.3 Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar

OJK melaksanakan tahapan seleksi izin prinsip tugas belajar yaitu psikotes dan wawancara. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, dari 46 aplikasi yang diterima sejumlah pegawai memperoleh persetujuan prinsip tugas belajar:

SKIM	1	2	3	4
Jumlah	8 orang	4 orang	16 orang	8 orang

4.9 OJK INSTITUTE

OJK *Institute* dikembangkan dalam rangka mewujudkan pusat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Keuangan. Program pengembangan SDM difokuskan pada penguatan atau pembentukan perilaku proaktif terhadap kebutuhan *stakeholder*, yang sejalan dengan tema budaya kerja 2018 yaitu "Insan OJK SIGAP". Adapun program pengembangan SDM yang dilaksanakan OJK *Institute* selama 2018 meliputi:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan
2. Program Pengembangan Kompetensi
3. Program Pendidikan Formal
4. Program Pengenalan untuk Calon Pegawai
5. Program Internalisasi Kultur
6. Program Bimbingan
7. Program Penugasan Pegawai

OJK *Institute* juga melaksanakan kegiatan Asesmen Kepemimpinan, *recycling program* dalam bentuk *capacity building*, serta Kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sektor Jasa Keuangan. Selama triwulan IV-2018, OJK *Institute* kembali membuka kesempatan kepada masyarakat dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, untuk belajar bekerja di OJK melalui Praktek

Kerja Lapangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir.

Selama triwulan IV-2018, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OJK *Institute* adalah sebagai berikut:

4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan program terbagi menjadi tahap *Pre-Training, Training dan Post Training (assignment)*.

Selama triwulan IV-2018, PPKB dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu:

1. PPKB Level Pertama (Kepala Sub Bagian) *Batch IV*. Kegiatan klasikal *batch IV* dilaksanakan di Jakarta yang diikuti oleh 39 peserta.
2. *Leadership Cafe* PPKB Level Madya I (Kepala Bagian) *Batch II*. Kegiatan dimaksud yang diikuti oleh 27 peserta, sebagai kelanjutan dari kegiatan klasikal yang lalu.
3. *Leadership Cafe* PPKB Level Madya II (Deputi Direktur). Kegiatan dimaksud diikuti oleh 33 peserta, sebagai kelanjutan dari kegiatan klasikal.

4.9.2 Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada triwulan IV-2018 sebagai berikut :

1. PPK *Non In-House* Luar Negeri
PPK *Non In-House* Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan terkait biaya, kualitas materi dan kualitas penyelenggara pelatihan, yang diikuti oleh 27 pegawai.
2. PPK *Non In-House* Dalam Negeri
Program pengembangan kompetensi teknis dalam bentuk PPK *Non In House* Dalam Negeri telah diikuti oleh 96 pegawai.
3. PPK *In-House* Dalam Negeri
PPK *In-House* Dalam Negeri telah dilaksanakan sebanyak enam IHT untuk pengembangan kompetensi teknis dengan jumlah peserta sebesar 525 pegawai, dan tujuh IHT untuk pengembangan kompetensi perilaku dengan jumlah peserta sebesar 643 pegawai.

4.9.3 Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan IV-2018 tercatat satu

orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK). Selain itu, juga terdapat beberapa pegawai yang dalam proses persiapan untuk melaksanakan program di 2019.

4.9.4 Program Penugasan

OJK *Institute* menugaskan satu orang pejabat yang mengikuti Program *Assignment (Fellowship)* di GLOPAC, Jepang. Untuk penugasan sebagai narasumber, OJK *Institute* telah menugaskan satu pejabat ke Tiongkok, satu pejabat ke Thailand dan empat pejabat ke Lampung, Bogor, Jambi dan Bali.

4.9.5 Program Asesmen

OJK *Institute* melakukan asesmen dalam rangka pemetaan pegawai, untuk level pejabat dengan jumlah peserta 207 orang.

4.9.6 Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

OJK *Institute* melaksanakan delapan *workshop* Program Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan yaitu *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis Risiko dan *Workshop* Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dengan jumlah peserta masing-masing 50 dan 240 orang.

4.9.7 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

OJK *Institute* melaksanakan *Workshop* Pembekalan Penyusunan SKKNI/KKNI Bidang Penjaminan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Sektor Jasa Keuangan (SJK).

4.9.8 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Program ini merupakan salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa dengan memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK. OJK *Institute* telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 61 pelajar/mahasiswa dan telah membantu 241 mahasiswa untuk melakukan penelitian di OJK dalam rangka menyusun tugas akhir.

4.9.9 Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit* OJK adalah program diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. OJK *Institute* telah melaksanakan delapan program *Visit* OJK dengan 600 peserta dari SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

OJK menetapkan *Roadmap* Program Budaya Kerja OJK *Way* 2018-2022 pada akhir 2017. Peta jalan ini disusun guna mengakselerasi pencapaian visi OJK *Way* 2022: “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional, dan Proaktif”.

Sesuai dengan *roadmap* tersebut, program budaya OJK *Way* 2018 mengusung tema “Insan OJK Sigap” yang terdiri dari program:

1. OJK Proaktif, agar Insan OJK mampu mencetuskan berbagai inisiatif untuk dapat melayani *stakeholders* secara cepat dan tepat;
2. OJK Inspiratif yang ditujukan untuk menginspirasi dan memperkuat rasa kepedulian kepada sesama; dan
3. OJK Inovatif untuk mendukung simplifikasi proses bisnis dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan mengadopsi kebiasaan kerja secara efektif dan efisien.

4.10.1 Pelaksanaan Program

OJK telah merumuskan Program Budaya Kerja OJK *Way* 2019 melalui *Focus Group Discussion* dan *Change Partner Forum*. Perumusan program 2019 mengacu pada hasil evaluasi Program Budaya Kerja OJK *Way* 2018 yang difokuskan pada penguatan budaya belajar berkelanjutan bagi Insan OJK dengan tema “Insan OJK Andal”. Para perwakilan Satuan Kerja yang tergabung dalam *Change Partner* juga turut memberikan masukan konstruktif guna mendukung iklim budaya kerja yang kondusif.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

OJK mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi Program Budaya Kerja OJK *Way* 2018 melalui:

1. Konsultansi dan *Offsite Monitoring*

Mekanisme penilaian pelaksanaan Program Budaya Kerja OJK *Way* 2018 dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja melalui *self-assessment* secara *online*. Hasil penilaian tersebut diverifikasi melalui kontak via telepon kepada perwakilan Insan OJK di masing-masing Satuan Kerja. Hasil monitoring menunjukkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Budaya triwulan IV-2018 OJK-*wide* mencapai nilai 5,50 dari skala 6.

2. Survei Budaya

OJK melakukan Survei Budaya tahunan guna memberikan gambaran kondisi iklim kerja OJK. Survei meliputi nilai personal pegawai serta organisasi saat ini dan budaya yang diharapkan di masa mendatang, indeks kesehatan budaya organisasi (*racun budaya*) dan faktor pemicunya, tingkat internalisasi nilai strategis OJK; dan harapan Pegawai serta perbaikan/pengembangan.

Survei Budaya dilaksanakan dengan responden sebanyak 3.533 orang atau 93,96% dari seluruh Insan OJK. Hasil survei menunjukkan adanya lima faktor utama yang dinilai dapat menghambat kinerja Insan OJK yakni birokrasi, pengurangan anggaran, kehati-hatian dan cenderung bekerja sendiri-sendiri.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

OJK mengkomunikasikan implementasi program budaya kepada seluruh Insan OJK melalui berbagai media. Penyampaian pesan ini dilakukan secara berkala, terpadu, dan didukung desain yang menarik. Sejumlah upaya telah dijalankan dalam mendukung internalisasi nilai strategis OJK, yaitu:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal OJK ini berisikan informasi tentang implementasi program perubahan, budaya, dan kinerja Satuan Kerja. Selama periode laporan, telah diterbitkan Majalah Integrasi dengan tema “Semangat Tunjukkan Aksi dan Prestasi”, “Bersatu dan Sinergi” dan “Insan OJK Andal”.

2. Penyampaian Pesan Anggota Dewan Komisiner

Pesan Anggota Dewan Komisiner merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner dengan Insan OJK. Tradisi ini diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi Insan OJK untuk selalu semangat dalam berkarya sesuai dengan nilai strategis OJK. Selama periode laporan, pesan yang telah disampaikan yaitu Pesan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan tema “Kemajuan Suatu Bangsa Ada di Genggaman Para Pemuda”, Pesan Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema “HUT OJK ke-7 Menjaga Momentum untuk Terus Berprestasi”, Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2019 oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Pesan Ketua Dewan Audit dengan tema “Menutup Tahun dengan Gemilang dan *Govern*”.

SINGKATAN DAN AKRONIM

AAJI	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	<i>Australia Awards Scholarship</i>
AASI	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	<i>ASEAN Banking Integration Framework</i>
ACIA	<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>
ACKS	Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	Anggota Dewan Komisioner
AFAS	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i>
AHM	Anugerah Media Humas
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	<i>Anti Money Laundering</i>
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASBANDA	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASIC	<i>Australia Securities and Investment Commission</i>
ATIGA	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>
ATISA	<i>ASEAN Trade In Services Agreement</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BIN	Badan Intelijen Negara
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPPI	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BRC	<i>BPD Regional Champion</i>
BS	Board Seminar
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CA	<i>Combined Assurance</i>
CBRC	<i>China Banking Regulatory Commission</i>
CDD	<i>Customer Due Diligence</i>



CFT	<i>Combating the Financing of Terrorism</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	<i>Cash Ratio</i>
CRM	<i>Costumer Relationship Management</i>
CTKI	Calon Tenaga Kerja Indonesia
DES	Daftar Efek Syariah
DFSA	<i>Dubai Financial Services Authority</i>
DJPU	Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	<i>Disaster Recovery Center</i>
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
Eduwan	Edukasi Wartawan
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FAPM	Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSC	<i>Financial Service Commission</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GeNTa PM	Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit</i>
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
GRC	<i>Governance Risk and Compliance</i>
HKHPM	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	<i>International Capital Market Association</i>
IDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IFAC	<i>International Federation of Accountant</i>
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFCC	<i>Integrated Financial Customer Care</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	<i>Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement</i>
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Individu
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	Iklan Layanan Masyarakat
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INDOBeX	<i>Indonesia Bond Indexes</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IRR	<i>Integrated Risk Rating</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
JPSK	Jaring Pengaman Sistem Keuangan

KDK	Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOINKU	Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPMR	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	Kelompok Usaha Bersama
KYC	<i>Know Your Customer</i>
KYFC	<i>Know Your Financial Conglomerates</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LoU	<i>Letter of Understanding</i>
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	<i>Loan to Value</i>
MCRA	<i>Market Conduct Risk Assessment</i>
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MPSJKI	<i>Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia</i>
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	Net Interest Margin
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ORP	<i>Outreach Program</i>
OSINT	<i>Open Source Intelligence</i>
PCE	Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	Pendidikan Calon Pejabat
PCS	Pendidikan Calon Staf
PCT	Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek

PELAKU	Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	<i>Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law</i>
PI	Penasihat Investasi
PKR	Pasar Keuangan Rakyat
PM	Pasar Modal
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPF	Program Pendidikan Formal
PPG	Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	Program Pendidikan Berkelanjutan
PPP	Program Penugasan Pegawai
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RDK	Rapat Dewan Komisioner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RGS	<i>Risk and Governance Summit</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIELOG	Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SKM	Sahabat Keuangan Maritim
SKP	Satuan Kredit Profesi
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	<i>Sarana Multi Finance</i>
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>

SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i>
TKHT	Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
TPHT	Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	<i>Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU LKM	Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WCFSL	<i>Working Committee on Financial Services Liberalisation</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	<i>Extensible Business Reporting Language</i>
YKP OJK	Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>
ZMET	<i>Zaltman Metaphor Elicitation Technique</i>

Halaman ini sengaja di kosongkan



Halaman ini sengaja di kosongkan

